IAIN KEDIRI PRESS

Dr. Mohammad Arif, MA.
Vika Faiza Rahma, S.Pd.
Dr. Lia Istifhama, M.E.I.

Pendidikan Islam

dalam Guncangan *Post Truth*

IAIN
KEDIRI

PENDIDIKAN ISLAM
DALAM GUNCANGAN POST-TRUTH

Dr. Mohammad Arif, MA.
Vika Faiza Rahma, S.Pd.
Dr. Lia Istifhama, M.E.I.

PENDIDIKAN ISLAM
DALAM GUNCANGAN POST-TRUTH

Editor
Nurul Dwi Lestari, M.Pd.

IAIN Kediri Press, 2023

Pendidikan Islam dalam Guncangan Post-Truth

© 2023, Dr. Mohammad Arif, MA.; Vika Faiza Rahma, S.Pd.; Dr. Lia Istifhama, M.E.I.
All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis: Dr. Mohammad Arif, MA.; Vika Faiza Rahma, S.Pd.; Dr. Lia Istifhama, M.E.I.

Editor: Nurul Dwi Lestari, M.Pd.

Layout: Muhammad Alfinanda Farids Amrulloh

Desain Cover: Dana Ari

Cetakan I, Desember 2023

ISBN: 978-623-7682-22-6

Diterbitkan oleh:

IAIN Kediri Press

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telp. (0354) 689282, Fax (0354) 686564

Bekerjasama dan Dicetak oleh:

PT Cita Intrans Selaras (Citila)

Jalan Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (0341) 573650

Website: www.intranspublishing.com

Pengantar Penerbit

Pendidikan Islam dalam Guncangan Post-Truth, sebagaimana judul buku ini menguraikan ihwal pendidikan Islam dalam menghadapi berbagai informasi yang simpang siur di dunia maya. Lebih lanjut, fakta dan kebenaran informasi mulai dipertanyakan karena cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi telah mengalami perubahan secara drastis. Fenomena ini dikenal juga dengan *post-truth*, di mana kondisi saat masyarakat lebih "membenarkan" ajakan, seruan, hasutan, atau propaganda pihak tertentu atas dasar emosi dan kesamaan perasaan.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, terutama bagi pengguna media sosial. Media sosial dituduh sebagai pihak yang turut mempercepat dan memperluas penyebaran disinformasi (ketidakbenaran informasi), seperti hoaks dan fitnah. Kehati-hatian perlu kita tingkatkan saat menerima informasi meragukan, lebih baik ditinggalkan, sekalipun kita sangat setuju dengan isi informasi tersebut. Menyebarkan informasi dari sumber yang meragukan bukanlah sebuah tindakan yang bijak.

Buku ini hadir untuk menginformasikan para pembacanya baik bagi generasi milenial maupun semua generasi agar memahami seberapa bahayanya disinformasi serta bagaimana latar belakang dan orientasi munculnya *post-truth*. Tujuannya agar ke depannya seluruh masyarakat mampu memfilter informasi-informasi sebelum menyebarkan informasi, dan mampu menyikapi, serta bertindak memberi informasi yang benar dan tepat di media sosial maupun mulut ke mulut.

Penulis menyajikan fenomena dan gagasannya ihwal pendidikan Islam dalam goncangan *post truth* dalam delapan bab bahasan. Buku ini menarik untuk dibaca karena kebutuhan dan penulis sistematik dengan temuan dalam bukunya yang membuat kebijakan pengguna media sosial, generasi milenial, dan mahasiswa untuk lebih memahami *post-truth*. Dengan hadirnya buku ini akan membuka pemikiran baru tentang pendidikan Islam yang dihadapkan di era *post-truth* ini. Tidak hanya itu, penulis juga secara meyakinkan menjelaskan upaya pencegahan dampak dari *post-truth* dalam dunia pendidikan Islam.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ____ v
Daftar Isi ____ vii

Bab I Latar Belakang dan Orientasi Munculnya Era *Post-Truth* ____ 1
Pengertian *Post-Truth* ____ 2
Latar Belakang *Post-Truth* ____ 6
Munculnya *Post-Truth* ____ 8
Historis Perkembangan *Post-Truth* ____ 12
Orientasi *Post-Truth* ____ 15
Post-Truth sebagai Ilmu ____ 20

Bab II Manajemen Informasi dan Komunikasi di Era *Post-Truth* ____ *25*
Pengertian Informasi ____ 25
Pengertian Manajemen Komunikasi ____ 27
Era *Post-Truth* ____ 28
Ciri-Ciri *Post-Truth* ____ 32
Dampak Positif dan Negatif *Post-Truth* ____ 35
Etika Menggunakan Media Sosial di Era *Post-Truth* ____ 41
Cara Menerima, Mengelola, dan Menyaring Informasi di Media Sosial ____ 43
Komunikasi yang Baik di Era *Post-Truth* ____ 47

Bab III Dampak Sosial Era *Post-Truth* ____ 53
Media Penyebaran *Post-Truth* ____ 53
Pengaruh *Post-Truth* Terhadap Masyarakat ____ 58
Post-Truth dan Tantangannya dalam Menjawab Problematika Pandemi ____ 67
Cara Menyikapi *Post-Truth* ____ 71

Bab IV **Intervensi Pihak Asing Terhadap Kedaulatan NKRI Era *Post-Truth* ___ 77**

Negara Kesatuan Republik Indonesia ___ 78

Kedaulatan NKRI ___ 80

Intervensi ___ 86

Era *Post-Truth* ___ 88

Pengaruh Intervensi Negara Asing terhadap Kedaulatan NKRI ___ 90

Kelebihan dan Kekurangan Intervensi Negara Asing terhadap Kedaulatan NKRI ___ 93

Penerapan Intervensi dalam Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional ___ 96

Dampak Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI ___ 98

Problematika Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI ___ 101

Tanggapan atau Penyelesaian Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI ___ 103

Bab V **Posisi Pancasila dalam Era *Post-Truth* ___ 109**

Definisi Pancasila ___ 110

Ciri-ciri Sebuah Masyarakat yang Memasuki Era *Post-Truth* ___ 116

Peran Pancasila di Era *Post-Truth* ___ 118

Urgensi Pancasila di Era *Post-Truth* ___ 120

Fenomena Hoax di Media Online ___ 123

Eksistensi Pancasila di Era *Post-Truth* ___ 124

Faktor Yang Mempengaruhi Pancasila Dalam Era *Post-Truth* ___ 127

Dampak Era *Post-Truth* Dalam Kedudukan Pancasila ___ 129

Kondisi Indonesia di Era *Post-Truth* ___ 131

Pengaruh Nilai Pancasila di Era *Post-Truth* ___ 134

Hubungan Pancasila Dalam Era *Post-Truth* ___ 136

Peran Pemerintah di Era *Post-Truth* ___ 137

Bab VI **Upaya Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Era *Post-Truth* ___ 141**

Pancasila di Era *Post-Truth* ___ 144

Era *Post-Truth* ___ 146

Konsep dan Karakteristik *Post-Truth* ____ 146
Post-Truth , Masyarakat Digital, dan Media Sosial ____ 148
Masyarakat Digital dan Media Sosial ____ 149
Dinamika Negara Berdasarkan Pancasila di Era *Post-Truth* ____ 151
Isu-isu Terkait *Post-Truth* ____ 155
Pandangan Terkait *Post-Truth* / *Post Factual.* ____ 156
Gagasan dan Ide Terkait *Post-Truth* ____ 158
Problematika Nilai-nilai Pancasila di Era *Post-Truth* ____ 159
Upaya yang Dapat Dilakukan di Era *Post-Truth* ____ 165

Bab VII Peran Mahasiswa dalam Era *Post-Truth* ____ 169
Post-Truth di Ruang Percakapan: Kebenaran vs Keyakinan ____ 172
Penyebab Percaya Berita Bohong (Hoaks) ____ 175
Dampak Terlalu Percaya terhadap Berita Hoaks ____ 178
Pengertian Media Pembelajaran Audio Visual ____ 181
Street Art ____ 186
Fenomena Frasa *Post-Truth* ____ 191
Strategi Digital di Era *Post-Truth* ____ 193

Bab VIII Eksistensi Pendidikan Islam sebagai Dasar Kebenaran Era *Post-Truth* ____ 197
Urgensi Pendidikan Islam bagi Kehidupan Era *Post-Truth* ____ 197
Sintesis Nusantara: Spirit Agama ____ 199
Pendidikan Islam Membentuk Karakter Terpuji di Era *Post-Truth* ____ 201
Islam Nusantara Sebagai "Proyek" ____ 205
Rimba Tafsir Anarkis ____ 208
Islam Nusantara di Era Kolonial hingga Generasi Millenial ____ 211
Konsisten pada Kebenaran Islam di Era Post-Truth ____ 213

Daftar Pustaka ____ 215
Tentang Penulis ____ 229

BAB I
LATAR BELAKANG DAN ORIENTASI MUNCULNYA ERA POST-TRUTH

Era sekarang merupakan era di mana setiap individu merasa begitu penting terhadap informasi yang berkembang. Kondisi seperti ini terjadi dalam jeda waktu yang tidak lama, apabila dikaitkan dengan kondisi era sebelumnya. Disinformasi beredar secara lebih luas di tengah masyarakat saat ini, sebenarnya bukanlah disebabkan pandangan orang yang bergeser dalam memaknai fakta dan kebenaran, melainkan karena cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi telah mengalami perubahan secara drastis. Media sosial ditengarai menjadi salah satu kanal pemicunya.

Post-truth adalah kondisi saat masyarakat lebih "membenarkan" ajakan, seruan, hasutan, atau propaganda pihak tertentu atas dasar emosi dan kesamaan perasaan. Apakah ajakan, seruan atau hasutan itu benar atau tidak, bukanlah hal yang terlalu penting. Kondisi ini sebagaimana kemunculan istilah *Post-truth* cukup mengkhawatirkan.

Media sosial dituduh sebagai pihak yang turut mempercepat dan memperluas penyebaran disinformasi (ketidakbenaran informasi), seperti hoaks dan fitnah. Pada titik inilah kaum milenial memiliki peran penting dalam menyikapi informasi yang beredar. Milenial adalah generasi yang erat dengan internet, kelompok orang yang mengonsumsi, berbagi, dan mendiskusikan informasi melalui medium digital, terutama media sosial.

Milenial dapat memutus rantai penyebaran disinformasi dan berani menolak pembentukan opini publik yang disebar melalui hoaks. Literasi digital yang kuat dan disiplin melakukan verifikasi atas informasi harus ada di dalam mentalitas milenial. Kehati-hatian perlu kita tingkatkan saat menerima informasi meragukan, lebih baik ditinggalkan, sekalipun kita sangat setuju dengan isi informasi tersebut. Menyebarkan informasi dari sumber yang meragukan bukanlah sebuah tindakan yang bijak.

Penulis ingin mengajak masyarakat, khususnya seluruh generasi milenial, untuk mengenali bagaimana latar belakang dan orientasi munculnya *post-truth* agar ke depannya seluruh masyarakat mampu memfilter informasi-informasi sebelum menyebarkan informasi, dan tahu bagaimana bertindak, menyikapi, dan bagaimana memberikan informasi yang benar bahkan secara tepat.

Pengertian Post-truth

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital di mana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, tetapi juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Menurut Varis, yang memfokuskan kajiannya pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ada dua persoalan yang pada masa depan akan terasa mendominasi. *Pertama*, peningkatan secara eksponensial jumlah informasi dan komunikasi pada masyarakat informasi global yang sedang berkembang; dan *kedua* pengetahuan menjadi sumber daya yang sangat penting dalam ekonomi informasi global. Dalam perkembangannya, umat manusia harus memiliki kompetensi media yakni orang yang melek media sebagai hasil pendidikan media (Mudjiyanto, dkk, 2020: 334).

Dalam penjelasan Kamus Oxford, istilah *post-truth* pertama kali digunakan pada 1992. Ialah Steve Tesich yang menggunakan istilah *post-truth* di majalah *The Nation* ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Tesich menggarisbawahi bahwa "kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia *post-truth*." Sementara itu, Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) dan pelawak Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan terkait dengan *post-truth* yaitu *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.

Selain ditandai dengan merebaknya berita hoaks di media sosial, era *post-truth* juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme

khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Jika di luar negeri nama Presiden AS Donald Trump acap kali dikaitkan dengan hoaks dalam setiap pernyataan politiknya, di Indonesia fenomena *post-truth* juga ditemui dengan tertangkapnya sekelompok orang yang tergabung dalam Saracen. Mereka adalah orang-orang yang secara sengaja menyebarkan hoaks alias berita bohong untuk memenuhi kepentingan klien yang membayarnya. Al Rodhan menyebutkan karakteristik utama dari politik *post-truth* sebagai berikut:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional;
2. Mengabaikan data dan fakta;
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu;
4. Mengombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya;
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan;
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban *televisual*, *online*, *android*, dan media sosial (Al-Rodhan, 2017:12).

Di sisi lain, *post-truth* juga memunculkan perdebatan klasik tentang nilai kebenaran itu sendiri. Dalam perspektif konstruktivisme kebenaran berkelindan dengan subjektivisme dan relativisme. Dengan begitu, kebenarannya menjadi kebenaran yang selalu diperebutkan. Fakta kemudian mengalami tantangan dan ditafsirkan secara berbeda. Kebenaran kemudian menjadi sebuah kepercayaan dalam suatu masyarakat tertentu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat informasi menjadi jauh lebih riuh dan bising. Tiap menit ada foto atau status baru yang di-*update*, beredar berita atau tips terbaru atau yang di-*renewal*, bahkan berita yang beranak pinak. Melalui media sosial yang lintas tanpa batas, video apa saja bisa "berseliweran" di akun platform kita. Satu jam akun kita *sign out*, sewaktu *sign in* langsung dipenuhi dengan video-video terbaru. Jadi, putaran informasi saat ini bergerak sangat cepat. Putaran gelombang dan ombak inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan yang menggiring publik untuk berasumsi bahwa kebohongan tadi adalah kebenaran. Seperti ucapan Joseph Goebbels, salah satu loyalis Hitler, yang menyatakan bahwa

"kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran."

Fenomena *post-truth* pada awalnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Namun, semakin hari, *post-truth* dipergunakan dalam segala lini isu dan agenda. Terdapat kemiripan antara *post-truth* dengan berita hoaks. Baik *post-truth* maupun hoaks, biasanya akan dibungkus dengan tajuk berita yang bombastis, abai terhadap data dan fakta, bahkan mungkin memakai data palsu yang tidak jelas kebenarannya. Belum lagi jika ada akun-akun bayaran, yang populer disebut dengan *buzzer*, yang memang sengaja mengangkat topik itu terus menerus (menyundul), atau berkomentar tentang berita itu yang mengakibatkan pengguna medsos menjadi bingung bahkan percaya akan "kebenaran" berita hoaks tersebut.

Mungkin parahnya lagi, pengguna medsos juga ikut terpengaruh untuk tidak sekadar mempercayai berita bohong itu, namun juga dengan secara sukarela mendistribusikannya melalui akun-akun mereka. Kita sering mendengar istilah *post-truth* untuk menjelaskan era hari ini yang marak dengan kebohongan yang dipercaya. Peradaban mengalami perubahan yang drastis dan kontras. Akan tetapi, tanpa disadari, perubahan tersebut membawa dampak, baik positif maupun negatif di dalam gaya hidup sosial (Zaluchu, 2020:99). Internet menjadi kanal informasi yang hampir tidak dapat dikontrol. Pengetahuan apa pun terdapat di sana. Dalam dunia pendidikan, misalnya, internet sangat berperan positif dalam menjadi alat edukasi murid-murid, terlebih sebagai media pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Banyak orang menamai kondisi baru ini sebagai era *post-truth*. Istilah yang memang sangat renyah dan menarik: pasca-kebenaran. Tidak heran kalau akhirnya ia menjadi populer. Ia rajin muncul dalam percakapan tentang Brexit dan Trump. Ia menjadi *soundbite* dalam pendapat politikus soal disinformasi. Tapi ironisnya, penggunaan istilah ini sendiri bisa menjadi semacam misinformasi. Sebagaimana pos-modernisme, pos-strukturalisme, dan deretan istilah "pos" lainnya, konsep *post-truth* berkonsekuensi pada anggapan bahwa pernah ada era *truth*; bahwa kebenaran pernah mendominasi kepercayaan dan pembuatan keputusan di masyarakat.

Bahkan di era modern, hoaks dan sentimen telah menjadi bensin konflik terbesar sepanjang sejarah: propaganda Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Artinya, era "kebenaran" bisa dibilang tidak pernah ada. Prasangka, emosi, dan kepercayaan sejak dulu lebih mudah mendominasi pendapat publik daripada rasio.

Menurut Jenkins dan Thorburn dalam bukunya *Democracy and New Media,* media sosial membentuk medan baru dalam relasi-relasi sosial. Dimulai dari terbentuknya *cyberspace*, lalu membentuk *cyberculture*, dan *cyber democracy*. Percakapan publik dalam media sosial tumbuh yang akhirnya menjadi indikator partisipasi politik dalam konteks sosial. Media sosial ini akan membuat perubahan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan kultur media, ekonomi sampai kepada bentuk pemerintahan serta aliansi politik (Wuryanta, 2018).

Sebagai konsep, *post-truth* mulai dibicarakan seiring dengan berkembangnya internet dan media baru, yang menentang dominasi media massa sebagai kanal informasi. Dari sini saya akan berargumen bahwa yang tersirat dari konsep *post-truth* sebagai era kebenaran, sesungguhnya adalah masa keemasan media massa: era seratus tahun ke belakang sebelum internet mulai dominan, ketika informasi didominasi media cetak, radio, dan televisi. Sebutlah era ini rezim Media Massa.

Adanya kode etik dalam praktik kerja pers dan persebaran informasi yang lebih tersentralisasi memang membuat disinformasi tertentu lebih mudah dikendalikan. Akan tetapi, hal tersebut mengasumsikan bahwa di era ini "kebenaran" mendominasi percakapan publik adalah sebuah kekeliruan besar.

Pers dan media massa memang menyeragamkan "kebenaran", namun sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi juri yang objektif. Pers memang punya akses yang lebih luas pada sumber-sumber kunci, dan tradisi profesional pers membuat mereka punya kecenderungan mendekat pada data dan sumber saintifik. Namun, pers juga punya kecenderungan kuat untuk condong pada negara dan sumber resmi, yang membuat mereka dekat dengan kepentingan kekuasaan.

Post-truth adalah istilah yang keliru karena ia mengimajinasikan adanya era kebenaran. Ia adalah imajinasi yang lahir dari idealisasi standar jurnalisme yang objektif, sebuah rangkaian standar dan kode etik dari sebuah industri yang sekarat karena kemunculan media baru. Alasan mengapa disinformasi beredar secara lebih luas di masyarakat kini bukan disebabkan oleh pandangan orang yang bergeser dalam memaknai "kebenaran", melainkan karena cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi tengah berubah drastis.

Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang

modern. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoaks) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima, dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam, dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi (Amalliah, 2018:15).

Salah satu alasan mengapa hoaks menyebar dengan sangat cepat, adalah karena orang suka membagikannya. Informasi-informasi yang paling optimal dalam takaran *engagement* ternyata bukanlah informasi yang paling akurat, melainkan informasi yang paling mendukung prasangka dan merangsang reaksi emosional. Sebaliknya, justru ada insentif untuk menghindarkan orang dari informasi yang sulit dan menantang kepercayaan mereka.

Istilah *post-truth* sejatinya merupakan nostalgia atas bayangan ideal yang tidak pernah ada. Penggunaan istilah ini kerap muncul dari akademisi media, pers, dan pemerintah. Mereka yang banyak mengatakan ini adalah otoritas lama yang kemampuannya dalam mungkin kita perlu bersikap lebih skeptis terhadap istilah ini. Istilah yang kita berikan untuk menamai fenomena tertentu ikut membentuk pandangan kita tentang fenomena tersebut. Karena itu, penggunaan istilah *post-truth* berpotensi keliru dan menyesatkan.

Latar Belakang Post-truth

Politik pasca-kebenaran (disebut juga politik pasca-fakta) adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Selain itu, poin topik pidato ditegaskan berkali-kali tanpa mendengarkan balasan yang berbobot. Pasca-kebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Pasca-kebenaran justru menempatkan kebenaran di posisi kedua. Meski pasca-kebenaran dianggap sebagai masalah modern, ada kemungkinan bahwa ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan politik, tetapi kurang terkenal sebelum kehadiran Internet. Dalam novel *Nineteen Eighty-Four, George Orwell* membayangkan sebuah negara yang mengganti catatan sejarah setiap hari agar pas dengan tujuan propaganda saat itu.

Komentator politik mengamati berkembangnya politik pasca-kebenaran di perpolitikan Amerika Serikat, Australia, Britania Raya,

Cina, India, Jepang, Rusia, Catalunya, Spanyol, dan Turki, serta di berbagai bidang debat yang didorong oleh perpaduan siklus berita 24 jam, keseimbangan palsu dalam laporan berita, dan pemasyarakatan media sosial.

Politik pasca-kebenaran (atau *post-truth*) disinyalir merupakan penyesuaian dari kata '*truthiness*' yang kali pertama diciptakan Stephen Colbert dan terpilih sebagai *Word of the Year* tahun 2005 menurut American Dialect Society (ADS) (Zimmer, 2010:13).

Istilah *Post-truth* ini sebagian besar digunakan untuk hal yang merujuk pada dua momentum politik paling berpengaruh pada 2016, yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. *Post-truth* didefinisikan sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Kondisi ini memang begitu memuncak dalam dua momen politik di atas yang digerakkan oleh sentimen emosi. Dalam situasi itu pula, informasi-informasi hoaks juga memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya.

Post-truth juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalis khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Kasus selama pemilu Presiden Amerika 2016 ini menjadi bukti nyata bahwa semakin sering media menyiarkan berita-berita bohong soal Donald Trump. Hal itu pulalah yang justru bisa membuat nama Trump semakin populer dan kebohongan-kebohongannya tersebar luas (*remotivi.or.id,* 2017). Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa *Donald Trump* adalah sosok politisi yang suka melempar berita bohong dan klaim sepihak yang tidak didukung bukti. Hal ini akan sangat berbahaya ketika di amplifikasi baik di media sosial yang notabenenya akan banyak orang percaya maupun di ranah publik yang lain.

Di dunia *post-truth,* rasionalitas individu dipotong kemudian digiring dalam naluri informasi *online*. Audiensi cenderung tidak mencari informasi yang menjadi dasar pendapatnya, tetapi mencari kebenaran pendapat yang mendukung keyakinannya sendiri. Saat ini, semuanya berada dalam cengkeraman ketidakrelevanan fakta, realitas, dan kebenaran. Bahasa semakin dieksploitasi oleh retorika tanpa landasan atau referensi yang jelas. Omong kosong relatif sederhana di dunia *pre-post-truth*, namun kini telah berevolusi, *post-truth* menjadi serangkaian strategi retorika yang kompleks, termasuk berita palsu. Saling menghujat, penyerangan berita palsu, bahkan paradoks

realitas pun terjadi. Berita palsu versi kepentingan yang di-dramatisir dan sensasional berbondong-bondong mendapatkan *trending topic* di media dan rasio masyarakat, sebab pernyataan wacana politik diperhitungkan dengan cermat untuk mendapatkan perhatian publik (Davis, E., 2017:32).

Wacana politik di era *post-truth* mengambil peran sentral dalam mengakomodir kebutaan akal sehat yang disengaja dan menarik argumen berbasis emosional. Keduanya sering berakar pada kecemasan problematik di masyarakat; mewakili keprihatinan nyata dan pengalaman hidup. Argumen yang berkembang lebih jauh lagi biasanya mencakup bentuk statistik, informasi historis, dan kerangka lain dari bukti ambivalen yang dapat diverifikasi tetapi menggunakan prosedur yang berbeda secara konteks maupun makna (Romano, A. 2017:66). Berdasarkan keyakinan dan muatan emosional dalam pembentukan wacana politik, fakta objektif akan kalah dengan kebenaran emosional. Dampaknya, diskursus politik Indonesia tidak lagi mengacu pada wacana rasional yang sehat.

Munculnya Post-Truth

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat informasi jadi jauh lebih ramai menjadi perbincangan, yang artinya saat ini putaran informasi bergerak secepat itu. Berubah, bergerak, bertambah, dan berkembang biak, arus ini yang kemudian dimanfaatkan dengan kebohongan-kebohongan buatan yang akhirnya membuat kita merasa kalau kebohongan tadi adalah kebenaran, kesimpangsiuran informasi dan susahnya membedakan antara fakta dan bukan. Ini sedikit banyak membuat kita memiliki keraguan dengan keaslian sumber informasi sehingga kita akan memunculkan persepsi kebenaran sesuai versi kita sendiri, seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yang seperti itu saja. Kita seperti dipersulit untuk melihat keluar dari gelembung, dan setiap orang terperangkap dalam gelembungnya masing-masing, wajar apabila filter *bubble* adalah faktor penting dalam semakin berpengaruhnya *fake news, hoaks,* dan *hate speech* (Pariser 2011, Rader dan Gray 2015).

Ada dua peristiwa yang melatarbelakangi *post-truth* yang jadi perbincangan banyak orang di dunia. *Peristiwa pertama* yang melatarbelakangi fenomena *post-truth* adalah keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa; *peristiwa kedua* yang menguatkan fenomena *post-truth* yaitu kemenangan Donald Trump dalam kontestasi politik di

Amerika Serikat. Usai dua peristiwa itu, muncul anggapan bahwa opini publik dapat dibentuk via hoaks. Namun, jika ditilik secara historis, pengguna pertama istilah *post-truth* ialah Steve Tesich dalam artikel berjudul *The Government of Lies* yang dimuat majalah *The Nation* pada 1992 (Kresnoadi, 2021).

Dari beberapa pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa *post-truth* sendiri merupakan pandangan benar mengenai suatu peristiwa yang bersifat subjektif berdasarkan pada emosi tanpa mengetahui faktanya di lapangan. Tentunya beberapa *post-truth* dapat muncul sebagai bentuk pembenaran terhadap suatu peristiwa maupun tindakan dalam melakukan sesuatu dan kebanyakan muncul bersamaan dengan sesuatu yang bersifat politik. Karena itu, tak heran apabila banyak opini masyarakat yang digiring menuju suatu kebenaran emosional tertentu tanpa melihat realita yang ada, hal ini terjadi bersamaan dengan adanya permasalahan politik, dan tentunya bersamaan pula dengan beberapa berita ataupun informasi di internet berdasarkan opini-opini yang ada.

Kemunculan *post-truth* sendiri kebanyakan bersamaan dengan adanya masalah yang terkait dengan permasalahan politik dan adanya orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari permasalahan tersebut. Karena alasan tersebut kemudian disebarkan berbagai informasi terkait permasalahan yang terjadi, namun dari sudut pandang maupun opini yang menguntungkan bagi orang tersebut, yang kemudian informasi tersebut dianggap benar oleh masyarakat umum, karena dianggap benar sesuai kejadian yang terjadi dan banyak yang mengabarkan serupa, tanpa mengetahui kebenaran ataupun bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Penggiringan opini publik inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan antar-satu orang dengan orang lainnya, dan memunculkan persepsi kebenaran sendiri di antara masyarakat, lalu berdampak pada munculnya kesalahpahaman terhadap satu peristiwa.

Tendensi tren masyarakat ke ranah media sosial telah berkontribusi pada gencarnya dunia *post-truth* selama beberapa dekade terakhir. Tampak dari elite politik di beberapa penjuru dunia yang menggunakan wahana media sosial untuk memanipulasi paradigma masyarakat melalui fakta alternatif ataupun gosip jahat tentang lawan dengan asumsi sedikit bukti sehingga mendorong penyebaran kebodohan. Media sosial sebagai bagian dari *new media* telah memberikan pemahaman baru bahwa kekuasaan bekerja di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ruang virtual. Sejalan dengan itu, Shapiro (1992) mengatakan bahwa dalam pembentukan suatu

wacana diperlukan adanya politik ruang (*a politics of space*) sebagai ranah pertarungan wacana terjadi; wacana utama (*main discourse*) dengan wacana tandingan (*counter discourse*). Media sosial menjadi alat yang menanamkan konsep kebenaran dan memungkinkan penciptaan rezim wacana yang berpotensi membingkai kepentingan menjadi sebuah fakta. Implikasi yang sangat mungkin terjadi adalah terbentuknya ekosistem media sosial yang diproduksi dan bersifat hierarkis (Jatmiko, 2019: 23).

Melalui diskursus tanpa data, persepsi masyarakat direkonstruksi dan secara bertahap fakta alternatif diciptakan sehingga *post-truth* berlangsung, budaya politik *post-truth* ditandai dengan perspektif relativis yang merendahkan klaim kebenaran dari pendirian politik dan arus utama media; seluruh kebenaran dianggap sebagai opini atau ungkapan kepentingan pribadi yang tersembunyi. Dengan begitu, opini-opini yang diterima masyarakat maupun yang tersebar ke dalam masyarakat sudah digiring jauh dari kebenaran yang sebenarnya, dan pemikiran-pemikiran liar di masyarakat menjadi semakin tidak terkendali. Karena itu, banyak kebohongan-kebohongan yang terkait pada permasalahan politik akan terus berlangsung sampai muncul opini-opini lainnya terhadap permasalahan yang sama. Dengan begitu, banyak informasi yang salah telah diterima masyarakat dan menganggapnya sebagai suatu informasi yang benar. Inilah sulitnya mencari kebenaran tentang suatu permasalahan, terutama saat muncul berbagai opini yang menggiring persepsi masyarakat ke arah yang jauh dari realita yang sesungguhnya. Apalagi saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi terutama internet sehingga banyak bermunculan *post-truth* yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Penekanan pada pemikiran kritis disajikan oleh seseorang sebagai bentuk memberikan metode untuk mengidentifikasi informasi berkualitas tinggi yang ditemukan melalui sumber lain. Karena itu, sebagai kelanjutan dari rezim kebenaran, namun penekanan pada pemikiran kritis juga dapat menjadi bukti munculnya individualisme, dengan fokus pada tanggung jawab individu. Sampai taraf tertentu, fokus pada individu ini dapat dilihat ada dalam hubungan instrumental antara program literasi informasi, pemikiran kritis, tugas penilaian dan nilai. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan oleh Rivano Eckerdal (2017), bahwa hal ini bukan bukti pergeseran ke arah individualisme dari rezim pasca kebenaran, tetapi bukti dari pandangan demokrasi umumnya disebut sebagai demokrasi liberal, di mana penekanannya adalah pada tanggung jawab individu untuk membuat keputusan yang

baik. Artinya, dengan liarnya pemikiran masyarakat tanpa mengetahui realitas yang ada dan hanya didasarkan pada emosi dan opini sensasional bisa mengarahkan pandangan masyarakat ke arah liberal tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait pada peristiwa tersebut (Cahyani, 2020: 20). Apalagi permasalahan pada kemunculan *post-truth* ini akan lebih berdampak kepada religiusitas atau tingkat nilai spiritualitas seseorang, ini terjadi bukan karena sebab yang tidak jelas, tentunya ada beberapa sebab yang menjadikan kemunculan *post-truth* berpengaruh terhadap nilai spiritualitas seseorang ataupun religiusitas seseorang. Berikut ini beberapa hal terkait kemunculan *post-truth* yang berpengaruh terhadap religiusitas:

1. Masyarakat lebih suka terhadap suatu berita yang menghebohkan dan sensasional, sehingga untuk mencari keuntungan tersebut, beberapa awak media melebih-lebihkan suatu pemberitaan ataupun suatu informasi;
2. Masyarakat cenderung memiliki opini tersendiri dalam menyimpulkan suatu informasi ataupun pemberitaan yang terkait suatu masalah, yang memungkinkan kemunculan prasangka buruk yang kemudian akan memunculkan fitnah, karena dugaan-dugaan tidak jelas seperti itu;
3. Terjadinya kemungkinan perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari suatu pemberitaan yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya realita sosial di dalamnya, dengan pengabaian realita yang ada sudah termasuk bentuk penggiringan opini publik yang akan menimbulkan permasalahan apabila tidak ada pembenaran secara jelas;
4. Adanya kerugian yang dialami seseorang ataupun kelompok tertentu karena kemunculan *post-truth* yang berbeda dari realita yang ada, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Itulah beberapa pengaruh kemunculan *post-truth* yang dapat memengaruhi tingkat religiusitas seseorang maupun nilai spiritualitas seseorang. Semua itu bisa timbul akibat perbedaan persepsi dan masuknya opini pribadi di dalamnya karena *post-truth* cenderung menilai sesuatu secara subjektif dan melebih-lebihkan sehingga berbeda dari yang aslinya (Ulya, 2018: 289).

Masyarakat abad 21 ini memiliki kecenderungan untuk mudah terpolarisasi akibat arus balik informasi yang hampir tak terpetakan

dan tanpa kendali. Dalam arus seperti ini, polarisasi dihiasi politik identitas menjadi pesona yang makin menguat dengan proses yang cukup jelas. Hal ini tak terhindarkan karena gejala *post-truth* menandai adanya benturan peradaban yang memungkinkan terbukanya ruang perebutan atas pengakuan akan identitas kolektif, yang dengan sistematis diamplifikasi secara cepat lewat bantuan teknologi informasi digital, yang juga merenggut sikap kritis dan rasionalitas.

Informasi menjalar bukan untuk menangkap apa yang diharapkan tetapi dari mana harapan itu diarahkan kepada publik untuk menghidupkan emosi sosial berupa ujaran kebencian, kita bisa melihat itu melalui *headlines* yang menjebak dan punya daya pikat sensasi. Seiring dengan itu, nalar kritis masyarakat dalam mencermati kebenaran justru mengalami kelemahan sehingga pada intinya bekerja dengan jeli oleh pembuatnya dalam melihat keinginan atau daya tarik masyarakat terhadap fenomena sosial, budaya, politik, demi meyakini apa keinginan masyarakat (Wera, 2020: 5). Fenomena ini persis kebalikannya, bahwa rasionalitas berupa nalar kritis yang merupakan ciri khas mentalitas ilmiah justru terhimpit, banyak yang berubah sebaliknya kalau soal Indonesia, mentalitas ilmiah berarti berpegang pada data dan fakta, sementara perlawanan sebaliknya mengabaikan data dan fakta yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

Dengan begitu, sudah seharusnya memiliki sikap yang sewajarnya dalam menyikapi kemunculan *post-truth* ini, terutama pada era sekarang ini yang semuanya sudah serba digital dan mudah tersebar ke segala penjuru dengan cepat. Begitupun kemunculan *post-truth* juga akan lebih cepat tersebar ke berbagai penjuru yang ada di masyarakat tanpa memandang siapapun sehingga banyak orang dari segala kalangan memunculkan berbagai opini sebagai akibat dari kemunculan *post-truth* tersebut.

Historis Perkembangan Post-truth

Post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, justru malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat. Secara literat, pasca-kebenaran adalah "setelah kebenaran", yang berarti kebenaran sudah ditinggalkan (Thabroni, 2019).

Keadaan *post-truth* dapat terjadi melalui argumen berbentuk alasan logis yang sebetulnya belum tentu benar dan dapat dibuktikan.

Alasan logis berupa *common sense*, akal sehat atau nalar wajar yang sudah umum dibenarkan sangat mudah untuk diamini. Opini nalar wajar terasa sangat *relatable* dan dekat dengan apa yang telah diketahui oleh pembaca. Sebelum membaca suatu berita atau artikel internet, warganet atau *netizen* sudah memiliki pendapat pribadi yang telah terbentuk dari *stereotype-stereotype* yang ada tanpa mencari fakta. Berbagai opini itu sudah tertanam dan seakan telah menjadi fakta sehari-hari yang memang benar, padahal belum tentu. Pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu fakta itu telah tertanam di benak masyarakat melalui berbagai cara. Dapat disebabkan oleh berita palsu (hoaks), salah asuhan/didikan, pergaulan yang kurang baik, hingga ke sumber informasi naif dari orang terdekat yang telah dipercayai sepenuhnya. Kemudian, berbagai pengetahuan dan *stereotype* yang telah tertanam pada khalayak itu, ditampilkan kembali pada artikel, postingan sosial media atau bentuk berita lain yang ada di internet. Dengan demikian, pembaca memiliki keterkaitan emosional terhadap apa yang disampaikan oleh berita yang sebetulnya belum tentu benar tersebut. Belum lagi, penulis artikel juga dapat dengan rapi menghilangkan konteks tanpa membuat beritanya menjadi palsu untuk membuat suatu argumen yang menggiring opini publik pada kenyataan yang sebetulnya tidak benar.

Contoh argumen logis yang tidak benar

Contoh argumen logis yang berupa keyakinan pribadi dan telah menjadi *common sense* atau nalar wajar, meliputi:

- Jika ingin menurunkan berat badan, jangan makan makanan yang berlemak. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa makanan berlemak tidak memiliki korelasi terhadap pembentukan lemak di tubuh. Justru gula dan karbohidrat berlebihan yang menyebabkan kegemukan. Fakta ilmiahnya, kalori yang tidak terpakai akan disimpan di dalam tubuh menjadi lemak, sebagai cadangan energi;
- Pesan yang harus kamu lakukan hanyalah terus mencoba, pesan yang disampaikan terdengar sangat positif dan memberikan motivasi yang baik. Padahal, kita akan membayar semua kegagalan tersebut dengan uang, waktu dan tenaga tanpa mendapatkan hasil apa-apa jika kita tidak belajar sama sekali dari kegagalan yang terjadi di saat kita mencoba. Tidak cukup jika kita hanya terus mencoba, kita harus secara terencana dan sistematis mengusahakan sesuatu agar berjalan dengan baik untuk mencapai suatu kesuksesan (*Jurnal Intelektual,* Volume 10, Nomor 3, Desember 2020).

Hoaks dapat menyebar luas dengan mudah karena kondisi *post-truth* yang semakin berkembang di era media sosial ini. Hoaks akan diakui kebenarannya tanpa pembuktian, karena ikatan emosional banyak orang telah tertuju pada tesis yang sama dan biasanya bersifat menghakimi. Saat itu terjadi maka suatu kebohongan pun telah menjadi argumen yang bahkan mengalahkan fakta objektif. Terlebih lagi jika fakta yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan atau membuat masyarakat tidak nyaman. Semakin banyak orang yang tidak menyukai fakta itu, maka akan semakin tidak dipercayai pula kebenaran yang telah dibuktikan tersebut. Seiring dengan ditinggalkannya fakta, kebohongan yang menyenangkan akhirnya akan lebih dipercayai oleh masyarakat luas. Penyebab lainya karena seseorang sudah terlanjur mempercayai suatu kebohongan yang justru faktanya berputar 180 derajat. Sudah salah, tidak mau menanggung malu, akhirnya tetap melakukan pembenaran terhadap kebohongan yang sudah ia percayai sebelumnya. *Toh* banyak juga yang percaya terhadap kebohongan tersebut, hal itu bisa dilihat langsung dari besarnya angka *share* dan *like* yang telah diterima oleh postingan hoaks tersebut (Juvano, 2020).

Mengapa *post-truth* berbahaya? Karena sesuatu yang tidak benar dan memberikan dampak negatif malah mendapatkan dukungan yang besar. Padahal, keyakinan personal sangat subjektif dan tidak mewakili kebenaran. Apa yang menurut keyakinan seseorang benar, belum tentu benar pula bagi orang lain, malah bisa jadi sebetulnya informasi itu memang salah untuk semua orang. Keyakinan personal seseorang atau suatu kaum rentan menimbulkan konflik yang seharusnya tidak terjadi, karena sejatinya tidak ada yang salah dari kedua belah pihak. Ketika *post-truth* terjadi maka kaum minoritas-lah yang akan mendapatkan konsekuensinya; mereka akan dianggap salah berdasarkan pandangan personal yang dianggap benar oleh kaum mayoritas.

Media sosial diciptakan dengan memasukkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku penggunanya. Sebuah algoritma yang mendeteksi kecenderungan informasi yang sering dicari dan diakses oleh pengguna media sosial di antara *timeline* yang setiap detik disesaki beragam informasi. Hal ini bertujuan untuk memunculkan jenis informasi baik berupa *feed* ataupun iklan yang sesuai dengan keinginan pengguna media sosial. Awalnya, algoritma ini diperuntukkan bagi penayangan iklan dengan memetakan kecenderungan aktivitas pengguna terhadap informasi yang sering dicari. Adanya algoritma informasi inilah yang kemudian kembali disalahgunakan oleh pemilik kepentingan sepihak, mulai dari untuk politik, pengaburan dan doktrinasi ideologi agama, pencitraan individu, dan lain sebagainya.

Menurut Fahruddin Faiz, ada tujuh akar kelahiran *post-truth,* yaitu: (1) Manusia suka pandangan baru, kebutuhan akan dukungan eksistensi pribadi sering kali membuat manusia mencari dukungan penguat bagi identitasnya meski bersifat basa-basi dengan cara palsu dan bohong; (2) Media, kebutuhan meningkatkan rating, klik *like,* penambahan *follower* dan profit membuat media cenderung kapitalis. Mem-*blow up* berita sensasional untuk menarik pembaca demi meraup laba; (3) Komodifikasi, yaitu membisniskan segala sesuatu atau menjadikannya komoditas. Apapun latar belakang yang dimiliki digunakan untuk meningkatkan sisi finansial, status, posisi atau lainnya meskipun hal tersebut ditempuh dengan menebar kebohongan; (4) Kemajuan teknologi tidak diiringi adaptasi dari masyarakat maupun pemerintah, pesatnya laju teknologi tidak diimbangi peningkatan kecerdasan sosial. Komentar-komentar negatif yang dilontarkan secara iseng justru ditanggapi dengan serius sehingga memicu gejolak; (5) Pragmatisme yang berorientasi hasil jangka pendek, cara-cara instan untuk segera mencapai apa yang diinginkan menyebabkan pembenaran melakukan tindakan-tindakan curang, menyikut kanan kiri seakan menjadi hal yang lumrah supaya melejit di tingkatan teratas; (6) Karakter masyarakat yang gampang kaget, Fahrudin Faiz mengistilahkan dengan masyarakat "epilepsi", suka dengan hal-hal sensasional bombastis dan berebut menjadi penyebar informasi tercepat dalam komunitasnya. Sering kali tanpa dikaji, apa pun berita sensasional langsung dibagikan padahal berita tersebut adalah kebohongan; dan (7) Populisme dalam politik praktis berupa sekadar retorika, untuk mendapatkan simpati masyarakat banyak sekali janji-janji indah, gagasan-gagasan muluk yang diagungkan dengan dalil 'demi rakyat' atau 'membela umat', namun sebenarnya dibalik itu semua bertujuan untuk keuntungan dirinya sendiri, mengamankan posisi jabatannya, meningkatkan *image* pribadinya dan lain.

Orientasi Post-Truth

Post-truth berkembang pesat di masyarakat yang sudah diwarnai arus informasi yang mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik. Apa yang terjadi dalam *post-truth* adalah relativisme kebenaran dengan objektivitas data, dramatisasi pesan jauh lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Dalam era *post-truth,* narasi selalu mengalami kemenangan mutlak terhadap data atas fakta yang ada. Karena itu, sangat perlu dilakukan *fact checking* atau pemeriksaan terhadap suatu fakta. Landasan *truth* hadir untuk membantu mengatasi perilaku

masyarakat, termasuk anak milenial zaman sekarang yang perilakunya jauh dari etika dan moral bermedia sosial yang diharapkan dan selalu menerima bahwa segala sesuatunya benar tanpa harus diperiksa atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Kindi dalam filsafatnya yang menyatakan kebenaran pertama (Tuhan) adalah sebab bagi setiap kebenaran, untuk itu kita harus mencari sumber kebenaran yang sesungguhnya (Haryatmoko, 2019:30).

Fenomena *post-truth* menghadirkan jenis fakta atas suatu peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan pengirim berita. Proses kerjanya yang sangat difasilitasi oleh kecanggihan teknologi informasi digital. Dalam konteks sosial politik kekuasaan yang saling berebut ruang pengaruh atas penguatan identitas kolektif dewasa ini, fasilitasi teknologi informasi justru memperkuat dan mempercepat penyebaran fenomena *post-truth* sehingga berpotensi dan berpeluang untuk memecah belah sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Terhadap domain ini, sikap bijaksana dan waspada dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya media sosial harus disadari sepenuhnya tentang pentingnya merawat dan menghargai perbedaan. Hal ini kemudian berpengaruh pada cara pandang masyarakat atas pluralisme di dalam masyarakat.

Post-Truth menyeruak ke kesadaran publik saat dinobatkan *Oxford Dictionaries* sebagai *word of the year* pada November 2016. Kata ini kemudian menjadi populer saat Pilpres AS 2016 dan Brexit pada 23 Juni 2016. Sampai sekarang sering dipakai karena tidak ada rasa percaya atau keyakinan pada data dan fakta ilmiah, ada anti intelektual, penolakan terhadap rasionalitas berpikir, dan kebohongan yang terang-terangan (McIntyre, 2018:1). Kebohongan yang secara sistematis mengepung ruang publik sampai menuai kepercayaan publik bahwa apa yang mereka utarakan adalah yang sebenarnya. Dalam peristiwa Pilpres AS, dengan terpilihnya Trump menjadikan frase ini kian populer. Karena menurut kubu pemenang Trump, tujuan utamanya adalah menang, jadi kita bohong dulu soal data dan fakta bisa menyusul. Terpenting adalah pembenaran dan merasa diri benar (Wibowo, 2019: 2).

Ada enam konteks gelagat zaman yang menuntut kebaruan dalam menandai era *Post-Truth*. *Pertama*, luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi; *kedua*, masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui media sosial; *ketiga*, demokratisasi media dan jurnalisme warga mengompensasi ketidakpuasan masyarakat

terhadap informasi media massa dan kekecewaan terhadap politik; *keempat*, masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi dan memiliki keyakinan yang sama; *kelima*, teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika; *keenam*, kebenaran tidak lagi dikalsifikasi atau dibantah, tetapi jadi nomor dua (Haryatmoko, 2019: 30). Gagasan para demagog yang selalu bermain di balik payung semantik: kebenaran alternatif, fakta alternatif, dan ujungnya hoaks.

Dari sudut pandang psikologi, menurut McIntyre, *post-truth* berakar dalam jiwa manusia yang mudah jatuh dalam *cognitive* bias, prasangka di tingkat pengetahuan yang sifatnya berat sebelah. Manusia tidaklah selalu rasional. Di depan kebenaran yang tidak mengenakkan, manusia cenderung jatuh dalam prasangka yang berat sebelah, dan mencari pembenaran yang membuat nyaman (McIntyre, 2018:45). Menurut Setyo Wibowo, prasangka bisa muncul karena *repetition effect*. Menurutnya, para ahli pemasaran paham betul *subliminal message* yang efektif mempengaruhi perilaku konsumen. Prasangka yang berat sebelah juga bisa muncul akibat *source amnesia* (lupa pada sumber pasti sebuah informasi) (Wibowo, 2019: 3). Di era melimpah ruahnya informasi seperti hari ini, orang atau bahkan masyarakat di ruang publik khususnya media daring hampir selalu lupa untuk membedakan sumber yang valid dari apa yang disebut hoaks.

Menurut penulis ada berbagai ragam dan modus secara teknik dalam *post-truth*. *Pertama*, proses *editing* foto untuk merekayasa dan memanipulasi citra diri seseorang baik positif maupun negatif untuk menyerang. *Kedua*, melepaskan suatu pernyataan dari konteksnya atau dekontekstualisasi untuk memicu emosi sosial publik. *Ketiga*, menjebak melalui *headlines* yang penuh sensasi dari isinya yang justru berbeda. *Keempat*, hujatan untuk memancing kemarahan publik. *Kelima*, argumen ekstrapolasi, data minim tapi kesimpulan sensasional. *Keenam*, hiperrealitas digunakan untuk menyembunyikan skenario antar yang fakta dan yang maya. *Ketujuh*, *weaponization of information* adalah metode retorika yang tidak perlu menyangkal suatu pernyataan agar timbul sikap skeptis. *Kedelapan*, *troll* adalah posting pesan jahil untuk memprovokasi massa. *Kesembilan*, skematisasi adalah upaya untuk menyederhanakan suatu gagasan agar mudah dipahami oleh para pendengarnya, tetapi lebih sensasi dan ekstrem untuk provokasi. *Kesepuluh*, teknik *phatique* yang menunjukkan bahwa fungsi bahasa bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi menjaga kontak antara

pembicara dan *audiens*, agar menarik. *Kesebelas*, menciptakan mitos-mitos tentang pemimpin gerakan berdasar pada etnis, agama, aliran, sekte-sekte tertentu untuk meyakinkan kelompoknya. Kata Arendt (1972: 192), ''mereka lalu dengan memberi kualifikasi pemimpin kelompok yang menurut mereka tidak bisa salah. *Keduabelas*, argumen repetisi yakni dengan mengulang-ulang suatu pernyataan sehingga publik percaya (Haryatmoko, 2019: 30).

Hoaks juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan orang untuk memahami sesuatu memang rendah. Pada titik ini, seseorang bisa mengalami *dunning kruger effect* (Wibowo, 2019: 3). Persis dari titik ini juga dimanfaatkan oleh kaum elite partai, agama, atau bisnis, untuk memainkan *post-truth* dalam mendominasi psikologi rakyat dengan memancing emosi sosial yang pada ujung kisah akan melahirkan populisme agama dengan alibi demokrasi. Konteks ini semakin mengemuka di saat media konvensional atau peran media tradisional mengalami stagnasi. Sebab, teknologi bisa menjadikan setiap orang jadi pengarang cerita dan isu. Internet sebagai sentralisasi domain digital bagi manusia digital era ini dengan media sosial sebagai jembatan utamanya menjadi *trigger* untuk hoaks, *fake news*, dan *conspiracy theory*.

Dengan melihat konteks peristiwa yang melatarbelakangi di atas, maka menurut penulis, secara kontekstual apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dalam konteks fenomena *post-truth* yakni tiga aspek yang jadi fokus dalam analisis. ***Pertama*, hoaks**. Hoaks pada hakikatnya mengandung tiga unsur yakni informasi yang menyesatkan: antara misinformasi dan disinformasi. Pada dimensi misinformasi; tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, tapi persoalannya orang membagikan dan percaya hal itu benar. Sementara disinformasi sebaliknya, ada unsur kesengajaan; orang yang membagikan informasi sudah tahu bahwa informasi tersebut salah atau tidak benar (Haryatmoko, 2019: 9). *Kedua*, hoaks terjadi karena didorong oleh tindakan yang disengaja. Terakhir, hoaks mengonfirmasi ketidakbenaran yang ditampilkan seolah-olah kebenaran; bahwa efek gemilang hoaks yang bertaburan mampu menurunkan derajat rasionalitas dalam ikhwal kita untuk demokrasi.

Menurut McIntyre, ada empat ragam kebohongan dalam menentukan karakteristik masyarakat *post-truth* untuk menciptakan hoaks. *Pertama*, kebohongan yang dilakukan karena terdesak setelah melakukan sebuah kesalahan dan mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk menutupinya. Kebohongan ini disebut *falsehood*, bukan penipuan, karena kekeliruan yang tidak disengaja. *Kedua*, ketidaktahuan yang

disengaja, tetapi disebarkan. Orang tidak mengetahui secara benar suatu masalah, tetapi tetap ingin menceritakan, tanpa mau memverifikasi apakah benar atau salah. *Ketiga*, berbohong dengan maksud untuk menipu. Bahwa setiap kebohongan ada *audiensnya*, arah beranjak dari 'penafsiran fakta' menjadi falsifikasi fakta`. *Keempat*, berbohong yang melibatkan penipuan diri dan delusi sampai seseorang bisa sungguh percaya sesuatu itu benar bahkan ketika semua sumber yang kredibel mempertanyakannya (Mclntyre, 2018:8-9).

***Kedua,* emosi sosial**. Ini adalah iklim sosial politik yang menggeser objektivitas, rasionalitas, dan membiarkan emosi sosial publik terjebak dalam banjir hasrat yang punya kecenderungan pada keyakinan meskipun bertolak belakang dengan fakta. Karena itu, gerakan masyarakat secara samar mengalami kecenderungan pada doktrin anti-pluralitas. Model-model gerakan ini mengatasnamakan demokrasi, tetapi sebenarnya anti-demokrasi. Alibi demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, menjadi argumentasi yang sudah sangat umum dalam perjalanan negara demokrasi. Konteks ini semakin marak karena hadirnya kompleksitas komunikasi digital, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, blog pribadi, *Snap Chat*, *Twitter*, *Line*, *YouTube,* dan lainnya. Bentuk komunikasi di atas masuk dalam kategori media sosial yang secara nyata memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk jadi otoritas dan tata kelola informasi. Setiap individu akhirnya jadi pusat sekaligus pasar informasi. Dalam bahasa media konvensional disebut sebagai jurnalisme warga.

Semua gerakan politik yang berlandaskan pada emosi sosial, sebenarnya mau mendiskreditkan penguasa dengan cara berusaha menggunakan unsur-unsur yang lebih sentimental/emosional daripada yang rasional. Kaum populisme sangat piawai memakai strategi demagogi dan retorika. Ini adalah model komunikasi yang membidik pengaruh melalui manipulasi. Kelompok ini sangat piawai beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi emosi sosial rakyat, bahkan sampai mampu menampilkan wajah sebanyak kategori rakyat. Para praktisi media menyebutnya komunikator demagog sangat mudah mengaduk-aduk emosi massa. Bagi mereka, merayu sama halnya dengan mati sebagai realitas untuk menghasilkan tipu daya. ''Konteks dan gagasan yang mereka komunikasikan diselipkan melalui nilai, opini serta gagasan (Haryatmoko, *Harian Kompas*, 25 April 2006).

***Ketiga,* populisme agama**. Pertanyaan subtilnya, mengapa harus agama? Menurut penulis jawaban kontekstualnya karena agama merupakan ideologi terkuat yang mampu bertahan melintasi zaman.

Agama selalu jadi perdebatan sehari-hari. Di saat yang sama agama juga mampu merasuki peristiwa hidup setiap orang akan misteri Yang Maha Kuasa. Ia ditentang juga diterima. Meskipun manusia juga tidak tahu keberadaannya, bahkan tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, semakin ditentang semakin besar pengaruhnya dalam realitas hidup manusia. Semakin ditentang, semakin masuk dalam keyakinan individu, bahkan melampaui itu, ikut mengatur detik-detik kehidupan manusia.

Sejak dahulu populisme agama adalah gejala destruktif karena melakukan ''emosionalisasi dan personalisasi politik''. Paling tidak menurut F. Budi Hadirman ada dua alasan untuk mengkonfirmasinya. *Pertama*, politik modern dalam pengertian normatif adalah sebuah proses rasional karena melibatkan argumen dan kepentingan yang dapat dinalar. Populisme naik ke panggung politik justru membawa isu sentimental untuk memancing emosi kerumunan. *Kedua*, politik itu perkara kepentingan negara, polis. Gerakan populisme menyempitkan politik hanya pada figur pemimpin kelompok tertentu yang berujung pada privatisasi politik pada ruang gerak kelompok tertentu (Hadirman, 2017:4).

Post-Truth Sebagai Ilmu

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital di mana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Dalam Kamus Oxford dijelaskan bahwa *post-truth* dijadikan sebagai "*Word of the Year*" pada 2016. Kamus Oxford mendefinisikan *post-truth* sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu memberikan pengaruh dalam pembentukan opini publik jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Kondisi ini memang memuncak dalam dua momen politik tersebut yang digerakkan oleh sentimen emosi. Dalam situasi tersebut, berita-berita hoaks mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada fakta yang sebenarnya.

Dalam penjelasan Kamus Oxford, istilah *post-truth* pertama kali digunakan pada 1992. Steve Tesich menggunakan istilah *post-truth* di majalah *The Nation* ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Tesich menggarisbawahi bahwa "kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia *post-truth*.

Sementara itu, Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) dan pelawak Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan terkait dengan *post-truth* yaitu *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali. Di Indonesia, fenomena *post-truth* juga ditemui dengan tertangkapnya sekelompok orang yang tergabung dalam Saracen. Mereka adalah orang-orang yang secara sengaja menyebarkan hoaks alias berita bohong untuk memenuhi kepentingan klien yang membayarnya (Nayef, 2017).

Adapun karakteristik utama dari politik *post-truth* adalah sebagai berikut:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional;
2. Mengabaikan data dan fakta;
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu;
4. Mengombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya;
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu;
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban *televisual*, *online*, *android*, dan media sosial.

Di sisi lain, *post-truth* juga memunculkan perdebatan klasik tentang nilai kebenaran itu sendiri. Dalam perspektif konstruktivisme, kebenaran berkelindan dengan subjektivisme dan relativisme. Fakta kemudian mengalami tantangan dan ditafsirkan secara berbeda. Kebenaran kemudian menjadi sebuah kepercayaan dalam suatu masyarakat tertentu.

Media sosial di dalamnya sering kali dijumpai hoaks. Hoaks adalah suatu berita kebohongan yang diperbuat oleh seseorang yang isi atau kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Faktor yang menyebabkan tersebarnya hoaks di masyarakat umumnya disebabkan

oleh pihak yang ingin mencari perhatian publik (yang dikenal sebagai "pansos") yang biasanya bertujuan untuk menyudutkan suatu pihak (Septanto, H., 2017:157–162). Hoaks juga dapat disebabkan oleh seseorang yang hanya ikut-ikutan agar terlihat lebih seru yaitu dengan menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya sehingga banyak orang yang berkomentar di media sosial dan media sosial terlihat lebih ramai (Wahyono, et.all., 2017). Media sosial menjadi ladang berkembangnya *post-truth* dengan sangat baik dan dapat dilihat dengan secara langsung, bahkan kebenaran yang dibenarkan menjadi argumen dan diinformasikan menjadi fakta yang parsial (Kurniawan, 2018:154).

Terbatasnya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor dalam merebaknya berita hoaks di media sosial. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai undang-undang ITE (informasi teknologi dan elektronik) untuk mengatasi masalah di media sosial. Namun, apabila undang-undang tersebut tidak diindahkan oleh pengguna internet maka hanya akan menjadi hal yang sia-sia.

Kehadiran teknologi informasi khususnya media sosial semakin memberi warna baru dalam kegiatan menyampaikan informasi. Media sosial sebagai ruang publik digital, di mana setiap individu dapat menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepada khalayak lainnya. Kehadiran individu di ruang publik memberikan dampak pada proses produksi dan distribusi informasi dari individu ke individu lainnya. Di samping itu, media sosial mampu menjadikan setiap individu menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi terkait pesan informasi yang mereka terima.

Perubahan dan perkembangan dunia yang sangat cepat melahirkan banyak korban kemanusiaan, kita sering juga berlindung dibalik argumen ketika mengalami kegagalan dalam memahami kehidupan. Kesadaran bahwa yang benar pada hari ini dapat menjadi tidak benar pada masa depan dan yang salah pada hari ini dapat menjadi benar pada masa depan merupakan dimensi yang menjadikan manusia sebagai homo sapiens memfungsikan nalarnya dengan baik karena kehidupan selalu menghadirkan perubahan dan ketidakpastian bagi manusia. Era *post-truth*, akibat dari kemajuan teknologi informasi yang berlangsung dengan sedemikian masif, intens, dan luar biasa, setiap individu dengan bebas dan mudah menyebarkan informasi dan berkata-kata dalam media sosial. Banyak kebohongan dan hoaks yang terjadi, meskipun argumentasi semacam ini dapat diubah dan dibantah karena ternyata

banyak juga orang pintar dan berpendidikan melakukan hal-hal yang bodoh, sebagaimana tergambar dan terkonfirmasi di dalam grup media sosial yang diikuti banyak orang.

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital di mana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, tetapi juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Kita sering mendengar istilah *post-truth* untuk menjelaskan era hari ini yang marak dengan kebohongan yang dipercaya. Peradaban mengalami perubahan yang drastis dan kontras. Akan tetapi, tanpa disadari, perubahan tersebut membawa dampak, baik positif maupun negatif di dalam gaya hidup sosial. Internet menjadi kanal informasi yang hampir tidak dapat dikontrol. Pengetahuan apa pun terdapat di sana. Dalam dunia pendidikan, misalnya, internet sangat berperan positif dalam menjadi alat edukasi murid-murid, terlebih sebagai media pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Milenial dapat memutus rantai penyebaran disinformasi dan berani menolak pembentukan opini publik yang di sebar melalui hoaks. Literasi digital yang kuat dan disiplin melakukan verifikasi atas informasi harus ada di dalam mentalitas milenial. Kehati-hatian perlu kita tingkatkan saat menerima informasi meragukan, lebih baik ditinggalkan, sekalipun kita sangat setuju dengan isi informasi tersebut. Menyebarkan informasi dari sumber yang meragukan bukanlah sebuah tindakan yang bijak.

BAB II
MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI ERA POST-TRUTH

Kencangnya arus informasi di era digital yang begitu masif menyebabkan masyarakat yang terkoneksi dengan media daring menerima luberan informasi yang begitu hebat. Luberan informasi seperti ini tentu saja bisa dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan karena masyarakat sebagai khalayak informasi memiliki banyak alternatif informasi tentang sebuah masalah.

Problem yang muncul dari situasi semacam ini adalah menyangkut kualitas dan kredibilitas isi dari informasi yang diterima masyarakat itu sendiri. Satu persoalan tadi masih ditambah dengan miskinnya literasi yang dipunyai masyarakat secara umum. Hal ini membuat mereka tentu saja tidak dapat menimbang, memilah atau bahkan menilai mana informasi yang sahih mana yang bukan. Masyarakat tidak memiliki kecakapan dalam menentukan mana informasi yang benar (*real news*), mana yang palsu (*fake news*), dan mana yang keliru (*false news*).

Post-truth adalah salah satu di mana fakta dari suatu objek yang tidak lagi memberikan pengaruh besar terhadap keyakinan secara pribadi keterikatan secara emosional yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat . dalam hal ini *post-truth* sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Masyarakat banyak yang belum bisa memfilterkan berita ataupun opini yang mungkin bisa menyesatkan mereka. Di dalam manajemen informasi dan komunikasi di Era *Post-truth*, memang ada perubahan dalam era sekarang seperti kita mendapatkan informasi secara cepat dll. Akan tetapi banyak dampak dari *post-truth* ini karena banyak orang belum paham efek dari hal tsb.

Pengertian Informasi

Informasi merupakan aliran darah dalam tubuh organisasi sehingga tanpa informasi maka organisasi akan mati. Manajemen informasi dapat melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

Manajemen informasi menjadi sebuah alat yang ampuh untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis, dan menjadi demikian krusial bagi daya saing setiap organisasi. Manajemen informasi adalah terminologi umum yang mencakup semua sistem dan proses dalam suatu organisasi untuk penciptaan dan penggunaan informasi perusahaan. Manajemen informasi merupakan proses menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Manajemen informasi adalah perencanaan, pengadaan, pengolahan, distribusi dan alokasi informasi sebagai sumber daya untuk mempersiapkan dan memfasilitasi keputusan (Marzuki, 2009:10).

Oleh karena itu, ada tiga makna dari kata informasi. Pertama adalah informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Di sini, informasi mengacu pada segala kejadian di dunia (entitas) yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang digunakan, kemudian dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan si penerima. Informasi dianggap sebagai bagian abstrak dari pikiran manusia sesuai dengan isi dan makna pesan yang diterima. Misalnya, si Ani berkata kepada Budi, "Wah, pandai betul kamu." Mungkin, maksud Ani karena jengkel melihat si Budi yang menyontek pekerjaan temannya. Mungkin juga, Budi mengira bahwa Ani betul-betul menganggap Budi pandai. Makna yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol dan dapat ditangkap oleh panca-indra manusia serta dapat saling dipertukarkan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata, yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi, informasi dapat kita definisikan sebagai kumpulan data yang terstruktur yang kita komunikasikan lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu: 1) sebagai benda nyata (*information as a thing*) dan; 2) sebagai sesuatu yang abstrak. Definisi tersebut berdasarkan pendapat Teskey (Pendit, 1992). Menurutnya, informasi adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Kemudian, Gordon B. Davis (1999: 28) juga memberikan definisi. Menurutnya, informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Pengertian Manajemen Komunikasi

Manajemen merupakan proses yang khas yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Kata manajemen berarti pemimpin, direksi dan pengurus yang diambil dari kata kerja "*manage*". "*Manage*" mengandung arti mengemudikan, mengurus dan memerintah. Menurut bahasa Italia, istilah manajemen berasal dari "*managiere*" yang berarti melatih kuda sebagai pelatih, dan istilah *manage* dalam bahasa Perancis bermakna tindakan membimbing atau memimpin. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya saling bekerja sama antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Bila ditinjau dari konsep Islam, menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar manajemen dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kegiatan manajemen mencakup pengkajian yang sangat luas, sebab aktivitas manajemen dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerja sama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Bagaimanapun, manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan usaha organisasi atau lembaga pendidikan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif efisien maka manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap lembaga atau organisasi, industri, perbankan, perusahaan, maupun pendidikan (Syafaruddin dan Irwan Nst, 2005:66).

Dalam proses interaksi antara individu yang satu dengan yang lainya terjadi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi. komunikasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak terlepas dari kemampuan yang dimilikinya untuk berkomunikasi terhadap orang lain di dalam menyampaikan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian bahwa komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang yang menjadi lawan bicara atau lawan untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengirim pesan, pesan dan penerima pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi (Syafaruddin dan Irwan Nst, 2005:75).

Dalam proses interaksi antara individu yang satu dengan yang lainya terjadi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi. komunikasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak terlepas dari kemampuan yang dimilikinya untuk berkomunikasi terhadap orang lain di dalam menyampaikan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian bahwa komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang yang menjadi lawan bicara atau lawan untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengirim pesan, pesan dan penerima pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi (Syafaruddin dan Irwan Nst, 2005:75).

Era Post-truth

Kencangnya arus informasi di era digital yang begitu masif menyebabkan masyarakat yang terkoneksi dengan media daring menerima luberan informasi yang begitu hebat. Luberan informasi seperti ini tentu saja bisa dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan karena masyarakat sebagai khalayak informasi memiliki banyak alternatif informasi tentang sebuah masalah. Problem yang muncul dari situasi semacam ini adalah menyangkut kualitas dan kredibilitas isi dari informasi yang diterima masyarakat itu sendiri. Satu persoalan tadi masih ditambah dengan miskinnya literasi yang dipunyai masyarakat secara umum. Hal ini membuat mereka tentu saja tidak dapat menimbang, memilah atau bahkan menilai mana informasi yang sahih mana yang bukan. Masyarakat tidak memiliki kecakapan dalam menentukan mana informasi yang benar (*real news*), mana yang palsu (*fake news*), dan mana yang keliru (*false news*). Situasi semacam inilah yang kemudian menyuburkan perkembangan hoaks di tengah masyarakat. Hoaks diartikan sebagai sebuah berita bohong dengan memutarbalikkan fakta yang sengaja diproduksi tujuan membangun opini untuk kepentingan pembuatnya. Hoaks tentu saja akan membuat mereka yang terpapar akan salah mengambil keputusan karena berdasarkan pada informasi palsu (*fake news*) ataupun keliru (*false news*) (D. Hartono, 2018).

Hoaks menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh sejumlah negara di dunia. Penyebaran berita bohong (hoaks) telah menempatkan masyarakat pada situasi yang saling mencurigai dan terpecah berdasarkan perspektif dan pemahaman masing-masing atas sebuah peristiwa. Pengaruh teknologi juga ternyata turut menyuburkan hoaks maupun *fake news*. Teknologi filter *bubble*, yaitu Algoritma yang sejatinya

diciptakan untuk memudahkan pencarian di Facebook dan membantu pengiklan menyasar target pasarnya, justru menjadi bumerang bagi demokrasi. Besarnya dampak kerugian yang disebabkan tren atau era *post-truth* di media sosial, mau tidak mau harus ada yang membangun kembali kesadaran kritis masyarakat supaya lebih peka terhadap bentuk berita hoaks di media sosial yang menyajikan segalanya serba cepat. Perlu sinergitas semua pihak untuk meminimalisir kebohongan yang menjadi ciri dasar dari *post-truth*, sebagai pengguna media sosial, harus cerdas memilah dan memilih sumber berita yang terpercaya dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya (Salman, dkk.). Semakin melimpahnya informasi di ruang publik yang terkadang memanipulasi fakta, membuat makin tipisnya batas pembenaran dan kebenaran. Sehingga saat ini dirasakan perlu untuk menggencarkan literasi digital secara benar, karena *netizen* sebenarnya mempunyai andil yang besar dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang intensitasnya terus melejit di tengah fenomena *post-truth*, sehingga harus benar-benar memiliki kecerdasan yang utuh, tidak hanya cerdas secara keilmuan namun juga cerdas secara digital; harus bisa mengenali, memahami perkembangan informasi dengan mengedepankan nilai integritas, empati sekaligus bersinergi untuk saling menghargai perbedaan. Kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berita yang viral juga dibutuhkan supaya mampu membedakan antara berita bohong dan yang faktual, konten-konten yang bisa dipercaya maupun konten yang meragukan. Bijak dalam bermedia sosial akan sangat menguntungkan bagi kesehatan jiwa dan pikiran sehingga tidak dihabiskan hanya untuk menanggapi konten yang tidak prinsip dan tidak berbangun (Rianto, 2019).

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan antara media arus utama dengan para pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital di mana manusia terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Selain ditandai dengan merebaknya berita hoaks di media sosial, era *post-truth* juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme

khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Jika di luar negeri nama Presiden AS Donald Trump acapkali dikaitkan dengan hoaks dalam setiap pernyataan politiknya, di Indonesia fenomena *post-truth* juga ditemui dengan tertangkapnya sekelompok orang yang tergabung dalam Saracen. Mereka adalah orang-orang yang secara sengaja menyebarkan hoaks alias berita bohong untuk memenuhi kepentingan klien yang membayarnya.

Karakteristik utama dari politik *post-truth,* adalah:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional;
2. Mengabaikan data dan fakta;
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu;
4. Mengombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya;
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu dan;
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban *televisual*, *online*, *android*, dan media sosial (*globalpolicy.com*, 2017).

Perkembangan digital dengan masifnya penggunaan internet sebagai media baru, membawa konsekuensi pergeseran karakter khalayak menjadi *audience*, khalayak tidak lagi obyek pasif, namun dapat berperan menjadi produsen informasi (*prosumer*) dan dapat membentuk opini publik via platform media sosial. Melalui media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring (*networking society*) yang ditandai dengan munculnya jurnalisme warga (*citizen journalism*), fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus berperan membentuk opini publik. Lebih ekstrem Aylin Manduric dalam tulisannya "*Social Media as a tool for information warfare*" menyatakan bahwa media sosial sebagai senjata pemusnah massal dan pemicu timbulnya konflik, berperan sebagai senjata kata-kata yang mempengaruhi hati dan pikiran *audiens* yang ditargetkan.

Melalui media sosial, berbagai informasi membanjiri ruang publik media sosial, arus informasi yang deras tanpa batas tersebut, ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, media sosial satu sisi dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan secara

benar, untuk mengedukasi masyarakat dan mengoptimalkan manfaat praktis media sosial, bagi peningkatan pembangunan bangsa (Jandja, 2005:15). Digitalisasi proses komunikasi dan diseminasi informasi memungkinkan setiap orang yang terakses internet masuk dalam arus informasi yang berjalan. Ketika perang strategi untuk memenangi pilkada mendominasi wacana yang berkembang di ruang komunikasi maya, warga pengguna internet cenderung tersedot mengikutinya.

Di sisi lain kita memasuki hidup di era *post-truth*, yang menurut *Oxford Dictionaries*, fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat emosional dan pribadi. Oleh karena itu, kebenaran wajar saja apabila masyarakat Indonesia masih mudah untuk dikelabui dengan berbagai informasi yang notabene hoaks. Kepercayaan akan suatu informasi pada era sekarang tidak didasarkan akan suatu kebenaran atau fakta yang disajikan. Sikap suka dan tidak suka lebih kepada diri manusia itu sendiri, wajar saja hoaks menjadi suatu informasi viral di tengah dunia media sosial.

Di era *post-truth* yang ditandai dengan membludaknya informasi berkualifikasi berita palsu (*fake news*), nirfakta, *anonymous*, dan *unauthoritative* dapat disaksikan juga bagaimana masyarakat di negara-negara maju sekali pun, ternyata dapat dengan mudah termakan berita dan informasi palsu, yang dapat menggerus dan menggoyahkan nilai-nilai demokrasi dan tatanan sosial dan ekonomi yang selama ini sudah terbukti mampu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Jika negara-negara maju saja bisa terkena imbas pasca kebenaran dengan dampak cukup serius. Dampak *post-truth* sekarang ini telah merasuk hampir ke setiap sudut ruang dan relung kehidupan masyarakat (Mudjiyanto, dkk, 2020:334).

Digitalisasi proses komunikasi dan diseminasi informasi memungkinkan setiap orang yang terakses internet masuk dalam arus informasi yang berjalan. Ketika perang strategi untuk memenangi pilkada mendominasi wacana yang berkembang di ruang komunikasi maya, warga pengguna internet cenderung tersedot mengikutinya. Di sisi lain kita memasuki hidup di era *post-truth*, yang menurut Oxford *Dictionaries*, fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat emosional dan pribadi. Oleh karena itu, kebenaran wajar saja apabila masyarakat Indonesia masih mudah untuk dikelabui dengan berbagai informasi yang notabene hoaks. Kepercayaan akan suatu informasi pada era sekarang tidak didasarkan akan suatu kebenaran atau fakta yang

disajikan. Sikap suka dan tidak suka lebih kepada diri manusia itu sendiri, wajar saja hoaks menjadi suatu informasi viral di tengah dunia media sosial.

Di era *post-truth* yang ditandai dengan membludaknya informasi berkualifikasi berita palsu (fake news), nirfakta, anonymous, dan *unauthoritative* dapat disaksikan juga bagaimana masyarakat di negara-negara maju sekali pun, ternyata dapat dengan mudah termakan berita dan informasi palsu, yang dapat menggerus dan menggoyahkan nilai-nilai demokrasi dan tatanan sosial dan ekonomi yang selama ini sudah terbukti mampu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Jika negara-negara maju saja bisa terkena imbas pasca kebenaran dengan dampak cukup serius. Dampak *post-truth* sekarang ini telah merasuk hampir ke setiap sudut ruang dan relung kehidupan masyarakat (Mudjiyanto, dkk., 2020:334).

Ciri-Ciri Post-truth

Post-truth sebenarnya, frasa ini sudah dipakai sejak lama. Pada 1992, oleh Steve Tesich. Dalam tulisannya *The Government of Lies* dalam majalah *The Nation*, menulis, "Kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan kita ingin hidup di dunia *post-truth*" (Mudjiyanto, dkk, 2020:334). Tesich membahas tentang Perang Teluk dan Iran. Kemudian di tahun 2004, Ralph Keyes, *di The Post-truth Era*, bersama komedian Stephen Colber juga membahas hal yang kurang lebih sama: *truthiness*. Kata ini mengacu kepada sesuatu yang seolah-olah benar, padahal tidak benar sama sekali.

Hingga pada akhirnya *post-truth* mengalami puncaknya di tahun 2016. Dua peristiwa yang menjadi momentum saat itu adalah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Di 2016, *post-truth* bahkan menjadi *word of the year* di kamus Oxford. Oxford sendiri mendefinisikan *post-truth* sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal (Kresnoadi Jan 26, 2021).

Post-truth adalah suatu era di mana kebenaran dan kebohongan, fakta dan fiksi, data dan imajinasi kehilangan batasnya. Dengan kata lain, ketika fakta objektif mulai dikaburkan dan hoaks justru dianggap sebagai kebenaran. Sulit mencari kebenaran informasi tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jujur dan mana yang bohong. Pembatas antara kebenaran dan kebohongan semakin

tipis. Teknologi informasi yang memberikan ruang kontestasi secara terbuka sehingga batas antara keduanya pun menjadi semakin kabur kemudian menghilang. Kurang lebih begini yang dimaksud, *post-truth* adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Bagaimana bisa seperti itu? Jawabannya dengan cara memainkan emosi dan perasaan kita. Ciri-ciri *post-truth* adalah masyarakat yang informis. Kebenaran tidak dibantah melainkan dijadikan sebagai norma. Masyarakat yang haus akan informasi menjadi sasaran utama dari *post-truth* karena ada harapan dan passion disitu. Kebohongan yang menyenangkan akhirnya akan lebih dipercayai oleh masyarakat luas.

Ciri-ciri era *post-truth* adalah ketidakjujuran baru secara kualitatif para politisi, terutama dalam hal mengarang fakta untuk mendukung *apapun* yang dinarasikan. Dengan kata lain, fakta dihadirkan dan dibuat sesuai dengan cerita tertentu atau karena sesuai dengan agenda yang lebih luas. Fakta yang hadir dalam realitas media sosial, termasuk dalam ruang-ruang percakapan karenanya tidak pernah netral.

Segala informasi menjadi semakin mudah disebarkan dan diyakini masyarakat sebagai kebenaran. Bahkan di media sosial, hoaks mampu menggerakkan emosi dan memengaruhi tindakan, maupun sikap masyarakat. Era *post-truth* terlihat dengan memudarnya batasan benar dan salah, meleburnya keaslian dan kepalsuan, penuh tipu muslihat, semakin menyatunya kejujuran dan kebohongan sehingga pabrikasi ketidaktahuan bahkan ketidakpedulian menjamur. Informasi yang diterima dan yang beredar dianggap segalanya dan dijustifikasi benar. Era *post-truth* juga ditandai dengan meningkatnya signifikansi media sosial yang dijadikan sebagai sumber berita serta semakin besarnya ketidakpercayaan terhadap fakta dan data (Fatmawati,2019).

Ciri-ciri masyarakat yang terdampak *post-truth* adalah kecenderungan memahami informasi yang diterimanya secara sepotong, gegabah, dan segera menyebarkannya melalui media sosial seperti *WhatsApp, Facebook, Twitter* maupun aplikasi media sosial lainnya. Hoaks atau kebohongan sebagai salah satu ciri penting *post-truth* banyak beredar melalui media sosial tersebut. Dampaknya adalah informasi yang disebarkan akan memengaruhi opini masyarakat sehingga informasi yang tidak benar justru dianggap yang paling benar. Bahkan karena instannya, penerima pesan tidak sempat mencerna informasi yang diperoleh, kurang kritis, serta kurang berpikir panjang. Akibatnya dalam mengunggah, sering kali kurang mengindahkan norma dan etika dalam berinformasi. Ketika generasi muda telah mengalami hal tersebut, dapat dikatakan mereka telah mengalami era *post-truth* (Keyes

2004). Cope dan Kalantzis (2009) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sumber utama kesetaraan sosial (*key sources of social equity*).

Perkembangannya yang sangat masif di media sosial melahirkan masyarakat baru dalam konsumsi dan distribusi pesan. Hampir setiap saat masyarakat menerima dan menyalurkan pesan di saluran pribadinya. Di mana simulasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Masyarakat cenderung memilih informasi berdasarkan apa yang diyakini terlebih dahulu dan cenderung menolak informasi yang bertentangan, walaupun hal yang dimaksud justru merupakan fakta objektif yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, kebenaran emosional lebih dipilih daripada kebenaran yang objektif. Generasi muda kini cenderung membaca informasi secara sepotong dan langsung membagikan ke orang lain. Penting bagi generasi muda untuk cerdas dan bijak dalam memilih dan memilah informasi dengan cara menyaring sebuah informasi dan bersikap bijak dalam menyebarkannya.

Masyarakat selalu menjadi objek dalam manipulasi bagi kekuasaan mereka dan menggunakan posisinya, termasuk perangkat di media massa, yang mereka miliki untuk dimiliki. Masyarakat akan percaya pada kebenaran yang mereka tawarkan bagi masyarakat terutama pada masyarakat yang menengah ke bawah (proletar). Namun, di dalam perkembangan era digital saat ini yang banyak ditandai dengan pergeseran karakter Khalayak. Ada beberapa karakteristik menurut al Rodhan dalam setiawan (2017) yang utama pada *post-truth,* adalah:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional;
2. Mengabaikan data dan fakta;
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu
4. Mengombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya;
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan;
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban t*elevisual, online, android,* dan media sosial.

Di sisi lain *post-truth* juga memunculkan perdebatan klasik tentang nilai kebenaran itu sendiri. Dalam perspektif konstruktivisme

kebenaran berkelindan dengan subjektivisme dan relativisme. Sehingga kebenarannya menjadi kebenaran yang selalu diperebutkan. Fakta kemudian mengalami tantangan dan ditafsirkan secara berbeda. Kebenaran kemudian menjadi sebuah kepercayaan dalam suatu masyarakat tertentu. Karena tidak semuanya masyarakat juga terjebak dengan berita hoaks. Bagi Castelss (Nasullah, 2015:78) dalam masyarakat jejaring atau *networking society*, informasi menjadi *content* yang dipertukarkan antara pengguna media siber yang tidak berada dalam pemilihan antar-*sender* dan *receiver*. Entitas memiliki peran ganda sebagai konsumen informasi sekaligus produsen informasi. Bahkan dalam kanal komunikasi yang semakin beragam dan model komunikasi yang juga semakin dipengaruhi oleh teknologi media baru (*new media*) ini, pengguna media siber bahkan telah menjelma menjadi *creative audience* (Castelss, 2009:127). Dengan demikian seperti disampaikan Nasrullah (2015) kehadiran media sosial memiliki implikasi terhadap media tradisional.

Dampak Positif dan Negatif Post-Truth

Tidak bisa dipungkiri media sosial membuat informasi semakin meluas tetapi juga membuat rusuh terhadap tatanan masyarakat. Setiap menit bahkan detik ada foto, berita, video dan lain-lain yang di *upload* di media sosial, bahkan di setiap menit ada saja unggahan yang viral tidak perlu menunggu berhari-berhari untuk menjadikan postingan itu viral. Tidak seperti pada zaman koran dulu, koran memerlukan banyak waktu untuk memviralkan suatu berita.

Ketika era *post-truth* ini tidak dikendalikan maka yang akan terjadi adalah banyaknya berita simpang siur yang belum tentu kebenarannya atau dalam istilah masa kini disebut dengan "hoaks". Saat kebenaran suatu informasi atau berita tidak digali terlebih dahulu maka kebohongan yang secara sengaja diciptakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan cepat diterima oleh orang awam. Dalam hal ini siapapun tidak memandang muda atau tua, laki-laki maupun perempuan bisa dengan mudah menjadi kambing hitam dari sebuah hoaks yang sengaja diciptakan tersebut, karena ketika opini publik sudah tercuci oleh suatu doktrin yang salah maka dengan mudah pula akan menganggap benar suatu kesalahan yang dilontarkan.

Keadaan di mana teknologi semakin canggih berkembang pula dampak yang ditimbulkan oleh media sosial, begitu juga dengan hoaks. Bagaimana tidak, hoaks dianggap sebagai berita yang benar sekalipun itu tidak dibuktikan kebenarannya. Kondisi seperti ini

sebenarnya sangat berbahaya untuk orang awam, sebab masyarakat hanya mengandalkan berita kabur (tidak jelas). Bahkan, berita yang benar sudah mulai diabaikan, suasana semakin buruk ketika beberapa orang menyebarkan hoaks dengan disertai beberapa prediksi yang belum tentu terjadi.

Semakin melimpahnya suatu informasi di ruang publik yang terkadang memanipulasi suatu kebenaran atau fakta, mengakibatkan semakin tipisnya batas kebenaran dan pembenaran. Biasanya, *post-truth* ini dimanfaatkan oleh kepentingan politik, di mana ia berteman dengan berita hoaks, dan korbannya adalah orang-orang yang tidak suka menyimak atau hanya menelan berita secara mentah-mentah. Dengan menebarkan bibit- bibit berita hoaks ke dalam suatu pusaran informasi yang cepat ini, masyarakat akan mengira suatu berita itu benar. Ditambah lagi ketika ada akun-akun yang tidak bertanggung jawab sengaja untuk menyundul atau berkomentar mengenai suatu berita hoaks tersebut.

Mengakibatkan masyarakat dengan mudah percaya. *Post-truth* yang menjadi celah bagi pemilik kepentingan kekuasaan justru memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial untuk mengendalikan opini publik. Dengan demikian, *post-truth* gagal mentransmisikan suatu kebenaran pada publik, dan yang akan terjadi justru lebih memilih berita fiktif yang sesuai dengan kepentingan atau pendapat sebagai penguat identitas.

Kesimpangsiuran sebuah informasi dan susahnya membedakan mana informasi fakta dan hanya fiktif membuat masyarakat mempunyai keraguan terhadap kevaliditasan sebuah sumber informasi. Meresahkan memang, berita seolah bekerja secara efektif dan efisien tepatnya melalui teknologi yang semakin canggih. Teknologi semakin canggih ini membuat media sosial semakin berkembang pesat juga, dengan hal tersebut maka dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif juga ditimbulkan. Dampak dari *post-truth* tidak selamanya akan memberikan dampak yang negatif saja melainkan akan menimbulkan dampak positif juga, tetapi dengan catatan tidak menelan berita secara mentah-mentah. Dampak yang ditimbulkan oleh *post-truth* sendiri tergantung bagaimana masyarakat menyikapi suatu berita yang simpang siur, maka dengan hal ini berikut penjelasan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh post-truth.

Dampak Positif adanya media sosial di antaranya, mempercepat informasi dari satu wilayah hingga tersebar di berbagai wilayah. Hal ini tentu saja menjadikan berbagai aspek kehidupan berkembang dengan

pesat. Media sosial memang didesain untuk mengumpulkan dan menjangkau banyak orang secara virtual dari berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Selain digunakan sebagai sarana komunikasi bisnis seperti *facebook ads*, media sosial belakangan ini semakin kentara juga digunakan untuk media komunikasi politik untuk memengaruhi dan membentuk opini publik. Contoh kemajuan di berbagai bidang:

- Bidang pendidikan, Jika seseorang pada zaman dahulu harus berjalan sangat jauh untuk mendapat pendidikan, belum lagi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan sangat besar mengingat jarak tempuh yang jauh. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama bagi kesuksesan kehidupan. Saat ini, cukup berada di rumah atau di warung *wifi* yang dilengkapi dengan jaringan internet, semua informasi dapat diakses dengan leluasa. Perkembangan pengguna akses internet tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ternyata Indonesia berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan India. Pengguna akses internet di China sebesar 25.4 juta, Indonesia tercatat sebesar 25.3 juta pengguna internet baru dalam setahun (Ramadhan, 2020). Begitu juga dengan menuntut ilmu bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi yang menyuguhkan kemudahan seperti *WA Group*, *live streaming* di *IG*, *Youtube*, dan masih banyak aplikasi lainnya.
- Bidang sosial juga mengalami kemajuan. Dulu, orang harus sosialisasi kegiatan apa pun *door to door* yang membutuhkan waktu lama, belum lagi jika anggota masyarakat sangat banyak. Tapi saat ini, cukup mengetik pemberitahuan sekali lengkap dengan dibubuhi *file* dokumentasi maka sosialisasi sudah berjalan dengan lancar. Fenomena saat ini juga banyak kegiatan sosial yang dilakukan lewat media sosial akan tetapi hasil yang didapat adalah nyata seperti penggalangan dana untuk kegiatan banjir, longsor atau bencana alam lainnya yang bisa mendapatkan jumlah dalam nominal yang besar meskipun penggalangan hanya dilakukan melalui media sosial.
- Bidang ekonomi, dampak yang diberikan oleh *post-truth* tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sisi positif adanya media sosial yang terbukti mampu mengangkat dan menggerakkan sektor ekonomi dengan pesat. Mulai dari mempertemukan penjual dan pembeli secara digital dalam *market place*, promosi produk dengan biaya hampir gratis, pemetaan kelompok serta kecenderungan konsumen yang disediakan dalam *report insight* media sosial

menjadi pijakan data dasar yang sangat berguna bagi produsen dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan bagi pebisnis digital dalam media sosial, sehingga arus ekonomi kerakyatan bisa lebih melejit, tidak hanya didominasi oleh perusahaan besar.

Banyaknya kebebasan mengunggah informasi yang disediakan media sosial kerap kali disalahgunakan bagi beberapa pihak untuk menyebarkan informasi kontra produktif berupa hoaks, informasi palsu maupun informasi keliru yang memiliki daya rusak sosial yang dahsyat karena melibatkan sisi emosi target sebagai pemicu ledakannya. Hal tersebut menjadikan dampak negatif adanya *post-truth* sangat berbahaya dan tidak dapat disepelekan begitu saja. Karena kecenderungan masyarakat milenial adalah menerima informasi secara sekilas tanpa adanya penelaahan lebih dalam terhadap sumber dan jenis informasi yang diterimanya. Bahkan kerap kali hanya membaca judul informasi yang bombastis tanpa memahami isinya sudah langsung saja menyebarkan penggalan informasi tersebut ke semua teman-temannya. Padahal, keakuratan informasi tersebut masih tanda tanya besar.

Penerima informasi seakan menutup telinga tanpa perlu menanyakan benar atau tidaknya informasi tersebut. Dengan demikian masyarakat secara tidak sadar digiring untuk semakin jauh dari fakta yang sebenarnya. Banyaknya informasi palsu (hoaks) yang beredar di media sosial melihat arus kebohongan berbagai "meme" dan beberapa ide-ide yang menyertainya untuk membentuk opini masyarakat. Akibatnya, muncul kepercayaan bersama yang baru di tengah masyarakat seiring dengan meningkatnya polarisasi.

Seperti teknik *framing* digunakan untuk menggiring keberpihakan politik di tengah masyarakat. Dampak negatif dari *post-truth* khususnya mengenai hoaks atau berita bohong tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sering kali hoaks digunakan sebagai senjata ampuh bagi kepentingan politik tertentu, seperti halnya awal kemunculan *post-truth* pada momen politik terheboh di tahun 2016. Yakni dengan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Cara-cara lama untuk melakukan penetrasi, intimidasi, dan indoktrinasi kepada masyarakat kini beralih dalam wadah media sosial. Penyebaran hoaks dengan gencar dilakukan untuk membentuk opini yang dianggap benar oleh publik, hampir di semua platform media sosial bisa dijumpai sebaran hoaks tersebut.

Akibat kebenaran yang dikalahkan, orang-orang sengaja digiring untuk menjauh dari fakta-fakta dan tumbuh di dalam keyakinan

manipulatif. Misalnya saja, objektivitas dan rasionalitas di dalam iklim sosial-politik, membuka jalan yang sangat lebar kepada emosi untuk berpegang kepada keyakinan kendatipun fakta menunjukkan hal yang sebaliknya. Akibat *post-truth* yang lebih mengutamakan emosi daripada rasionalitas dan objektivitas (emosi mengalahkan fakta), diperlukan sebuah kritik diri dengan mulai melakukan literasi yang benar. *Post-truth* hanya dapat dihadapi dengan *counter information* yang digali dari sumber berita terpercaya. Butuh waktu untuk membangun budaya literasi yang demikian tetapi sangat efektif di dalam menangkal disinformasi kebenaran.

Sejatinya, *post-truth* itu bukan hanya tentang kebohongan yang disebar, tapi ketakutannya menjadi jauh lebih besar dari itu. Jika dilihat dari bagaimana era ini mengobarkan kebingungan di tengah arus informasi yang banyak dan bergerak cepat. Akhirnya membuat diri seseorang menjadi ragu akan pengertian kebenaran, dan bisa- bisa merasa takut terhadap pandangan yang berbeda dengan pemikiran kita.

Bahaya Post-Truth

Tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial membuat informasi jadi jauh lebih riuh dan bising. Tiap menit ada foto atau status baru yang di-*update* dan bikin kita jadi ketagihan *smartphone*. Ada berita yang beranak pinak. Kalau kita taruh *handphone* kita tiga jam saja, sudah ada video viral baru. Pagi ada anak kecil nyanyi terus tirai belakangnya jatuh yang membuat dia menjerit, , kemudian tiba-tiba siang sudah dengan rame prank ojol... eh, malemnya Kekeyi sudah *live* Instagram saja bareng Rio Ramadhan. Dan di *live* Rionya cerita dipatok ayam pula. Absurd sekali pembahasan dunia ini.

Pada intinya dari paragraf di atas adalah: saat ini putaran informasi bergerak secepat itu. Berubah, bergerak, bertambah dan berkembang biak. Arus ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan yang akhirnya membuat kita merasa kalau kebohongan tadi adalah kebenaran. Dari hal tersebut muncullah bahaya *Post and Truth* yaitu kita jadi susah membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah lalu di anggap benar. Dalam masa ini, orang mempengaruhi publik dengan cara menomor satukan sensasional dan membimbing emosionalitas (Haryatmoko, 2018). Masyarakat lebih tertarik dengan kebodohan sebuah berita, mereka cenderung lebih terpengaruh dengan berita atau hal-hal yang mampu menyentuh perasaan, seperti membuat rasa gembira, sedih, kecewa, marah dan

seterusnya. Jadi intinya publik itu lebih sensitif apabila disentuh sedikit emosinya (Ulya, 2018).

Terkadang, *Post and Truth* ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dia berteman dengan berita hoaks, dan korbannya adalah orang-orang yang tidak suka menyimak. Dengan menebarkan bibit-bibit hoaks ke dalam pusaran arus informasi yang sangat cepat ini, orang akan mengira kalau berita itu benar. Belum lagi kalau ada akun-akun bayaran yang memang sengaja "menyundul" atau berkomentar tentang berita hoaks tersebut. Jadi semakin membuat orang percaya.

Bagaimana, apa sudah terbayang bahayanya *Post and Truth* ini? Ya, jaman dulu saja ada kok, masanya kita (atau mungkin ini saya saja) di-*broadcast* untuk menyebarkan SMS doa ke 10 teman supaya lulus UN. Dan buktinya, kita percaya-percaya saja. Karena kembali lagi, "mereka mempermainkan emosi kita." Dan itulah salah satu dari *post and truth*. Emosi dan kepercayaan bisa jadi variabel yang sangat kuat untuk menentukan apakah sesuatu dianggap kebenaran atau sebaliknya. Kesimpangsiuran informasi dan susahnya membedakan mana fakta dan bukan ini sedikit banyak membuat kita punya keraguan terhadap kevaliditasan sumber informasi.

Di era *post-truth*, banyak sekali berita hoaks yang beredar dalam masyarakat. Opini– opini yang digiring dan seolah-olah dibenarkan oleh orang meskipun sebenarnya yang diungkapkan belum tentu benar. *Post-truth* akan menjadi sangat berbahaya jika tidak dikendalikan karena kebohongan yang tersistematik justru mendapat dukungan yang besar karena dianggap benar. Dalam hal ini si*apa pun* bisa dengan mudah menjadi kambing hitam dari hoaks yang sengaja diciptakan, karena bila opini publik sudah tercuci oleh doktrin yang salah maka dengan mudah akan menganggap benar kesalahan yang dilontarkan

Fake news, hoaks dan ujaran kebencian merupakan masalah besar dalam media sosial, di mana dampak buruknya meningkat dengan cepat dengan algoritma media sosial. Yang sebenarnya digunakan adalah media sosial sebagai platform berkumpulnya manusia secara virtual menciptakan cara supaya penggunanya betah berlama-lama menggunakan platform mereka. Salah satu caranya adalah dengan membuang pandangan yang bertentangan dengan *mindset* pengguna dan membanjiri mereka dengan postingan yang sejalan dengan keyakinan pribadi (Syuhada, 2017).

Bahaya yang tidak bisa dibendung lagi di era *Post-truth* adalah ujaran kebencian yang semakin merajalela tanpa terkendali. Ketika kita

membuka *wall* media sosial tak jarang juga ujaran kebencian baik pada ulama', pemerintah, ataupun diskriminasi terhadap suku/ ras tertentu turut mewarnai platform media sosial. Jika hal-hal ini dibiarkan tanpa adanya kontrol atau upaya penyaringan setiap informasi yang masuk maka akan terjadi perpecahan, dan disharmonisasi antar-satu dengan yang lainnya.

Pemerintah mempunyai andil besar untuk mengerem laju *post-truth* dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang jelas. Seperti halnya undang-undang ITE yang mengandung sanksi dan hukuman bagi penyalahgunaan informasi digital yang mengganggu ketertiban umum, serta melindungi warga dalam berinteraksi di dunia maya. Kominfo juga harus berperan aktif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Sudah selayaknya penanganan menghambat penyebaran informasi hoaks menjadi tugas bersama baik dalam keluarga, pemuka agama, pihak berwajib, komunitas, pemerintah, dan yang paling penting dimulai dari pribadi masing-masing (Arifin, 2020).

Etika Menggunakan Media Sosial di Era Post-Truth

Post-truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya dengan menggunakan atau memainkan emosi dan perasaan kita. Media sosial membuat informasi menjadi jauh lebih riuh dan bising. Dalam era ini kita menjadi susah membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Keadaan *post-truth* dapat terjadi melalui argumen berbentuk alasan logis yang sebetulnya belum tentu benar dan dapat dibuktikan. Alasan logis berupa *common sense*, akal sehat atau niat wajar yang sudah umum dibenarkan sangat mudah untuk diamini (Ralph, 2004).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa " etika" adalah ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (*akhlak*). Etika dapat mengarahkan perilaku komunikasi dengan santun, jujur dan tidak merugikan orang lain. Hal inilah yang dapat menjadi cara agar terhindar dari menyebarkan maupun memberikan informasi hoaks sehingga dapat menangkal hoaks ketika menerima pesan ataupun membaca berita.

Panduan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sesuai kaidah normatif sudah ada yang biasa disebut dengan n*etiquette*. *Netiquette* berasal dari kata *networks* dan *ettiquetee*, yang mempunyai

arti: 1) etika dalam menggunakan internet 2) aturan-aturan kebiasaan umum yang berlaku di seluruh dunia, sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman berinteraksi di dunia maya.

Beberapa aturan yang ada pada *netiquette* ini di antaranya adalah:

1. Mengamankan diri terlebih dahulu, maksudnya ialah mengamankan semua properti komputer dengan memasang anti virus;
2. Jangan mudah percaya dengan internet;
3. Hargailah pengguna internet lain, dengan cara:
   - Jangan dibiasakan menggunakan internet atau informasi sembarangan atau plagiat;
   - Jangan mengusahakan untuk mengambil keuntungan secara ilegal di internet;
   - Jangan mengganggu privasi orang lain, dengan cara mencuri informasi yang sebenarnya terbatas;
   - Jangan terlalu banyak menggunakan huruf kapital karena bisa saja diartikan dengan kegiatan teriak-teriak pada kelompok sesungguhnya.

Etika bicara baik di media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Berhati-hati dengan membagi informasi. Seperti bercerita mengenai kehidupan pribadi dan sensitif;
2. Jangan berbicara dan membagikan konten yang mengandung unsur SARA;
3. Hindarilah pembicaraan yang merendahkan diri orang lain, melecehkan orang lain, kelompok, RAS atau bangsa lain;
4. Hindari bicara yang bersifat mengadu domba, memaki ataupun menyalahkan;
5. Hindari berbicara yang mendiskresikan, memburuk-burukan, mencela, atau menyinggung orang lain, dan;
6. Menimbulkan konflik sehingga bisa saja berakhir di meja hijau(Neni,2016).

Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jaringan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA. Karena media *online* mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyebaran informasi bagi setiap pengguna. Dalam kelompok percakapan yang menjadi subjek amatan, orang yang dianggap penyebar hoaks oleh anggota kelompok lainnya sebenarnya cukup

literate. Mereka mampu melakukan konsumsi dan produksi teks media digital dengan baik. Setiap kelompok dalam masyarakat akan senantiasa berusaha menunjukkan identitasnya, dan bertindak atas perhitungan akan reaksi orang lain. Ideologi mengandalkan adanya sistem makna yang dapat lepas dari sistem penafsiran. Maka ideologi pada akhirnya merestrukturisasi tindakan sosial karena tindakan itu dengan pasti melibatkan bidang penafsiran.

Secara sederhana, etika berhubungan yang baik ataupun buruk, dikaitkan dengan nilai-nilai dan moralitas. Ajaran-ajaran beretika juga biasanya bersandar pada deontologi (kant) dan teleologi (John Struath Mill). Kedua ajaran beretika ini secara tidak langsung bertolak belakang. Terfokus dengan kebaikan atau kepada kemanfaatan. Bagi etika deontologi, bertujuan tindakan etis ialah demi mewujudkan kewajiban manusia universal. Oleh karenanya, suatu perbuatan baik akan terukur apakah tindakan itu sesuai dengan norma atau pun sesuai dengan kewajiban universal. Jadi, bila melakukan kebohongan dalam kondisi *apa pun* adalah tindakan yang tidak etis karena kelirunya menurut moral universal. Dan dalam etika deontologi, tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Di sisi lain, bagi etika teleologis, titik beratnya pada tujuan atau konsekuensi, jika tindakan tersebut mempunyai kebaikan, maka tindakan tersebut etis (Haryatmoko, 2007).

Cara Menerima, Mengelola, Menyaring Informasi di Media Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan, sehingga banyak sekali cara seseorang untuk bisa mendapatkan informasi salah satunya melalui media sosial. Media sosial adalah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan dunia virtual (Cahyono, 2016:142). Media sosial memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan tempat tinggal mereka. Selain untuk memudah berinteraksi dan mendapatkan informasi, media sosial juga membawa dampak yang buruk bagi penggunanya salah satunya yaitu semakin luasnya jaringan dan tidak adanya jarak yang tercipta ketika seseorang berinteraksi dan mendapatkan informasi dari media sosial maka akan semakin banyak pula orang-orang yang dengan begitu mudahnya terpengaruh oleh informasi yang salah (hoaks) dari media sosial. Untuk itu perlu adanya pengetahuan bagaimana cara menerima,

mengolah dan menyaring informasi dari media sosial. Adapun cara yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Perhatikan keaslian sumber berita dengan cara mencari sumber fakta, berasal dari situs resmi atau bukan, siapa yang mengunggah berita tersebut;
2. Mencari sumber pembanding, ketika kita ragu dengan adanya suatu informasi yang tersebar di media sosial, maka kita dapat mencari informasi tersebut dari sumber lain yang lebih valid sehingga kita dapat membuktikan apakah informasi yang ada di media sosial sudah sesuai dengan kenyataan;
3. Jangan hanya membaca judul, saat kita menerima informasi atau berita dari media sosial sudah seharusnya kita tidak terpancing dengan judul yang sudah dibuat semenarik mungkin yang dapat membuat kita terkecoh, karena seperti saat ini banyak sekali informasi di media sosial di mana antara judul dengan isi berita tidak sama;
4. Cek keaslian gambar, foto atau video. Apabila dalam informasi di media sosial di cantumkan foto maupun video, maka kita harus mengecek keasliannya, karena di era modern seperti saat ini setiap orang bisa memanipulasi video sehingga terlihat sesuai dengan siaran yang ada di televisi tetapi pada kenyataannya video tersebut tidak sama;
5. Melakukan *recheck* sebelum menyebar luaskan berita, banyak sekali masyarakat yang baru mengenal sosial media langsung menyebarluaskan informasi tanpa membuktikan kebenarannya terlebih dahulu sehingga semakin tersebar luas berita hoaks di masyarakat, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang (Cika A.S, 2021:48)[19].

Beberapa cara tersebut dianggap akurat karena kita dituntut untuk realistis, berpikir kritis dan rasional mengenai suatu informasi agar nantinya kebenaran dapat dibuktikan dan berita palsu (hoaks) tidak tersebar luas di kalangan masyarakat. Selama puluhan tahun, media arus utama, mulai dari TV, cetak, hingga radio, menjadi sumber informasi utama masyarakat. Kini, di era teknologi, era internet, era media sosial, media arus utama bukan satu-satunya sumber informasi masyarakat. Media sosial kini turut serta memproduksi dan menyebarluaskan informasi dengan caranya sendiri, yang sering kali tak terduga.

Informasi yang dihasilkan oleh media cetak, radio, dan TV diolah para jurnalis dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Mereka memproduksi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena melalui proses cek dan *recheck* yang cukup panjang sebelum dirilis ke publik. Jika pun ada kesalahan atau kurang akurat, media bertanggung jawab untuk merevisi dan memberikan hak jawab. Sebaliknya, informasi yang diproduksi dan disebarluaskan di media sosial oleh penggunanya adalah informasi yang tidak perlu memenuhi etika jurnalistik karena mereka memang bukan jurnalis. Pengguna media sosial adalah masyarakat, perorangan, yang dapat memproduksi informasi apa saja di berbagai layanan media sosial. Bahkan beberapa orang kini membuka kanal sendiri di telegram untuk menjaring *audience* dan menyebarkan informasinya, sebagaimana yang sudah lebih dulu terjadi di Youtube.

Selain memproduksi informasi, *netizen* juga menyebarkan informasi yang didapat dari media arus utama ke media sosial. Ada yang menyebarkan apa adanya, persis seperti yang disajikan media arus utama. Ada yang menafsir dan menulis ulang sesuai tafsirnya, baru kemudian disebarkan ke media sosial. Ada pula yang sengaja mengedit, lalu menyebarkannya, dengan tujuan tertentu, termasuk mencemarkan nama baik, atau menyesatkan informasi. Di saat ada pertarungan politik atau bisnis, campur aduk dan banjir informasi makin deras mengalir. Ini bisa kita rasakan saat Pilkada di kota-kota besar dengan penduduk padat pengguna media sosial, seperti DKI. Media- media yang berpihak pada calon tertentu, terus memproduksi berita positif mengenai calon yang didukungnya, sekaligus tak gentar menulis berita negatif mengenai lawannya.

Beberapa cara atau tips menyaring informasi dari media sosial agar tidak termakan hoaks:

1. Jangan hanya membaca judul

Media *online* atau versi *online* media arus utama sangat bergantung pada klik. Semakin banyak klik, semakin terbuka peluang mendapat iklan. Agar mendapat klik tinggi dari media sosial, judul harus dibuat semenarik mungkin. Sayangnya, semenarik mungkin itu bisa terjebak menjadi se-provokatif mungkin, yang sering kali melenceng dari isi berita. Judul berita provokatif tak selalu sama dengan isi berita. Karena itu jangan terkecoh oleh judul. Jika ingin menyebarkannya, baca dulu isinya. Pastikan judul dan isi memang selaras.

2. Cek dan *recheck*

Media boleh memihak. Itu hak media, namun berita yang diproduksinya harus taat kaidah jurnalistik. Pembaca, artinya kita semua, mesti lebih rajin melakukan cek dan *recheck* terlebih dulu sebelum menjadikannya sebagai referensi. Cek ke media lain, yang menjadi lawannya, bagaimana sudut pandang media tersebut terhadap hal yang sama.

3. Ikuti akun-akun terpercaya

Kita bisa berkawan banyak di Facebook, bisa mentok sampai 5.000. Kita bebas mengikuti orang lain di Twitter tanpa batasan jumlah, begitu juga di Instagram dan lainnya. Tapi hidup kita akan rumit jika informasi mengalir terlalu banyak. Teman di *Facebook* yang sebenarnya tak pernah kita kenal tapi membanjiri informasi layak di-*unfollow*, jika enggan untuk *unfriend*. Demikian pula di Twitter, *unfollow* saja akun-akun yang berisik dengan informasi tidak akurat. Lebih baik kita mengikuti akun-akun terpercaya, meski mereka berbeda pandangan dengan kita.

4. Saring via fasilitas penyaring di media sosial

Setiap media sosial memiliki fasilitas untuk menyaring informasi, termasuk menyaring kata kunci. Di Twitter, saya menyaringnya dengan cara lain: membuat daftar akun yang layak dibaca informasinya. Isinya beberapa akun, baik punya kesamaan maupun perbedaan pandangan mengenai isu tertentu, tapi jumlahnya terbatas, paling banyak 100 akun, agar informasi yang mengalir ke otak bersih dari sampah informasi.

Pengolahan informasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

- Pengumpulan data (mencari informasi);
- Memilah data atau informasi;
- Menyimpan data atau informasi;
- Mengambil kembali untuk diolah menjadi informasi baru;
- Mempresentasikannya;
- Menerima informasi yang baik dengan memperhatikan sbb;
- Hindari bersikap pasif mencari informasi;
- Berita maupun informasi yang muncul dan berkembang saat ini memang mengejutkan. Antara percaya dan tidak. Untuk itu, hindari yakin pada satu sumber berita saja. Kamu sebagai generasi muda harus mau mencari sumber berita lain untuk mengetahui kepastiannya;

- Abaikan informasi menyimpang;
- Semua orang bisa membuat suatu informasi, baik yang pro dan kontra dalam menghadapi suatu fenomena atau permasalahan;
- Hindari ikut perdebatan yang sensitif ;
- Saat ini banyak topik pemberitaan yang rentan menimbulkan suatu permasalahan. Meninggalkan komentar pun bisa berujung perdebatan yang pelik. Akibatnya, kamu bisa menggunakan perkataan sensitif dan negatif sebagai pertahanan diri.

Komunikasi yang Baik di Era Post-Truth

Secara etimologis menurut Hafied Cangara, komunikasi berpangkal dari kata latin *communis* yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara terminologi komunikasi adalah proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis, melainkan melalui Bahasa tubuh, gaya, penampilan, atau hal lain di sekelilingnya yang memperjelas makna (Liliweri, 2009:124).

Menurut Susanto komunikasi terbagi menjadi 5 konteks, yakni:

1. Komunikasi interpersonal (*intrapersonal communication)*

Merupakan proses komunikasi yang terjadi pada diri sendiri, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication)*

Karakteristik komunikasi antarpersonal menurut Richard L Weaver yaitu; minimal melibatkan 2 orang, adanya *feedback*, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh.

3. Komunikasi kelompok (*group communication)*

Komunikasi ini menitik beratkan pada interaksi antara orang-orang dalam kelompok kecil yang terdiri beberapa orang yang bekerja dengan tujuan Bersama.

4. Komunikasi organisasi (*organizational communication)*

Merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari organisasi. Pembahasan dalam komunikasi organisasi ini dititikberatkan pada struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi.

5. Komunikasi massa (*mass communication*)

Merupakan proses penciptaan makna yang sama di antara media massa dan para komunikannya (Susanto, 2010:12).

Komunikasi di zaman sekarang ini berkembang semakin cepat dan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi antar orang bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun menggunakan media sosial yang kian hari kian beragam. Namun, banyak pengguna media sosial yang menyalah fungsikan media sosial yang dipakai. Sebagai pengguna media sosial sudah seharusnya kita sebagai pengguna menggunakan fasilitas media sosial sebaik mungkin.

1. Pemanfaatan dan penggunaan internet yang benar di tengah-tengah *post-truth*

Masyarakat memiliki peran yang sangat tinggi sebagai pengguna media sosial atau internet. Sehingga dalam memanfaatkan internet masyarakat perlu bersikap idealis, yang mana mampu memperhatikan batasan-batasan atau selektif dalam penggunaan ataupun pemanfaatan yang ditimbulkan dari penggunaan internet yang belum bijak. Apalagi saat ini telah memasuki fase *post-truth* yang dengan begitu mudah banyak oknum yang sering memanfaatkan kondisi tersebut sebagai ajang mencari pembenaran dengan menggeser kebenaran yang sesungguhnya atas informasi yang di sebar-luaskan. Hal itu tentu sangat berbahaya, apalagi berita atau suatu informasi yang didapat masyarakat tidak valid dan juga tidak digali lebih dalam mengenai teoritisnya. bisa saja dengan mudah masyarakat terpancing dan terpengaruh dalam pemahaman dari adanya berita atau suatu informasi yang salah (hoaks).

Kepercayaan terhadap berita yang salah (hoaks) di era *post-truth* ini tentu menjadi persoalan secara global di berbagai negara. Yang mana hal itu dapat menimbulkan perasaan saling curiga antar suatu kelompok dalam masyarakat. Kecurigaan itulah yang dapat memicu terjadinya kesalahpahaman yang berakibat pada terjadinya konflik. Kepercayaan masyarakat yang kurang bijak terhadap kebenaran informasi sering kali dipahami hanya sebatas kebenaran berdasarkan perspektif masing-masing. Jika Suatu informasi dianggap benar dan dapat mempengaruhi emosi publik, maka itulah di yang dijadikan suatu anggap sebagai kebenaran dan tidak perlu lagi memedulikan dari mana dan bagaimana penyusunan informasi tersebut, sehingga keberadaan informasi di sini hanya sebatas abu-abu atau mungkin berlawanan dengan suatu peristiwa yang sesungguhnya atau fakta sebenarnya (Kuen, 2020:362).

Era *post-truth* ini begitu rawan karena bisa saja fase ini sebagai bentuk propaganda yang berkembang. Sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis terhadap media sosial atau media digital tentu sangat mudah untuk terprovokasi dan terpengaruh khususnya informasi yang berkaitan dengan dunia politik. Fenomena itulah merupakan bagian dari *post-truth*, di mana saat ini banyak dari kalangan mempercayai informasi sesuai dengan keyakinan atau perspektifnya saja seperti politik, agama dan semacamnya (Arifin, 2020: 385). Sehingga perlunya hati-hati dalam memahami serta menggali lebih jauh informasi yang tidak bersumber dari situs yang valid. Sebab penggunaan media sosial atau internet sembarangan, sama saja dengan membuka celah bagi pemilik kepentingan yang berkuasa yang dengan maksimal memanfaatkan masyarakat yang kurang teliti ketika bermedia sosial dalam mengendalikan opini publik.

Kemajuan teknologi khususnya internet justru sebenarnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai media cepat untuk berbisnis atau menggali informasi yang bermanfaat dan benar adanya. Upaya semacam itu hanya dapat dimulai dari kesadaran masing-masing individu yang mana melalui literasi digital diharapkan masyarakat justru semakin cerdas dan selektif dan dapat membangun budaya bijak bermedia sosial, meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis dan mampu menyikapi adanya era *post-truth* menuju masa depan yang lebih baik.

2. Beretorika yang baik di era post-truth

Retorika berasal dari Bahasa inggris *rhetoric* yang berarti ilmu berbicara atau seni berbicara di hadapan umum. Retorika adalah seni persuasi, suatu uraian singkat , jelas, dan meyakinkan. Dengan keindahan Bahasa yang didukung untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan (Effendy, 2003:4).

Semakin canggihnya komunikasi di era *post-truth,* pengguna harus bisa mengolah dan memahami berita yang pengguna peroleh. Karena orang-orang ataupun media massa yang membuat berita sudah pasti mereka memakai retorika dalam menulis berita. Hal ini dilakukan supaya para pembaca tertarik pada berita yang ia tulis. Dari persoalan tersebut kita sebagai pengguna media harus memahami karakteristik retorika di era *post-truth*.

Karakteristik retorika di era *post-truth* dibagi menjadi 4 karakteristik, yaitu:

1. *Logos,* digunakan sebagai instrumen justifikasi kebenaran sepihak dan juga dapat digunakan sebagai penyalahgunaan realita. Menurut Ilan Zvi Baron argumen yang baik adalah argumen yang disusun oleh seseorang yang memahami konteks dan tujuan.
2. *Ethos,*(kredibilitas), adalah pertunjukan kredibilitas yang tidak mempedulikan keaslian kredibilitasnya.
3. *Pathos,* dipahami sebagai kemahiran dalam memikat emosi *audiens.* Untuk memikat emosi *audiens pathos* menggunakan cara yang tidak etis seperti; *name-calling*, satir, mengutip berita bohong, penggunaan diksi-diksi yang *fallacy*, dan penggunaan diksi-diksi hiperbola.
4. *Bullshit,* orang yang melakukan *bullshit* tidak memedulikan kebenaran ataupun kebohongan. *Bullshit* ini dikatakan berhasil apabila; (1) *audiens* mempercayainya sebagai kebenaran. (2) *audiens* salah paham tentang motivasi si *bullshiter* (Haq, 2019:108).

3. Pentingnya literasi digital di era post-truth

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang pesat dan mengubah pola komunikasi antar manusia. Sebagai contoh dalam berkomunikasi, pada zaman dahulu untuk dapat menjaga kualitas dan intensitas komunikasi, setiap orang harus berinteraksi secara langsung melalui tatap muka, agar mendapatkan respons komunikasi secara timbal balik sehingga informasi yang disampaikan bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti hadirnya ponsel pintar membuat kegiatan komunikasi secara intens dan timbal balik menjadi sangat mudah dilakukan. Bahkan hanya dengan adanya fitur-fitur canggih yang telah tersedia, komunikasi bisa dilakukan secara langsung bahkan melalui tatap muka tanpa terhambat oleh ruang jarak dan waktu.

Semakin berkembangnya teknologi tentunya akan memberikan berbagai dampak pada kehidupan manusia, dampak positif perkembangan teknologi dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Namun, tak jarang hasil perkembangan teknologi memberikan dampak negatif juga bagi penggunanya. Pengguna hasil teknologi dituntut untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan baik dan tepat.

Post-truth di era informasi digital berlandaskan pada emosi dan keyakinan yang menjadi faktor utama dalam mencari kebenaran dalam sebuah informasi. Di era *post-truth*, informasi bohong dikemas seolah benar dan bisa menyentuh emosi khalayak. Rangsangan emosi

ini bisa memunculkan keputusan spontan yang dilakukan pembaca informasi. Tidak dapat dipungkiri fenomena *post-truth* berdampak pada munculnya istilah hoaks dan *fake news* di media massa maupun media sosial.

Era *post-truth* terlihat dengan memudarnya batasan benar dan salah, meleburnya keaslian dan kepalsuan, penuh tipu muslihat, semakin menyatunya kejujuran dan kebohongan sehingga pabrikasi ketidaktahuan bahkan ketidakpedulian menjamur. Informasi yang diterima dan yang beredar dianggap segalanya dan dijustifikasi benar. Era *post-truth* juga ditandai dengan meningkatnya signifikansi media sosial yang dijadikan sebagai sumber berita serta semakin besarnya ketidakpercayaan terhadap fakta dan data yang mengonsumsi dan menyebarkan informasi, namun juga melakukan pemilahan dan pemilihan informasi yang faktual dan akurat (Fatmawati, 2022, Vol.21). Pentingnya literasi digital tentu seiring dan sejalan dengan pentingnya karakter yang dimiliki oleh warga negara. Prinsip dasar pengembangan literasi digital, yaitu:

1. Pemaham, yaitu pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media;
2. Saling Ketergantungan, artinya antara media yang satu saling berkaitan dengan media yang lainnya. Media yang ada harus saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain;
3. Faktor sosial, yaitu antar media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi;
4. Kurasi, yaitu masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna (Pradana, 2018: 175).

Literasi digital yang mampu mengubah pola pikir masyarakat setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Pertama, arus informasi yang cukup banyak. Dengan banyaknya informasi yang disediakan oleh media digital, membuat masyarakat terlalu banyak memperoleh informasi secara bersamaan dalam hal ini penting adanya literasi digital untuk dapat mencari, menemukan, memilah serta memahami informasi yang benar dan tepat. Kedua adalah konten negatif. Dengan mudahnya mengakses segala hal dalam era digital

tentunya harus dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni, sehingga individu dapat mengetahui mana konten positif yang bermanfaat serta konten negatif yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Meningkatkan budaya literasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah dari ancaman di balik era *post-truth* menjadi salah satu yang paling utama, khususnya dalam bidang literasi digital. Dengan cara mengerti dan memahami informasi yang didapat mulai dari sumber, isi, penanggung jawab, dan mengetahui secara tepat hal-hal yang dilarang dalam dunia kepenulisan kita dapat dengan mudah memilih dan memilah informasi yang benar dan salah, serta belum terbukti kebenarannya.

Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung dan disiplin ilmu lainnya. Untuk dapat memenuhi tantangan pada masa kini setiap individu harus memiliki literasi digital yang mumpuni. Literasi digital adalah keterampilan (*life skill*) yang melibatkan tidak hanya kemampuan menggunakan teknologi informasi dan alat komunikasi, tetapi juga keterampilan sosial, keterampilan belajar dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreativitas, dan inspirasi sebagai kompetensi digital (Janner, dkk., 2021: 71).

BAB III
DAMPAK SOSIAL ERA POST-TRUTH

Post-truth merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antar manusia. *Post-truth* sendiri memiliki berbagai dampak bagi kehidupan manusia, salah satunya ialah dampak sosial. Peran manusia sangat penting di sini, guna membangun kerukunan antar-sesama yang di mana memasuki era *post-truth* pada saat ini. Dikarenakan banyak sekali berita-berita zalim yang mudah sekali diterima oleh masyarakat.

Masyarakat juga dapat dengan mudahnya mengemukakan pendapat melalui alat yang menjadi penyokong kegiatan *post-truth* saat ini. Tanpa ditelaah terlebih dahulu apakah pendapat tersebut sesuai kaidah atau tidaknya. Dan juga, masyarakat mudah menyerap informasi lalu disebarkan, tanpa difilter sebelumnya. Begitulah era yang dihadapi manusia pada saat ini. Sasaran yang mudah menelan informasi tanpa mencari tahu realitasnya biasanya ialah golongan yang gagap dalam teknologi. Mudahnya perkembangan zaman yang masuk, tanpa menyaring terlebih dahulu, merupakan bibit-bibit yang bisa saja menimbulkan adanya perselisihan.

Terlebih lagi umat Islam yang ada di Indonesia sendiri, sering kali menjadi sasaran bagi oknum-oknum yang tak ingin umat Islam bersatu. Sangat susah sekali untuk menolak perkembangan zaman pada era ini.

Media Penyebaran Post-truth

Media sosial menjadi pihak yang turut mempercepat dan memperluas penyebaran hoaks atau ketidakbenaran informasi. Selain merebaknya berita hoaks di media sosial menjadi tanda munculnya *post-truth*, kasus pemilu presiden Amerika Serikat 2016 menjadi bukti bahwa media dapat menyiarkan berita-berita bohong soal Donald Trump. Hal itu justru membuat nama Donald Trump semakin naik, populer, dan kebohongannya tersebar luas.

Hal ini akan menjadi berbahaya jika diaplikasikan di media sosial dan membuat banyak orang percaya. Untuk menghadapi berita semacam ini, *New York Times* membuat metode untuk melakukan pemeriksaan fakta atas setiap *statement* yang dikeluarkan oleh Donald

Trump. Kamus Oxford sampai menobatkan *post-truth* menjadi *word of the year*, dan mendefinisikan *post-truth* sebagai kondisi di mana fakta tidak berpengaruh terhadap opini masyarakat dibandingkan keyakinan dan emosi. Sederhananya, *post-truth* adalah era di mana kebohongan yang diulang ulang dan menyamar menjadi kebenaran. Di kala perkembangan teknologi informasi serta jaringan global seakan membuka peluang suatu akses informasi apapun melalui dunia digital, fakta dan fiksi yang seharusnya ada batasannya seakan kabur, di mana yang disebut ilusi dan mana realitas sudah tipis batasannya (Mahmud, 2021).

Di sinilah era post-modern atau sering di kenal dengan *post-truth* bangkit dan berkembang. Ciri-cirinya antara lain seperti berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat serta canggih melalui media internet, mulai dari browser, *Chrome*, dan masih banyak lagi. Namun masih ada penyebaran *post-truth* melewati media, seperti *Twitter, Facebook, Youtube*, dan *Instagram,* serta lewat gadget seperti *android*, *iphone*, dan masih banyak lagi.

Meluasnya informasi dari segala segi kehidupan manusia sebagai imbasnya percepatan teknologi yang membuat internet dan media informasi menjadi kanal yang hampir tidak bisa di kontrol. Terlihat perubahan yang drastis pada semua aspek kehidupan manusia post-modern inilah yang kemudian melahirkan istilah *post-truth society*. Yang disayangkan ialah fenomena *post-truth* merupakan gejala negatif dari modernisasi, yang berhasil menciptakan akses yang dapat memudahkan masyarakat, akan tetapi perkembangan tersebut memunculkan istilah disrupsi informasi di mana bisa saja menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia.

Peran sosial media menjadi sebuah pokok kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, di setiap manusia yang memiliki *smartphone* sudah dipastikan terinstal beberapa aplikasi sosial media, dan bahkan bisa saja menjadi satu di platform sosial media di mana satu orang bisa mempunyai banyak akun yang digunakan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Selain dipergunakan untuk sarana menggali informasi dan komunikasi, media sosial juga kerap digunakan sebagai sarana untuk media politik yang membentuk opini publik (Arifin, Nuhdi Futuhal, A. Juhar Fuad, 2020: 376-377).

Penggunaan media sosial terkadang tidak disertai tanggung jawab sehingga menjadi sarana penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar, *hoaks, ghibah, fitnah, gosip, ujaran kebencian, informasi palsu,*

pemutarbalikan fakta. Informasi ini merusak keharmonisan suasana sosial yang dapat menimbulkan mafsadat di masyarakat (Fatwa MUI, 2017).

Kondisi pertumbuhan pengakses media sosial di internet di Indonesia tidak bisa dipandang rendah karena Indonesia saat ini berada pada peringkat tiga dunia. Terpaut sedikit dengan China yang sebesar 25.4 juta dan Indonesia sebesar 25.3 juta pengakses dalam setahun. *YouTube, Instagram* dan *Facebook* menjadi aplikasi media sosial teratas yang paling banyak diakses (Bagus Ramadhan, *teknoia.com*, 2021).

Aplikasi *WhatsApp* adalah aplikasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, semua masyarakat yang mempunyai *smartphone* pasti mempunyai aplikasi ini. Aplikasi tersebut digunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi, dan dapat digunakan untuk berbagi foto, video, dan berkomunikasi langsung melalui *WhatsApp call. Post-truth* juga tersebar melalui aplikasi tersebut, bukan hanya *WhatsApp* saja, melainkan juga melalui aplikasi komunikasi lainnya.

Melalui aplikasi tersebut, terdapat kebebasan untuk membuat grup atau kelompok yang memiliki berbagai tujuan, dari grup atau kelompok tersebut mereka dapat berbagi berita, gambar, video dan informasi lainnya. Karena kemudahan inilah seseorang dapat bergabung lebih dari satu kelompok yang di dalamnya terdapat belasan, puluhan bahkan ratusan anggota.

Dalam ruang percakapan dan informasi di media sosial tersebut seperti *Facebook, Whatsapp ataupun Twitter,* dan lain-lain merupakan aplikasi yang rawan tersebar hoaks. Melalui aplikasi ini, seseorang reaksi seseorang atau kelompok dapat segera diidentifikasi ketiga dalam suatu pesan terdapat sebuah hoaks yang diunggah dalam percakapan tersebut. Pesan itu dapat dikoreksi oleh anggota lain, tetapi terkadang juga dapat menimbulkan konflik, biasanya muncul ketika topik tersebut membahas tentang politik atau agama. Tidak jarang pesan atau unggahan tersebut membuat resah anggota grup lainnya yang membuat anggota dan kelompok lain keluar dari grup.

Meskipun di antara anggota di dalam grup meminta agar di grup tersebut tidak membicarakan tentang politik, namun hal tersebut sulit terealisasikan dan tidak pernah terwujud. Dari beberapa pengalaman dapat disimpulkan bahwa orang yang aktif informasi adalah anggota kelompok yang memiliki literasi digital yang baik. Mereka mampu berbagi pesan dan informasi ke dalam kelompok percakapan. Mereka aktif dalam berbagi pesan dan terlibat penyebaran hoaks yang

disengaja. Dan ini menjadi salah satu penyebaran hoaks dalam era *post-truth* (Rianto, 2019).

Kebebasan dalam berpendapat dan mengunggah informasi yang disediakan oleh media sosial sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, yang merusak daya sosial yang dapat melibatkan emosi target menjadi pemicu ledakannya. Sementara itu, kesalahan masyarakat milenial adalah menerima sekilas informasi tanpa adanya pencarian kebenaran atau telaah terlebih dahulu dalam informasi yang diterimanya.

Tidak jarang juga hanya dengan membaca judul informasi yang bombastis tanpa tahu dan paham isinya sudah langsung membagikan informasi tersebut. Penerima informasi seakan tidak perlu tahu benar atau tidaknya informasi yang didapat tersebut. Dengan demikian, masyarakat secara tidak sadar dijauhkan dari fakta yang sebenarnya.

Keengganan masyarakat untuk mencari kebenaran suatu informasi yang sedang panas atau heboh. Dapat dilihat survei pada 2019 ditemukan sebanyak 55,8% responden mengira sudah mengira adanya sistem yang memeriksa benar atau salahnya suatu informasi yang sudah tersebar sehingga menurut mereka informasi yang diterima akurat. Responden yang tidak mau tahu kebenaran suatu informasi dan berasalan ribet, repot atau sibuk sebesar 37,7%. Terdapat 6,50% kelompok yang sayang kuota untuk mengecek kebenaran suatu informasi (Mastel, 2017).

Hoaks tidak bisa dipandang sebelah mata, hoaks sering kali digunakan sebagai senjata untuk kepentingan suatu kelompok sosial atau politik tertentu, seperti pada 2016 adalah momen *post-truth* terheboh yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan Donald Trump yang terpilih menjadi presiden. Penyebaran hoaks digunakan untuk membentuk opini publik agar dianggap benar, dan hampir di setiap media dapat dijumpai hoaks tersebut (Juvano, 2021).

Di media sosial terdapat algoritma yang dimasukkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku penggunanya. Algoritma dapat mencatat kecenderungan informasi yang sering diakses atau dicari oleh pengguna di antara *timeline* yang setiap detik bertambah oleh informasi baru. Hal ini mempunyai tujuan untuk memunculkan informasi atau iklan yang sesuai keinginan pengguna media sosial.

Adanya logaritma inilah yang kemudian disalahgunakan oleh suatu oknum atau kelompok untuk kepentingan sepihak, yang biasanya membahas tentang agama, politik dan lain-lain. Hal ini yang menjadi

semangat para *buzzer* dan bot untuk menjadi *trending* topik di media. Semakin banyak yang memperbincangkan topik tersebut maka algoritma secara otomatis mencatat dan mengangkat topik tersebut sehingga muncul di beranda lebih intens (Kharisma Dhimas Syuhada, 2017).

Potensi disinformasi di media sosial yang tidak relevan, terfragmentasi, membuat penggunanya terilusi seolah-olah menjadi orang yang paham segala hal, merasa tahu dan berhak berkomentar. Munculnya *citizen journalism* membuat informasi atau opini menjadi terekspos secara mudah yang bahkan dapat menjadi pemicu konflik. Masyarakat juga sangat berperan membentuk opini publik dan menjadi produsen suatu informasi di media sosial (Eddy Cahyono Sugiarto, 2018).

Di dalam hidup seseorang pasti terus didorong untuk selalu mencari kebenaran dan tidak boleh keluar lingkaran kebenaran, kurang lebihnya untuk para jurnalis atau akademisi. Ketika seseorang mencari kebenaran, dapat dipastikan berhadapan dengan banyaknya fakta yang memaparkan kebenaran.

Kehadiran *Post-truth* di Indonesia yang tersebar luas di pengaruhi oleh media informasi atau media sosial. karena di saat ini medsos memiliki pengaruh yang sangat besar dan luas untuk menyebarkan sesuatu. Fungsi medsos antara lain seperti tempat untuk menulis di media massa, menghimpun pertemuan *online* salah satunya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa *Post-truth* sangat berkesinambungan dengan emosional seseorang, karena emosional itu sudah mengalahkan faktor lainya, contohnya status ekonomi, pendidikan, dan agama (Dina Fitri Anisa, 2021).

Medsos menjadi sebuah ladang untuk perkembangan teknologi yang sangat pesat menurut Del Vicario dan Sheikh dalam utami, berpendapat bahwa medsos mempunyai fungsi untuk tempat penyebaran informasi secara meluas. Dan juga menjadi tempat berkumpulnya publik yang mempunyai minat atau tujuan yang sama, di medsos pengguna dapat membuat suatu video atau konten menjadi viral hanya dengan menyebarkan video lewat media sosial yang mana medsos di sini memiliki peran dalam mendapatkan simpati orang lain.

Dalam Media sosial seperti *twitter* semisal, salah satu media sosial ini memiliki banyak pengguna dan menjadi salah satu tempat untuk bertukaran informasi. Di dalamnya sangat banyak sekali fitur yang membuat penggunanya tertarik untuk mencobanya. Kemudian menjadi salah satu sarana untuk menuangkan ide-ide gagasan, opini dan keterlibatan diskusi. Kecepatan media *twitter* di dalam

mengunggah informasi bagi penggunanya membuat sebuah fiktif atau isu yang dapat tersebar secara cepat. Karena di sini *twitter* sangat bisa untuk menampung banyaknya informasi serta berbagai sumber salah ataupun baik dan benar. Di situasi yang seperti inilah terkadang publik sering terperangkap dalam lingkaran emosional untuk mempercayai informasi yang tertera ketimbang memakai fungsi akalnya untuk berpikir secara jernih.

Trending topic atau berita viral dalam media sosial seperti *twitter* kerap sekali membawa isu-isu yang berbau sensitif, salah satunya seperti politik karena isu-isu inilah yang dapat memancing publik untuk terlibat di dalam situasi yang mana kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya pro dan kontra. Dapat di pastikan bahwa seorang pengguna *twitter* itu juga akan menyampaikan opininya terkait isu tersebut untuk memenangkan ideologi politiknya sendiri (Dyah Winahyu Rizki, 2020). Dapat diambil kesimpulannya bahwa semua media sosial kemungkinan besar juga pasti persis sama seperti *twitter*, sangat mengerikan dan tidak ada kata mengalah sebelum pendapatnya didengarkan atau disanggah oleh orang yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaruh Post-Truth terhadap Masyarakat

Post-truth adalah kondisi di mana kebenaran objektif tidak lagi memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Kebenaran objektif sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebenaran bukan lagi kesamaan antara apa yang dipikirkan, diinformasikan dengan apa yang ada dalam kenyataan sebagaimana yang digabungkan oleh para filsuf, melainkan sangat tergantung pada banyaknya dukungan dari masyarakat atas informasi yang diberikan. Meskipun informasi tersebut belum diketahui secara jelas kebenarannya. Fenomena *post-truth* menghadirkan jenis fakta atas suatu peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan pengirim berita. Proses kerjanya sangat difasilitasi oleh kecanggihan teknologi informasi digital. Dalam konteks alam sosial politik kekuasaan yang saling berebut ruang pengaruh atas penguatan identitas kolektif dewasa ini, fasilitasi teknologi informasi justru memperkuat dan mempercepat penyebaran fenomena *post-truth* sehingga berpotensi dan berpeluang untuk memecah belah sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat multikultural (Wera Marz, 2021).

Apabila kita telusuri sejarahnya bahwa kata hoaks ini sudah muncul sejak 1808. Pada saat itu istilah hoaks sering diterjemahkan

sebagai tipuan oleh para ilmuwan. Dan di era post-truth sekarang ini, fenomena penyebaran informasi hoaks semakin hari semakin parah karena kemudahan mengakses informasi di internet.

Kenapa hoaks dibuat? Karena dianggap mampu mempengaruhi seseorang melalui sebuah gambar, dapat memunculkan rasa takut dan ancaman pada *basic instinct*, sehingga menimbulkan reaksi primitif (menyerang *Croc Brain/Amidala*). Mengakibatkan menumpulnya *neo cortex* (pikiran waras), sehingga berpikiran tidak rasional dan mudah diarahkan. Menurut hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), masyarakat yang fanatik lebih mudah terkena hoaks (Anshar T., 2021).

Penggunaan internet pada zaman milenial menjadi ajang "perang komunikasi politik". Media sosial digunakan sebagai senjata disinformasi untuk berbagai kepentingan. Muncul *cyber troops* atau *cyber army* sebagai komponen penting dalam perang komunikasi, dan masyarakat menjadi mudah larut, tersentuh emosi dan terlibat perang komunikasi. Golongan paling besar dari pembagian hoaks adalah misinformasi, disinformasi dan mal-informasi. Misinformasi merupakan informasi salah yang disampaikan baik sengaja maupun tidak. Sedang disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Mal-informasi adalah informasi yang memang memiliki kebenaran baik berdasarkan penggalan atau keseluruhannya, namun penyajiannya dikemas dengan bentuk yang dapat merugikan pihak lain atau kondisi yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.

Siapa pun, kapan, dan di mana pun, bisa mengakses dan kemudian menyebarkan informasi yang tidak benar secara cepat dan mudah melalui media-media sosial: *WA*, *Instagram*, *Facebook*, *Line*, dan media sosial lainnya. Internet mengizinkan satu miliar bunga mekar, namun sebagian besarnya berbau busuk, mulai dari pikiran iseng para penulis blog, teori konspirasi, hingga penyebar hoaks. Tambahan pula, internet bukan hanya membuat kita makin bodoh, tapi juga lebih kejam. Di dunia maya sebagian dari kita tak ingin menguji informasi, berdiskusi dan berdebat sehat, tetapi mengecilkan opini orang lain yang berbeda, menghina, dan menyerang. Anda berkelana sampai menemukan kesimpulan yang Anda tuju. Anda meng-klik laman demi pembenaran, dan keliru dalam membedakan jawaban dengan kekuatan argumen.

Kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi tersebut sadar atau tidak, justru akan merusak cara pandang, perilaku dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, informasi yang kita

sebarkan justru memberikan dampak positif dan negatif, baik terhadap pemberi informasi, maupun terhadap penerima informasi tersebut.

Dampak hoaks tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sering kali hoaks digunakan sebagai senjata ampuh bagi kepentingan politik tertentu, seperti halnya awal kemunculan *post-truth* pada momen politik terheboh pada 2016, yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Cara-cara lama untuk melakukan penetrasi, intimidasi, indoktrinasi kepada masyarakat kini beralih dalam wadah media sosial. Penyebaran hoaks dengan gencar dilakukan untuk membentuk opini yang dianggap benar oleh publik, hampir di semua platform media sosial bisa dijumpai sebaran hoaks tersebut.

Meskipun dalang kepentingan dari penyebaran hoaks tersebut dapat dikerucutkan, namun untuk dapat melakukan penyebaran secara masif mereka mempunyai pasukan khusus yang mengoperasikan akun-akun media sosial palsu untuk menguatkan sebaran hoaks yang dibuatnya. Para pengendali akun palsu ini kemudian dikenal dengan pasukan *bot* atau *buzzer*, mereka merupakan tim yang dibayar untuk membentuk opini masyarakat lewat hoaks bagi kepentingan pemesan citra. Hal ini terlihat dari penelitian data yang dilakukan Soroush Vosoughi seorang ilmuwan data MIT selama rentang 12 tahun menemukan 126.000 topik berita palsu dibagikan di *Twitter* 4,5 juta kali oleh sekitar 3 juta orang (Edo Juvano, 2021).

Sementara itu, dari data Kemenkominfo, sepanjang tahun 2017 ada 800.000 akun palsu yang sering menyebarkan hoaks. Kominfo mengidentifikasi ada 486 hoaks sepanjang April 2019. Jadi, total ada 1.731 hoaks dalam jenjang waktu antara Agustus 2018 sampai April 2019. Hoaks kembali meningkat ketika jelang Pemilu pada 17 April 2019. Pada Agustus 2018 tercatat 25 konten hoaks, naik menjadi 27 konten hoaks pada September 2018. Sementara pada Oktober dan November 2018, beranjak ke angka 53 dan 63, Desember 2018, terus naik diangka 75. Bahkan, sejak 2016 terus mengalami peningkatan yakni 14 konten hoaks, 2017 meningkat jadi 281, sementara tahun 2018 meningkat jauh menjadi 1440 konten hoaks (Kemkominfo, 2020).

Oleh karena itu, Osler di dalam Juliswara mengusulkan pentingnya edukasi masyarakat agar dalam mengintegrasikan dirinya menuju peradaban digital, setiap warga negara mengembangkan sikap yang bertanggung-jawab dalam mengelola informasi dan kebebasan hak (Vibriza Juliswara, 2017: 142).

Dari uraian di atas maka dapat diketahui dampak negatif dari *post-truth*. Beberapa dampak *post-truth*, sebagai berikut:

1. Susah percaya kepada orang lain

   Dampak ini terjadi akibat terlalu banyak berita yang tidak pasti antara benar dan salah sehingga banyak orang yang kurang mempercayai orang lain. Selain itu, sulit menaruh kepercayaan pada orang lain karena rasa khawatir akan kebenaran dan keburukan yang sangat sulit dibedakan.

2. Berpikiran buruk terhadap orang lain

   Dampak ini biasanya terjadi dan berkaitan dengan dampak pertama yakni susah mempercayai orang lain sehingga dapat mengakibatkan seseorang berpikiran buruk terhadap orang lain.

3. Susah membedakan antara yang benar dan yang salah

   Dampak ini biasanya terjadi jika penyebaran hoaks lebih banyak dari pada berita yang benar. Masyarakat pun akhirnya lebih memilih percaya pada berita yang lebih banyak dibicarakan.

4. Takut akan perbedaan

   Dampak ini diakibatkan oleh pendapat apa yang menurut kita benar berbeda dengan pendapat orang lain yang mungkin telah mempercayai berita hoaks.

5. Emosi tidak stabil

   Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut:

   - Kurang Tidur

     Tidur menjadi waktu tubuh dan otak beristirahat agar energi tubuh bisa kembali sepenuhnya, tubuh perlu beristirahat dan tidur selama kurang lebih delapan jam. Meski demikian, masih banyak orang yang menyepelekan waktu tidur dengan sering begadang. Akibatnya, tubuh pun akan kurang fit, lesu, dan kepala yang sering pusing. Rasa lelah tubuh ini akan membuat seseorang menjadi emosional.

     Kurang tidur yang diakibatkan karena memikirkan berita yang baru kita lihat atau dengar, berita buruk atau berita yang kurang mengenakkan tentang seseorang yang kita kenal.

   - Kondisi Tubuh

     Saat kita kurang tidur maka tubuh akan kekurangan energi dan kondisi pun akan menurun.

- Stres

  Tidak dapat dimungkiri jika stres adalah penyebab utama seseorang memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung berlebihan. Ada hal yang mengganggu pikiran kita, dapat memicu stres.

6. Memicu masyarakat untuk menyebarkan

   Saat banyak orang yang telah percaya pada suatu berita yang tersebar, tak ayal akan banyak juga yang akan menyebarkan. Berakibat pada semakin luasnya orang yang membaca berita hoaks tersebut.

7. Dapat mempengaruhi anak-anak

   Anak-anak lebih mudah untuk terkena doktrin-doktrin dari berita, entah itu benar maupun tidak benar. Sedangkan, sekarang banyak anak yang dengan mudah mengakses berbagai platform media sosial tanpa pengetahuan (pengawasan) orang tua.

Besarnya dampak kerugian yang disebabkan tren *post-truth* di media sosial, mau tidak mau harus ada yang membangun kembali kesadaran kritis masyarakat supaya lebih peka terhadap bentuk berita hoaks di media sosial yang menyajikan segalanya serba cepat. Perlu sinergitas semua pihak untuk meminimalisir kebohongan yang menjadi ciri dasar dari *post- truth*, sebagai pengguna media sosial, harus cerdas memilah dan memilih sumber berita yang terpercaya dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Bagaikan keping mata uang, media sosial menghasilkan dampak positif dan negatif. *Post-truth*, hoaks, ujaran kebencian, dan opini liar merupakan bagian dari tantangan di era disrupsi saat ini. Kemampuan berpikir kritis yang mampu menimbang dengan jeli fakta demi fakta, sangat dibutuhkan untuk bertahan dari gempuran informasi *post-truth*. Tetap kedepankan etika dalam bermedia sosial, meskipun aktivitas dunia maya namun dampaknya sangat terasa di dunia nyata.

Kita seperti dikondisikan untuk mengabaikan verifikasi kebenaran yang berdasar pada akal sehat. Beragam bentuk media sosial yang mudah dan gampang diakses oleh setiap individu membuat kebohongan mudah menyelinap melalui kebingungan publik karena ragam informasi. Sisi lain literasi yang lemah, mengakibatkan orang tidak bisa lagi membedakan antara opini, fakta, dan analisis. Di penghujung fenomena ini, keragaman identitas kultural kita mudah terpolarisasi oleh ideologi tempelan yang masuk melalui berbagai macam gerakan

samar, bahkan ketegangan dan konflik identitas pun makin menguak (Marz Wera, 2020).

Contoh dan Munculnya Post-Truth

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat informasi jadi jauh lebih ramai menjadi perbincangan, yang artinya saat ini putaran informasi bergerak secepat itu. Berubah, bergerak, bertambah, dan berkembang biak, arus ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan yang akhirnya membuat kita merasa kalau kebohongan tadi adalah kebenaran, kesimpangsiuran informasi dan susahnya membedakan antara fakta dan bukan ini sedikit banyak membuat kita memiliki keraguan dengan keaslian sumber informasi, sehingga kita akan memunculkan persepsi kebenaran sesuai versi kita sendiri, kita seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yang seperti itu saja. Kita seperti dipersulit untuk melihat keluar dari gelembung, dan setiap orang terperangkap dalam gelembungnya masing-masing, wajar apabila *filter bubble* adalah faktor penting dalam semakin berpengaruhnya *fake news*, *hoaks*, dan *hate speech* (Pariser 2011, Rader dan Gray 2015).

Contoh gampangnya gini:

Kamu lagi naik motor ke restoran makan sore, tapi kamu enggak tahu jalan. Maka biar tahu, kamu buka aplikasi *google maps*. Setelah buka, kamu tahu "Oh, Makan Sore tinggal lurus, lalu *belok kiri."*

Begitu mendekati perempatan, jalanan yang kamu lewati kosong. Hanya terdiri dari rumah penduduk dan enggak ada tanda-tanda restoran. Kamu pun mulai ragu sama si *google maps*. Tidak berapa lama, di pinggir jalan ada orang bawa spanduk bertuliskan "*Restoran Makan Sore Belok Kanan*".

Kamu makin bingung dong. Padahal sebelum berangkat kamu udah *browsing* dan liat peta. Restoran itu berada di kiri, tapi kok kata orang ini belok kanan? Kamu memelankan kendaraan. Eh, di belakang dia ada tiga orang lain bawa spanduk sama: "*Kenyang Banget Nih Abis Makan Di Makan Sore! Posisi Di Kanan Anda!*" Semakin menuju perempatan, orang- orang yang bawa penunjuk kalau Makan Sore ada di kanan makin banyak. Tidak hanya memberikan posisi restoran yang *Ada Di Kanan*, biar orang percaya, mereka juga menambahkan informasi lain kayak *review*, ngasih tahu fasilitas restorannya, serta jam buka dan tutupnya. Hasilnya: kamu jadi ragu. Mana nih yang bener ya?

Bukan enggak mungkin gara-gara orang dan spanduk ini, di perempatan nanti, kamu beneran kepancing untuk belok kanan. Padahal, semua orang dan spanduk tadi adalah berita hoaks yang memang direncanakan untuk menipu kamu.

Kemunculan *post-truth* sendiri kebanyakan bersamaan dengan adanya masalah yang terkait dengan permasalahan politik dan adanya orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari permasalahan tersebut. Kemudian disebarkan berbagai informasi terkait permasalahan yang terjadi, namun dari sudut pandang maupun opini yang menguntungkan bagi orang tersebut, yang kemudian informasi tersebut dianggap benar oleh masyarakat umum karena dianggap benar sesuai kejadian yang terjadi dan banyak yang mengabarkan serupa, tanpa mengetahui kebenaran ataupun bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Penggiringan opini publik inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan antar-satu orang dengan orang lainnya, dan memunculkan persepsi kebenaran sendiri di antara masyarakat, dan berdampak pada munculnya kesalahpahaman terhadap satu peristiwa.

Tendensi tren masyarakat ke ranah media sosial telah berkontribusi pada gencarnya dunia *post-truth* selama beberapa dekade terakhir. Tampak dari elite politik di beberapa penjuru dunia yang menggunakan wahana media sosial untuk memanipulasi paradigma masyarakat melalui fakta alternatif ataupun gosip jahat tentang lawan dengan asumsi sedikit bukti sehingga mendorong penyebaran kebodohan. Media sosial sebagai bagian dari *new media* telah memberikan pemahaman baru bahwa kekuasaan bekerja di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ruang virtual. Sejalan dengan itu, Shapiro (1992) mengatakan bahwa dalam pembentukan suatu wacana diperlukan adanya politik ruang (*a politics of space*) sebagai ranah pertarungan wacana terjadi; wacana utama (*main discourse*) dengan wacana tandingan (*counter discourse*). Media sosial menjadi alat yang menanamkan konsep kebenaran dan memungkinkan penciptaan rezim wacana yang berpotensi membingkai kepentingan menjadi sebuah fakta. Implikasi yang sangat mungkin terjadi adalah terbentuknya ekosistem media sosial yang diproduksi dan bersifat hierarkis (Mochamad Iqbal Jatmiko, 2019: 23).

Dari beberapa pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa *post-truth* sendiri merupakan pandangan benar mengenai suatu peristiwa yang bersifat subjektif berdasarkan pada emosi tanpa mengetahui faktanya di lapangan, dan tentunya beberapa *post-truth* dapat muncul sebagai bentuk pembenaran terhadap suatu peristiwa maupun tindakan

dalam melakukan sesuatu dan kebanyakan muncul bersamaan dengan sesuatu yang bersifat politik, Karena itu, tak heran apabila banyak opini masyarakat yang digiring menuju suatu kebenaran emosional tertentu tanpa melihat realita yang ada. Hal ini terjadi bersamaan dengan adanya permasalahan politik, dan tentunya bersamaan pula dengan beberapa berita ataupun informasi di internet berdasarkan opini-opini yang ada.

Melalui diskursus tanpa data, persepsi masyarakat direkonstruksi dan secara bertahap fakta alternatif diciptakan sehingga *post-truth* berlangsung, budaya politik *post-truth* ditandai oleh perspektif relativis yang merendahkan klaim kebenaran dari pendirian politik dan arus utama media, seluruh kebenaran dianggap sebagai opini atau ungkapan kepentingan pribadi yang tersembunyi. Dengan begitu, opini-opini yang diterima masyarakat maupun yang tersebar ke dalam masyarakat sudah digiring jauh dari kebenaran yang sebenarnya, dan pemikiran-pemikiran liar di masyarakat menjadi semakin tidak terkendali, dengan begitu banyak kebohongan-kebohongan yang terkait pada permasalahan politik akan terus berlangsung sampai muncul opini-opini lainnya terhadap permasalahan yang sama. Dengan begitu, banyak informasi yang salah telah diterima masyarakat dan menganggapnya sebagai suatu informasi yang benar. Inilah sulitnya mencari kebenaran tentang suatu permasalahan, terutama saat muncul berbagai opini yang menggiring persepsi masyarakat ke arah yang jauh dari realita yang sesungguhnya. Apalagi saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi terutama internet sehingga banyak bermunculan *post-truth* yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Penekanan pada pemikiran kritis disajikan oleh seseorang sebagai bentuk memberikan metode untuk mengidentifikasi informasi berkualitas tinggi yang ditemukan melalui sumber lain. Karena itu, sebagai kelanjutan dari rezim kebenaran, namun penekanan pada pemikiran kritis juga dapat menjadi bukti munculnya individualisme, dengan fokus pada tanggung jawab individu. Sampai taraf tertentu fokus pada individu ini dapat dilihat ada dalam hubungan instrumental antara program literasi informasi, pemikiran kritis, tugas penilaian dan nilai. Di sisi lain seperti yang ditunjukkan oleh Rivano Eckerdal (2017), bahwa hal tersebut bukan bukti pergeseran ke arah individualisme dari rezim pasca kebenaran, melainkan bukti dari pandangan demokrasi umumnya disebut sebagai demokrasi liberal, di mana penekanannya adalah pada tanggung jawab individu untuk membuat keputusan yang baik (Indah Rachma Cahyani, 2020: 20), yang artinya dengan liarnya

pemikiran masyarakat tanpa mengetahui realitas yang ada dan arahnya didasarkan pada emosi dan opini sensasional bisa mengarahkan pandangan masyarakat ke arah liberal tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait pada peristiwa tersebut. Apalagi permasalahan pada kemunculan *post-truth* ini akan lebih berdampak kepada religiusitas atau tingkat nilai spiritualitas seseorang. Ini terjadi bukan karena sebab yang tidak jelas, tentunya ada beberapa sebab yang menjadikan kemunculan *post-truth* berpengaruh terhadap nilai spiritualitas seseorang ataupun religiusitas seseorang. Berikut ini beberapa hal terkait kemunculan *post-truth* yang berpengaruh terhadap religiusitas:

1. Masyarakat lebih suka terhadap suatu berita yang menghebohkan dan sensasional sehingga untuk mencari keuntungan tersebut, beberapa awak media melebih-lebihkan suatu pemberitaan;
2. Masyarakat cenderung memiliki opini tersendiri dalam menyimpulkan suatu informasi ataupun pemberitaan yang terkait suatu masalah, yang memungkinkan kemunculan prasangka buruk yang kemudian akan memunculkan fitnah, karena dugaan-dugaan tidak jelas seperti itu;
3. Terjadinya kemungkinan perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari suatu pemberitaan yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya realita sosial di dalamnya, dengan pengabaian realita yang ada sudah termasuk bentuk penggiringan opini publik yang akan menimbulkan permasalahan apabila tidak ada pembenaran secara jelas;
4. Adanya kerugian yang dialami seseorang ataupun kelompok tertentu karena kemunculan *post-truth* yang berbeda dari realita yang ada, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat

Itulah beberapa pengaruh kemunculan *post-truth* yang dapat mempengaruhi tingkat religiusitas seseorang maupun nilai spiritualitas seseorang. Semua itu bisa timbul akibat perbedaan persepsi dan masuknya opini pribadi di dalamnya karena *post-truth* cenderung menilai sesuatu secara subjektif dan melebih-lebihkan sehingga berbeda dari yang aslinya.

Masyarakat abad 21 ini memiliki kecenderungan untuk mudah terpolarisasi akibat arus balik informasi yang hampir tak terpetakan dan tanpa kendali, dalam arus seperti ini, polarisasi dihiasi politik identitas menjadi pesona yang makin menguat dengan proses yang

cukup jelas, hal ini tak terhindarkan karena gejala *Post-truth* menandai adanya benturan peradaban yang memungkinkan terbukanya ruang perebutan atas pengakuan akan identitas kolektif, yang dengan sistematis diamplifikasi secara cepat lewat bantuan teknologi informasi digital, yang juga merenggut sikap kritis dan rasionalitas.

Informasi menjalar bukan untuk menangkap apa yang diharapkan, melainkan dari mana harapan itu diarahkan kepada publik untuk menghidupkan emosi sosial berupa ujaran kebencian, kita bisa melihat itu melalui *headlines* yang menjebak dan punya daya pikat sensasi. Seiring dengan itu, nalar kritis masyarakat dalam mencermati kebenaran justru mengalami kelemahan sehingga pada intinya bekerja dengan jeli oleh pembuatnya dalam melihat keinginan atau daya tarik masyarakat terhadap fenomena sosial, budaya, politik, demi meyakini apa keinginan masyarakat. Fenomena ini persis kebalikannya, bahwa rasionalitas berupa nalar kritis yang merupakan ciri khas mentalitas ilmiah justru terhimpit, banyak yang berubah. Sebaliknya, kalau soal Indonesia, mentalitas ilmiah berarti berpegang pada data dan fakta, sementara perlawanan sebaliknya mengabaikan data dan fakta yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

Dengan begitu, sudah seharusnya memiliki sikap yang sewajarnya dalam menyikapi kemunculan *post-truth* ini terutama pada era sekarang ini yang semuanya sudah serba digital dan mudah tersebar ke segala penjuru dengan cepat. Begitupun kemunculan *post-truth* juga akan lebih cepat tersebar ke berbagai penjuru yang ada di masyarakat tanpa memandang siapapun sehingga banyak orang dari segala kalangan memunculkan berbagai opini sebagai akibat dari kemunculan *post-truth* tersebut.

Post-Truth dan Tantangannya dalam Menjawab Problematika Pandemi

Saat ini komunikasi informasi ilmiah menghadapi tantangan baru, ilmu pengetahuan yang dulu dianggap sebagai media yang tepat untuk menginformasikan politisi tidak lagi berbobot seperti dulu. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan informasi untuk diekspos dan dikomentari di media massa. Mulai 2016, kami melihat situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam mengarahkan opini publik untuk menarik perasaan atau keyakinan pribadi mereka yang konsisten dengan penyangkalan artikel bereputasi oleh para ahli, elite, ataupun pejabat pemerintah, di mana peneliti ilmiah telah diuji dan

dibentuk media arus utama. Hal ini sering kali menjadi tantangan untuk mendorong massa, terutama ketika mengkomunikasikan kebenaran tentang perubahan pendapat kepada publik. Di era *post-truth*, kita melihat kebohongan, propaganda, dan berita bohong yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang makna sebuah wacana.

Kita hidup di era pasca-kebenaran di mana kepalsuan, setengah kebenaran, dan kebenaran merajalela. Saat ini, siapa pun dapat membuat situs web, artikel, atau posting blog pribadi yang mengklaim kebenaran pemikiran atau keyakinan mereka. Sebagai profesional informasi yang baru muncul, pustakawan telah merefleksikan jenis keterampilan yang dapat mereka tawarkan kepada pengguna untuk membantu mereka menavigasi informasi di era pasca-kebenaran. Beberapa pustakawan mengembangkan literasi informasi dan menyediakan akses ke sumber terpercaya, mendorong pemikiran kritis, mencatat bahwa berbagi informasi menjadi kekuatan kutub perubahan positif di masyarakat.

Alternatif lain adalah pustakawan dapat membantu meningkatkan literasi informasi publik dengan menyediakan akses ke arsip dan penelitian yang bereputasi baik. Berpikir kritis tentang informasi dan sumber informasi adalah keterampilan lain yang dapat diajarkan kepada pengguna agar mereka (pengguna) tahu bagaimana berpikir kritis tentang di mana dan bagaimana mereka mengakses informasi. Pustakawan semakin dibutuhkan saat ini, apalagi pustakawan diposisikan sebagai agen perubahan positif dengan membekali masyarakat dengan keterampilan mengakses informasi dengan baik. Sudah saatnya kali ini untuk proaktif dan kritis dalam menangani masalah berita palsu (hoaks) dengan keterampilan komunikasi yang baik ke depan.

Gangguan *post-truth* yang sangat mendasar adalah hilangnya autentisitas. Dari segi konten, *post-truth* dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan keaslian suatu informasi. Jika *post-truth* dibawa oleh wartawan, publik tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika peneliti melakukannya, pembaca mungkin bertanya-tanya apakah laporan yang ditulis peneliti itu sejarah benar atau catatannya sendiri tentang subjek penelitiannya. Jika ilmuwan atau cendekiawan melakukan *post-truth*, teori yang mereka bangun kehilangan objektivitas, dalam arti bahwa mereka tidak dapat diuji ulang. Paradigma ilmu pun bisa berubah menjadi dogma keyakinan. Jika *post-truth* dipimpin oleh pejabat dan pendukungnya atau penantang, kita bisa kehilangan autentisitas dalam pilihan pemimpin. Konsekuensinya, dapat berakibat fatal bagi kehidupan sosial orang-orang yang dipimpinnya.

Untuk itulah kita perlu hidupkan kembali *science communication*. Dalam arti praktis, komunikasi ilmiah berarti mengkomunikasikan pengetahuan, teori atau hasil penelitian melalui berbagai metode dan media. Sebagai antitesis dari *post-truth*, komunikasi ilmiah juga dapat dipahami sebagai suatu strategi di mana ketika berkomunikasi (ucapan huruf kapital), kita harus menyampaikan suatu topik pembicaraan sesuai teori, teori dan praktik pembahasan topik pembicaraan. Dengan menggunakan empat komponen kunci komunikasi ilmiah: data (bukan asumsi), analisis kausal (bukan klaim), interpretasi (bukan alasan), dan kesimpulan (bukan argumen), evaluasi), kita menyeimbangkan dan bahkan menghilangkan *post-truth*. Akan tetapi, kami dapat menemukan kembali keaslian informasi dan kehidupan sosial kami (Ibnu Hamad, 2017).

Merebaknya pandemi Covid-19 telah menuntut seluruh masyarakat dunia untuk meminimalisir aktivitas di luar rumah. Dinamika ekonomi, sosial, bahkan pendidikan yang mana biasanya dikerjakan di luar rumah, kini terdampak cukup serius. Masyarakat harus dapat beradaptasi dengan keadaan yang belum pernah terjadi pada abad ke-21. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengonsumsi media dengan baik. Nyatanya dalam era baru ini, masyarakat mau tidak mau harus mengonsumsi media agar dapat beraklimatisasi dengan era baru. Dan media yang paling sering dinikmati adalah media massa dan media sosial. Meski tidak ada *feedback* masyarakat terhadap media massa, akan tetapi konten-konten yang dimuat di media massa dapat diolah kembali di media sosial (Asman, 2021).

Ketika ada berita kontroversial, terlepas dari apakah itu faktual atau tidak, mudah untuk menelan persiapan dan dapat digunakan sebagai dasar refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Karena karakteristik media saat ini telah memasuki era yang dikenal dengan era *post-truth*, di mana kebenaran fakta dan bukti tidak lagi penting selama narasi, cerita dan spekulasi tidak penting. pandangan, pemikiran, dan keyakinan. Kita bisa mengambil contoh ketika ada beberapa tokoh masyarakat bahwa virus Covid-19 adalah konspirasi. Tentu saja, ini adalah argumen yang salah dan menyesatkan.

Meski Indonesia adalah negara yang mengizinkan kebebasan berbicara dan berekspresi, namun mengungkapkan pendapat yang merugikan, mau tidak mau akan berdampak negatif bagi publik. Jika, satu orang melanggar aturan, mengklaim bahwa Covid-19 dibuat-buat, itu akan memengaruhi orang lain. Konstruksi media ini harus didekati di era pasca-kebenaran ini, di mana pertumbuhan media tumbuh subur

dengan cara yang melibatkan dan membuat orang mempercayainya berdasarkan prinsip, yakni prinsip di luar nalar dan akal sehat.

Keberadaan kebenaran setelah fakta semakin membentuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap media sosial selama masa pandemi memberikan dampak yang cukup besar. Beberapa figur publik, mulai dari musisi hingga elite politik, menggunakan media sosial untuk memanipulasi paradigma sosial melalui fakta alternatif atau gosip jahat tentang musuh dengan bukti rendah untuk menyebarkan dukungan bodoh secara finansial. Semua orang dapat mengonsumsi, menghasilkan, dan mendistribusikan informasi melalui munculnya media sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penyebaran berita palsu meningkat karena munculnya internet dan berbagai platform media sosial.

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan di era *post-truth* ini, perlu kiranya meninjau kembali bagaimana agar konstruksi media di tengah pandemi dapat mengonsolidasi dalam melawan Covid-19. Meskipun media tidak dapat memutus mata rantai penyebaran virus secara langsung, akan tetapi media memiliki efek dalam mengubah pola berpikir dan pola hidup masyarakat agar menaati protokol kesehatan yang berlaku dan dapat beradaptasi di era yang baru. Memasuki era *post-truth*, media memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga kestabilan kondisi sosial masyarakat di masa pandemi. Karena, informasi yang dihasilkan di berbagai media menjadi suatu 'konsumsi' wajib bagi setiap masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini, masyarakat membutuhkan informasi yang 'menyehatkan' sehingga tidak terkontaminasi informasi yang dapat menyesatkan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, perlu adanya pemantapan media sebagai social control kepada masyarakat (Thoriq Tri Prabowo, 2021).

Sebagai alat kontrol sosial, media dikatakan sebagai titik temu antara kebenaran dan kecurigaan atas informasi yang beredar di masyarakat. Media harus mampu meminimalkan ketidakpercayaan terhadap hubungan publik-pemerintah. Oleh karena itu, mendekatkan hubungan negara-pemerintah dalam kerangka kemitraan yang saling memperkuat adalah tugas media untuk mengatasi masalah pandemi saat ini. Mengkomunikasikan keinginan publik kepada pemerintah juga mudah di era *post-truth* ini. Siapa pun dapat menghasilkan konten olahan yang kemudian dapat didistribusikan melalui media sosial. Selain itu, media sosial juga cukup mendapat perhatian di masa pandemi ini. Pada Maret 2020, penggunaan media sosial meningkat 40%. Artinya, jejaring sosial pun seakan menjadi konsumsi wajib kehidupan masyarakat.

Selain sebagai corong antara publik dan pemerintah, media juga harus mampu menjaga stabilitas nasional, ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi negara. Meski terkena dampak pandemi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut tentu saja menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masalah undang-undang penciptaan lapangan kerja dan pemilihan kepala eksekutif menjadi semakin menyakitkan untuk dibahas. Namun, masyarakat Indonesia lupa bahwa Indonesia menempati urutan ke-22 dunia di antara negara-negara yang warganya terdampak Covid-19.

Protokol kesehatan, anjuran memakai masker dan menjaga jarak, serta peraturan lainnya akan menjadi menu harian Anda selama pandemi ini. Namun, masyarakat juga membutuhkan informasi yang dapat merangsang semangat kerja dan pembangunan guna mewujudkan cita-cita negara. Beradaptasi dengan *new-normal* sangat penting bagi semua individu. Bukan berarti keberadaan pandemi ini menyebabkan penurunan kinerja pekerjaan sehari-hari setiap orang. Oleh karena itu, peran media dalam bidang ini perlu diperhitungkan. Semoga orang-orang terus melakukan hal-hal positif dan produktif selama adanya pandemi. Seiring berjalannya waktu, media diharapkan menjadi pedoman berharga yang dapat memberikan efek positif bagi publik. Meski di era *post-truth*, aksesibilitas sayap informasi semakin meluas ke berbagai pelosok setiap daerah, diharapkan dapat menyampaikan informasi di mana kebenaran dapat digunakan. Dan tentunya era media *post-truth* merupakan hal baru yang dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Terakhir, liputan media harus dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum dan dapat berfungsi sebagai pendukung untuk mempertahankan liputan berita atau acara sosial publik.

Pada akhirnya, paket narasi di dalam media harus dikemas sedemikian rupa sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat umum dan dapat menjadi figur besi bagi stabilitas kondisi sosial masyarakat. Ada realitas lain, seperti perbatasan negara atau wilayah tertentu, tetapi fakta lain yang masih dihormati oleh kalangan tertentu adalah media yang berpartisipasi dalam realitas bingkai kinerja tanpa batasan (Wahyu Nurdianto, 2020.)

Cara Menyikapi Post-truth

Istilah "pasca-kebenaran" telah sering digunakan sejak 2015, yaitu istilah yang digunakan untuk membentuk opini publik atas suatu

situasi yang mewakili keyakinan pribadi lebih penting daripada fakta. Istilah ini digunakan oleh penulis Steve Teisch pada 1992. Ada banyak sumber informasi tentang *post-truth* yang terjadi di masyarakat saat ini, tetapi filternya sangat sedikit. Orang tidak cenderung mencari kebenaran, tetapi mencari alasan berdasarkan perasaan mereka sendiri daripada logika. Orang hanya bertindak dulu, baru berpikir.

Kita sekarang berada di zaman kebohongan, dan ini bukan masalah. Era *post-truth* melahirkan kedangkalan dan kebohongan, seperti kasus Ratna Sarumpaet. "Alasan *post-truth* untuk menyebarkan informasi yang tidak benar telah dirancang. *Prank* digunakan untuk kepentingan politik bahkan komersial, dan bahkan ada pasar yang jelas. Tujuannya untuk bermain dengan emosi," kata Sinam M. Sutarno, ketua JRKI, yang merupakan kantor SPEK-HAM Konsultan Pembicara.

Perlu dicatat bahwa jumlah orang yang menggunakan Internet di Indonesia pada 2018 melebihi setengah dari penduduk Indonesia, dan semua orang dapat dengan mudah mengakses Internet. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk di pulau Jawa, terutama pengguna pria berusia 35-44 tahun, disusul dengan usia 25-34 tahun. Sebagian besar pengguna adalah pekerja swasta, diikuti oleh ibu rumah tangga. Media merupakan salah satu kekuatan opini publik dan berperan penting dalam bidang informasi, pendidikan dan hiburan.

Pada saat yang sama, media sosial adalah cara baru masyarakat, dan jargonnya adalah "dari kami, oleh kami, dan untuk kami". Mengambil tanggung jawab sosial adalah kewajiban media sosial. Etika bermedia sosial harus menyampaikan ekspresi yang santun dan santun, menyampaikan hal yang benar dan faktual, menghargai keberagaman, dan yang terpenting menjaga privasi (*Post-truth* dan Hal-Hal dalam Menyikapi Media Sosial-SPEK).

Seorang peserta diskusi menjelaskan bagaimana menanggapi *post-truth* dengan mengutip pernyataan Nezar Patria, yang mengandung tiga unsur: akal sehat, pemikiran kritis, dan moralitas. Istilah *post-truth* akhir-akhir ini terdengar dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. *Post-truth* sendiri menjadi "*Word of the Year*" dalam *Oxford Dictionary* pada 2016.

Menurut Kamus Oxford, istilah ini digunakan untuk mendefinisikan situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi mempengaruhi pembentukan opini publik lebih dari fakta objektif. Menurut Bambang Wibawarta, ilmuwan budaya Universitas Indonesia, istilah "*post-truth*" sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, semakin banyak

digunakan di era Brexit dan era terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat atau sekitar 2017-an hingga sekarang.

Bambang menjelaskan bahwa *post-truth* dapat dijelaskan sebagai sebuah fenomena, yang menjadikan keberadaan kebenaran lain, yang sebenarnya merupakan kebenaran palsu, digunakan untuk menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. "*Post-truth* ini menciptakan wacana yang berbeda dengan kebenaran yang ada. *Post-truth*. Ya, tentu tidak akan benar," kata Bambang kepada SP. Setelah kebenaran itu sendiri, lanjut Bambang, merupakan istilah yang tidak bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. "*Post-truth* tetap disebut *post-truth* karena kalau diganti dengan bahasa Indonesia bisa jadi tidak benar," kata pria yang juga wakil presiden bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Indonesia ini.

Terkait dengan pasca-kebenaran atau mencari kebenaran semu maka jelas bahwa *put up truth* sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dari hoaks, manipulasi, dan *pretend news*. "Karena mereka mencari yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Ini berkembang karena ada dua pilihan yang berbeda dan tentunya ada pandangan yang memiliki kepentingan berbeda pula," tutur Bambang.

Dalam hidup, sejatinya seseorang terus didorong untuk selalu mencari kebenaran serta tidak boleh keluar dari koridor kebenaran. Terlebih bagi para akademisi dan jurnalis. Lebih lanjut, dipaparkan Bambang, ketika seseorang mencari *statistics* kebenaran maka dia pasti akan dihadapkan pada sejumlah fakta-fakta yang tentunya memaparkan kejujuran. "Saya mencoba melihat ini secara ilmiah saja. Jika data-datanya menampilkan hasil turun, misalnya, maka sungguh janggal rasanya jika lantas kita ubah atau katakan menjadi naik. Ini sama saja mengingkari kebenaran yang tidak sesuai dengan data fakta yang valid," papar Bambang. Kemunculan *post-truth* di Indonesia yang menyebar masif sangat dipengaruhi oleh media sosial (medsos) di mana saat ini media sosial memiliki pengaruh besar dan masif untuk menyebarkan sesuatu, terlebih bila sama dengan pandangan orang tersebut.

"Medsos makin mempermudah penyebaran *post-truth*. jika tidak ada medsos tentu akan sulit untuk menyebarkan pendapat, contohnya; harus menghimpun orang dalam pertemuan, menulis di media massa, atau cara-cara konvensional lainnya. Nah, bila medsos, tanpa nama atau anonim pun dapat diyakini kebenarannya selama sejalan dengan yang menjadi pandangan orang tersebut. Di sinilah diketahui bahwa *post-truth* sangat berkaitan erat dengan ikatan emosional seseorang. Ikatan

emosional mengalahkan segala faktor lainnya misalnya pendidikan, agama serta status ekonomi. Kenapa bisa sedemikian masif? Ya karena terdapat ikatan emosionalnya. Ikatan perasaan, misalnya; tidak memperoleh keadilan yang sama, tidak mendapatkan kesempatan yang sama (antihoaks.com, 2021).

Kunci untuk mengatasi *post-truth* ialah dengan mengasah serta menaikkan kemampuan literasi kita dalam memahami gempuran *post-truth*. Banyaknya gosip bohong seolah dipersepsi menjadi benar adalah karena rendahnya kemampuan literasi seorang. Padahal terdapat banyak cara bisa dilakukan buat menggali kebenaran terlebih di era digital seperti ketika ini. "pada sinilah aku merasa peran media-massa *mainstream* atau konvensional wajib dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kebenaran, sebagai akibatnya media mampu menjadi asal referensi terpercaya buat memihak kebenaran" kata Bambang. Istilah Bambang, berhak memilah dan menentukan siapa pun yang akan dimuat atau ditayangkan. Jika seseorang mempunyai pernyataan atau pandangan yang berbeda jauh berasal warta kebenaran maka media jua harus tegas buat tidak memunculkan orang tersebut pada isu yang ditulis atau ditayangkan di televisi.

Lebih lanjut, Bambang Wibawarta mengatakan, seleksi pemilihan narasumber dapat dilakukan jajaran redaksi agar tak sembarangan orang bisa dimuat pernyataannya karena dengan demikian media tetap menjadi rujukan kebenaran yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas. "Media punya peran untuk menyaring. Mari semua bersikap dewasa menyikapi ini. Cara paling gampangnya adalah dengan belajar berpikir kritis**.** Cari tahu suatu kejadian dari berbagai sisi. Lalu, jangan mentang-mentang kita berada di era yang serba cepat, kita jadi minder untuk "terlambat" dan malah jadi terburu-buru. Pastikan kita bisa menyimak dengan baik**.** Sering kali kita mendengar untuk melawan. Tapi coba ganti jadi mendengar untuk mencerna**.** Jadi, ketika ada suatu hal, kita bisa berpikir dulu sebelum mengambil keputusan (*spekham.org*).

Era *post-truth* atau yang bisa disebut dengan era pasca kebenaran merupakan era di mana segelintir manusia lebih menerima suatu adanya informasi tanpa diolah terlebih dahulu. Dengan kata lain, *post-truth* adalah kebohongan yang menyelinap dalam kebenaran. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan bagi manusia. Pelaku *post-truth* biasanya dilakukan oleh oknum yang mengedepankan kepentingannya sendiri.

Dalam Islam, *post-truth* juga bisa disebut dengan *fitnah*, yang berasal dari kata *fa-ta-na*. Abdul Mudjib mendefinisikan fitnah ialah: kegiatan menyebarkan berita tanpa dilihat benar atau tidaknya berita tersebut, dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain (Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001: 301). Seperti yang termaktub dalam surah Al-Lahab, di mana istrinya (Abu Lahab) merupakan salah satu pelaku penyebaran kebohongan yang berlindung di balik kebenaran.

Pada zaman sekarang, sosial–media merupakan media penyebaran *post-truth* yang paling mudah dijangkau oleh setiap individu. Sosial-media menjadi alat yang mujarab bagi individu yang ingin memecahbelah kerukunan yang sudah diciptakan. Akan tetapi, tidak semua sosial-media menjadi alat untuk menyebarkan hoaks. Semua bergantung pada pribadi yang melakukan aktivitasnya di *platform* sosial–media tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, *post-truth* dapat memecahkan kerukunan yang sudah tercipta, jika karakter masyarakat tidak mau berubah. Hal yang dapat mengantisipasi masyarakat dari aktivitas (*post-truth*) ini ialah; menyaring informasi terlebih dahulu, tidak asal menyebarkan informasi yang tidak tahu keakuratannya, dan tidak memihak atau netral. Jika karakter masyarakat tetap tidak mau berubah maka tidak bisa dipungkiri lagi, kerukunan yang sudah dicipta akan hancur. Dan negara ini akan lebih mudah sekali direbut negara lain jika kerukunan yang diciptakan sudah hancur.

Perkembangan zaman yang pesat, manusia didesak agar menjadi pribadi yang kritis. Peran manusia di sini sangat penting, karena; hanya manusia sendiri yang dapat membentengi–diri dari adanya era *post-truth* ini. Agar mampu menciptakan kebenaran yang benar-benar kebenaran, bukan kebohongan yang menyelimuti diri dalam kebenaran. Terlebih lagi, manusia harus menerima perkembangan zaman ini. Secara eksplisit, dampak sosial dari adanya *post-truth* ialah; menimbulkan kerenggangan antar sesama, memecahkan kerukunan antar umat beragama, dan yang paling ditakuti ialah, bisa menyebabkan runtuhnya negara. Dikarenakan masyarakatnya yang tidak bisa melindungi diri dari adanya era *post-truth*.

BAB IV
INTERVENSI PIHAK ASING TERHADAP KEDAULATAN NKRI ERA POST-TRUTH

Negara-negara berdaulat di dunia ini pada umumnya berusaha untuk menyatukan pemahaman dan pandangan mereka satu sama lain. Usaha-usaha untuk menyatukan pemahaman dan pandangan ini ditandai dengan adanya berbagai musyawarah atau konvensi-konvensi yang dilakukan oleh Negara-negara tersebut. Pada dasarnya, Negara-negara ini berusaha untuk saling menerima atau kompromi satu sama lain. Akan tetapi, sering kali tidak tercapai kesepahaman antara mereka karena perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap yang menurut masing-masing pihak sangat mendasar (fundamental). Pada akhirnya, terjadilah pertentangan yang semakin meningkat sehingga akhirnya menjadi konflik. Di era *Post-truth* ini, banyak fenomena kebohongan. Disinformasi dalam praktik politik kalau dibiarkan juga dapat merusak demokrasi. Informasi fitnah dan *hate speech* (ujaran kebencian) dalam praktik demokrasi hakikatnya adalah kejahatan demokrasi. Ini berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat karena praktik manipulasi dan dapat mengantarkan orang yang tidak dikehendaki menjadi penguasa.

Meski suatu negara dapat menanamkan kehendaknya terhadap negara lain, maka negara tersebut melakukan campur tangan terhadap urusan internal suatu negara. Contohnya, apabila suatu negara A terancam keberadaannya karena masalah internal yang terjadi dalam wilayah kedaulatannya, sedangkan penanganan terhadap masalah itu dianggap tidak sesuai dengan kehendak negara B maka negara B merasa perlu untuk campur tangan dalam urusan negara A agar negara B dapat menanamkan pengaruhnya serta kehendaknya diikuti. Pada akhirnya, campur tangan atau intervensi tersebut dilaksanakan dengan kekerasan yang mengakibatkan peperangan serta kerugian bagi banyak pihak.

Pada era *Post-truth*, banyak terjadi kebohongan. Disinformasi menjelang Pilpres dan Pileg marak digunakan yang merupakan perilaku tidak etis seseorang untuk memenangi sesuatu dengan kebohongan

yang diperbuatnya untuk mendapat simpati dan memanfaatkan situasi masyarakat yang emosional dan kemudahan penyebaran melalui media sosial.

Pentingnya arti sebuah kedaulatan NKRI. Dalam konteks kepentingan kedaulatan NKRI, Presiden dan DPR RI sebagai positif legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya mengambil tanggung jawab melawan intervensi asing terhadap kedaulatan hukum nasional. Keberanian dan konsistensi menolak intervensi asing itu pun harus dimaknai sebagai pesan bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia tak mau bertekuk lutut dengan intervensi asing. Konstitusi Indonesia memerintahkan negara melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman intervensi kedaulatan NKRI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Roh Pancasila

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik. Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia misalnya dengan bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi. Sedangkan, Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain, contohnya: Indonesia, India, dan bangsa Asia yang lainnya. Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia (Dharma Setyawan, Mua'dil Faizin Nizham, 2018: 3-4).

Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Dalam keadaan realitas masyarakat terjajah yang diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit, atau budaya. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur menjadi rintisan yang akan digapai oleh Pancasila.

Disadari atau tidak, Pancasila secara hukum tata negara memiliki kedudukan sebagai *Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*, yaitu pokok

kaidah fundamental negara dalam tataran normatif. Pokok pikiran Pancasila oleh pendiri bangsa dijabarkan dalam UUD yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat regulasi dan kebijakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Religiusitas bangsa di Nusantara yang telah lama mengakar berhasil dirangkai dalam kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada alasan bagi pemeluk agama tertentu untuk menentang Pancasila.

2. Demokrasi Pancasila

Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah menerapkan beberapa bentuk demokrasi, bermula dari demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), sampai demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Demokrasi Pancasila bertarif sebagai demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, kepentingan individu dan masyarakat, serta nilai kekeluargaan yang tinggi.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam bidang politik telah menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan", yang merupakan sila keempat Pembukaan UUD 1945. Secara umum, segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila.

3. Undang-Undang Dasar 1945

Istilah undang-undang dasar merupakan hasil terjemahan dari perbendaharaan kata Belanda berupa *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga menggunakan istilah *constitutie*. negara, dalam perspektif Hukum Tata Negara, yaitu organisasi kekuasaan, karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam superstruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik. Menindaklanjuti pengertian negara, merupakan organisasi kekuasaan, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pembatasan yang efektif. Sistem yang dilakukan melalui hukum yang disebut konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 adalah hasil renungan para pejuang pergerakan nasional Indonesia yang pada waktu itu menjadi anggota Panitia Sembilan (Panitia Kecil tidak resmi). Substansi yang tertuang

dalam Pembukaan adalah hasil dari pengalaman mereka sebagai bangsa yang berada di bawah cengkraman kolonialisme dan imperialisme, di antara pokok-pokok penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
b. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;
c. Suatu keinginan (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
d. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Kedaulatan NKRI

1. Definisi Kedaulatan

Secara etimologis, kedaulatan berasal dari bahasa Arab *"daulat"* yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni *"supremus"* yang artinya tertinggi. Jadi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*).

Definisi kedaulatan menurut Riyanto (2012) yaitu ajaran filosofis mengenai kedaulatan yang memiliki makna kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Di mana pemerintah memiliki kuasa penuh terhadap pembentukan negara tanpa terikat hukum dan konstitusi. Sedangkan, secara umum Kedaulatan memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan sendiri merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta juga masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat di suatu negara (Yuda, 2021).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, di mana negara tersebut berdaulat dengan batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional.

2. Landasan Hukum

Perlu dicatat bahwa hukum adalah aspek yang sangat penting dari kedaulatan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum merupakan dasar atau landasan tegaknya tatanan politik, dan bahwa hukum merupakan "satu-satunya jaminan kelangsungan peradaban" (Anthony Pagden, 2002; James J. Sheehan, 2006: 42–43). Sistem hukum dapat menjadi sarana untuk menjamin keberlangsungan peradaban. Kristalisasi teoritis hubungan antara hukum dan kedaulatan dapat dilihat dalam teori kedaulatan Jean Bodin pada abad ke-16. Dalam hal ini, Jean Bodin menganjurkan doktrin bahwa kedaulatan adalah sumber utama legislasi. Kedaulatan adalah sumber otoritas pada tingkat tertinggi dari hierarki hukum (Riyanto, 2012). Negara kesatuan Republik Indonesia diciptakan melalui revolusi nasional membongkar sistem hukum kolonial dan membangun yang baru. Oleh karena itu, dasar hukum negara kesatuan Republik Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi

Pasal 25A UUD 1945 "NKRI adalah negara kepulauan yang berciri kepulauan yang wilayah batas dan haknya ditentukan oleh undang-undang." Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 "Tidak dapat dilakukan perubahan, terutama terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia". Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang *de facto* dan sah. Artinya, bersamaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945, struktur negara kesatuan Republik Indonesia dapat dengan jelas dikenali oleh setiap warga bangsa Indonesia (Putri, 2020).

3. Hakikat Kedaulatan

Hakikat atau esensi negara kesatuan (*unitary state*) dapat dilihat dari dua sisi yakni: sisi kedaulatan dan susunan negara. Pertama, dari sisi kedaulatan, hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Adanya kewenangan pemerintah daerah (legislatif daerah) untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri (Perda) bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat (Mahmuzar, 2020).

Berikutnya, (kedua) hakikat negara kesatuan dapat pula dilihat dari susunan negara. Negara kesatuan disebut juga dengan negara bersusunan tunggal atau dengan kata lain negara yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang terdapat dalam negara federasi (*bondstaat*). Oleh karena itu, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal maka pada negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan yakni pemerintah pusat. Konsekuensinya, segala urusan pemerintahan pada negara kesatuan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui konstitusi negara kesatuan. Negara kesatuan yang seperti ini menurut Thorsten V. Kalijarvi merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (Mahmuzar, 2020).

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara-bangsa modern, yang pembentukannya didasarkan atas nasionalisme dan semangat nasionalisme; berdasarkan tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di negara yang sama. Meskipun masyarakat terdiri dari berbagai agama, ras, suku, dan golongan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak ada bangsanya di dalam Negara tersebut. Jadi, di dalam NKRI tiada ada dan tidak akan mempunyai Negara bagian di dalamnya. Sebagai koalisi atau negara koalisi. Maka dari itu, tidak dapat mengubah format NKRI ke format lain. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menyatakan bahwa "khusus terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat ikatan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki pemerintahan tertinggi. Kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Keduanya perlu saling mendukung, mendukung dan bekerja secara sinergis. Bentuk negara kesatuan dianggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat

Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, agama atau kepercayaan. Bentuk persatuan inilah yang menjadi cita-cita para *founding father* (pendiri bangsa) sejak tahun 1945. Bahkan, pada 1928, kaum muda di Nusantara bersumpah untuk mengakui hanya satu tanah air, satu negara, satu bahasa, Indonesia. Wilayah Indonesia tidak boleh diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Setelah mengetahui hakikat NKRI, diharapkan warga memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI. (Putri, 2020)

4. Bentuk-Bentuk Kedaulatan

Menurut Yuda (2021), bentuk-bentuk kedaulatan sebagai berikut:

a. Kedaulatan ke dalam: negara atau juga pemerintah berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa negara yang dibentuk oleh negara tersebut;
b. Kedaulatan ke luar: pemerintah ini mempunyai kekuasaan yang bebas serta juga tidak terikat. Pemerintah tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat, di mana memiliki makna bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota madya (Fahmi, 2016).

5. Sifat-Sifat Kedaulatan

Yuda (2021) menjelaskan sifat-sifat kedaulatan sebagai berikut:

a. Asli: kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedaulatan tersebut terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan kedaulatan tersebut.
b. Permanen/Tetap: negara reorganisasi struktur, kedaulatan tersebut tetap tidak akan mengalami perubahan apa pun. Hanya pihak pelaksana saja yang akan mengalami adanya suatu perubahan.
c. Absolut: tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi itu selain kedaulatan. Di dalam sebuah negara, kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam menentukan segala hal.
d. Tidak dapat terbagi: tidak boleh dibagi kepada badan tertentu karena dapat menimbulkan pluralism.

e. Tidak terbatas: kedaulatan ini melingkupi semua orang serta juga seluruh golongan yang berada di dalam sebuah negara tanpa terkecuali.

6. Jenis-Jenis Kedaulatan

Menurut Yuda (2021), jenis-jenis kedaulatan mencakup:

a. Kedaulatan Tuhan: kedaulatan yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau juga pihak penguasa. Karena pada dasarnya raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau juga titisan dewa. Semua kebijakan yang dibuat penguasa itu dianggap bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat itu diwajibkan untuk mau mematuhi perintah penguasa.
b. Kedaulatan Raja: raja merupakan sebuah kedaulatan negara yang berada di tangan raja. Supaya negara tersebut dapat kuat serta kokoh maka seorang raja itu harus memiliki kekuasaan yang kuat serta juga tidak terbatas. Rakyat juga harus rela menyerahkan hak serta kekuasaannya kepada sang raja.
c. Kedaulatan negara: di mana kekuasaan pemerintahan yang berasal dari suatu kedaulatan negara. Artinya negara tersebut memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja atau penguasa atas nama sebuah negara. Negara tersebut mempunyai hak untuk membuat aturan hukum sehingga negara itu tidak diwajibkan untuk tunduk kepada hukum.
d. Kedaulatan Hukum: sebuah negara yang diharapkan menjadi negara hukum, yang mana semua tindakan yang dilakukan pemerintah serta juga rakyat itu harus dengan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
e. Kedaulatan rakyat: di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat tersebut memberikan kekuasaannya kepada pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan melalui perjanjian yang dikenal dengan istilah kontrak sosial.

7. Prinsip-Prinsip Kedaulatan

Menurut Anwar (2021: 1) Prinsip-prinsip Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni:

a. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik;
b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar;

c. Negara Indonesia adalah negara hukum;
d. Presiden tidak dapat membekukan dan/membubarkan Dewan Perwakilan; Rakyat.
e. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
f. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

8. Konsep Kedaulatan

Konsep kedaulatan berkaitan dengan hubungan antara kekuatan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Anda dapat memahami kedaulatan dengan mengamati ini. Pertama, kekuatan politik berbeda dengan kerangka organisasi dan otoritas lain dalam masyarakat, seperti agama, keluarga, dan ekonomi. Kedua, kedaulatan adalah bahwa jenis lembaga publik ini bersifat otonom dan sangat luas (otonom dan dominan), lebih unggul dari lembaga- lembaga yang ada di masyarakat yang bersangkutan, mandiri atau mandiri, mengklaim bebas dari pihak luar (Riyanto, 2012).

9. Aspek Kedaulatan

Menurut konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu:

a. Aspek eksternal dari kedaulatan adalah hak semua bangsa untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan bangsa dan kelompok yang berbeda tanpa tekanan dan pengawasan dari negara lain.
b. Aspek internal kedaulatan: hak atau wewenang eksklusif suatu negara, bentuk sistem, fungsinya, dan hak untuk memberlakukan undang-undang yang mereka inginkan dan untuk menentukan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhannya.
c. Aspek teritorial dari kedaulatan berarti kekuasaan negara yang lengkap dan eksklusif atas orang-orang dan benda-benda yang terkandung di dalam wilayah itu. (Situmorang, 2021).

10. Cara Pandang Tentang Kedaulatan

Dua ajaran atau dua paham berikut ini memberikan pengertian mengenai kedaulatan:

a. Monisme

Paham ini mengatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, dan tidak dapat dibagi. Pemegang kedaulatan menurut paham ini adalah

pemegang wewenang tertinggi dalam suatu Negara. Karena itu, wewenang tertinggi menentukan wewenang-wewenang yang ada di dalam Negara tersebut.

b. Pluralisme

Paham ini mengungkapkan bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan. Organisasi-organisasi lainnya banyak yang berdaulat terhadap masyarakat. Menurut paham ini, negara hanya bertugas mengkoordinir organisasi yang berdaulat di bidangnya masing-masing.

Intervensi

Secara definitif, intervensi sendiri sebenarnya memiliki banyak definisinya. Mengenai definisi tersebut biasanya tergantung dengan bidang yang dibicarakan. Definisi secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intervensi merupakan campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak orang, golongan, negara, dan sebagainya. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan (pertikaian) yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah (bertikai). Dilansir dari Oxford *Bibliographies*, pengertian intervensi adalah campur tangan suatu negara dalam urusan negara seperti politik ataupun militer dari negara lain dengan tujuan utama untuk memelihara atau pun untuk mengubah kondisi, situasi, atau barang yang ada di negara tersebut.

Intervensi juga dapat dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain. Namun, intervensi juga dapat berupa turut campurnya suatu pihak untuk membantu penyelesaian masalah pihak lainnya.

1. Tujuan Intervensi

Turut campurnya pihak lain atau intervensi terhadap suatu masalah yang bukan masalahnya bertujuan untuk membantu permasalahan pihak tersebut agar dapat selesai. Namun, intervensi juga dapat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari permasalahan orang lain. Konotasi intervensi dalam berbagai bidang ini, tidak selalu berakibat negatif, tetapi juga bisa berdampak positif bagi negara maupun kehidupan sosial budaya masyarakat.

Meskipun masih banyak orang yang justru menilai dari sisi negatifnya bahwa intervensi adalah ikut campur yang berlebihan. Padahal, justru intervensi sering dilakukan untuk membantu pihak yang sedang mengalami permasalahan. Bahkan, sejauh ini Intervensi juga sering digunakan di bidang kesehatan, politik, pemerintahan, psikologi, pendidikan, keperawatan, dan lainnya.

2. Dampak Intervensi

Intervensi dapat berdampak positif (baik) ataupun berdampak negatif (buruk) sesuai dengan tujuan dilakukannya, sebagai berikut:

a. Intervensi positif adalah intervensi yang berdampak baik bagi negara yang dicampuri urusannya. Misalnya intervensi negara Indonesia dalam mengakhiri perang Kamboja dan Vietnam, juga intervensi PBB untuk menjaga keamanan dan tidak adanya pelanggaran HAM di seluruh negara di dunia;
b. Intervensi negatif adalah intervensi yang berdampak buruk bagi negara yang dicampuri urusannya. Contohnya adalah masuknya Italia untuk membela Jerman melawan Inggris Raya pada Perang Dunia II yang memperparah peperangan. Intervensi negatif juga sering kali dilakukan negara kuat untuk mendapatkan keuntungan sumber daya maupun politik dari negara yang lebih lemah.

3. Bentuk Intervensi

Menurut Kevin J Holstri, intervensi memiliki enam bentuk, yaitu:

1. Intervensi diplomatik, biasanya dilakukan seorang diplomat di dalam bentuk komentar untuk dapat memperlihatkan keberpihakannya pada suatu negara tertentu;
2. Intervensi Klasik, adalah intervensi rahasia seperti penyadapan informasi di sebuah negara dengan tujuan tertentu;
3. Pameran kekuatan militer, ini hanya sebatas *show up* atau latihan aksi militer tanpa mengirim ekspedisi anggota militer sungguhan.
4. Subversi, gerakan politik serta juga militer bawah tanah yang terorganisir. memanfaatkan situasi untuk dapat mencapai tujuannya.
5. Gerilya, Ini merupakan suatu pencampuran dari subversi serta juga sistem perang jenis konvensional.
6. Intervensi Militer, ini merupakan suatu pengiriman sebuah ekspedisi militer dalam hal menunjang sebuah Negara.

Era Post-truth

Era *Post-truth* dapat digambarkan sebagai perubahan sosial yang melibatkan media arus utama dan pembuat opini. Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh dunia digital, di mana manusia saling terhubung dalam suatu jaringan yang disebut internet. Kondisi ini berarti produksi berita bukan lagi monopoli media *mainstream*, tetapi juga media sosial yang dikelola masyarakat. media *online* yang pernah dianggap sebagai salah satu sumber harus menerima kenyataan bahwa penghalang antara kebenaran dan kebohongan semakin tipis, kebenaran dan penipuan, struktur fiksi dan non-fiksi. kebenaran bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Al Rodhan dalam Setiawan (2017) menyebutkan karakteristik utama dari politik *Post-truth,* antara lain:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional;
2. Mengabaikan data dan fakta;
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu;
4. Mengombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya;
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang *figure* atau peristiwa tertentu, dan;
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi *social figure* kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban *televisual*, *online*, *android*, dan media sosial.

1. Bahaya *Post-truth*

Mengapa *Post-truth* berbahaya? Karena sesuatu yang tidak benar dan memberikan dampak negatif malah mendapatkan dukungan yang besar. Padahal, keyakinan personal sangat subjektif dan tidak mewakili kebenaran. Apa yang menurut keyakinan seseorang benar, belum tentu benar pula bagi orang lain, malah bisa jadi sebetulnya informasi itu memang salah untuk semua orang.

Keyakinan personal seseorang atau suatu kaum rentan menimbulkan konflik yang seharusnya tidak terjadi karena sejatinya tidak ada yang salah dari kedua belah pihak. Ketika *Post-truth* terjadi maka kaum minoritaslah yang akan mendapatkan konsekuensinya, mereka akan dianggap salah berdasarkan pandangan personal yang dianggap benar oleh kaum mayoritas.

Seseorang juga dapat dengan mudah menjadi kambing hitam karena terjadinya fenomena ini. Sesuatu yang sebetulnya tidak benar terpaksa diangkat menjadi patokan kebenaran karena tekanan publik yang mengiyakan kesalahan tersebut.

Banyak yang telah menjadi korban *scapegoat* seperti ini. Ucapan seseorang dipotong lantas dihilangkan konteksnya, sehingga ucapannya tampak menjadi provokatif dan salah di mata publik, padahal sebetulnya tidak. Apa yang terjadi selanjutnya? Ia akan diproses secara hukum, bukan atas nama hukum, tetapi atas nama main hakim sendiri yang terjadi di media sosial. Media sosial hari ini menjadi media baru bagi perburuan penyihir. Warganet dapat mengarak seseorang dan menghakiminya karena dianggap telah melakukan hal buruk yang sebetulnya tidak ia lakukan, namun sudah terlanjur menjadi kesalahan yang dibenarkan.

2. Karakteristik *Post-truth*

Post-truth berkembang pesat di masyarakat yang sudah diwarnai oleh arus informasi yang mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik. Apa yang terjadi dalam *Post-truth* adalah relativisme kebenaran dengan objektivitas data, dramatisasi pesan jauh lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Dalam era *Post-truth,* narasi selalu mengalami kemenangan mutlak terhadap data atas fakta yang ada, maka sangat perlu dilakukan *fact checking* atau pemeriksaan terhadap suatu fakta.

Fenomena ***Post-truth*** menghadirkan jenis fakta atas suatu peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan pengirim berita. Proses kerjanya sangat difasilitasi oleh kecanggihan teknologi informasi digital. Dalam konteks alam sosial politik kekuasaan yang saling berebut ruang pengaruh atas penguatan identitas kolektif dewasa ini, fasilitasi teknologi informasi justru memperkuat dan mempercepat penyebaran fenomena *post-truth* sehingga berpotensi dan berpeluang untuk memecah belah sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Terhadap domain ini, sikap bijaksana dan waspada dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya media sosial harus disadari sepenuhnya tentang pentingnya merawat dan menghargai perbedaan. Hal ini kemudian berpengaruh pada cara pandang masyarakat atas pluralism di dalam masyarakat.

Terdapat enam konteks gelagat zaman yang menuntut kebaruan dalam menandai era *Post-truth*. *Pertama*, luasnya akses ke konten

informasi berkat digitalisasi komunikasi; *kedua*, masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui media sosial; *ketiga*, demokratisasi media dan jurnalisme warga mengkompensasi ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi media massa dan kekecewaan terhadap politik; *keempat*; masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi dan memiliki keyakinan yang sama; *kelima*, teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika; keenam, kebenaran tidak lagi difalsifikasi atau dibantah, tetapi jadi nomor dua.

Dari sudut pandang psikologi, menurut McIntyre, *post-truth* berakar dalam jiwa manusia yang mudah jatuh dalam *cognitive* bias, prasangka di tingkat pengetahuan yang sifatnya berat sebelah. Manusia tidaklah selalu rasional. Di depan kebenaran yang tidak mengenakkan, manusia cenderung jatuh dalam prasangka yang berat sebelah, dan mencari pembenaran yang membuat nyaman.

Pengaruh Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI

Pengaruh intervensi terhadap kedaulatan NKRI:

1. Intervensi asing melalui utang

Bentuk imperialisme yang dialami oleh Indonesia adalah adanya campur tangan asing dalam proses pengambilan kebijakan negara. Intervensi asing ini terjadi melalui berbagai cara, misalnya, dengan memberikan masukan dan ide langsung melalui beberapa ahlinya dan LSM-LSM dalam proses pengambilan kebijakan atau amandemen undang-undang sebuah negara, dan melalui utang (Ghazy, 2009:69).

Menarik untuk menyimak sejarah masuknya dominasi asing ke Indonesia. Sejak era Soeharto sebagai bentuk imperialisme. Dengan naiknya Soeharto Sebagai penguasa baru di Indonesia (1966), sikap pemerintah terhadap utang luar Negeri berubah secara drastis. Hal itu tidak hanya tampak pada strategi Pembangunan yang dijalankannya, atau pada jumlah utang baru yang dibuatnya, tetapi terutama tampak secara mencolok pada berbagai tindakan yang Dilakukannya dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia.

Beberapa tindakan yang dilakukan Soeharto dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, memperbaiki hubungan dengan para kreditur, terutama negara-negara blok Barat

dan lembaga-lembaga keuangan multilateral. Tujuannya untuk memperoleh utang luar negeri Baru dan meminta penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri yang diwariskan Soekarno. Hasil yang diperolehnya adalah sebagai berikut:

Pertama, menyusul pertemuan negara-negara kreditor blok Barat di Tokyo. Pada September 1966, yang dikenal sebagai *the Paris Club* pada Oktober 1966 Indonesia memperoleh komitmen untuk menerima pinjaman siaga sebesar 174 Juta dolar AS. *Kedua*, melanjutkan pelaksanaan program stabilisasi IMF serta mengeluarkan kebijakan ekonomi yang lebih bersahabat dengan sektor swasta dan Investasi asing (Frans Seda, 1983: 99).

Sesuai dengan permintaan IMF, hal yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dalam garis besarnya meliputi: penyusunan anggaran berimbang, pelaksanaan kebijakan uang ketat, penghapusan subsidi dan peningkatan harga komoditas layanan publik, peningkatan peranan pasar, penyederhanaan prosedur ekspor, dan peningkatan pengumpulan pajak.

2. Intervensi asing melalui pemilu

Intervensi asing bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat tradisional sampai modern, yang terkini dengan bantuan dan mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi. Di masa kolonialisme, intervensi asing didahului aksi pendudukan, di era dewasa ini teknologi memungkinkannya bersifat langsung tanpa perlu aksi penguasaan wilayah lebih dulu. Karena itu, sesuai dengan perkembangan zamannya, peran kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, menjadi dominan. Intervensi semacam ini ditandai dengan pembobolan akses masuk ke sumber data nasional sebuah negara, untuk kemudian dikacaukan dan diintervensi, dengan memasukkan data hasil rekayasa, berisi propaganda negara yang berkepentingan (Nainggolan, 2018:4).

Pelaku intervensi asing dalam pelaksanaan Pemilu nasional di berbagai negara bisa melibatkan *State actors* (aktor negara) dan *non-state actors* (aktor non-negara). Pelakunya bisa melibatkan satu atau lebih aktor yang dominan. Adapun aktor negara memperlihatkan kehadiran pemerintah negara asing secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat terdeteksi dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan, terutama bantuan yang diberikan, secara resmi maupun tidak resmi. Sementara, aktor non-negara yang terlibat berupa berbagai institusi non-pemerintah yang memang benar-benar bersifat mandiri

maupun yang masih merupakan bagian dan kepanjangan tangan dari pemerintah. Globalisasi yang cepat dan keterbukaan yang meluas telah membuat peran aktor non-negara semakin besar dan signifikan dewasa ini di banyak tempat dan negara, serta berbagai sektor.

Keterlibatan dan intervensi asing yang diwaspadai rawan dilakukan dewasa ini melalui propaganda *firehouse falsehood* dinilai sebagai salah satu ciri dari era ***Post-truth***, yang ditandai dengan mudahnya masyarakat begitu saja mempercayai informasi instan yang mereka terima tanpa menyelidiki atau mengujinya lebih lanjut. Lebih jauh lagi, era ini dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, yang tidak mendasarkan lagi setiap informasi yang mereka terima berdasarkan objektivitas dan reliabilitas, serta logika. Sikap dan respons masyarakat dalam menerima informasi dari luar menjadi cenderung mencari dan membuat pembenaran (*justification*) daripada mencari kebenaran (*truth*) yang sesungguhnya (Nainggolan, 2018:5).

Keterlibatan asing secara legal, yang sesungguhnya lebih menggambarkan bantuan di tengah keterbatasan negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu, seperti Indonesia dan Timor-Leste, mengingat posisinya sebagai *new Emerging democracies*, dapat disaksikan dalam bentuk berbagai kerja rutin, seperti pelatihan penyelenggaraan pemilu yang bebas, bersih, terbuka, dan juga efisien. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka sosialisasi dan diseminasi demokrasi sebagai sistem politik yang disadari relatif jauh lebih baik untuk dipilih oleh negara-negara di dunia ini, khususnya negara demokrasi baru. Karena itulah, kemudian diselenggarakan berbagai program *workshops*, termasuk yang ditujukan bagi para saksi dari partai-partai politik. Juga ada program pendidikan politik dan pelatihan bagi para calon anggota legislatif (caleg), yang pasca-pemilu biasanya dilanjutkan dengan program sosialisasi bagi anggota parlemen yang telah terpilih.

Adapun institusi asing, termasuk *Non-Government Organizations* atau LSM yang sering hadir dalam membantu persiapan pemilu dan membantu pelatihan para caleg serta sebagai pemantau pelaksanaan pemilu di berbagai negara adalah IDEA dari Swedia dan LSM yang dipimpin mantan Presiden AS, Jimmy Carter. Mereka merupakan pengamat independen, yang kehadirannya tidak melakukan intervensi selama proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu. Agar lebih mudah dan memberi manfaat lebih luas, mereka sering kali melakukan kerja sama dengan LSM domestik, kampus-kampus, lembaga pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, KPU serta Bawaslu.

Bagaimana dalam praktiknya intervensi asing dalam pemilu ini dilakukan? Seiring dengan masuk ke dalam sistem komputer negara dan partai politik yang menjadi sasarannya, serta data pribadi yang dimiliki media sosial, pihak asing (negara luar) terlibat dalam ikut merencanakan dan mengembangkan kampanye negatif dan kotor (*smear and black Campaigns*) terhadap lawan dari pihak yang didukungnya, dan sebaliknya, mendukung calon penguasa boneka yang akan dikuasainya, dengan merekayasa dan melebih-lebihkan kemampuan, kinerja dan prestasinya. Dengan cara ini, sebagai manfaat timbal-baliknya, kebijakan di masa depan si calon pemimpin yang didukung negara asing itu pun diharapkan dapat diarahkan atau didikte pemerintah Negara sponsornya (Nainggolan, 2018:6).

Dalam implementasinya, selama kampanye, Metode propaganda negatif, yang penuh kebohongan dan kepalsuan, yang diarahkan kepada pihak lawan, dilancarkan secara gencar dan kontinu. Akibatnya, kalangan terpelajar atau terdidik pun, terkecoh dan terperdaya untuk diarahkan memilih kandidat pemimpin dukungan negara asing ini. Taktik propaganda ala Joseph Goebbels di era Hitler, telah diuji sukses dalam pemilu Jerman di tahun 1933, sukses dalam mengelabui rakyat Jerman yang cerdas dan dikenal logis berpikir dan dalam mengambil keputusan. Alhasil, Hitler, yang semula Partainya dinilai *underdog*, Nazi, bisa memenangkan Pemilu secara telak, dan ia pun terpilih sebagai Kanselir. Dalam perspektif Goebbels, kebohongan yang terus-menerus disampaikan, tanpa koreksi dan upaya *counter* dari lawannya, pada akhirnya dapat menimbulkan rasa percaya dan meyakinkan orang atas pesan yang disampaikan orang yang berkepentingan dengan berita bohong itu.

Kelebihan dan Kekurangan Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI

Penerapan intervensi pihak asing terhadap kedaulatan NKRI di era ***Post-truth*** ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan dan kekurangan tersebut ialah:

1. Kelebihan

a. *Post-truth* mengisi kurangnya kepercayaan NKRI dengan menuduh analisis kompleks dan mendalam yang dilakukan pihak asing sebagai sihir yang ditujukan untuk membuat rakyat atau masyarakat menjadi bingung. Kemampuan para politisi pasca-

kebenaran sebenarnya juga jalin-kelindan dengan hasrat manusia untuk mencari pandangan yang sesuai dengan pandangan mereka. Media yang sedari awal tidak ingin kehilangan rezeki ekonomi, tidak berani mengambil risiko untuk kehilangan para pelanggannya. Kondisi tersebut menjadikan para politisi *Post-truth* mendapatkan keuntungan untuk selalu muncul di depan publik melalui pemberitaan sembari menghindari pihak-pihak yang sejatinya memiliki pandangan "yang lebih bisa dipercaya." Akibatnya, para politisi yang kontra dengan para demagog tersebut bisa mendapati usaha mereka berantakan karena efek umpan balik yang kontradiktif, sebuah kondisi di mana individu-individu yang menerima informasi yang kurang mengenakkan tidak serta-merta mau melawan pandangan mereka. Penyebarluasan *post-truth* dan politisasinya sangat terbantu oleh teknologi terbaru, tak terkecuali media televisi, media internet, ataupun media sosial.

b. Dengan kehadiran media baru di tengah masyarakat Indonesia oleh invensi pihak asing menghasilkan ruang publik baru menjadi perhatian utama kita pada persoalan kebebasan berekspresi atas apa saja dan berpartisipasi dalam arti akses internet. Awalnya, *new public sphere* seperti *Facebook, Twitter* dan yang baru *Instagram* dimanfaatkan sebagai ajang merepresentasikan diri manusia sebagai makhluk sosial. Robert Dahl menyatakan bahwa hal yang paling menentukan juga bagi sistem dalam demokrasi adalah bagaimana masyarakat untuk mengimplikasikan hak-hak fundamental seperti adanya kebebasan untuk berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu. Kini masyarakat di era globalisasi informasi memanfaatkan ruang maya sebagai sarana partisipasi politiknya, istilahnya *cyber democracy*. Partisipasi politik dalam ruang maya ini dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik partisipan atau warga negara. Bagi kelompok optimis, internet dilihat sebagai ruang siber memuat ruang publik baru yang memungkinkan pertukaran melampaui geografi, sosial dan batasan budaya, yakni sebuah tempat tanpa adanya kontrol, sehingga setiap individu bebas untuk mengekspresikan pendapat dan pemikirannya. Derasnya injeksi informasi media sosial ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dapat diibaratkan pedang bermata dua. Dalam pandangan kritis, internet sekaligus menciptakan segmentasi publik yang berbeda (*echo chambers*) yang mengakibatkan polarisasi sosial.

2. Kekurangan

a. Kedamaian NKRI terancam oleh negara yang gagal. Apabila dalam suatu negara, pemerintah gagal berfungsi untuk melindungi warganya karena adanya perang saudara atau pembunuhan massal, maka pada kondisi inilah negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Dalam era *post-truth* ini, terutama memasuki tahun politik, penyebaran berita hoaks politik menjadi isu yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia oleh pihak asing. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara) hingga ujaran kebencian dapat memperlemah ketahanan nasional jika ketahanan nasional kita lemah maka bisa terjadi disintegrasi bangsa, dan bisa mengancam keutuhan NKRI. Pendapat ini dijustifikasi oleh hasil survei yang dilakukan secara *online* oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada bulan Februari 2017 kepada 1.116 responden. Hasil survei tersebut menunjukkan, sebanyak 96,6% responden berpendapat bahwa hoaks dapat menghambat pembangunan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jika ketahanan nasional lemah dan keutuhan NKRI terancam akibat maraknya berita hoaks politik maka proses pembangunan menjadi terhambat.

b. Konsepsi nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Relevansi ketahanan nasional dengan pembangunan nasional tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Sebaliknya, kukuhnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengimplementasikan ketahanan nasional sebagai strategi dalam menghadapi era *post-truth* untuk menangkal berita hoaks politik.

c. Intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan. Praktik-praktik negara saat ini telah menimbulkan suatu preseden, di mana intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan terjadi ketika ada suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara kolektif dilakukan melalui otoritas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membentuk kerja sama internasional. Hal ini sesuai dengan bab VII Piagam, yang berbicara tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata.

Penerapan Intervensi dalam Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional

Piagam PBB dalam Pasal 2 (4) dan 2 (7) jelas menyatakan bahwa hubungan antar-negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) yang dikeluarkan pada 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. Namun, dalam praktik negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut sering kali dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan yang terjadi di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh Negara-negara dalam hubungan internasionalnya.

Tindakan Negara dalam melakukan intervensi yang bersifat kemanusiaan sering didasari dengan alasan yang menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.1 Atas dasar itulah beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Internasional.

Dari perspektif masyarakat internasional, intervensi kemanusiaan muncul karena dua alasan utama. *Pertama*, dilakukan dengan penggunaan kekerasan (*use of force*) yang dalam aspek legal, yang sangat tidak dibenarkan. *Kedua*, intervensi kemanusiaan dijalankan dengan cara melanggar kedaulatan Negara yang diintervensi. Alasan yang kedua ini lebih peka dari alasan yang pertama karena dalam masyarakat internasional, masalah kedaulatan (*sovereignty*) berada di atas segalanya. Aspek kedaulatan ini yang membuat suatu negara dianggap bermartabat.

Ada beberapa parameter yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan menurut Awaludin, yaitu:

1. Negara yang Gagal. Apabila dalam suatu negara, pemerintah gagal berfungsi untuk melindungi warganya karena adanya perang saudara atau pembunuhan massal maka pada kondisi inilah negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
2. Kesadaran Kemanusiaan. Bila dalam suatu Negara terjadi pembunuhan secara massal, perbudakan massal dan peledakan

yang menimbulkan kematian yang besar (*shocking the conscious of mankind*) maka kondisi itulah yang membenarkan suatu Negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

3. Jalan Terakhir. Bila semua cara nonmiliter telah dilakukan tetapi tetap gagal maka intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan. Praktik-praktik negara saat ini telah menimbulkan suatu preseden, di mana intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan terjadi ketika ada suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara kolektif dilakukan melalui otoritas Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa dengan membentuk kerja sama internasional. Hal ini sesuai dengan bab VII Piagam, yang berbicara tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata.

Intervensi kemanusiaan memang tidak mendapatkan pengaturan yang tertulis dalam Piagam. Akan tetapi, ketentuan larangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata yang diatur dalam piagam pun masih dapat ditafsirkan berbeda-beda, apakah merupakan sebuah larangan yang absolut atas penggunaan kekuatan bersenjata atau batasan dalam penggunaan kekerasan bersenjata. Terlepas dari motif politik yang dimiliki oleh para pihak asing dalam melakukan tindakan intervensi di Libya, dengan melihat dari sudut pandang Hukum Internasional, ada dua hal yang mendasari tindakan intervensi ke Libya ini, yaitu:

1. Hukum Internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam arti Negara lain atau organisasi mana pun pada dasarnya tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu Negara.
2. Intervensi yang pada awalnya direncanakan dalam rangka melindungi rakyat sipil di Libya dari tentara pro-Khadafi, mengakibatkan jumlah korban warga sipil ribuan jiwa dan puluhan ribu untuk mengungsi.

Masyarakat internasional sepakat bahwa intervensi kemanusiaan hanya bisa dilakukan secara kolektif melalui otoritas Dewan Keamanan dengan membentuk kerja sama internasional. Hal ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab VII, yang merupakan pasal tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata. Intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah persoalan hukum, melainkan permasalahan kepentingan, kekuatan dan dominasi.

Dampak Intervensi Negara Asing Terhadap Kedaulatan NKRI

Intervensi asing dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat tradisional sampai modern, yang terkini dengan bantuan dan mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi (Nainggolan, 2020). Di masa kolonialisme, intervensi asing didahului aksi pendudukan, di era dewasa ini teknologi memungkinkannya bersifat langsung tanpa perlu aksi penguasaan wilayah lebih dulu. Karena itu, sesuai dengan perkembangan zamannya, peran kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, menjadi dominan. Intervensi semacam ini ditandai dengan pembobolan akses masuk ke sumber data nasional sebuah negara, untuk kemudian dikacaukan dan diintervensi, dengan memasukkan data hasil rekayasa, berisi propaganda negara yang berkepentingan. Keterlibatan dan intervensi asing yang diwaspadai rawan dilakukan dewasa ini melalui propaganda *firehouse falsehood* dinilai sebagai salah satu ciri dari era *post-truth*, yang ditandai dengan mudahnya masyarakat begitu saja mempercayai informasi instan yang mereka terima tanpa menyelidiki atau mengujinya lebih lanjut. Lebih jauh lagi, era ini dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, yang tidak mendasarkan lagi setiap informasi yang mereka terima berdasarkan objektivitas dan reliabilitas, serta logika. Sikap dan respons masyarakat dalam menerima informasi dari luar menjadi cenderung mencari dan membuat pembenaran (*justification*) daripada mencari Poltak Partogi Nainggolan Pemilu Presiden dan Intervensi Asing 5 kebenaran (*truth*) yang sesungguhnya. Ketimpangan informasi antara yang benar dengan yang palsu (direkayasa) di negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu membuat terciptanya negara yang dipenuhi informasi asimetris.

Indonesia merupakan sebuah entitas sosial budaya, selain tentu saja sebagai sebuah entitas politik. Sebagai sebuah entitas sosial budaya, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dan cara pandang yang berasal dan mengakar dari budaya tersebut. Seperti apa kontekstualisasi nilai-nilai luhur dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut dapat dilihat pada apa yang menjadi konsensus dasar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dampak negatif intervensi pihak asing di era *post-truth* terhadap karakter bangsa Indonesia apabila tidak disikapi dengan langkah-langkah yang memadai. Kita semua tentu tak ingin terjadi segregasi sosial, konflik horizontal yang kian

melebar di masyarakat, hingga terciptanya generasi instan yang hanya menumpukan pemahaman dan proses konstruksi berpikir mereka pada perangkat informasi yang penuh dengan berita bohong, fitnah, dan propaganda (anugrah, 2021). Dampak negatif intervensi pihak asing Ikut campur yang berlebihan malah akan dapat memperkeruh suatu suasana yang sedang tidak baik. Oleh sebab itu, intervensi ini sebetulnya tidak disarankan untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.

Ternyata ada pun negara yang senang mengerjakan intervensi, tentu terdapat niat terselubung dibalik seluruh itu. Pengertian intervensi ini juga dapat membuka wawasan penduduk negara supaya dapat lebih berhati hati andai ternyata terdapat yang mengerjakan intervensi. Ketika seorang pihak ketiga ikut campur ke dalam urusan pihak lain, hal tersebut malah bisa menyebabkan kondisi menjadi semakin buruk. Apalagi jika kegiatan intervensi memang dilakukan dengan tujuan negatif, sudah tentu tak akan memperbaiki keadaan dan menambah konflik yang sedang terjadi. Tak heran jika banyak negara di dunia memandang negatif terhadap negara yang suka melakukan intervensi kepada sesuatu yang bukan urusannya (Febriyandra, 2021).

1. Dampak Positif Intervensi Pihak Asing

a. Intervensi positif adalah seperti intervensi negara Indonesia dalam mengakhiri perang Kamboja dan Vietnam, juga intervensi PBB untuk menjaga keamanan dan tidak adanya pelanggaran HAM di seluruh negara di dunia;
b. Redistribusi pendapatan dan kekayaan. Misalnya, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan seperti asuransi pengangguran, kesehatan dan pendidikan gratis. Itu menopang kualitas hidup mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Pengenaan pajak juga menjadi jalan lain untuk redistribusi pendapatan;
c. Menyediakan barang publik. Contoh barang publik adalah taman umum, infrastruktur dan pertahanan nasional. Swasta sering kali tidak mau menyediakan semacam itu karena tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran;
d. Menyediakan lapangan persaingan yang adil. Melalui peraturan anti monopoli, pemerintah mencegah praktik persaingan tidak sehat seperti kolusi dan penetapan harga predatori;
e. Mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan pembatasan perdagangan untuk

melindungi industri domestik dari persaingan produk impor. Harapannya, industri terus tumbuh dan menciptakan lebih banyak pekerjaan;

f. Melindungi konsumen. Misalnya, pemerintah meluncurkan kebijakan perlindungan konsumen, persyaratan kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan;

g. Mengubah perilaku konsumen. Intervensi adalah salah satu jalan untuk mengurangi dampak dari eksternalitas negatif. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk produk seperti minuman beralkohol dan tembakau;

h. Melestarikan lingkungan. Tanpa peraturan dan kebijakan pemerintah, perusahaan lebih cenderung untuk mengabaikan biaya eksternal terhadap lingkungan. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau membiarkan limbah mengalir ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Praktik semacam itu tentu saja membahayakan kesinambungan perekonomian dalam jangka panjang.

Mencapai tujuan makroekonomi. Empat sasaran makro-ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan ekuilibrium neraca pembayaran. Beberapa ekonom memandang intervensi pemerintah adalah perlu. Tapi, mereka masih berdebat tentang seberapa besar pemerintah harus campur tangan dan bagaimana mereka harus campur tangan. Perbedaan pendapat tersebut memunculkan dua aliran pemikiran dalam ekonomi. Yang satu berfokus pada aspek positif pasar, sementara yang lain berfokus pada ketidaksempurnaan pasar. Dalam makroekonomi, itu memunculkan mazhab pemikiran seperti ekonomi Keynesian dan ekonomi Neoklasik (Tujuan Makro Ekonomi, 2021).

Keynesian memandang pemerintah seharusnya campur tangan. Ketika terjadi disequilibrium, perekonomian tidak akan bergerak menuju ekuilibrium yang baru dengan sendirinya. Ambil kasus ketika perekonomian sedang depresi. Di antara solusi untuk keluar dari depresi ekonomi adalah dengan merangsang belanja pemerintah, yang mana merupakan bagian dari permintaan agregat. Sebagaimana kita tahu, permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Ekspor neto berada di luar kendali perekonomian domestik karena tergantung pada kondisi perekonomian global. Sehingga, opsi utama untuk merangsang permintaan agregat adalah melalui konsumsi, investasi dan belanja

pemerintah. Tapi, selama depresi ekonomi, keuntungan bisnis memburuk karena permintaan jatuh. Begitu juga, pendapatan rumah tangga jatuh karena tingginya tingkat pengangguran. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk meningkatkan konsumsi dan investasi selama depresi. Sehingga, opsi yang lebih masuk akal adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Anggaran belanja lebih tergantung pada kebijakan diskresi pemerintah alih-alih kondisi ekonomi (Keynesia,2021).

Sebaliknya, ekonomi Neoklasik memandang intervensi pemerintah seharusnya minimal. Mekanisme pasar akan bekerja dan mengarahkan perekonomian menuju ekuilibrium. Menurut ekonom Neoklasik, penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan barang, *output*, dan pendapatan dalam perekonomian. Jadi, intervensi pemerintah hanya akan membuat perekonomian tidak lebih baik (Ekonom Klasik,2021).

Problematika Intervensi Negara Asing terhadap Kedaulatan NKRI

Intervensi asing bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat tradisional sampai modern, yang terkini dengan bantuan dan mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi. Di masa kolonialisme, intervensi asing didahului aksi pendudukan, di era dewasa ini teknologi memungkinkannya bersifat langsung tanpa perlu aksi penguasaan wilayah lebih dulu. Karena itu, sesuai dengan perkembangan zamannya, peran kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, menjadi dominan. Intervensi semacam ini ditandai dengan pembobolan akses masuk ke sumber data nasional sebuah negara, untuk kemudian dikacaukan dan diintervensi, dengan memasukkan data hasil rekayasa, berisi propaganda negara yang berkepentingan. Dalam intervensi asing seperti ini, peran agen intelijen di lapangan diupayakan sangat minim. Sedangkan aset yang digunakan adalah lingkaran dalam yang berkepentingan langsung terhadap suksesnya target intervensi bagi calon presiden yang sudah dipersiapkan negara yang berkepentingan. Melalui pesan propaganda yang disampaikan dan telah dipersiapkan sebelumnya secara seksama dan detail, upaya mempengaruhi masyarakat di negara tujuan dapat dilakukan jauh lebih halus, tanpa terlihat dan dirasakan mencolok. Harapan baru dibangun dari realitas palsu yang baru diciptakan, yang kemudian tercipta dan dapat diterima masyarakat begitu saja di negara tujuan intervensi dan

ditelan bulat-bulat, tanpa filter dan direspons daya kritis masyarakat yang telah lama mati akibat telah terpapar disinformasi berskala besar dalam waktu lama, seiring dengan absennya aksi kontra- intelijen oleh pemerintah yang tengah diserang dan terancam.

Ketimpangan informasi antara yang benar dengan yang palsu di negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu membuat terciptanya negara yang dipenuhi informasi asimetris. Akibat penggunaan disinformasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, informasi yang benar dan berkualitas dengan mudah kemudian digeser disinformasi yang telah dibangun dan direkayasa, dalam hal ini untuk kepentingan propaganda negara yang melakukan intervensi.

Kondisi informasi asimetris ini jelas memberi keuntungan bagi negara atau aktor non-negara yang jauh-jauh hari berkepentingan untuk melakukan intervensi atas penyelenggaraan pemilu di negara lain. Tetapi, sebaliknya, memberi implikasi yang buruk bagi negara dan pihak-pihak yang dirugikan, karena kalah dalam pemilu yang sudah diintervensi tersebut. Keterlibatan asing secara legal, yang sesungguhnya lebih menggambarkan bantuan di tengah keterbatasan negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu, seperti Indonesia dan Timor-Leste, mengingat posisinya sebagai *new emerging democracies*, dapat disaksikan dalam bentuk berbagai kerja rutin, seperti pelatihan penyelenggaraan pemilu yang bebas, bersih, terbuka, dan juga efisien.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka sosialisasi dan diseminasi demokrasi sebagai sistem politik yang disadari relatif jauh lebih baik untuk dipilih oleh negara-negara di dunia ini, khususnya negara demokrasi baru. Karena itulah, kemudian diselenggarakan berbagai program *workshops*, termasuk yang ditujukan bagi para saksi dari partai-partai politik. Juga ada program pendidikan politik dan pelatihan bagi para calon anggota legislatif, yang pasca-pemilu biasanya dilanjutkan dengan program sosialisasi bagi anggota parlemen yang telah terpilih.

Kehadiran, sebagai keterlibatan secara konstruktif, bahkan dilakukan atas undangan pihak di negara yang sedang mempersiapkan pemilu, termasuk Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019, terkait usulan menghadirkan pemantau asing. Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandy, mengungkapkan kehadiran para pemantau dari luar negeri cukup penting demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas, karena mereka bisa memberikan penilaian yang objektif.

Bagaimana dalam praktiknya intervensi asing dalam pemilu ini dilakukan? Seiring dengan masuk ke dalam sistem komputer negara dan partai politik yang menjadi sasarannya, serta data pribadi yang dimiliki media sosial, pihak asing terlibat dalam perencanaan dan mengembangkan kampanye negatif dan kotor terhadap lawan dari pihak yang didukungnya, dan sebaliknya, mendukung calon penguasa boneka yang akan dikuasainya, dengan merekayasa dan melebih-lebihkan kemampuan, kinerja dan prestasinya. Dengan ini, sebagai manfaat timbal-baliknya, kebijakan di masa depan si calon pemimpin yang didukung negara asing itu pun diharapkan dapat diarahkan atau didikte pemerintah negara sponsornya. Dalam implementasinya, selama kampanye, metode propaganda negatif, yang penuh kebohongan dan kepalsuan, yang diarahkan kepada pihak lawan, dilancarkan secara gencar dan kontinu. Akibatnya, kalangan terpelajar atau terdidik pun, terkecoh dan terperdaya untuk diarahkan memilih kandidat pemimpin dukungan negara asing ini.

Taktik propaganda ala Joseph Goebbels di era Hitler, telah diuji sukses dalam pemilu Jerman pada 1933, sukses dalam mengelabui rakyat Jerman yang cerdas dan dikenal logis berpikir dan dalam mengambil keputusan.

Tanggapan atau Penyelesaian Intervensi Negara Asing terhadap Kedaulatan NKRI

Dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Penanganan dan pemberdayaan arsip berikut informasinya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus secara terpadu, sistematik, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara yang ada serta dengan tetap memperhatikan paradigma nasional, perkembangan lingkungan strategis, dan kemajuan zaman. Perlu penanganan khusus terhadap arsip dan informasi di dalam arsip yang bernilai strategis sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, apalagi pihak asing, yang bisa mengancam kedaulatan NKRI.

Pada konteks ini, terdapat tiga elemen penting yang kurang lebihnya menciptakan kekeruhan kondisi politik di Indonesia sejak 2018 hingga 2019 pasca-pemilihan umum. *Pertama*, paradigma *post-truth* yang menciptakan partikularisme narasi-narasi sehingga memungkinkan adanya kebohongan dalam penangkapan realitas objektif. *Kedua*, wacana politik yang sebagai manifestasi dari kelompok

elite kepentingan; abstrak secara perspektif, materiil dalam produksi berita bohong di media sosial. *Ketiga*, media sosial yang berperan memediumisasi dari keseluruhan konten sehingga sampai di tangan masyarakat. Media sosial, khususnya *online*, mengarahkan manusia ke era baru pencerahan melalui komunikasi yang mudah diakses secara universal. Gaya hidup digital seperti ini mengkhawatirkan kondisi masyarakat Indonesia karena dalam jejaring *online* banyak proyek terorganisir untuk mencemari kesadaran dan mengarahkan politisasi subjek individu.

Dalam memahami asal-usul dunia *post-truth* tampaknya sangat membutuhkan analisis tendensi politik dan sosial. Ancaman *post-truth* yang menyerang berbagai elemen kehidupan manusia tampaknya juga membutuhkan pendekatan multidisiplin yang lebih terintegrasi; menggabungkan pemeriksaan mendalam terhadap kognisi, sosial, budaya dengan kemungkinan solusi dari kendala politik saat ini. Penulis juga menyarankan beberapa saran, *pertama*, adanya lembaga swadaya yang membuat sistem pelacak narasi kebohongan. Kedua, mempekerjakan Ombudsman atau editor yang mengawasi operasi surat kabar dan menanggapi kritik publik. Ketiga, pembelajaran publik tentang cara kerja kampanye berita palsu. Keempat, pelatihan umum dalam literasi informasi sejak dini. Kelima, pendidikan teknologi untuk mengantisipasi mekanisme gelembung filter otomatis. Keenam, menjamin kebebasan berekspresi di ruang publik demokrasi melalui klaim-klaim rasional.

Penyajian fakta yang dilakukan melalui pola kerja jurnalistik yang terukur etika dan profesionalitas membuat fakta-fakta tersebut nyaris tak bisa dibantah. Bukanlah upaya mudah melakukan *fact checking* terhadap masalah- masalah yang ditimbulkan oleh hoaks, *fake news* dan *false news*. Butuh kemampuan profesional dengan jumlah tenaga yang tidak sedikit, termasuk biaya yang lumayan besar. Untuk itu perlunya keterlibatan lembaga-lembaga pers untuk lebih sering melakukan *fact checking* atas polemik yang muncul di masyarakat. Namun, *fact checking* tidak serta merta menyasar individu-individu yang sebelumnya telah terpapar hoaks, *fake news* dan *false news*, untuk itulah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Institusi pers, termasuk asosiasi wartawan, untuk lebih masif lagi melakukan *fact checking*, dan bertindak sebagai hoaks buster. Perlunya meningkatkan kemampuan teknologi sebagai instrumen pendukung melakukan f*act checking*. Aksi nyata pemerintah cq Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Siber Nasional dalam menangkal dan melakukan tindakan hukum yang

keras kepada para pelaku pembuat hoaks, *fake news*, *false news* maupun *hate speech*. Upaya ini tentu saja tanpa mengabaikan proses hukum dan menjaga demokrasi yang sudah berkembang baik. Melakukan pendidikan terkait literasi media.

Pengaturan dalam undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kepulauan bertolak dari aspirasi langsung masyarakat di daerah-daerah kepulauan, yang disuarakan lewat *Focus Group Discussion* dengan para Senator (anggota-anggota DPD); aspirasi yang dikemukakan menghendaki adanya wewenang yang lebih bermakna dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan dalam wilayah kepulauan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakatnya, khususnya pada wilayah darat pulau, perairan laut pedalaman daerah kepulauan; para pemangku kepentingan pada daerah di wilayah kepulauan tidak bermaksud mengubah bentuk dan susunan pemerintahan pada daerah di wilayah kepulauan. Konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul (jika) Pemerintahan daerah di wilayah kepulauan diakui sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki ciri dan karakter kewilayahan yang khusus, tidak mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan aspirasi adanya daerah yang dikhususkan di wilayah kepulauan dapat mengatasi ketimpangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya antara sentra-sentra kehidupan sosial, ekonomi dan budaya antara wilayah berbasis daratan dengan wilayah berbasis kepulauan yang didominasi perairan laut pedalaman. Wilayah perairan teritorial Indonesia dan laut pedalaman lainnya yang menjadi wewenang Pemerintah dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan di luar daerah-daerah kepulauan, masih lebih luas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah perairan laut pedalaman dari seluruh daerah di wilayah kepulauan. Argumentasi akademik, filosofis, dan sosiologis mengenai adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan, menepis argumentasi akan adanya disintegrasi bangsa jika status daerah di wilayah kepulauan ditetapkan sebagai daerah yang memperoleh perlakuan khusus.

Bentuk imperialisme yang dialami oleh Indonesia adalah adanya campur tangan asing dalam proses pengambilan kebijakan negara. Intervensi asing ini terjadi melalui berbagai cara, misalnya, dengan memberikan masukan dan ide langsung melalui beberapa ahlinya dan LSM-LSM dalam proses pengambilan kebijakan atau amandemen undang-undang sebuah negara, dan melalui utang.

Sejarah masuknya dominasi asing ke Indonesia sejak era Soeharto sebagai bentuk imperialisme. Pada masa Soeharto sebagai penguasa baru di Indonesia (1966), sikap pemerintah terhadap utang luar negeri berubah secara drastis. Hal itu tidak hanya tampak pada strategi pembangunan yang dijalankannya, atau pada jumlah utang baru yang dibuatnya, tetapi terutama tampak secara mencolok pada berbagai tindakan yang dilakukannya dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Beberapa tindakan yang dilakukan Soeharto dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, memperbaiki hubungan dengan para kreditur, terutama negara-negara blok barat dan lembaga-lembaga keuangan multilateral. Tujuannya untuk memperoleh utang luar negeri Baru dan meminta penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri yang diwariskan Soekarno. Kedua, melanjutkan pelaksanaan program stabilisasi IMF serta mengeluarkan kebijakan ekonomi yang lebih bersahabat dengan sektor swasta dan Investasi asing.

Intervensi asing bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat tradisional sampai modern, yang terkini dengan bantuan dan mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi. Di masa kolonialisme, intervensi asing didahului aksi pendudukan, di era dewasa ini teknologi memungkinkannya bersifat langsung tanpa perlu aksi penguasaan wilayah lebih dulu. Sehingga teknologi informasi yang begitu pesat menjadi dominan.

Pelaku intervensi asing dalam pelaksanaan pemilu nasional di berbagai negara bisa melibatkan *State actors* (aktor negara) dan *non-state actors* (aktor nonnegara). Aktor negara memperlihatkan kehadiran pemerintah negara asing secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat terdeteksi dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan, terutama bantuan yang diberikan, secara resmi maupun tidak resmi. Sementara, aktor non-negara yang terlibat berupa berbagai institusi nonpemerintah yang memang benar-benar bersifat mandiri maupun yang masih merupakan bagian dan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Keterlibatan dan intervensi asing yang diwaspadai rawan dilakukan dewasa ini melalui Propaganda *firehouse falsehood* dinilai sebagai salah satu ciri dari era *post-truth*, yang ditandai dengan mudahnya masyarakat begitu saja mempercayai informasi instan yang mereka terima tanpa menyelidiki atau mengujinya lebih lanjut. Terlebih lagi pada era ini dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, yang tidak mendasarkan lagi setiap informasi yang mereka terima berdasarkan

objektivitas dan reliabilitas, serta logika. Sikap dan respons masyarakat dalam menerima informasi dari luar menjadi cenderung mencari dan membuat pembenaran (*justification*) daripada mencari kebenaran (*truth*) yang sesungguhnya.

Indonesia adalah sebuah entitas sosial budaya, selain tentu saja sebagai sebuah entitas politik. Sebagai sebuah entitas sosial budaya, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dan cara pandang yang berasal dan mengakar dari budaya tersebut. Seperti apa kontekstualisasi nilai-nilai luhur dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut dapat dilihat pada apa yang menjadi konsensus dasar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, seperti Bhinneka Tunggal Ika, dan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). dampak negatif intervensi pihak asing di era *Post-truth* terhadap karakter bangsa Indonesia apabila tidak disikapi dengan langkah-langkah yang memadai. Kita semua tentu tak ingin terjadi segregasi sosial, konflik horizontal yang kian melebar di masyarakat, hingga terciptanya generasi instan yang hanya menumpukan pemahaman dan proses konstruksi berpikir mereka pada perangkat informasi yang penuh dengan berita bohong, fitnah, dan propaganda. Dampak negatif intervensi pihak asing Ikut campur yang berlebihan malah akan dapat memperkeruh suatu suasana yang sedang tidak baik. Oleh sebab itu, intervensi ini sebetulnya tidak disarankan untuk dilaksanakan oleh sebuah Negara.

BAB V
POSISI PANCASILA DALAM ERA POST-TRUTH

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memedulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, dan aturan (yang mengatur tatanan kehidupan manusia yang hidup untuk berkembang sesuai dengan cita, rasa dan karsa masing-masing. Keanekaragaman tersebut dirangkum oleh Ir. Soekarno ke dalam istilah Pancasila. Gagasan Pancasila tersebut disampaikan pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945 (Fais Yonas Bo'a, 2018:30). Namun, Ir. Soekarno tidak pernah menyatakan diri sebagai penemu Pancasila akan tetapi hanya sebagai penggali Pancasila. Hal tersebut menjadi wajar jika Pancasila memang dilahirkan dari nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia dan Ir. Soekarno yang menjadi penggali nilai-nilai tersebut dan mengungkapkannya dengan istilah Pancasila (H.M. Alwi Kaderi, 2015: 28).

Kenyataannya, Pancasila justru kian berkurang diakibatkan arus globalisasi, seharusnya di era globalisasi ini Pancasila justru menjadi filter. Keberadaan Pancasila saat ini sudah tidak seperti yang diharapkan sebelumnya sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Hari peringatan kelahiran Pancasila yang dirayakan setiap tahun menjawab kenyataan tersebut, peringatan hari kelahiran Pancasila hanya sebagai peringatan simbolis semata. Pancasila tidak lagi menjadi spirit dalam berbangsa dan bernegara. Perkembangan pola hidup sosial kemasyarakatan terjadinya distorsi dari pemaknaan Pancasila tersebut. Beberapa dekade belakangan kita menemukan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak hafal dan paham akan Pancasila.

Kemudian konten negatif di dunia maya termasuk hoaks dan ujaran kebencian naik signifikan. Ini menandakan kita benar-benar berada di era *post-truth*. *Post-Truth* atau pasca kebenaran merupakan kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik, dibanding emosi dan keyakinan personal. Dalam kata lain, masyarakat hanya ingin mengetahui apa yang sesuai dengan ketertarikan emosionalnya semata. Era *post-truth* menjadikan pola laku masyarakat mengatasnamakan kebenaran hanya berawal dari keyakinan pribadi. Terkadang membaca Pancasila pun hanya pada satu butir poin pokok saja yaitu ketuhanan. Hal demikian menjadi keyakinan yang mutlak.

Definisi Pancasila

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yakni "panca" berarti lima dan "sila" berarti dasar. Maka, arti Pancasila adalah lima dasar. Selain itu, sila juga bisa diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang.

Pancasila menjadi dasar tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Istilah Pancasila terdapat pada kitab Negara kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Selain berarti "berbatu sendi yang lima" (dari bahasa Sansekerta), Pancasila dalam kitab Sutasoma juga berarti pelaksanaan Kesusilaan yang lima.

Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan.

Wujud Pancasila sebagai konkret ialah Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari. Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai moral yang berasal dari agama-agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan hanya berlaku bagi kelompok yang bersangkutan. Dengan demikian, tampaklah bahwa moral Pancasila mengatasi segala golongan dan bersifat nasional. Pancasila adalah lima asas moral yang relevan untuk ditetapkan menjadi dasar negara yang memiliki ilmu pengetahuan dari aspek

ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mampu dijadikan landasan dasar dalam upaya mengembangkan Pancasila dan mengatasi persoalan bangsa Indonesia saat ini.

Di dalam buku *Ensiklopedia Pancasila: Arti Pancasila dan Demokrasi Pancasila* karya R. Toto Sugiarto dkk., demokrasi Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, juga yang dalam penyelesaian berbagai masalah nasionalnya berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk memperoleh mufakat.

Pancasila menurut para ahli, yaitu:

1. Prof. Muhammad Yamin

   Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

2. Notonegoro

   Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan Negara Indonesia.

3. Ir. Soekarno

   Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

4. Ruslan Abdul Ghani

   Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

5. Prof. Dr. Nurcholish Majdid

   Menurut Prof. DR. Nurcholish Majdid, Pancasila diartikan sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia, Pancasila menyumbang beberapa hal penting (*pasla.jambiprov.go.id*, 2023).

Pancasila yang diutarakan Ir. Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI yang pertama memuat 5 (lima) buah gagasan pada dasarnya, yaitu:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila (Nurwardani, Paristiyanti et.al, 2016: 52), yaitu:

1. Sosio-Nasionalisme;
2. Sosio-Demokrasi, dan;
3. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong. Selain Ir. Soekarno terdapat 2 (dua) tokoh lain yang mengutarakan dasar falsafah (H.M. Alwi Kaderi, 2015: 38). Tokoh tersebut, yaitu:

Mr. Muhammad Yamin mengutarakan 5 (lima) gagasan, sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Peri Kesejahteraan (Nurwardani, Paristiyanti et.al, 2016:52).

Akan tetapi, gagasan tersebut berubah ketika disampaikan secara tertulis menjadi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia;
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Nurwardani, Paristiyanti et.al, 2016:52).

Soepomo mengutarakan 5 (lima) gagasan, sebagai berikut:

1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan Lahir dan Batin;
4. Musyawarah;
5. Keadilan Rakyat.

Selanjutnya, gagasan tersebut di atas mengerucut dan pada sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945, disetujuinya naskah awal "Pembukaan Hukum Dasar" yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila, sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Nurwardani, Paristiyanti et.al,2016:53).

Tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan, yang diberi nama "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Junbi Iinkai (H.M. Alwi Kaderi, 2015: 43). Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Radjiman Widijodiningrat diundang oleh Marsal Terauchi, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon/ Vietnam, guna menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia (H.M. Alwi Kaderi, 2015: 44). Namun, pada 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, kemudian pada 9 Agustus 1945 di Nagasaki, yang menyebabkan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu. Akibat dari itu, menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersebut menyebabkan seluruh janji-janji untuk memerdekakan

bangsa Indonesia menjadi tidak ada lagi. Walaupun demikian sebagian besar rencana Jepang terhadap bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik, kecuali rencana terakhir berupa janji untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlaksana.

Akhirnya, dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada, sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka Indonesia mengambil keputusan sendiri untuk memproklamasikan Indonesia (Paristiyanti Nurwardani et.al, 2016:57). Bertepatan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar jam 10 WIB, Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu: Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya (Koentjaraningrat, 2004: 2).

Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD '45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula;
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta);
3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr.Kasman Singodimejo. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
    a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
    b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
    c. Persatuan Indonesia;

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2023:94-95).

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 (tujuh) kata di belakang kata "Ketuhanan", yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 (tujuh) kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah "Yang Maha Esa" (Fais Yonas Bo'a, 2018:33-34). Dengan demikian, maka sah atau legal Pancasila sebagai *staats fundamental norm*. Pancasila sebagai *staats fundamental norm bersifat* saling mengisi antara sila-sila yang terdapat di dalamnya, yaitu:

Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Saleh, Roeslan, 1979:49).

Pancasila sebagai *staats fundamental norm* atau weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri.

Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (Saleh, Roeslan, 1979:49). Dengan demikian, jika dicermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar

yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar-norma melalui teorinya Stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi". Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi,sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Artinya, Pancasila merupakan sumber sebagai sumber hukum di mana lahirnya atau Sejarah pembentukan Pancasila dapat dikatakan sebagai salah satu bagian sejarah hukum di Indonesia (Saleh, Roeslan, 1979:49).

Ciri-ciri Sebuah Masyarakat yang Memasuki Era Post-Truth

Merebaknya berita hoaks dan kebimbangan media massa dan jurnalis menghadapi berita-berita bohong yang disebarkan di media sosial. Indonesia sejak 1998 telah memasuki era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses dan menyebarluaskan informasi seluas-luasnya ditambah dengan perkembangan teknologi informasi, memungkinkan setiap orang untuk menciptakan informasi baik fakta maupun hoaks.

Ciri-ciri *Post-Truth* adalah masyarakat informis. Kebenaran tidak dibantah melainkan dijadikan sebagai norma. Masyarakat yang haus akan informasi menjadi sasaran utama *Post-Truth* karena ada harapan dan *passion* di situ. *Passion* dan intuisi mengarahkan penolakan terhadap hal baru sekaligus mengarahkan pandangan terhadap hal yang diyakini.

David Hume mengatakan bahwa preferensi mendahului pikiran (*reasoning*). Dengan demikian, kebohongan menjadi memikat karena si pembohong menggunakan logika terhadap yang dibohongi. Sensor saat ini pun juga menggunakan strategi *Post-Truth*, tetapi berbeda dengan sensor zaman dahulu. Apabila sensor zaman dahulu selalu menutup, memotong fakta tapi sensor zaman sekarang adalah menggelontorkan sebanyak mungkin info sehingga masyarakat menjadi bingung mana yang fakta dan mana yang hoaks.

Populisme. *Post-Truth* menyasar populisme karena masyarakat cenderung *groupis* daripada *selfish*. Sesuatu yang menarik itu karena diingini oleh orang lain bukan karena nilai yang dimiliki oleh sesuatu

itu sendiri. Robert Tales mengatakan hal ini sebagai perilaku karangan. Perilaku karangan inilah dasar dari pembentukan citra. Keberadaan citra semakin memiliki legitimasi karena didukung dengan media sosial. Emile Durkheim dalam dasar-dasar pengalaman religius mengatakan bahwa transenden bukan berarti beragama secara teologis melainkan transenden adalah proyeksi ketakutan pada yang sosial.

Teknik *Post-Truth* di era digital ini adalah dengan photoshop, dekontekstualisasi, dan *headline*. Ketiga perangkat ini berfungsi untuk mendistorsi data. Masyarakat Amerika yang notabene sebagai masyarakat negara maju pun ternyata 62 persen meng*update* diri di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa orang yang berpendidikan tinggi pun masih dapat kabur dalam memahami berita. Pendidikan tinggi menggambarkan ideologi yang tinggi dan ideologi yang tinggi membuat orang hanya percaya pada informasi yang seideologi dengannya. Informasi yang disajikan dalam *Post-Truth* ini disajikan dalam laporan jurnalisme yang disebut dengan jurnalisme membakar nafsu. Jurnalisme membakar nafsu akan menimbulkan insting sosial untuk melindungi kelompok sesuai dengan teori groupis Jonathan Right. Menguji dan menyalahkan itu menjadi faktor penting dalam kelompok. Di sisi lain, ada juga faktor kolestosin atau hormon. Ini adalah hormon untuk menarik yang disukai sekaligus membenci yang tidak disukai.

Jean Baudrillard menyatakan bahwa fenomena poststruktural ini merupakan fenomena hiperealitas atau skandal negativitas operasional. Hiperrealitas Jean Baudrillard membuktikan yang riil dengan yang imajiner. Menghidupkan etika yang sekarat dengan yang skandal. Tanda disamakan dengan objek dengan referen padahal ada garis ada proses yang dilalui agar tanda ini menjadi sama dengan objek atau referen. Bagi sistem *Post-Truth*, kebenaran adalah kasus khusus bagi kekeliruan. *Post-Truth* melawan naluri dengan tirani. *Post-Truth* juga mempertanyakan dominasi kebenaran. Bahasa sebagai instrumennya. Bahasa itu tidak netral karena bahasa mengandung ideologi dan bahasa itu instrumen kekuasaan. Oleh sebab itu, Feercloch menyarankan ketika membaca teks maka amatilah ketidakberesan sosialnya. Apakah dalam teks ada diskriminasi sekaligus manipulasi? Dua pertanyaan itu harusnya ada dalam skemata pembaca kritis. Hal itu karena bahasa yang dipilih selalu mengandung strategi politik.

Solusinya adalah mengubah hoaks melalui: (1) *passion*; (2) jasa; dan (3) kedekatan. *Post-Truth* tidak bisa dilawan dengan nalar melainkan dengan keyakinan atau meyakinkan. Strategi pertama

adalah dengan *passion*. Orang berpengaruh atau orang berkarisma akan bisa mengubah *mindset* orang yang mempercayai *Post-Truth* karena orang berpengaruh ini memiliki daya tarik untuk didengarkan dan dipercayai. Jasa merupakan strategi berikutnya karena melalui jasa, maka seseorang akan menjadi empati dan lebih mempercayai yang dikatakan oleh pemberi jasa. Mengubah hoaks juga dapat dilakukan melalui kedekatan. Contohnya adalah upaya deradikalisasi. Upaya deradikalisasi yang tepat adalah dengan cara dimanusiakan atau memanusiakan manusia sehingga pelaku akan dapat memahami fakta dan kebenaran. Solusi yang dilakukan untuk menangkal *Post-Truth* berikutnya adalah: (1) meyakinkan diri; (2) jangan memberi data; (3) mendengarkan; dan (4) mengubah gagasan. Meyakinkan diri berarti mampu memilah fakta dan opini.

Kemudian data juga harus disimpan baik-baik karena strategi *Post-Truth* adalah memutar balikkan data. Strategi ketiga adalah dengan cara mendengarkan karena mendengarkan sekaligus memahami informasi adalah keterampilan yang sering kali disepelekan padahal sangat dibutuhkan. Solusi terakhir adalah mengubah gagasan atau filsafat gagasan. Mengubah gagasan dapat dilakukan dengan cara memahami sekaligus memberi contoh riil terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh filsuf.

Peran Pancasila di Era Post-Truth

Pancasila pun tak luput dari berbagai tantangan sejarah yang tentunya tak terhindarkan. Uniknya, Pancasila ternyata masih dapat bertahan sebagai sebuah narasi utama dalam gagasan kebangsaan setelah melewati pergantian rezim pemerintahan. Apa sesungguhnya yang memungkinkan Pancasila dapat memiliki relevansi pada setiap periode, padahal dengan penafsiran dan penerapan yang sangat berbeda satu sama lain.

Pancasila terkait dengan struktur kesadaran dan ketidaksadaran kolektif masyarakat yang memungkinkan Pancasila dapat diterima dan bahkan dihayati dalam konteks kewarganegaraan ataupun kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai landasan seperti mengakui persamaan hak, menghormati perbedaan serta kebebasan berkeyakinan, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dewasa guna mengatasi *Post-Truth* dengan situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta-fakta obyektif dalam suatu

peristiwa yang terjadi. Selain itu, jika dijabarkan menurut ideologi dalam Pancasila, yaitu:

1. Pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa

   Berbicara soal keyakinan mesti dikembalikan kepada individu masing-masing karena pilihan berketuhanan merupakan hubungan transendensi antara makhluk dengan Sang Khalik. Kajian tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mestinya dikembalikan kepada individu dan inilah yang dilakukan oleh Erdogan dalam mencoba mengembalikan dan membangkitkan negara Turki dalam keterpurukan. Pemahaman inilah yang diterangkan oleh Soekarno dalam buku Islam Sontolonya yang mengatakan bahwa untuk berkeyakinan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tidak mesti mengatasnamakan agama, keyakinan, ketuhanan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sepaham dengan orang lain.

2. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

   Seharusnya menghargai setiap pilihan pribadi yang menjadi pilihannya. Meskipun harus menghargai nilai-nilai kemanusian yang berbeda maupun sama dengan pemahaman kita.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

   Apabila telah memiliki keadilan dan bermusyawarah di sila keempat maka hasil dari musyawarah tersebut dijadikan sebagai keinginan bersama dan bersatu dalam mewujudkannya.

4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

   Pada sila yang keempat ini, bahwa dalam setiap memutuskan suatu persoalan *mesti* di musyawarahkan atau diskusikan secara bersama terlebih dahulu. Istilah *footing* pada dasarnya tidak pernah ada dalam perbendaharaan kamus rakyat Indonesia. Karena, *footing* tersebut bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah musyawarah dan berumbuk bersama. Untuk mewujudkan hal demikian mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mewujudkan poin di awal tersebut. Apalagi di era *Post-Truth*, bermusyawarah sangat dibutuhkan.

5. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

   Tidak akan ada lagi yang namanya kesenjangan sosial, tidak ada lagi yang namanya kelaparan, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Jika sila ini betul diterapkan.

Urgensi Pancasila di Era Post-Truth

1. Penggunaan Media Sosial Menciptakan Ketidakstabilan Politik

Pada era digital saat ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat, masyarakat sudah biasa terpapar dengan salah satu bentuk dari teknologi, yaitu media sosial. Media sosial menjadi wadah untuk berbagi informasi dengan banyak orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial, memberikan dampak yang besar pada pengguna karena sangat efektif bahkan hingga mampu menciptakan ketidakstabilan politik. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di era *post-truth*, media sosial yang merupakan media baru yang menghilangkan sekat antara rasional dan emosional, dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong di mana isu-isu sektarian dan keagamaan disuarakan terus menerus, dan masyarakat lebih percaya berita yang disebar di media sosial daripada media konvensional.

Hoaks membawa masyarakat pada fenomena *post-truth*, yang mana saat ini individu cenderung langsung mempercayai segala informasi yang sejalan dengan daya tarik emosional mereka, ketimbang fakta yang ada. Demikian dapat disimpulkan bahwa fenomena ini dapat mengubah sebuah tatanan yang sudah ada, asal masyarakat dipaparkan pada informasi-informasi bohong yang membakar emosi atau sentimen mereka.

Opinion leaders merupakan sosok yang sangat signifikan perannya dalam menggerakkan opini publik, walaupun sering kali *opinion leaders* menyebar informasi yang tidak seharusnya kepada publik sehingga menimbulkan kemarahan, mengaduk-aduk emosi dan masyarakat yang sentimen satu sama lain. Hal ini membuat seseorang kerap dianggap sebagai ikon atau dikultuskan, karena ia dapat mempengaruhi opini publik, yang mana tampak dari ungkapan Syahroji yang memandang Habib Rizieq sebagai sosok yang selalu benar.

Konten informasi dalam media sosial sering kali disalahgunakan oleh suatu kelompok tertentu dalam menyebarluaskan berita bohong dan ujaran kebencian untuk sebuah kepentingan. Kecenderungan masyarakat yang langsung mempercayai segala informasi dalam media sosial dan juga didorong oleh daya tarik emosional mereka melahirkan fenomena *post-truth*. Hal inilah dilakukan oleh organisasi masyarakat radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), melalui pemimpinya Habib Rizieq untuk membuat masyarakat terkotak-kotak dan mempertanyakan kembali atau meredefinisikan Bhinneka Tunggal Ika. Fenomena *post-truth* telah mengganggu nilai-nilai pluralisme yang

terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika, serta menghancurkan tatanan yang sudah ada.

Maka dari itu, untuk bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa maka pemahaman *post-truth* perlu diminimalisir melalui pembentukan modal sosial yang kuat, yang mana bisa membentuk kepercayaan yang tinggi di antara masyarakat dan kerja sama baik antar individu yang berketerampilan guna mencapai suatu tujuan bersama. Pembentukan modal sosial diawali dengan membangun landasan *human capital* yang dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu, mulai dari pendidikan moral hingga literasi media agar kemudian masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan arif.

2. *Firehose of Falsehood* pada Era *Post-truth*

Fenomena penyebaran kebohongan untuk kepentingan politik ini sudah meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena *Post-Truth* ini terjadi juga di negara maju, sebut saja di Amerika Serikat pada masa pemilihan Presiden tahun 2016. Kemudian dalam *referendum Brexit* untuk menentukan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016, diwarnai oleh penyebaran berita-berita bohong yang mempengaruhi keputusan *voters*. Secara umum retorika-retorika *post-truth* cenderung merupakan eksploitasi dan politisasi terkait isu isu keadilan sosial, perbedaan ras, migran dan orang-orang termarginalisasi.

Firehose of falsehood saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu. Menurut Paul dan Matthews (2016) peneliti dari Rand Corporation, *Firehose of Falsehood* memiliki ciri-ciri yaitu *lacks commitment to consistency, lacks commitment to objective reality, rapid, continuous and repetitive, high volume and multichannel propaganda.*

Salah satu contoh yang memenuhi karakteristik *firehose of falsehood* ini adalah kasus hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet. Perkara ini tengah menjalani pemeriksaan di Pengadilan Jakarta Selatan dengan dakwaan 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 2 Oktober 2018 sempat beredar foto dan pernyataan mengenai penganiayaan terhadap

Ratna Sarumpaet. Berita yang beredar penganiayaan tersebut terjadi 21 September 2019 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Berita ini disebarkan melalui multi-channel baik media berita resmi, viral di media sosial, hingga grup *chat*.

Penyebaran berita ini berlangsung secara *repetitive dan continuous*, secara bergantian beberapa tokoh menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan diliput media, setiap pernyataan tokoh menjadi pemberitaan dan tersebar di berbagai media, termasuk akun media sosial yang kemudian disebarluaskan (*share*). Konten-konten yang dibuat oleh pengguna sosial media (*user generated content*) bermunculan, dengan berbagai spekulasi tentang apa yang terjadi.

Ketentuan perundangan Indonesia saat ini telah mengatur perbuatan-perbuatan dan ancaman hukuman terhadap penyebar hoaks, sebagaimana dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi penegakan hukum terhadap pelaku tidak serta-merta menghambat informasi bohong diserap oleh masyarakat. Sebagai perbandingan, Jerman saat ini sudah memberlakukan *Network Enforcement Act* di mana mewajibkan pengelola media sosial dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten yang mengandung kebohongan, *hate speech* dan terorisme dalam tempo 1 x 24 jam (Morgan, 2018). Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu terobosan dalam menghambat penyebaran hoaks dalam waktu sesingkat mungkin.

Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 diwarnai dengan berbagai isu hoaks yang merusak sendi-sendi demokrasi. Kebohongan tersebut bisa diterima oleh publik bukan karena keterbatasan informasi, tetapi karena membanjirnya informasi (*information overload*). *Information overload* ini terjadi dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Informasi-informasi tersebut diterima masyarakat dengan perantaraan share di media sosial seperti Facebook. Fase ini disebut dengan era *post-truth*.

Salah satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis adalah *firehose of falsehood*. *Firehose of falsehood* saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. Firehose of falsehood bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan

dan memperbanyak narasi palsu. *Firehose of Falsehood memiliki ciri-ciri yaitu lacks commitment to consistency, lacks commitment to objective reality, rapid, continuous and repetitive, high volume and multichannel propaganda.*

Untuk melawan *firehose of falsehood* diperlukan sinergitas *stakeholders* seperti politisi sebagai sumber informasi dan publik sebagai penerima informasi, serta media massa dan penyelenggara jasa internet sebagai wadah penyampai informasi kepada publik. Masifnya penyebaran hoaks menuntut Polri untuk lebih mengembangkan strategi dalam penanganan misinformasi dan penyebaran kebohongan di masyarakat demi menciptakan situasi yang kondusif hingga akhir masa Pemilu 2019. Tidak hanya strategi dalam penegakan hukum, namun juga strategi manajemen media dalam penyebaran informasi oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menanggulangi penyebaran hoaks salah satunya melalui kontra narasi (*counter narrative*) yaitu alternatif solusi dalam menangani penyebaran kebohongan dan kontra hoaks dilakukan dengan membangun layanan *fact check* yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah.

Mahasiswa di Indonesia terutama mahasiswa perguruan tinggi negeri Islam seperti STAIN, IAIN, maupun UIN, wajib hukumnya untuk menerapkan Pancasila disertai ajaran Islam yang benar yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Peran mahasiswa di sini adalah mahasiswa dapat membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam diri sendiri terlebih dahulu dan berusaha memberikan contoh terhadap masyarakat umum, bahwa mahasiswa merupakan sosok yang kemampuan intelektualnya tinggi dan memiliki nilai moral lebih dan dapat menjadi sosok pembawa perubahan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama (Arif, Mohammad, 2021: 243).

Fenomena Hoaks di Media Online

Media sosial sudah menjadi pendamping dalam kehidupan sehari hari masyarakat baik itu kalangan remaja sampai orang dewasa. Semua berita yang terjadi saat itu atau yang sedang fenomenal ataupun ingin berjumpa dengan teman, kerabat jauh dengan mudahnya kita dapat mengetahui keberadaan dan kabar ataupun kegiatan yang dilakukan. Media sosial menjadi kebutuhan semua masyarakat Indonesia, berita-berita yang terdapat di media sosial khususnya berita yang sedang fenomenal terupload dengan cepat menyebar menjadi tidak terfilter

bahkan sulit sekali membedakan mana yang berita asli ataupun palsu. Hal ini diperlukan kecerdasan dan ketelitian masyarakat dalam menyikapinya. Hoaks saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat di era digital ini. Produksi berita palsu atau bohong tersebut tidak.

Post-truth menjadi fenomena masa kini. Fenomena ini muncul bersamaan dengan berkembangnya fenomena hoaks yang tengah masif menyentak akal sehat masyarakat dan dunia politik. Minimnya verifikasi kredibilitas informasi membuat kebohongan dapat masuk dengan mudah melalui celah kebingungan masyarakat dalam membedakan antara berita, opini, fakta dan analisis. Akibatnya, ketegangan dan konflik mudah dipicu. Pasalnya, *post-truth* dapat digunakan senjata politik disinformasi dan instrumen persuasi massa. Pesan secara sengaja diciptakan agar mudah menyentuh emosi dan membungkam pikiran kritis dan analitis masyarakat. Berkembangnya media alternatif, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, blog pribadi, *SnapChat*, *Twitter*, *Youtube* semakin memudahkan tersebarnya berita hoaks.

Eksistensi Pancasila di Era Post-Truth

Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya (Soekarno,1958).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan ideologi yang masih relevan sampai saat ini. Pancasila Ideologi Dunia, buku yang ditulis oleh Respiratori Saddam Al-Jihad menjelaskan secara terang bahwa Pancasila merupakan sebagai sintesis dari dua ideologi besar dunia. Kapitalisme dalam aspek ekonomi menitikberatkan bahwa kepemilikan modal menjadi poin penting.

Perkembangan pola hidup sosial kemasyarakatan terjadinya distorsi dari pemaknaan Pancasila tersebut. Beberapa dekade belakangan kita menemukan banyaknya para masyarakat Indonesia yang tidak hafal dan paham akan Pancasila. Ketidakpahaman tersebut hanya menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam dalam meraup eloktoral pada tahun politik 2019 sekarang ini. Hal ini tergambar

jelas ketika perdebatan antara kelompok satu dengan yang lainnya mengatakan mereka lebih Pancasilais dari pada kelompok yang lain.

Akibat dari pengkultusan tersebut membuat masyarakat geram oleh ulah para politisi yang meraup simpatisan. Oleh karena itu munculnya istilah politik pasca-kebenaran atau yang diistilahkan *post-truth politics*. Bahwa yang benar tersebut adalah apa yang menjadi pemaham dan keinginan dari hati seseorang. Tidak ada lagi kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi dan tidak ada lagi kebenaran pragmatis. Namun, kebenaran yang berasal dari pribadi masing-masinglah yang benar.

Era *post-truth* menjadikan pola laku masyarakat mengatasnamakan kebenaran hanya berawal dari keyakinan pribadi. Terkadang membaca Pancasila pun hanya pada satu butir poin pokok saja yaitu ketuhanan. Hal demikian menjadi keyakinan yang mutlak dalam memeluk kepercayaan suatu agama dan menjadikan keyakinan orang lain tidak benar. Akibat dari era tersebut memperlihatkan bahwa negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila sedang dilanda krisis pemahaman yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Persoalan yang begitu rumit tentu perlu mencari formula yang baik untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi perang saudara di tanah air. Penulis pikir perlu membaca Pancasila dengan kacamata terbalik. Pancasila yang termaktub dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Membaca Pancasila secara terbalik tidak lagi dari satu sampai lima tapi dari lima sampai satu. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti diletakkan pada posisi yang paling awal. Supaya segenap rakyat Indonesia mesti menyadari bahwa itulah poin pertama yang mesti diwujudkan. Dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penulis pikir tidak akan ada lagi yang namanya kesenjangan sosial, tidak ada lagi yang namanya kelaparan, tidak ada lagi momok antara si kaya dengan si miskin, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Poin selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada sila yang keempat ini, mesti diletakan pada posisi kedua, bahwa dalam setiap memutuskan suatu persoalan mesti di musyawarahkan atau diskusikan secara bersama terlebih dahulu. Istilah *footing* pada dasarnya tidak pernah ada dalam perbendaharaan kamus rakyat Indonesia karena *footing* tersebut bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah musyawarah dan berembuk bersama.

Apabila poin keadilan sosial telah pada posisi atas maka untuk mewujudkan hal demikian mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mewujudkan poin di awal tersebut. Ketiga Persatuan Indonesia, jika telah memiliki keadilan dan bermusyawarah maka hasil dari musyawarah tersebut dijadikan sebagai keinginan bersama dan bersatu dalam mewujudkannya. Keempat Kemanusian yang adil dan beradab, jika telah bersatu maka pada poin ini mesti harus menghargai setiap pilihan pribadi yang menjadi pilihannya. Mesti harus menghargai nilai-nilai kemanusian yang berbeda maupun sama dengan pemahaman kita.

Ketika bicara persoalan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada poin ini bicara soal keyakinan mesti dikembalikan kepada individu masing-masing. Karena pilihan berketuhanan merupakan hubungan transendensi antara makhluk dengan Sang Khalik. Kajian tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mesti dikembalikan kepada individu dan inilah yang dilakukan oleh Erdogan dalam mencoba mengembalikan dan membangkitkan negara Turki dalam keterpurukan.

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai wahana berdemokrasi dan kondisi *post- truth* sekarang ini membuat pemaknaan kebebasan demokrasi menjadi liar. Bisa dikatakan bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia sekarang adalah demokrasi liberal. Kebebasan dimaknai secara sembrono, bahwa setiap orang bebas dan berhak untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, mengkritik, setiap orang ingin didengar suaranya.

Di era post-truth, masyarakat cenderung mencari kebenaran sesuai perasaannya bukan logikanya

Orang cenderung tidak mencari kebenaran melainkan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan dan perasaan meskipun itu salah. Kondisi seperti inilah yang sedang menjangkit masyarakat Indonesia di mana bukan rasio dan nalar yang digunakan dalam menghadapi suatu isu atau informasi, namun lebih mengedepankan emosi. Biasanya fenomena *post-truth* ini digunakan oleh lawan politik untuk meraup suara untuk memenangkan pemilu. Demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan kepada publik untuk menentukan suaranya sesuai hati nurani dan rasionalitasnya, malah digiring opininya agar menggunakan emosi dalam proses yang sangat sakral yakni pemilihan umum.

Apabila merunut ke belakang, sejarah bangsa ini juga tidak terlepas dari pertarungan ideologi, gagasan anti-komunisme, anti-Kristen, anti-

China yang menggambarkan absennya demokrasi di negara Indonesia silam. Sekarang ini kelompok-kelompok yang anti-Pancasila menjadi ancaman persatuan bangsa. Pasalnya kelompok anti-Pancasila dan anti-demokrasi ini sangat radikal ingin mengganti sistem demokrasi dengan sistem lain yang mereka anggap sempurna.Pemahaman inilah yang diterangkan oleh Soekarno dalam buku Islam Sontolonya yang mengatakan bahwa untuk berkeyakinan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika lebih spektakuler kita bisa membaca buku Gus Dur yang berjudul Tuhan tidak perlu dibela, dan ini mengindikasikan bahwa Tuhan cukup di dalam keyakinan masing-masing. Tidak mesti mengatasnamakan agama, keyakinan, ketuhanan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sepaham dengan orang lain. Jika membaca Pancasila seperti ini, penulis yakin kegaduhan di tahun yang panas ini tidak akan menjadi kerusuhan yang berkepanjangan. Cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat adil dan makmur hendaknya tercapai.

Faktor yang Memengaruhi Pancasila dalam Era Post-Truth

Post-truth timbul sebab banyak faktor antara lain ialah menurunnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan, ketimpangan sosial dan ekonomi, menurunnya modal sosial (Lewandowsky et.al, 2017); serta ketiadaan institusi yang memonopoli kebenaran (Kapolkas, 2019: 11). Salah satu faktor yang menjadi katalisator berkembangnya *post-truth* artinya kehadiran teknologi berita yang berimplikasi pemanfaatan media umum yang tidak sempurna, teknologi digital sudah bisa membentuk empiris sendiri, sesuai menggunakan agenda *setting* kelompok kepentingan atau berdasarkan ilmu semiotika. Keadaan ini berdampak pada terpisahnya antara penanda (*signifier*) menggunakan petanda (*signified*).

Menurut Fahruddin Faiz, ada tujuh akar kelahiran *post-truth* yaitu:

1. Manusia suka pandangan baru, kebutuhan akan dukungan eksistensi pribadi sering kali membuat manusia mencari dukungan penguat bagi identitasnya meski bersifat basa-basi dengan cara palsu dan bohong;
2. Media, kebutuhan meningkatkan *score*, klik *like*, penambahan *follower* dan profit membuat media cenderung kapitalis. Mem-*blow up* berita sensasional untuk menarik pembaca demi meraup laba;

3. Komodifikasi, yaitu membisniskan segala sesuatu atau menjadikannya komoditas. Apapun latar belakang yang dimiliki digunakan untuk meningkatkan sisi *finansial*, *reputation*, posisi atau lainnya meskipun hal tersebut ditempuh dengan menebar kebohongan;
4. Kemajuan teknologi tidak diiringi adaptasi dari masyarakat maupun pemerintah, pesatnya laju teknologi tidak diimbangi peningkatan kecerdasan sosial. Komentar-komentar negatif yang dilontarkan secara iseng justru ditanggapi dengan serius sehingga memicu gejolak;
5. Pragmatisme yang berorientasi hasil jangka pendek, cara-cara instan untuk segera mencapai apa yang diinginkan menyebabkan pembenaran melakukan tindakan-tindakan curang, menyikut kanan kiri seakan menjadi hal yang lumrah supaya melejit di tingkatan teratas;
6. Karakter masyarakat yang gampang kaget, Fahrudin Faiz mengistilahkan dengan masyarakat "epilepsi", suka dengan hal-hal sensasional bombastis dan berebut menjadi penyebar informasi tercepat dalam komunitasnya. Sering kali tanpa dikaji, apa pun berita sensasional langsung dibagikan padahal berita tersebut adalah kebohongan;
7. Populisme dalam politik praktis berupa sekadar retorika, untuk mendapatkan simpati masyarakat banyak sekali janji-janji indah, gagasan-gagasan muluk yang digabungkan dengan dalil 'demi rakyat' atau 'membela umat', namun sebenarnya dibalik itu semua bertujuan untuk keuntungan dirinya sendiri, mengamankan posisi jabatannya, meningkatkan *image* pribadinya dan lain sebagainya.

Kebebasan mengunggah informasi yang disediakan media sosial kerap kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi kontra produktif berupa hoaks, informasi palsu maupun informasi keliru yang memiliki daya rusak sosial yang dahsyat karena melibatkan sisi emosi target sebagai pemicu ledakannya. Kecenderungan masyarakat milenial adalah menerima informasi secara sekilas tanpa adanya penelaahan lebih dalam terhadap sumber dan jenis informasi yang diterimanya. Bahkan kerap kali hanya membaca judul informasi yang bombastis tanpa memahami isinya sudah langsung saja menyebarkan penggalan informasi tersebut ke semua teman-temannya. Padahal, keakuratan informasi tersebut masih tanda tanya besar. Penerima informasi seakan menutup telinga tanpa perlu menanyakan benar atau tidaknya informasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat secara tidak sadar digiring untuk semakin jauh dari fakta yang sebenarnya.

Dampak Era Post-Truth dalam Kedudukan Pancasila

Di Indonesia, banyak sekali informasi atau berita yang tersebar melalui internet (sosial media). Apalagi sekarang Indonesia berada dalam era *Post-Truth* yang mana banyak dari masyarakat Indonesia yang terhasut atau percaya dengan berita hoaks yang beredar melalui sosial media. Dampaknya pun beragam, berikut adalah beberapa dampak dari adanya era *Post-Truth* terhadap kedudukan Pancasila di Indonesia, yaitu:

1. Dalam segi politik, media sosial digunakan sebagai media propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dengan begitu, di era *Post-Truth* ini banyak masyarakat Indonesia yang akan percaya dengan hoaks yang dilontarkan oleh lawan politik yang dipilihnya. Problemnya bukan dari mana mereka mendapatkan berita tersebut, melainkan karena mereka tidak mencerna terlebih dahulu informasi yang mereka dapat sehingga mereka langsung melabeli informasi tersebut dengan fakta meskipun belum ada kebenaran atau kejelasan dalam informasi yang mereka dapatkan itu;
2. Masih dalam ranah politik. Penggunaan media sosial di era *Post-Truth* ini juga akan berakibat atau berdampak buruk kepada ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Sebagai contoh isu ras, suku, agama, budaya, dan antar golongan (Sara) hingga ujaran kebencian akan memperlemah ketahanan nasional Indonesia;
3. Apabila ketahanan nasional Indonesia melemah karena adanya *Post-Truth* maka akan menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga bisa mengancam keutuhan NKRI;
4. Saat ketahanan nasional lemah dan keutuhan NKRI terancam akibat maraknya berita hoaks politik maka proses pembangunan nasional juga akan terhambat;
5. Dampak lain tidak hanya dalam hal segi politik tetapi juga dalam segi persatuan Indonesia. Jika isu ras, suku, agama, budaya serta ujaran kebencian membludak di media sosial maka akan menyebabkan persatuan yang ada di Indonesia menjadi runtuh. Dari satu ras ke ras yang lain, atau dari suku satu ke suku yang lain hingga dari satu budaya ke budaya yang lain akan terjadi olok-olokan. Karena adanya suatu kesalahpahaman yang terjadi di media sosial, mereka tidak mau memahami atau mencari terlebih dahulu fakta yang sebenarnya sehingga mereka akan saling membenci dan merasa

bahwa suku, ras, agama, budaya mereka lebih baik dari yang lain. Sehingga hal inilah yang akan menyebabkan perpecahan dalam persatuan Indonesia;

6. Merebaknya saling curiga dalam masyarakat dengan maraknya hoaks yang memicu pikiran negatif;
7. Banyak informasi tidak valid karena teknologi yang semakin murah yang memicu masyarakat awam bisa mendapatkan gadget dan jaringan internet dengan mudah sehingga lebih mudah terpapar *Post-Truth*;
8. Perubahan karakter anak di mana lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas *online*;
9. Bagi pemilik kepentingan kekuasaan, menjadikan media sosial untuk mengendalikan opini publik.

Post-truth yang menjadi celah bagi pemilik kepentingan kekuasaan justru memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial untuk mengendalikan opini publik. Dengan demikian, *post-truth* gagal mentransmisikan kebenaran pada publik, dan yang terjadi justru publik justru lebih memilih berita fiktif yang sesuai dengan kepentingan atau pendapatnya sebagai penguat identitas.

Dampak hoaks tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sering kali hoaks digunakan sebagai senjata ampuh bagi kepentingan politik tertentu, seperti halnya awal kemunculan *post-truth* pada momen politik terheboh di tahun 2016. Yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Cara-cara lama untuk melakukan penetrasi, intimidasi, indoktrinasi kepada masyarakat kini beralih dalam wadah media sosial. Penyebaran hoaks dengan gencar dilakukan untuk membentuk opini yang dianggap benar oleh publik, hampir di semua platform media sosial bisa dijumpai sebaran hoaks tersebut.

Oleh karena itu, perlu mengimplementasikan ketahanan nasional sebagai strategi dalam menghadapi era *post-truth* untuk menangkal berita hoaks politik. Implementasi ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional diperlukan kriteria sebagai berikut: 1) *comprehensive*; 2) keuletan dan ketangguhan; 3) keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan; 4) dinamis; 5) kemandirian; dan 6) partisipatif. Adapun implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi era *post-truth* dapat dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam era

globalisasi. Dalam era *post-truth* ini, setiap warga negara dan seluruh rakyat Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, dalam pemantapan Wawasan Nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional sebagai hasil akhir pembangunan nasional (Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, 2019: 119).

Kondisi Indonesia di Era Post-Truth

Seperti yang kita tahu hidup bermasyarakat terkhususnya di daerah Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan hal utama dalam perilaku sosial dalam menanggapi berbagai informasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan modernisasi. Bangsa Indonesia saat ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern, Indonesia sudah menciptakan media teknologi yang sangat praktis seperti layaknya yang ada di kehidupan sehari-hari seperti televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun mempunyai kajian-kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih jauh modern.

Di era kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang berpengaruh negatif. Penyampaian informasi sangat cepat di mana setiap orang telah dengan mudah menggunakan informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial, ataupun pesan telepon genggam dan lain sebagainya yang tidak dapat diterima dengan baik.

Informasi yang disampaikan baik orang perorangan maupun Badan Usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong atau yang disebut hoaks dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini atau negatif, fitnah, menyebarkan hal yang tidak baik, kebencian yang diterima dan membuat pihak mana pun akan membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberikan suatu informasi yang tidak baik.

Menurut CNN Indonesia bahwa dalam data yang disampaikan oleh kementerian komunikasi dan informatika ada sejumlah delapan ratus ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kemkominfo juga sudah memblokir tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu situs berdasarkan pada sepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung obat-obatan narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan hak kekayaan intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi.

Hoaks merupakan usaha untuk menipu atau menggali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitahuan palsu dalam pemberitaan palsu pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi sedangkan pada suatu pertunjukan sulap penonton justru mengharapkan supaya ditipu, menurut pandangan psikologis ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoaks. Orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan memperdulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoaks memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekedar untuk membuat masalah.

Adapun beberapa kasus hoaks yang baru-baru ini sangat hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat dan Ridwan kami mengusulkan tanggal 3 Oktober sebagai hari anti hoaks nasional, sebelumnya kita tahu bahwa tanggal 3 okober 2018 kemarin menjadi hari di mana kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet terbongkar. Melansir kompas.com Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Mas Emil itu pun mengungkapkan pendapatnya. "karena puncak hoaks nasional itu tepat tanggal 3 Oktober saat negeri ini dibohongi ibu Ratna Sarumpaet," kata Mas emil dalam sambutannya di acara Indonesia

City Government PR Summit di Ballroom Trans Luxury Hotel. Mas emil juga menjelaskan bahwa efek kebohongan Ratna Sarumpaet itu bisa berdampak buruk di level nasional menjelang pemilihan presiden atau pilpres 2019, ini menjadi peristiwa luar biasa karena yang menjadi korban sampai level elite nasional kang Emil merasa tidak hanya elit nasional yang menjadi korban ia menilai banyak warga Indonesia yang menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet ini hikmah dari Allah di mana kondisi bangsa Indonesia begitu mudah dibohongi, karena pengakuan pembuat hoaks terbaiknya tanggal 3 Oktober sebelumnya viral kabar aktivis Ratna Sarumpaet dikeroyok di kawasan bandara Husein Sastranegara kabar ini sempat meresahkan seluruh warga Indonesia membuat pihak kepolisian ikut turun tangan.

Penyebaran berita hoaks pada periode akhir-akhir ini membuat para pengguna internet atau biasa disebut sebagai *netizen* sangat khawatir. Dengan keadaan seperti ini, menurut ketua dewan pers, Stanley Adi Prasetyo, dewan pers akan memberlakukan sistem verifikasi media masa, mulai 9 Februari 2017,bersamaan dengan hari pers nasional, seperti dikutip oleh kaskus.co.id. dengan demikian, dapat kita ketahui jumlahnya berapa banyak media massa yang abal-abal dan media yang bersertifikasi. Hal tersebut tentunya baik mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh hoaks, dikutip dari indolinear.com, ada 4 hal dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu hoaks sebagai membuang-buang waktu, pengalihan isu, penipuan publik dan pemicu kepanikan sosial.

Pertama adalah membuang waktu seperti dikutip dari *cmsconect.com*, menyatakan bahwa dengan melihat hoaks di sosial media bisa mengakibatkan kerugian bagi individu itu sendiri maupun kelompok di kantor tempat ia bekerja. Hal ini dikarenakan hoaks tersebut yang mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kelompok di kantor tersebut dengan penurunan produktivitas tersebut maka apa yang dihasilkan semakin berkurang sedikit demi sedikit atau bahkan dengan jumlah besar.

Kedua adalah sebagai pengalihan isu di media sosial ataupun internet khususnya para penjahat internet atau biasa dipanggil *cyber crime*, hoaks biasa dimanfaatkan sebagai pelancar aksi kejahatan mereka di internet atau di sosial media. Sebaga contohnya, para penjahat *cyber* mengirimkan sebuah hoaks yang berisikan bahwa telah terjadi kerentanan sistem dalam pelayanan internet seperti g-mail dan g-mail. Lalu, para penjahat tersebut akan mengirimkan sebuah tautan berupa *link* kepada para *user* atau pengguna yang berisikan saran meng-klik

tautan tersebut agar akun pengguna akan terhindar dari kerentanan sistem g-mail maupun g-mail, padahal pada kenyataan tautan tersebut merupakan virus yang bisa membajak g-mail maupun Mas Mail para pengguna yang bisa kita sebut *hacking*.

Selanjutnya adalah sebagai penipuan publik jenis penipuan ini biasanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat yang, percaya dengan hoaks tersebut lalu ketika dianjurkan untuk menyumbangkan sejumlah uang dan anehnya ada saja yang mau menyumbangkan sejumlah uang tersebut tanpa berpikir lebih dengan detail apakah berita tersebut terbukti benar-benar ataupun hanya sekedar opini. Banyak orang yang akhirnya tertipu dengan hoaks tersebut dan pada akhirnya terlanjur mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar salah satu contoh kasusnya seperti dikutip dari indolinear.com beberapa waktu yang lalu yaitu sebuah pesan yang beredar lewat aplikasi *chat* yaitu *whatsapp* berisi pesan pembukaan pendaftaran CPNS nasional. Setelah berita hoaks tersebut viral tersebar akhirnya pemerintah langsung memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran CPNS pada waktu itu. Berikut yang terakhir adalah sebagai pemicu kepanikan publik biasanya hoaks yang satu ini memuat berita yang merangsang kepanikan khalayak publik dan beritanya berisikan tentang tindakan kekerasan atau suatu musibah tertentu salah satu contohnya adalah hoaks tentang kecelakaan hilangnya pesawat garuda Indonesia dengan tujuan jakarta-palu beberapa waktu lalu. Hoaks ini begitu cepat menyebar sampai media massa maupun *online* harus mengklasifikasikan berita tersebut agar masyarakat tidak panik ataupun percaya dengan hoaks tersebut.

Pengaruh Nilai Pancasila di Era Post-Truth

Nilai Pancasila di sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yaitu mengutamakan aspek spiritualisme tetapi bukan aspek materialisme, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan lebih mengedepankan sikap religius karena hidup ini bukan hanya mencari kekayaan dan kesenangan tapi ada tanggung jawab terhadap Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan hendaknya berpikir dahulu apakah sesuai dengan kaidah agama. Memperkuat keimanan salah satu contoh upaya membentengi diri dari tindakan tercela seperti menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya/hoaks (Latif, 2011). Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) yaitu: mengandung tentang pemberdayaan manusia agar tidak semena-mena terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini berarti

setiap manusia harus memiliki keadaban dalam setiap bertingkah laku di dalam kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lain. Nilai kemanusiaan di dalam sila ini menunjukkan kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras. Nilai ini diterapkan dalam bentuk meningkatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Fuad, 2012). Sila ketiga (Persatuan Indonesia)yaitu mengandung makna persatuan yang bertujuan mempersatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Yang dimaksud dalam sila ini yaitu kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang didasarkan persatuan/wujud Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan) yaitu mengandung makna untuk mencegah adanya kesalahpahaman dan kecenderungan individualis yang dapat memicu adanya hoaks. Dalam sila ini kita dapat membina diri kita dan orang lain dengan bergotong- royong agar mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti proses musyawarah yang demokrasi tidak sekedar mengutamakan suara rakyat, tetapi juga mengedepankan aturan hukum. Jadi, segala sesuatu yang dianggap dapat merugikan orang lain akan diproses pihak hukum (Maftuh, 2008). Sila kelima mengandung makna tentang mengupayakan suatu kebijakan yang dapat dinikmati dan dihargai oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam hal ini diupayakan agar setiap manusia mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Dumanhuri, 2016; Juliswara, 2017; Lonto, 2015).

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan dalam membentuk pola pikir dan meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami makna ideologi Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan tingkah laku sehari-hari (Faradila, Holilulloh dan Adha, 2014) karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang

bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Antara lain yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam) serta aspek Hak Asasi Manusia (HAM) mengakibatkan setiap tingkah lakunya tidak dilandaskan pada etika. Seperti halnya isu hoaks. Maraknya isu berita palsu atau hoaks akan mengakibatkan dampak yang sangat miris bahkan sampai memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang majemuk akan suku, agama, ras, dan adat istiadat perlu sebuah pedoman agar tidak sampai muncul suatu degradasi moral yaitu dengan Pancasila. Pancasila adalah suatu dasar negara dan ideologi negara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusian, sosial, keadilan, moral dan etika, serta nilai persatuan yang digunakan sebagai upaya untuk membentuk suatu bangsa dan negara yang terbebas dari hoaks.

Hubungan Pancasila dalam Era Post-Truth

Pembahasan mengenai berita hoaks ini sangat berkaitan erat dengan Pancasila terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang menuntut kita kepada kebaikan, kedamaian, dan kebenaran. Pancasila adalah pegangan bangsa Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum Dalam setiap silanya pastilah mengandung makna yang dalam. Seperti nilai- nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah sepatutnya Pancasila kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa sekarang, nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar. Sudah mulai terbawa kita sebagai manusia harus lebih bijak menggunakan teknologi dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila lebih baik bukan malah memudar. Arus modern globalisasi yang masuk perlu memilih mana yang baik untuk dibaca dan ditonton. Jadi, dapat dipilih mana yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, mana yang tidak. Meskipun ada suatu yang bagus dan menarik tapi kalau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sudah sikap kita untuk tidak menerima. Selain itu, pemikiran yang semakin maju dan luas jangan sampai disalahgunakan, apalagi sampai melunturkan nilai-nilai Pancasila dan ingin mengubah Pancasila. Jangan sampai itu terjadi, akan menjadi suatu berguna jika digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, agama, dan negara.

Dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat nilai yang berkaitan dengan sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kasus hoaks yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Mereka harus tahu bahwa hoaks itu merupakan suatu hal yang kesalahan maka sudah seharusnya kita menentangnya, bukannya malah mendukung dan menyukseskan kasus hoaks tersebut. Sebagai negara yang berdemokrasi Pancasila haruslah didasarkan pada Pancasila. Pengamalan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila, benar-benar dilakukan. Karena proses untuk melahirkan Pancasila tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Dengan asas gotong royong yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, perlu adanya sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri. Adanya kerja sama gotong royong yang tercipta, maka hidup akan lebih dinamis.Lebih mudah bersimpati dan empati dengan orang lain sehingga tidak banyak manusia yang tertipu dengan adanya kasus-kasus hoaks.

Peran Pemerintah di Era Post-Truth

Menertibkan dan memberantas berita palsu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui kampanye literasi, inisiatif pengecekan fakta, dan penetapan langkah- langkah hukuman untuk mencegah penyebarannya. Salah satu upaya pemerintah adalah melakukan kolaborasi preventif untuk mengurangi kemungkinan suatu peristiwa yang dapat memicu longsoran berita palsu. Upaya dari berbagai tingkatan yang ditujukan adalah mengurangi kemungkinan penyebaran informasi yang salah sebelum pemilihan umum dijadwalkan. Tujuan kolaboratif ini untuk mengurangi dampak penyebaran berita palsu (Dodda & Dubbudu, 2019). Menurut Haciyakupoglu et al. (2018), kegiatan kolaborasi memiliki tujuan untuk (1) memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan; (2) mempersempit kesenjangan antara lokal dan global; (3) membantu mengidentifikasi masalah yang tumpang tindih antara berbagai masalah dan konteks; dan (4) memungkinkan pengiriman pesan yang konsisten.

Dalam menghadapi pemilihan umum, pemerintah Belgia melalui *Superior Council for Media Education* (SCME) *of Wallonia-Brussels Federation*, pada bulan Oktober 2017 selama dua minggu menyelenggarakan pendidikan media dengan topik berita palsu dan dis-informasi (Coche, 2018). Sebagian besar sekolah di Belgia mengajarkan siswanya tentang konsep berita palsu dan pentingnya membedakan antara informasi nyata dan palsu di media sosial. Hal yang

sama juga dilakukan oleh berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Di Inggris, melalui lembaga terkait menyelenggarakan pendidikan dan bimbingan kepada warga negaranya tentang keterampilan informasi untuk membedakan antara informasi berupa fakta dan fiksi (*The Digital, Culture, Media and Sport Committee,* 2018). Di Indonesia, sejak 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait. Namun, gerakan tersebut lebih pada keterampilan membaca, menulis, berhitung, baik berbasis cetak maupun digital yang pada prinsipnya sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kemendikbud. GLN lebih ditujukan untuk gerakan membaca, bukan ditujukan untuk mahir menggunakan informasi. Gerakan membaca justru sudah mulai berevolusi menjadi literasi informasi sebagai gerakan jangka panjang yang telah dicanangkan oleh para pustakawan. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait konten di dunia maya. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa MUI dalam rangka membantu pemerintah melaksanakan tugas sosialisasi literasi sesuai amanat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memberantas informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial (Bayu, 2017). Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran berita di internet dan menguji kebenarannya. Hal tersebut dapat dilihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu lembaga pemerintah berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun, kini BSSN berada langsung di bawah Presiden.

Besarnya dampak kerugian yang disebabkan *trend post-truth* di media sosial, mau tidak mau harus ada yang membangun kembali kesadaran kritis masyarakat supaya lebih peka terhadap bentuk

berita hoaks di media sosial yang menyajikan segalanya serba cepat. Perlu sinergitas semua pihak untuk meminimalisir kebohongan yang menjadi ciri dasar dari *post-truth*, sebagai pengguna media sosial, harus cerdas memilah dan memilih sumber berita yang terpercaya dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Semakin melimpahnya informasi di ruang publik yang terkadang memanipulasi fakta, membuat makin tipisnya batas pembenaran dan kebenaran. Sehingga saat ini dirasakan perlu untuk menggencarkan literasi digital secara benar, karena *netizen* sebenarnya mempunyai andil yang besar dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang intensitasnya terus melejit di tengah fenomena *post-truth*, sehingga harus benar benar memiliki kecerdasan yang utuh, tidak hanya cerdas secara keilmuan namun juga cerdas secara digital; harus bisa mengenali, memahami perkembangan informasi dengan mengedepankan nilai integritas, empati sekaligus bersinergi untuk saling menghargai perbedaan. Kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berita yang viral juga dibutuhkan supaya mampu membedakan antara berita bohong dan yang faktual, konten- konten yang bisa dipercaya maupun konten yang meragukan. Bijak dalam bermedia sosial akan sangat menguntungkan bagi kesehatan jiwa dan pikiran sehingga tidak dihabiskan hanya untuk menanggapi konten yang tidak prinsip dan tidak berguna.

Langkah yang bisa diupayakan supaya terhindar dari hoaks yakni aktif untuk *cross-check* data bila ada informasi baru yang bombastis, tidak mudah men-*share* ulang informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Cermati *link* alamat situs, hati-hati dengan judul provokatif, luangkan waktu untuk cek keaslian foto dan konten, ikut dalam grup diskusi anti hoaks dan lain-lain. Menurut Fahrudin Faiz, kecerdasan dalam menimbang berita penting untuk dilatih supaya tidak terjebak dalam sensasi pemberitaan bombastis. Pertama, harus disadari betul bahwa setiap berita adalah konstruksi dari pembuat berita, maka dari itu penting untuk mengetahui siapa pembuat dan sumber beritanya. Kedua, harus memahami *framing* berita, bagaimana makna sebenarnya yang ingin disampaikan karena bisa jadi beda orang beda pula makna yang ditangkapnya. Ketiga, jeli menilai sudut pandang media, dalam membuat berita, media pasti mengulasnya dari berbagai sudut pandang mana yang ditonjolkan dan mana yang disingkirkan untuk membentuk opini dari berita tersebut. Keempat, pahami tujuan dari berita yang dilontarkan media apakah demi keuntungan tertentu karena tidak semua media bersifat netral. Sederhananya, cek kebenarannya, cek kebaikannya, dan cek manfaatnya.

Pemerintah mempunyai andil besar untuk mengerem laju *post-truth* dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang jelas. Seperti halnya undang-undang ITE yang mengandung sanksi dan hukuman bagi penyalahgunaan informasi digital yang mengganggu ketertiban umum, serta melindungi warga dalam berinteraksi di dunia maya. Kominfo juga berperan aktif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Sudah selayaknya penanganan menghambat penyebaran informasi hoaks menjadi tugas bersama baik dalam keluarga, pemuka agama, pihak berwajib, komunitas, pemerintah dan yang paling penting dimulai dari pribadi masing-masing.

Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan ideologi yang masih relevan sampai saat ini. Perkembangan pola hidup sosial kemasyarakatan terjadinya distorsi dari pemaknaan Pancasila tersebut. Beberapa dekade belakangan kita menemukan banyaknya para masyarakat Indonesia yang tidak hafal dan paham akan Pancasila.

Ketidakpahaman tersebut hanya menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam dalam meraup eloktoral pada tahun politik 2019 sekarang ini. Akibat dari pengkultusan tersebut membuat masyarakat geram oleh ulah para politisi yang meraup simpatisan. Oleh karena itu munculnya istilah politik pasca kebenaran atau yang diistilahkan *post-truth politics*. Bahwa yang benar tersebut adalah apa yang menjadi pemaham dan keinginan dari hati seseorang. Tidak ada lagi kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi dan tidak ada lagi kebenaran pragmatis. Namun, kebenaran yang berasal dari pribadi masing-masinglah yang benar. Pemerintah mempunyai andil besar untuk mengerem laju *post-truth* dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang jelas. Seperti halnya undang-undang ITE yang mengandung sanksi dan hukuman bagi penyalahgunaan informasi digital yang mengganggu ketertiban umum, serta melindungi warga dalam berinteraksi di dunia maya. Kominfo juga berperan aktif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Sudah selayaknya penanganan menghambat penyebaran informasi hoaks menjadi tugas bersama baik dalam keluarga, pemuka agama, pihak berwajib, komunitas, pemerintah dan yang paling penting dimulai dari pribadi masing-masing.

BAB VI
UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ERA POST-TRUTH

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia merupakan ideologi/cita-cita, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan mulai dari ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut digali dan dihidupkan kembali oleh *founding father* Indonesia hingga dirumuskan dalam suatu dasar negara dan sekaligus dijadikan sebagai cita-cita hidup bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Muzayin; bahwa Pancasila adalah suatu pandangan dan kepribadian bangsa yang sifat dari nilai-nilainya telah berlaku nasional dan juga mendasari kebudayaan bangsa, sehingga dapat dirumuskan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk perwujudan atas aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada warga negara mulai sejak dini bahkan sejak anak mendapatkan pendidikan di tingkat dasar karena di dalamnya terdapat cita-cita Bangsa Indonesia yang harus tetap dijunjung dan diperjuangkan (Muzayin, 1992:16). Selain itu, penanaman nilai Pancasila sejak usia dini juga perlu dilakukan, karena "Dengan Pancasila, perpecahan Bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apa pun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh" (Muzayin, 1992:16).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling tepat dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan di lingkup masyarakat, berbangsa, dan bernegara mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat

beraneka ragam, mulai dari suku, ras, agama, tingkat sosial, dan lain-lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat menghimpun segala keberagaman yang ada sehingga menjadikan keberagaman tersebut bukan sebagai penghalang untuk hidup rukun dalam suatu negara, tetapi dijadikan sebagai sumber kekayaan nusantara. Membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, beberapa ahli mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian nilai terlebih dahulu. Mulyana menyebutkan bahwa nilai adalah hal yang diharapkan oleh seseorang dan pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk perilaku atau tindakan pada diri seseorang. Pada dasarnya nilai tersebut meliputi tiga ranah, yaitu nilai intelektual (benar-salah), estetika (indah-tidak indah), dan etika (baik-buruk). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai merupakan sumber yang dijadikan oleh seseorang dalam bertingkah laku. Nilai-nilai yang dipahami dan dijadikan pegangan oleh seorang individu akan terwujud dalam kebiasaannya sehari-hari (Mulyana, 2004: 24). Demikian juga Kaelan mengemukakan bahwa definisi nilai adalah pada dasarnya adalah suatu sifat atau kualitas yang terdapat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu (Kaelan, 2002: 123).

Mengacu pada perspektif teori fungsionalisme struktural, menurut Winarno Narmoatmojo (2010: 1) sebuah negara bangsa yang hidup dalam berbagai keberagaman seperti Negara Indonesia harus memiliki suatu nilai bersama yang dapat digunakan sebagai nilai pemersatu integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Winarno tersebut, Negara Indonesia telah memiliki *Integrative Value*, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut merupakan rincian dari nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila pada Pancasila, yaitu:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan memiliki rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mensyukuri kehidupan yang ada, selalu menunjukkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain dengan memberikan kesempatan beribadah, tidak pernah mencela keyakinan yang dianut oleh orang lain serta tidak memaksakan yang kita yakini kepada orang lain.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan), yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan dapat memperlakukan orang lain dan menganggap bahwa semuanya memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama selaku warga negara Indonesia. Sila ini juga menekankan agar memiliki sikap ramah dan saling menyayangi serta gemar menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya dengan cara mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dibandingkan dengan kepentingan individu maupun kelompoknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan hidup rukun dengan sesama serta tidak mempermasalahkan berbagai perbedaan yang ada.
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu nilai yang terkandung dalam sila ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan sikap yang dewasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan cara melakukan musyawarah dan menunjukkan sikap untuk saling menghargai pendapat orang lain dalam proses pelaksanaannya serta bersifat lapang dan menerima setiap keputusan yang dihasilkan dari hasil musyawarah tersebut.
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, lebih berempati terhadap kehidupan orang lain dengan cara berbagi kepada yang membutuhkan, tidak menunjukkan gaya hidup yang boros dan berlebihan. Selain itu, dalam mewujudkan keadilan sosial selalu berusaha memajukan diri melalui kerja keras.

Mengacu pada beberapa penjelasan mengenai definisi nilai serta uraian rinci dari nilai-nilai Pancasila tersebut, dapat kita pahami bahwa sangat pentingnya warga negara/masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai dasar, diharapkan, dan dijadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan dari berbagai perbedaan yang ada di Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanaman nilai Pancasila tersebut bahkan sejak

usia dini. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah nilai-nilai Pancasila yang harusnya hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia sudah mulai luntur. Berbagai permasalahan yang muncul di Negara Indonesia mencerminkan sudah pudar dan ditinggalkannya nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi pada berbagai kalangan mulai dari para pejabat, orang tua, para remaja, bahkan juga anak-anak. Anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar juga banyak menunjukkan keseharian yang jauh dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan anak-anak usia sekolah dasar, mulai dari kasus *bullying*, tawuran, pencurian, asusila, bahkan sampai kasus pembunuhan. Permasalahan tersebut muncul tentunya disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya *role model* yang dapat dijadikan contoh oleh anak-anak dalam bertingkah laku. Dalam kesehariannya, anak-anak banyak melihat hal yang kurang baik yang dicontohkan oleh orang dewasa baik yang terlihat langsung dalam kesehariannya maupun di sosial media. Selain itu, globalisasi dan masuknya era Reformasi memberikan pengaruh besar pada pola pikir dan tingkah laku generasi muda saat ini. Pengaruh yang masuk akibat globalisasi membawa pengaruh baru yang terkadang kurang sejalan dengan nilai luhur Pancasila. Para generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah sangat rentan untuk mengikuti nilai-nilai baru tersebut yang jauh dari nilai ideologi Bangsa Indonesia termasuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar.

Pancasila di Era post-truth

Post-truth dapat digambarkan sebagai kondisi atau situasi di mana opini publik dipengaruhi oleh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi daripada oleh kepercayaan pada fakta dan data objektif. Bersamaan dengan itu, ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada hadirnya tanggung jawab moral. *Post-truth* semakin mudah menyebar bila disertai dengan atribut kesakralan dengan *sentiment* keagamaan. Akibatnya, muncul rasa kebencian dan intoleransi. Daya nalar akan nilai-nilai etik menghilang dikalahkan dengan ego pribadi yang menolak untuk mempercayai informasi akurat sekalipun didukung data dan fakta empiris dari sumber yang bereputasi dan terpercaya.

Dalam era *Post-Truth,* menjadikan pola perilaku masyarakat yang mengatasnamakan kebenaran hanya berawal dari sebuah keyakinan pribadi. Terkadang dalam membaca Pancasila hanya satu butir pokok saja yakni Ketuhanan. Hal tersebut menjadi keyakinan

yang mutlak dalam memeluk suatu kepercayaan dalam suatu agama serta menjadikan sebuah keyakinan tersebut pada orang lain tidak benar. Dalam era tersebut berakibat dalam memperlihatkan negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila sedang dilanda kritis dalam pemahaman yang akan berakibat disintegrasi bangsa mengenai suatu persoalan yang bisa dikatakan rumit dan perlu mencari usaha untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perang antara saudara di tanah air. Pancasila di era Orde Baru menjadi instrumen bagi negara dalam rangka mendominasi serta bukan hanya sekedar mengatur di dalam kehidupan bersama. Terdapat sebuah pengalaman kelam dalam konflik horizontal menumbuhkan suatu trauma bagi masyarakat yang menjadi salah satu cakrawala yang dimanipulasi rezim dalam menerapkan suatu penafsiran Pancasila sebagai doktrin yang harus ditaati. Pancasila di era Reformasi dan di era digital dalam menghadapi kecenderungan baru era *post-truth*, tetapi Pancasila akan tetap mampu relevan jika menjadi suatu kerangka sebuah pemahaman yang dialogis serta dialektis yang selalu terbuka dalam kritisme dan dalam berelasi dengan cakrawala yang baru dan terus berkembang.

Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan semakin kompleks, khususnya berkaitan dengan persatuan Indonesia. Persatuan nasional mendapat ancaman dari maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan intoleransi. Di satu sisi, selalu ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Sementara pada sisi lain, para pengusung jargon kebhinekaan seolah ingin memisahkan Pancasila dengan agama. Kedua kelompok di atas sesungguhnya adalah kelompok historis yang tidak memahami sejarah lahirnya Pancasila dan pula tidak memahami fondasi Pancasila yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama dan semangat Keindonesiaan yang hidup dalam keberagaman. Eksistensi negara hukum Pancasila di era *post-truth* tentu saja Akan terus mengalami banyak tantangan dan ancaman. *Post-truth* di ruang publik digital seolah berkelindan dengan pemeran sebagai orang untuk menyebarkan berita-berita bohong atau konten negatif yang berupaya memecah belah persatuan bangsa. Menurut Syaikh Ahmad Mohammad Ath-Tayeb (2019), Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan adalah inti sari dalam ajaran Islam.

Era Post-Truth

Dilansir media-media besar; *Washington Post, BBC, Time*, pada 2016, Oxford *Dictionaries*, salah satu kamus daring terkemuka di dunia yang dibuat oleh Universitas Oxford, telah menahbiskan *'post-truth'* sebagai *'Word of the Year'*. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan banyak orang jika 2016 menjadi tahun kejutan kontroversial dan peristiwa tak terduga. Panorama politik dan sosial selama beberapa waktu ke depan akan ditandai oleh iklim *post-truth* ini, di mana objektivitas dan rasionalitas memberi jalan kepada emosi, atau kesediaan untuk menjunjung tinggi kepercayaan meskipun fakta menunjukkan sebaliknya (L Lorente & Cuenca, 2017). Menurut *Oxford Dictionaries*, *'post-truth'* diartikan sebagai istilah atau iklim yang berhubungan dengan atau mewakili situasi-situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif. Oxford *Dictionaries* juga menjelaskan bahwa terpilihnya *'post-truth'* sebagai *'Word of The Year'* karena dipengaruhi oleh cara kebanyakan orang masa kini untuk mendapatkan informasi. Mereka memilih menjadikan media sosial sebagai sumber berita. *PEW Research Center* pada 2016 merilis bahwa 62 persen dari populasi Amerika akan menggunakan media sosial untuk tetap mendapatkan informasi terbaru (Gooch, 2017). Padahal, tidak semua hal yang ada di platform tersebut merupakan kebenaran. Internet telah mengubah cara orang berkomunikasi, tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi juga dengan memungkinkan individu untuk menemukan dan menyatu di sekitar kelompok lain dengan bias yang mirip dengan mereka sendiri sehingga memperkuat keyakinan mereka.

Konsep dan Karakteristik Post-Truth

Jose Antonio Llorente, Kepala Lembaga kajian Llorente & Cuenca (USA-Spain) dalam pengantar *UNO Magazine* berjudul "*The Post-truth Era: Reality vs Perception*", mengatakan bahwa "Semua tonggak dari fenomena *post-truth* memiliki kesamaan: kepercayaan pribadi yang bagi banyak orang tak terbantahkan telah memperoleh kekuatan di hadapan logika dan fakta, dan telah menjadi mapan sebagai asumsi yang dibagikan oleh masyarakat, menyebabkan kebingungan dalam opini publik". Dalam iklim ini, cara-cara baru terkait dengan opini publik muncul dan media alternatif menjadi mapan. Metode jurnalisme tradisional kalah dengan munculnya saluran komunikasi baru, seperti blog pribadi, *Youtube*, saluran pesan instan, seperti

WhatsApp, *Telegram* dan *Facebook Chat*, atau jaringan media sosial seperti Snapchat atau *Twitter*. Sebuah *Tweet* sederhana sekarang dapat memobilisasi massa dan memberikan efek yang tak terbayangkan bila dibandingkan beberapa tahun lalu. Penyebaran berita palsu menyebabkan kebohongan menjadi hal yang lumrah dan karenanya, muncul relativisasi kebenaran. Nilai atau kredibilitas media agak memudar dibandingkan dengan pendapat pribadi. Fakta-fakta itu sendiri menjadi nomor dua, sementara "bagaimana" sebuah cerita diceritakan lebih diutamakan daripada "apa" atau isinya. Karena itu, ini bukan tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang mendengarkan, melihat, dan membaca versi fakta yang lebih dekat dengan ideologi setiap orang (Lorente & Cuenca, 2017).

Jose Antonio Zarzalegos, seorang jurnalis, mantan Direktur ABC dan El Correo, Spanyol, menegaskan bahwa *Post-truth* tidak sinonim dengan kebohongan. Namun *post-truth* menggambarkan sebuah situasi di mana, ketika fakta-fakta objektif kurang memiliki pengaruh dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi.

Dr. Johanes Haryatmoko, S.J., dosen tetap Universitas Sanata Dharma, dan juga dosen terbang pascasarjana Universitas Indonesia, mengemukakan apa saja kebaruan dari *post-truth*. Era *Post-truth* mendapat momentumnya karena massa jenuh dan membenci limpahan pesan dan rayuan: semua berujung meminta untuk membeli, mengonsumsi, memilih, memberi pendapat, atau ambil bagian di kehidupan sosial. Era *Post-truth* mengutamakan bagaimana melihat dan membaca versi fakta yang lebih dekat dengan ideologi masing-masing. Ada lima kebaruan yang menandai era *post-truth*:

1. Luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi;
2. Masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui medsos berkat demokratisasi media dan jurnalisme warga;
3. Masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas se-ideologi;
4. Teknologi telah merancukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika;
5. Kebenaran tidak perlu lagi difalsifikasi atau dibantah, tetapi kebenaran menjadi nomor dua;

Kelima kebaruan itu memberi peluang politisi yang haus kekuasaan untuk merekayasa agar prasangka negatif kelompok-kelompok masyarakat diintensifkan melalui manipulasi emosi mereka.

Post-Truth, Masyarakat Digital, dan Media Sosial

Kemunculan media sosial tidak lagi menjadi sesuatu yang baru di masyarakat, bahkan sangat dekat dengan semua pengguna internet. Media sosial memberikan kemudahan bagi *user* atau *membernya* dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi baik dalam bentuk *vlog*, blog, jejaring sosial, forum, atau pun dalam bentuk komunitas virtual lainnya. Semakin mudahnya fasilitas untuk mengakses internet membuat perkembangan media sosial sangat pesat bahkan tidak yang memanfaatkan media ini untuk keperluan pribadi, bisnis dan penyebaran informasi hoaks.

Kekuatan platform berita internet atau media *online* diperkuat oleh pengguna/penyebar dan penerima. Aktor yang menggunakan media sosial untuk memulai pertengkaran, membuat marah orang, dan menabur kebingungan di antara mereka penerima pesan dengan menyebarkan informasi yang sering kali dan palsu dan membuat pembacanya meradang. Banyak penggunaan berpura-pura menjadi siapapun dengan membuat banyak akun di media sosial untuk menyebarkan berita palsu dan cerita-cerita menyesatkan.

Berdasarkan sudut pandang paradigma psikologis sosial klasik, komunikasi efektif akan terjadi ketika sumber yang dapat dipercaya menyampaikan argumen yang kuat kepada target *audiens* yang menerima informasi disertai bukti. Akan tetapi, pada lingkungan seperti saat ini yang terpolarisasi, kuatnya politik identitas membuat partisan melihat lawan politik dan ideologi mereka sebagai ancaman dari eksistensial.

Sebagai contoh, fenomena polarisasi di Indonesia misalnya polarisasi partai politik telah meningkat selama pemilihan presiden periode 2019-2024 karena sejumlah alasan, antara lain; **pertama,** korespondensi antara divisi partai dan perbedaan sosial ekonomi dan ideologi. Koalisi paslon 01 adalah partai wong cilik, penduduk desa, dan, merakyat. Sebaliknya, koalisi paslon 02 mewakili orang-orang elite, pintar, dan orang kaya. Pertemuan afiliasi partai dan lampiran kelompok lainnya, tentu saja, memperkuat rasa "kami lawan mereka." Intensifikasi pengaruh partisan, tentu saja, tidak berlaku untuk segmen pemilih yang tidak mengidentifikasi dengan partai. **Kedua,** evolusi dan revolusi media digital telah menghasilkan banyak hal yang luar biasa bagi perubahan pasar media. Saat ini, partisan memiliki banyak peluang untuk mencari informasi dari penyedia yang memiliki perspektif yang sama dengan selera mereka sendiri. Dengan cara seperti ini, mereka

menjangkau individu yang relatif memiliki motif partisan yang lemah. Jutaan orang Indonesia membaca atau menemukan laporan palsu tentang pemilu 2019, baik di *Instagram, Facebook, Twitter,* maupun media media *online* lainnya. Mengingat kenaifan politik, banyak kemungkinan pemilih percaya pada keakuratan berita-berita yang tersebar tersebut, meskipun bukti yang tersedia tidak cukup untuk membenarkan berita tersebut.

Jadi, pasca-kebenaran bisa juga diartikan segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang melalui media *online* atau media sosial ketika melihat kebenaran yang sesungguhnya di media konvensional. Kebenaran yang ada di media kemudian dekonstruksi ulang sesuai dengan pemikiran dan asumsi pembacanya yang merasa apa yang diketahuinya adalah hal yang paling benar. Hal inilah yang pada akhirnya dapat mengaburkan nilai isi berita yang menghiasi media itu bisa menjadi benar dengan kebenarannya dalam semangat yang lebih benar daripada kebenaran itu sendiri.

Masyarakat Digital dan Media Sosial

Arus putaran revolusi industri teknologi komunikasi dan informatika yang belum cukup kuat dengan adanya penguatan literasi media justru membentuk kondisi kejiwaan yang tidak sehat dalam mengemukakan pendapat atas nama kebebasan mengemukakan pendapat. Informasi yang membanjiri halaman media sosial terjadi secara simultan dan berkesinambungan menimbulkan kebiasaan dan perilaku baru bagi para penggunanya, ada reaksi yang diakibatkan oleh aksi dan ada juga aksi yang diakibatkan oleh reaksi dalam sebuah komunitas *virtual* yang terbentuk. Keberadaan komunitas virtual tidak bisa lepas dari ketergantungannya dengan internet. Komunitas *virtual* adalah ruang komunikasi dan saluran paling atas untuk kata-kata yang dibagikan secara *online* dari halaman ke halaman atau dari mulut ke mulut (Surahman, 2018:55).

Masyarakat dalam ruang *virtual* menjadi gagasan baru yang hendak diketengahkan dalam artikel ini. Suatu gagasan yang ingin menawarkan kontribusi baru tentang prospek muslim kosmopolitan sebagai *netizen* yang kesehariannya terjerat jejaring media sosial. Hal ini secara spesifik berkaitan dengan berbagai aktivitas di media sosial, terutama pada beberapa isu yang menjadi perbincangan *netizen* terkait dengan isu moral universal kosmopolitan. Tentu saja artikel ini tidak akan mengulas satu persatu pengguna media sosial secara mendalam

terkait aktivitas mereka di media sosial, tetapi akan menyajikan berbagai aktivitas di media sosial yang fenomenal sebagai salah satu bentuk yang mendorong gagasan muslim kosmopolitan.

Netizen pengguna jejaring media sosial semua bisa bergabung dan berbagai komunitas virtual lainnya untuk bisa terlibat dalam aktivitas jejaring tersebut. Termasuk menjelajah di dunia *virtual* apapun yang dikehendaki, serta berbagi informasi apa pun yang hadir dalam komunitas. Salah satu media *online* yang paling digandrungi anak muda saat ini adalah media sosial (Surahman, 2016:54).

Aktivitas masyarakat digital di media sosial bisa dipahami sebagai masyarakat siber dalam memproduksi segala bentuk konten yang dipublikasikan melalui media sosial. Masyarakat digital sebagai bentuk dari "pe-label-an" untuk formasi sosial baru yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Masyarakat digital bergantung pada *computer mediated communication (CMC)*, seperti *Instagram, Twitter, Facebook*, email, blog, vlog, *Youtube*, dan lainnya, dalam menumpahkan berbagi pemikiran atau informasi secara instan yang tidak lagi dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Aktivitas *netizen* di media sosial dapat menjadikan seorang *netizen* sebagai produsen informasi, distributor informasi, dan juga sekaligus menjadi konsumen informasi itu sendiri. Materi atau konten tersebut dapat berupa teks tulisan, berbagai jenis gambar, *visual, audio* atau video. Makin meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir merupakan variasi yang sifatnya temporal.

Variasi temporal dan intensitas di media sosial mampu mendorong munculnya aksi dan reaksi massa. Pada waktu tertentu dan kasus yang berbeda, percakapan di media sosial dapat muncul kembali untuk meningkatkan intensitasnya. Intensitas tersebut akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari aktivitas di media sosial yang sebelumnya. Hal ini memberikan bukti mengenai hubungan antara aktivitas di media sosial dengan aksi dan reaksi massa sebagai gerakan sosial masyarakat digital. Pada konteks masyarakat digital dan perkembangan teknologi terkait pemanfaatan telekomunikasi dan informasi, tentu pengaruhnya besar dalam perubahan tatanan kehidupan kemasyarakatan, baik dalam hubungan sosial disebabkan oleh sifat komunikasi yang fleksibel dan memasuki aspek-aspek kehidupan manusia.

Dinamika Negara Berdasarkan Pancasila di Era post-truth

Pada 2016, kata *post-truth* ditetapkan oleh kamus *Oxford* sebagai *international word of the year.* Pada tahun itu terjadi intensitas politik yang tinggi. Presiden Kamus *Oxford,* **Casper Grathwohl**, menyatakan bahwa istilah *Post-truth* masih akan menjadi *word of the year* selama beberapa tahun mendatang. Alasannya karena dominasi wacana politik dalam percakapan, khususnya melalui penyebaran berita di media sosial, masih akan menjadi "tajuk utama" dibarengi dengan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh institusi dan media massa.

Penggunaan istilah *Post-truth* pertama kali digunakan pada 1992 dalam sebuah artikel pada *Nation Magazine* oleh seorang penulis bernama **Steve Tesich**. Pada saat itu Steve berusaha menggambarkan fakta-fakta buruk yang diungkapkan pada masa kekuasaan Presiden AS, **Richard Nixon**. Warga AS saat itu meremehkan kebenaran dan tidak mempercayainya. Dalam artikelnya tersebut ia menulis: "Kita sebagai manusia bebas telah memutuskan bahwa kita ingin hidup di era *post-truth*." Kalimat ini mencerminkan kegelisahan Steve terhadap perilaku para politisi dan Pemerintah Amerika Serikat saat itu yang sengaja memainkan fakta dan data objektif atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali demi memanipulasi opini publik.

Dalam ajaran Islam, Pancasila merupakan dasar hukum negara yang sangat relevan dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis meskipun nama Pancasila itu tidak tertera di dalamnya, tetapi isi kandungannya sangat erat hubungannya dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan ajaran Islam melalui perintah untuk beribadah kepada Allah Swt. sebagai tuhan umat Islam dan seterusnya. Hal ini sebenarnya tidaklah berlebihan karena teologi Islam atau akidah yang tertanam kuat di lubuk hati sanubari seseorang dapat menjadi benteng atau kendali baginya sehingga ia tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik atau merusak, seperti penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran hukum (Arif, Mohammad, 2021:242).

Post-truth dapat digambarkan sebagai kondisi atau situasi di mana opini publik dipengaruhi lebih oleh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi daripada oleh kepercayaan pada fakta dan data objektif. Bersamaan dengan itu, ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada

hadirnya tanggung jawab moral. *Post-truth* semakin mudah menyebar bila disertai dengan atribut kesakralan dengan *sentiment* keagamaan. Akibatnya, timbul rasa kebencian dan intoleransi. Daya nalar akan nilai-nilai etik menghilang dikalahkan ego pribadi yang menolak untuk mempercayai informasi akurat sekalipun didukung data dan fakta empiris dari sumber yang bereputasi dan terpercaya.

Contoh nyata Indonesia tidak luput dari pengaruh era *Post-truth* dapat dilihat dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan sebaran berita negatif di aplikasi media sosial *Whatsapp* (WA) melalui aduan masyarakat:

Tabel Pengaduan Pemberitaan Negatif di Media Sosial WA

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1	2016	14
2	2017	281
3	2018	733

Sumber: Data Kominfo.

Kembali ke persoalan negara hukum Pancasila, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan semakin kompleks khususnya berkaitan dengan persatuan Indonesia. Persatuan nasional mendapat ancaman dari maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan intoleransi. Di satu sisi, selalu ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain. Sementara pada sisi lain, para pengusung jargon kebhinekaan seolah ingin memisahkan Pancasila dengan agama. Kedua kelompok di atas sesungguhnya adalah kelompok ahistoris yang tidak memahami sejarah lahirnya Pancasila dan pula tidak memahami fondasi Pancasila yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama dan semangat Keindonesiaan yang hidup dalam keberagaman. Dalam pada itu juga harus dicermati bahwa di dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia butir kesatu dalam 45 butir pengamalan Pancasila disebutkan:

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini termuat di dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR tersebut termasuk dalam Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003.

Eksistensi negara hukum Pancasila di era *Post-truth* tentu saja akan terus mengalami banyak tantangan dan ancaman. *Post-truth* di ruang publik digital seolah berkelindan dengan kegemaran sebagian orang untuk menyebarkan berita-berita bohong (konten negatif) yang berupaya memecah belah persatuan bangsa. **Syaikh Ahmad Mohammad Ath-Tayeb**, seorang *syaikh* besar dari Al-Azhar Mesir dalam kunjungannya ke Indonesia menilai bahwa Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, tetapi merupakan esensi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, asas musyawarah, dan keadilan adalah inti sari dalam ajaran Islam. Di tengah "kontestasi" terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, baik yang ingin menggantikannya dengan ideologi baru maupun memisahkannya dengan agama,

Pancasila justru semakin kokoh sebagai perekat persatuan nasional dan menjadi pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Antisipasi terhadap ancaman eksistensi negara hukum Pancasila di era *post-truth,* di sini akan dianalisis dari sudut pandang teori hukum kritis dari **Roberto M. Unger**. Alasan penulis menggunakan teori hukum kritis sebagai media analisis, adalah: (1) Teori ini mengusung konsep hukum dan modernitas dan negara hukum Pancasila termasuk negara hukum modern; (2) Salah satu substansi dari teori hukum kritis adalah tinjauan terhadap problematika sosial. Era *post-truth* yang terjadi saat ini di Indonesia telah menjadi problematika sosial khususnya di ruang publik digital; dan (3) Teori hukum kritis ini mengusung kajian tentang disintegrasi *rule of law* dalam masyarakat pasca-liberal. Menurut pandangan **Unger,** dalam konteks persoalan tatanan sosial (*social order*): "Doktrin tentang tatanan sosial mencakup pandangan terhadap bentuk dan penggunaan peraturan. Apabila tiap-tiap doktrin paling cocok untuk satu jenis masyarakat tertentu maka diharapkan akan diketahui bahwa karakter hukum mengalami perubahan dari satu bentuk kehidupan sosial ke bentuk kehidupan sosial yang lain".

Ada sebuah adagium hukum dari Belanda, yaitu *Het recht hinkt achter de feiten aan,* yang terjemahan bebasnya adalah hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan. Adagium ini kiranya relevan dengan keadaan yang dialami Indonesia dewasa ini. Ketika kontestasi politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah sedang terjadi, pada saat itu pula pemberitaan negatif berkonten hoaks menjadi *trending topics* yang digemari oleh masyarakat. Hukum tertatih-tatih menangani dan membendung gempuran-gempuran ***post-truth***.

Sesungguhnya, **Unger** mengisyaratkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern tidak boleh melunturkan semangat interaksi sosial dan interaksi pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif. Masyarakat Indonesia berkenaan dengan itu tidak boleh melupakan identitasnya sebagai makhluk sosial. Negara hukum Pancasila sebagai negara hukum modern sudah seharusnya menjadi jati diri dan perekat bangsa. Bangsa Indonesia yang sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang pluralis, tidak boleh kehilangan kultur dengan tetap menjaga identitas nasionalnya. Negara Hukum "Pancasila" inilah yang diharapkan akan membawa negara Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Lalu bagaimana relevansi antara eksistensi negara hukum Pancasila dan ketahanan nasional di era *post-truth* ini? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk tantangan, hambatan dan ancaman, datang dari dalam maupun dari luar negeri, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI(Arif, Mohammad, 2021:245).

Di sinilah perlunya kesadaran kolektif segenap elemen bangsa untuk menempatkan 'Persatuan Indonesia di atas segalanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Bila kesadaran kolektif ini terbangun dan dilaksanakan secara konsisten, masyarakat akan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga eksistensi negara hukum Pancasila akan terus terjaga.

Masyarakat umum merupakan objek sasaran yang sulit untuk dipengaruhi karena sudah tertanam dengan rapi dan kuat ideologi dan pola pikir mereka masing-masing. Dalam konteks penguatan Pancasila, masyarakat umum terdiri dari banyak suku bangsa dan agama, dan kebanyakan mempunyai keyakinan masing-masing tentang ketuhanan maupun tentang cara hidup dan bermasyarakat. Hal itu menjadi suatu kendala yang cukup sulit. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menyiasati dengan menggunakan media sosial sebagai senjata yang dapat ditujukan kepada seluruh objek sasaran, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua dalam bentuk pembentukan konten-konten kebangsaan seperti video tentang krisis moral, *wallpaper* kata bijak para pahlawan, video pendek penanaman nilai Pancasila, aplikasi kuis kebangsaan, video tentang bahayanya radikalisme, membuat *website* diskusi, petisi dan penyampaian aspirasi sebagai wujud bentuk demokrasi dan lain

sebagainya. Cara ini dirasa ampuh dalam menerapkan penguatan nilai Pancasila di era Globalisasi sekarang. Karena hampir semua orang pasti mempunyai gawai dan dapat mengakses media sosial di mana pun berada tanpa biaya yang banyak dan mudah diakses. Namun, tidak melupakan pula kaidah-kaidah kita sebagai mahasiswa dalam berdakwah harus tetap menggunakan adab dan tata krama (Arif, Mohammad, 2021:246).

Isu-Isu Terkait Post-Truth

Secara sosiologis, *post-truth* merupakan fenomena untuk membongkar sebuah teknologi media yang dimanfaatkan hanya untuk memuaskan "syahwat politik" pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Di dalamnya termasuk mengonstruksi kebohongan sebagai pesan kebenaran sehingga kebenaran mengalami defisit di antara kepungan ego dan kepentingan politik. Dari fenomena ini, kemudian muncullah sebuah era di mana kebohongan menjadi sebuah dogma yang "diamini" oleh masyarakat awam.

Masyarakat di berbagai belahan negara sedang mengalami fase post-truth yaitu sebuah fase di mana masyarakat mengabaikan etika pendapat, mengedepankan berita hoaks dan fitnah seperti kasus Brexit dan terpilihnya Trump. Hal tersebut bertujuan untuk mencampur adukan dan "memanasi" emosi khalayak dan menggiring sebuah kebenaran dalam menyampaikan informasi dan gagasan. Era ini cenderung menggiring kebenaran dengan selera yang diinginkan meskipun pada dasarnya hal ini tak mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.

Masyarakat sudah diselubungi antitesis dari sebuah pengetahuan dan kebenaran yang hakiki. Ilmu pengetahuan yang berusaha memvalidasi atau memverifikasi sebuah "isu hoaks" hanya akan dianggap sebagai niatan konspirasi. Masyarakat sudah tidak mempercayai akan sebuah pengetahuan yang bersifat empiris dan objektif. Akan tetapi, lebih percaya pada "*broadcast*" yang disampaikan oleh pihak lain yang memiliki paham yang sama. Kondisi *post-truth* menjadi ancaman yang besar bagi tatanan moral. *Post-truth* dapat menjadi sebuah "tsunami" di mana terdapat isu-isu yang merusak pola berpikir dan pola nilai masyarakat. Dimulai dari media maya yang berujung pada kerusakan sendi-sendi realitas kehidupan nyata masyarakat.

Ghufron (2017) menyatakan bahwa industri media pada saat ini sedang mengalami refeodalisasi ruang publik di mana terdapat logika

ekonomi dan politik yang dimasukkan dalam sendi-sendi kesadaran masyarakat sehingga memperlemah kekuatan masyarakat dalam ruang publik. Karl Marx melihat bahwa mereka yang menguasai basis materi akan menguasai gagasan dalam sebuah zaman (Ritzer 2011). Di era kontemporer ini, mereka yang akan menguasai modal, politik dan media maka akan menguasai gagasan di zaman ini. Terdapat sebuah mekanisme yang lebih kompleks dan halus yang membuat orang-orang melakukan yang dikehendaki oleh pemilik media.

Pandangan Terkait Post-Truth/Post-factual.

Dr. Adam Rutherford kurang yakin bahwa masyarakat pada era sekarang berada pada era post-truth. Pandangan Rutherford ini didasari atas latar belakangnya sebagai ilmuwan di mana seorang ilmuwan harus selalu meragukan sebuah kebenaran. Oleh karena itu, Rutherford menganggap bahwa Trump telah menyatakan kebohongan-kebohongan secara terus menerus demi kepentingan politiknya. Ilmu pengetahuan dan politik memang merupakan sesuatu yang berbeda. Pada ilmu pengetahuan, kebenaran diperoleh berdasarkan landasan metode yang digunakan sehingga diperoleh bukti-bukti yang mendukung kebenaran yang dimaksud. Sementara politik, kebenaran hanya dipersepsikan tanpa adanya bukti yang mendukungnya. Walaupun begitu, banyak orang yang lebih percaya pada orasi politikus dari pada penjelasan para pakar karena masyarakat mengambil keputusan tanpa berpikir rasional melainkan menggunakan emosional.

Prof. Frank Furedi tidak setuju atas adanya *post-factual* karena fakta mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung seseorang yang menafsirkannya. Sementara akhir-akhir ini elite yang mempunyai media massa lebih dipercaya oleh masyarakat daripada para ahli. Para elite yang mempunyai media massa menyebarkan pandangan mereka tentang fakta menggunakan sedikit sentuhan sains melalui media massa sehingga masyarakat terpengaruh atas hal itu.

Prof. Neena Modi kurang setuju dengan adanya *post-factual* karena dengan istilah tersebut hanya menguntungkan sebagian orang yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Kondisi *post-factual* hanya dipenuhi dengan keadaan-keadaan dan isu-isu yang didasari atas adanya emosi serta adanya penolakan yang kuat atas bukti-bukti yang ada. Pada era *post-factual* ini masyarakat tidak lagi percaya dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pakar melainkan lebih percaya pada pernyataan faktual yang salah. Pernyataan faktual yang salah dari

kepentingan tersebut diterima oleh masyarakat dengan menggunakan emosi tanpa menggunakan logika. Dalam bidang politik, pernyataan-pernyataan politik selalu memiliki daya tarik emosi di mana dalam hal ini disebut sebagai ideologi. Dalam ideologi ini kadang dilupakan aspek kebaikan dan keburukannya. Oleh karena itu, kondisi *post-factual* bisa membahayakan bagi keadaan masyarakat di masa yang akan datang. Maka dari itu, masyarakat perlu memperhatikan politisi yang mempunyai integritas dan perilaku yang baik.

Josh Lowe menyatakan bahwa masyarakat hidup di era *factual* ini, di mana masyarakat tidak menerima pernyataan-pernyataan politik tanpa didasari atas fakta. Oleh karena itu, politisi selalu membuat pernyataan sesuai fakta yang menarik dan dapat mencapai tujuannya. Jika politisi tidak mempunyai bahan orasi sesuai fakta maka para politisi menggunakan beberapa bahan yang mendekati kebenaran. Para politisi menyebarkan orasi yang sesuai tujuannya melalui media-media yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi menurut masyarakat. Dalam kondisi *post-factual*, politisi hanya mengambil fakta-fakta yang kemudian diinterpretasi sesuai dengan cara berpikir, emosi, budaya dan struktur masyarakat.

Fenomena *post-truth/post-factual* merupakan hal sedang hangat terjadi di berbagai Negara. Lain halnya di Amerika terkait Trump dan Inggris terkait Brexit, di Indonesia juga terjadi fenomena *post-truth/ post-factual* pada pertarungan politik Jakarta tentang "Ahok". Berbagai media yaitu *Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter,* dan media lainnya digunakan untuk menebar berita-berita faktual yang belum tentu kebenarannya. Berita-berita tersebut diterima oleh masyarakat dengan penuh emosi karena menyangkut ideologi dan agama sehingga beberapa bukti dan kebenaran yang disampaikan oleh pakar dan ahli agama dan ilmu pengetahuan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat secara tidak sadar sudah larut dalam berita-berita aktual yang dipenuhi oleh kepentingan politik sebagian *stakeholder* yang pada dasarnya memberikan keuntungan pada *stakeholder* yang bersangkutan. Sebagai mahasiswa dan kaum intelektual muda, fenomena dan istilah *post-truth/post-factual* tidak seharusnya serta merta dipercaya karena kebenaran dan fakta yang disampaikan oleh politisi dan media belum tentu benar. Kebenaran dari suatu fakta harus dicek melalui berbagai pandangan ontologi, epistemologi dan metodologi yang mendasarinya. Sebagai mahasiswa juga mempunyai pandangan yang luas dan holistik serta menghindari penggunaan emosi dalam menafsirkan suatu fakta yang disampaikan dan dinilai oleh beberapa orang saja.

Gagasan dan Ide Terkait Post-Truth/Post-factual

Dalam fenomena *post-truth* yang terjadi pada akhir-akhir ini memiliki pandangan yang berbeda dengan filsafat sains. Di mana isu-isu yang dipandang secara *post-truth* berkembang dan terus "menggelinding" bagaikan bola salju tanpa arah dan tujuan. Isu yang ada selalu berbasiskan pada kepentingan elite dan sesuai dengan selera masyarakat umum." Tidak ada bahasa dalam dirinya sendiri, juga tidak ada universalitas dalam bahasa, bahasa adalah kumpulan dialek, ujaran, ungkapan popular (slang) dan bahasa khusus, tidak ada pula juru bicara" ideal dalam komunikasi, kecuali pada komunikasi linguis yang homogeni. Tidak ada bahasa ibu, kecuali perampasan kekuasaan oleh wacana dominan dalam suatu keberagaman politik" (Gilles Deleuze dan Felix Guattari, dalam Lubis, 2015). Isu-isu dalam *post-truth* dibahas ini selalu dalam kondisi diskursus antara fakta kebenaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Foucault yang memperhatikan tentang formasi wacana dan peran wacana dalam pembentukan kesadaran masyarakat. Foucault mengemukakan mengenai "*decentering* subjek" dan hubungan antara diskursus dengan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat dan produksi diskursus selalu dikontrol, diseleksi, di-redistribusi oleh kekuasaan (Lubis, 2015). Dalam kasus ini, Donald Trump sebagai "penguasa" sekaligus miliarder mampu mengendalikan pengetahuan media melalui "kuasa" politik dan ekonomi.

Isu-isu dalam *post-truth* dipandang sebagai sebuah wacana kepentingan mengetahui dan menjelaskan realitas. Wacana yang diisukan dalam *post-truth* ini meliputi cara berpikir, cara mengetahui dan menyatakan sesuatu. Jalinan hubungan antara argumen, pola pikir, dan pengetahuan yang disebut Foucault adanya berbagai perspektif, kepentingan dan kuasa yang berbeda dalam membentuk subjek. Oleh karena itu, terdapat beragam wacana yang membentuk pemikiran masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan filsafat sains (ilmu pengetahuan) yang harus mendasarkan argumennya pada sebuah epistemologi logis dan dibuktikan secara ilmiah berkali-kali (diverifikasi). Selanjutnya, kita mampu memberikan penjelasan (kausalitas) dan memberikan pemaparan secara jelas, sistematis, dengan pernyataan yang dapat dibuktikan (dijustifikasi) berdasarkan pengalaman atau eksperimen.

Problematika Nilai-Nilai Pancasila di Era Post-Truth

Pertama, Emosi Sosial

Post-truth merupakan suatu masa di mana masyarakat lebih terpengaruh dengan opini-opini publik berdasarkan daya tarik emosionalnya, tanpa memandang apakah fakta itu nyata atau obyektif. Dalam kata lain, masyarakat hanya ingin mengetahui apa yang sesuai dengan ketertarikan emosionalnya semata. *Post-truth* pula yang menyebabkan hoaks mudah muncul dan disebarkan tanpa kendali.

Hal itu didukung dengan fakta yang diungkap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Berdasarkan data Kemenkominfo, dalam dua tahun terakhir, penyebaran kabar bohong meningkat secara drastis. Ada peningkatan hampir 900 persen jumlah pengaduan masyarakat terkait konten di situs, akun media sosial, aplikasi telepon genggam, dan perangkat lunak. Ini menandakan, penanganan konten hoaks dan ujaran kebencian belum dilakukan secara optimal oleh perusahaan media sosial.

Pengguna media sosial bisa menggugah berbagai macam konten, baik isu Sara, fitnah tentang seseorang, maupun informasi bohong lainnya. Akibatnya, keutuhan berbangsa di tanah air menjadi rawan. Isu Sara seolah seperti virus yang secara perlahan menggerogoti sendi-sendi keutuhan bangsa dan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Konsensus cerdas para pendiri negara tersebut berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan sejarah serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara kesatuan.

Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Konsep persatuan yang ideal dengan mengondisikan setiap warga negara hidup berdampingan dan gotong royong tanpa menghilangkan identitas suku bangsa, adat istiadat, ras, ataupun agama.

Dalam definisi tertentu, Pancasila sebenarnya Indonesia itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan spirit/roh kebangsaan;

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan watak, karakter, dan kepribadian bangsa; Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan media/wadah dan alat kebangsaan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan.

Masih Relevan 1 Juni 2019 menjadi penanda bahwa Pancasila sudah berusia 74 tahun. Rentang waktu yang begitu panjang dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang signifikan menimbulkan beberapa pertanyaan baru di kalangan petinggi negara, akademisi, dan kita semua. Apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi negara dewasa ini? Apakah Pancasila masih mampu menjawab setiap tantangan di era perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0? Apakah Pancasila masih bisa menjadi bintang pemandu bagi rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial?

Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dan dampak buruk bagi masyarakat. Kemudahan, kecepatan, dan efektivitas merupakan gambaran umum dampak kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Generasi milenial adalah generasi yang sangat familier dengan teknologi karena generasi ini lahir ke dunia di mana segala aspek fisik (manusia dan tempat) mempunyai ekuivalen digital. Di Indonesia populasi generasi milenial mencapai 90 juta jiwa. Itu menandakan kelompok milenial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Ditambah dengan jumlah aktivitas warga negara di dunia maya didominasi oleh anak muda milenial. Generasi milenial menjadi penyokong utama peredaran informasi di dunia virtual.

Pada waktu yang sama ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang. Bidang ideologi (ancaman ekstrimisme, paham radikal), bidang politik (permasalahan pemilu, pejabat negara yang terjerat korupsi), bidang ekonomi (kesenjangan yang masih tinggi), bidang sosial budaya (pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga), bidang pertahanan dan keamanan (terorisme, konflik Sara, illegal *fishing*).

Revolusi industri 4.0 juga membawa *disruption and bridging generations*. Terdapat gap antar generasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas.

Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan setiap masalah yang ada maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini.

Menjawab Problematika

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apa pun baik pada masa hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Itu artinya Pancasila dengan basis filosofinya yang mendalam sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada.

Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. *Pertama*, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. *Kedua*, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Pancasila sebagai nilai universal masih sangat relevan dengan generasi hari ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada khususnya generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh pergerakan kemajuan negara yang kita cintai ini.

Nilai-nilai ketuhanan, Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam bermedia sosial akan menghantarkan kesedapan dalam kehidupan beragama. Tidak melontarkan konten penghinaan atau menyudutkan agama dan kepercayaan tertentu membuat kehidupan beragama menjadi tenteram dan damai.

Nila-nilai kemanusiaan, memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri *netizen* yang humanis. Tidak menyebarkan konten hoaks dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab.

Nilai-nilai persatuan, forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme. Memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi saat diskusi di forum-forum dunia maya. Selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan di dalam forum *online*.

Nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan, berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya. Ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi *online*. Menyelesaikan setiap perdebatan di grup *online* dengan mengedepankan musyawarah.

Nilai-nilai keadilan sosial, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang.

Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua.

Kedua, Berita Bohong

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Namun, banyak informasi atau berita yang disebarkan secara pribadi atau kelompok lebih banyak tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teridentifikasi hoaks. Hoaks adalah informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Survey Mastel (2017) menyatakan bahwa 1.146 responden,44,3% di antaranya menerima berita hoaks setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu setiap harinya. Bahkan, media arus utama terkadang ikut terkontaminasi oleh hoaks.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa hoaks merupakan bagian dari era keterbukaan yang harus dihadapi. Presiden meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah yang dapat memecah bangsa, terutama yang telah beredar di media sosial (Widodo,2017). Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan bahwa masyarakat akan dirugikan dengan banyaknya persebaran berita yang tidak jelas, di antaranya dengan adanya keraguan terhadap informasi masyarakat menjadi bingung. Kebingungan masyarakat ini dapat digunakan untuk menanamkan kebencian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Post-truth berkembang pesat di masyarakat yang sudah diwarnai oleh informasi yang mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik. Apa yang terjadi dalam *post-truth* adalah relativisasi kebenaran dengan objektivitas data, dramatisasi pesan jauh lebih penting dari isi pesan itu sendiri. Dalam era *post-truth*, narasi selalu mengalami kemenangan yang mutlak terhadap data atas fakta yang ada maka sangat perlu dilakukan *fact-checking* atau pemeriksaan terhadap suatu fakta.

Fenomena *post-truth* menghadirkan jenis fakta atas suatu peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan pengiriman berita. Proses kerjanya difasilitasi oleh kecanggihan informasi digital.

Berdasarkan hasil penelitian Mastel (2017), jenis hoaks yang paling sering diterima masyarakat adalah bidang sosial politik (Pilkada, pemerintah) dan masalah SARA. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Awang Dermawan menyampaikan bahwa hoaks memiliki tujuan untuk kepentingan manuver politik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Didik Haryadi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta bahwa penyebaran hoaks memiliki motif yang merujuk pada pertarungan dan kekuasaan di dunia maya.

Menjawab Problematika

Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman masyarakat dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara yang mana mampu menjawab setiap problematika yang ada.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap agama mengajarkan sebuah kebaikan dan mengajarkan bahwa perbuatan berbohong atau menyebar berita hoaks merupakan perbuatan yang tercela. Dengan percaya akan adanya Tuhan berarti akan senantiasa berkata baik dan jujur serta tidak mudah menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan sebuah fitnah dan perpecahan

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung nilai-nilai kemanusian dengan membela keadilan dan kebenaran. Dengan menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari maka akan meminimalisir terjadinya perpecahan yang disebabkan oleh berita hoaks yang tersebar di luar sana.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan, yang terdiri dari suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut diharapkan mampu mempersatukan Indonesia sehingga tidak mudah mempercayai hoaks yang beredar yang mampu memecahkan persatuan Indonesia.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, individu diharapkan mampu menciptakan kebenaran dan meminimalisir terjadinya penyebaran hoaks yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat Indonesia.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan suasana yang harmonis dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan umum. Menciptakan suasana yang harmonis dilakukan dengan tidak mudah mempercayai atau menyebar berita hoaks yang belum tentu benar atau salah.

Oleh sebab itu, Pancasila sangat penting artinya agar tercipta suasana yang harmonis dan gotong royong dengan tidak menyebarkan berita hoaks dan tidak mudah untuk mempercayai sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Saling menyadari dan introspeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa menyaring informasi dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan hoaks.

Ketiga, Populisme Agama

Populisme agama adalah gejala destruktif karena melakukan "emosionalisasi dan personalisasi politik. Menurut F. Budi Hadirman, ada dua alasan untuk mengkonfirmasinya. *Pertama*, politik modern dalam pengertian normatif adalah sebuah proses rasional karena melibatkan argumen dan kepentingan yang dapat dinalar. Populisme naik ke panggung politik justru membawa sentimental untuk memancing kerumunan. *Kedua*, politik itu perkara kepentingan negara, polis. Gerakan populisme menyempitkan politik hanya pada *figure* pemimpin kelompok tertentu yang berujung pada privatisasi politik pada ruang gerak kelompok tertentu saja.

Haryatmoko menegaskan bahwa populisme agama muncul karena sekelompok orang yang memakai jubah agama tertentu secara

samar sudah menganggap bahwa demokrasi representasi sudah tidak aspiratif lagi sehingga harus diubah. Dengan itu, mereka menanamkan diri dalam sebuah jalan perjuangan dengan menjual bendera berbau agama tertentu sebagai satu-satunya keyakinan untuk menempuh jalan kesejahteraan baru. Dengan anggapan seperti itu maka respons kelompok ini kepada pihak penguasa selalu berisi kritikan yang negatif. Diujung fenomena ini, era informasi, gejala ini dicurigai sebagai bentuk demagogi dalam konteks komunikasi politiknya.

Dalam pandangan Georg Beyz dan Carol Johnson, keduanya menawarkan bahwa populisme agama muncul untuk menjawab tiga hal:

- Apa yang salah atau tidak beres dalam masyarakat?
- Siapa yang salah?
- Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan situasi?

Haryatmoko dalam bukunya, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* menganalisis bahwa ada tiga aspek yang menjadi kunci sukses populisme agama. *Pertama*, mampu memberikan kepastian, maksudnya dalam ketidakpastian ekonomi global, pengangguran, dan ketidakadilan. *Kedua*, agama menumbuhkan keyakinan orang berada dalam kontak dengan makna yang terdalam dalam hidupnya. *Ketiga*, acuan ke tujuan terakhir hidup memberi pembenaran dan sikap kritis terhadap tatanan yang ditolaknya.

Upaya yang Dapat Dilakukan di Era Post-Truth

Dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang, pola pikir para pemikir negara berikut masyarakatnya juga semakin berkembang dan semakin kompleks. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai keyakinan mengenai ideologi bangsa, apakah ideologi yang sudah kita terapkan bertahun-tahun masih dapat digunakan di era saat ini melihat banyaknya masalah yang terjadi di mana-mana. Hal yang perlu dilakukan di era saat ini agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan identitas bangsa tidak tergerus oleh zaman adalah dengan mengetahui secara mendalam tentang identitas bangsa Indonesia.

Upaya-upaya yang dapat kita lakukan di masa *post-truth* ini agar kita tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya informasi yang ada di media sosial di antaranya, yaitu:

1. Dengan beredarnya informasi di mana-mana maka bisa menyebabkan masalah. Upaya kecil yang dapat kita lakukan

adalah menyaring informasi terlebih dahulu sebelum kita mempercayainya jangan sampai kita mudah percaya terhadap hal-hal yang tidak ada bukti;

2. Pada zaman kita saat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama agama. Hal ini bisa dilakukan di media sosial dengan menyebarkan isu-isu agama yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari hal ini bisa menyebabkan berubahnya pola pikir masyarakat. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan berguru secara langsung di suatu lembaga pendidikan agama yang benar-benar dipercaya dan mendapatkan izin dari pemerintah hal ini untuk mencegah kita tersesat dalam memahami suatu agama;
3. Untuk melindungi ideologi bangsa yaitu Pancasila dari era pembenaran yang sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, seharusnya pemerintah menyudahi dan menghentikan isu-isu yang belum jelas dan terbukti kebenarannya dan tanpa didasari adanya fakta agar tidak menimbulkan keretakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
4. Pemahaman terhadap bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila sejalan dinamika perkembangan zaman menjadi penting di sini. Bagaimana menggali sudut pandang generasi milenial sampai Z terhadap nilai kehidupan berbangsa sejalan dengan tren saat ini dan bagaimana bentuk penyematan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dengan nuansa yang mutakhir perlu untuk menjadi perhatian. Hal ini memerlukan pemikiran yang *out of the box*;
5. Bagaimana menerapkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila pada masa kiwari dan hal itu dianggap sangat relevan dengan zaman. Penerapan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan medium tren sebagai sarananya bukan sekadar melanggengkan eksistensi negara dan pemerintah, tetapi mengarah pada pembumian nilai-nilai Pancasila. Relevansi tersebut dapat dihadapkan pada latinnya ekstremisme, hoaks, dan pernyataan pernyataan publik dari para stakeholder, baik dari kelompok kepentingan dan pemerintah;
6. Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam rangka memperkuat moral bangsa dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali sikap dan rasa nasionalisme. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui pendidikan Pancasila dalam rangka membangun karakter generasi muda. Hal ini dikarenakan pendidikan dianggap sebagai prioritas utama dalam rangka

mencetak generasi muda yang memiliki karakter serta moral sehingga dapat meneruskan perjuangan dalam membangun dan memajukan bangsa;

7. Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan Pancasila di arus globalisasi agar nilai-nilai yang termuat di dalamnya tidak memudar, bahkan hilang diperlukan adanya kerja sama dari seluruh warga masyarakat terutama generasi muda. Masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai dengan cara mengaktualisasi sekaligus mengimplementasi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diharapkan pandai serta bijaksana dalam menyikapi dan memilah segala informasi yang masuk akibat arus globalisasi;
8. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pendidikan karakter. Bangsa Indonesia perlu untuk kembali menata ulang pola pendidikannya. Selama ini, pendidikan kita lebih berpusat kepada nilai dari hasil ujian nasional padahal kenyataannya yang kita butuhkan saat ini bukan hanya berpusat pada nilai hasil ujian saja, tetapi juga pendidikan moral, pendidikan keterampilan hidup, pencegahan kekerasan, dan resolusi konflik. Dengan generasi muda yang dididik dengan langkah-langkah ini bisa dipastikan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan tetap utuh;
9. Memunculkan *Community Power* yaitu suatu hal untuk menciptakan ruang untuk saling bicara dan bekerja sama dalam mencerdaskan dan menajamkan masyarakat, seperti pejabat publik yang berpikir progresif disruptif, pendidik dan wirausahawan sosial (*social entrepreneurs*)."

Upaya Solutif

Pada 2016 menjadi tahun kejutan kontroversial dan peristiwa tak terduga. Panorama politik dan sosial yang ditandai oleh iklim *post-truth*, di mana objektivitas dan rasionalitas memberi jalan kepada emosi, atau kesediaan untuk menjunjung tinggi kepercayaan meskipun fakta menunjukkan sebaliknya. Situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif. Dalam rentang masa ini penggunaan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai basis pengukuran objektivitas seakan-akan tak penting dalam mempengaruhi opini, pemikiran, maupun perilaku publik.

Kepercayaan pribadi bagi banyak orang tak terbantahkan telah memperoleh kekuatan di hadapan logika dan fakta, dan telah menjadi asumsi yang dibagikan oleh masyarakat, menyebabkan kebingungan dalam opini publik. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan semakin kompleks yang berkaitan dengan persatuan Indonesia. Persatuan nasional mendapat ancaman dari maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan intoleransi. Namun, adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Dan yang perlu dilakukan di era saat ini agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terpecah belah lagi dan identitas bangsa tidak tergerus zaman adalah dengan mengetahui secara mendalam tentang identitas bangsa Indonesia.

Pancasila telah menjadi pemersatu dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan dinamika perkembangan zaman, tentu dalam penerapannya perlu upaya berkelanjutan dalam penyesuaian dan penguatannya. Untuk itu, pemahaman terhadap situasi dan kondisi berjalan penting untuk menjadi perhatian. Tulisan ini mencoba memaparkan kecenderungan situasi dan kondisi saat ini dalam konteks penguapan nilai-nilai Pancasila. Kajian pustaka terkait digunakan penulis untuk merangkai pokok-pokok pikiran merujuk kepada *trend* situasi dan kondisi berjalan dan perlunya pola pikir yang relevan dengan masa kontemporer tanpa menghilangkan esensi penguatan nilai-nilai Pancasila. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak terkait dalam kaitannya dengan upaya penguatan Pancasila sebagai falsafah pemersatu dan pedoman kehidupan elemen dari NKRI.

BAB VII
PERAN MAHASISWA DALAM ERA POST-TRUTH

Dalam era *post-truth*, sebuah politik pascakebenaran, budaya yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi keluar dari inti kebijakan. Selain itu, poin topik pidato ditegaskan berkali-kali tanpa mendengarkan balasan yang berbobot. Pascakebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Jadi, era *post-truth* dalam kamus Oxford menobatkan *post-truth* menjadi *word of the year*, dan mendefinisikan *post-truth* sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan emosi dan keyakinan masyarakat.

Post-truth/pascakebenaran merupakan suatu berita sebenarnya hoaks atau belum tentu ada kebenarannya. Berita hoaks ini di media sosial sangat mudah tersebar dengan cepat. Karena banyak pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab menyebarkan sebuah berita di media sosial. Begitu mudah tersebar melalui sebuah situs-situs yang tak tahu asal yang membuat hal itu. Telah banyak berita yang mudah sekali tersebar salah satu contohnya berita tentang kuota pelajar, berita *SMS* atau telfon tentang mendapatkan beasiswa, berita tentang subsidi bantuan pulsa sebesar Rp200.000. Berita mengenai pinjaman untuk modal usaha, bahkan berita tentang mendapatkan sebuah hadiah berupa uang pun ada, namun pasti persyaratan tersebut harus mentransfer terlebih dahulu dengan alasan untuk pengiriman barang atau modal untuk biaya ongkir.

Hal inilah yang kadang sesuatu yang sangat menggiurkan bahkan sangat menarik. Sudah banyak para korban yang tertipu oleh hal ini. Karena mudah sekali percaya dengan berita hoaks. Dalam hal tersebut penting bagi kita para pelajar atau mahasiswa untuk lebih teliti dan lebih cerdas lagi dalam memahami berita entah dalam bentuk secara langsung, atau dari *Facebook*, *Instagram*, atau *WhatsApp*. Maka dari situlah penting dalam penelusuran dan pembahasan, mahasiswa memiliki sebuah peran tentang era *post-truth* atau berita hoaks.

Media sosial sendiri pertama kali muncul pada 1997 yaitu *Sixdegree.com*, walaupun saat 1995 telah ditemukan situs *classmates.*

com, yang merupakan jejaring sosial. Media ini sering disalahtuliskan dengan sebuah jaringan yang digunakan satu sama lain guna untuk saling berbagi informasi berupa kabar dari berbagai bentuk aplikasi. Jejaring media sosial ialah alat komunikasi jarak jauh, untuk saling berinteraksi, membuat sebuah forum *group*. Mendefinisikan media sosial sebagai sarana suatu kelompok berbasis internet. Klasifikasi teknologi ini berbagai bentuk, seperti majalah, *weblog*, foto video, gambar, dan berbagai situs lainnya.

Hal ini sangat berguna sekali untuk semua orang, sebab sekarang ini teknologi semakin maju dan semakin canggih. Banyak orang yang telah memanfaatkan media sosial ini untuk bisnis *online*, membuat video, mengedit, membuat forum *group*, membuat situs bacaan atau aplikasi untuk para pembaca. Ada sebuah situs yang mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di web ini bernama proyek kolaborasi.

Adapun jenis situs jejaring sosial yang memberikan izin bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berbentuk video/foto, contohnya Facebook dan *Instagram*. Di sebuah media sosial mempunyai sejenis virtual *game* world, ini merupakan replikasi lingkungan 3D. User atau nama pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata, contohnya permainan daring (*online game*).

Jenis *game online* pun banyak tak hanya satu, yaitu minecraft adalah sesuatu aplikasi yang isinya membuat atau membangun suatu kreativitas seperti membangun rumah dan membuat dunia sendiri, lalu jenis *game* yang menggunakan kecerdikan dan kelincahan. *Game* yang mengutamakan kekompakan dan logika. Isi *game* yang menggunakan otak manusia, seperti teka teki atau kecepatan dalam berpikir.

Di sebuah perusahaan, membangun wadah sosial sendiri yang mencoba untuk menghubungkan blok bangunan tujuh fungsional sekitar merek atau brand. Perusahaan yang dimaksud adalah komunitas swasta yang melibatkan orang-orang disekitar dengan tema yang lebih sempit, seperti di sekitar panggilan tertentu, merek atau hobi dari wadah media sosial, contohnya Google.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut "tumbuh" dengan pesat kini untuk mengakses *Twitter* bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone.* Sebenarnya, aplikasi untuk berbagi informasi

bukan hanya lewat *WhatsApp, Facebook, Instagram* ataupun *Twitter,* namun bisa juga lewat *Line, Licmath, Tik Tok, Youtube, SMS, Messenger,* dan telepon biasa, *Licpath* sama saja seperti aplikasi pada umumnya akan, tetapi bentuk tampilan yang berbeda. Di sini kita dapat mencari teman, mendapatkan teman bahkan membuat *group* untuk berkenalan dengan satu sama lain, sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini. Jika menguraikan atau membahas tentang jejaring media sosial tak cukup dengan ini karena sangat banyak sekali jenisnya.

Ada di situs aplikasi yang di mana isinya kita dapat bermain dengan orang baru, dapat bergabung secara otomatis entah untuk mengobrol atau bernyanyi, lalu untuk saling *chatting* pribadi, yaitu hago. Hago merupakan suatu bentuk *game online*. Maka dari itulah kita akan membahas penjabaran yang lebih luas lagi. Hal ini yang menyangkut paut mengenai sejarah perkembangan media sosial dari zaman awal penemuan hingga sekarang, sejarah media sosial, jenis situs apa saja yang terkait ini, pengertian menurut para ahli, macam-macam, dampak positif dan negatifnya, berbagai contoh. Nama tokoh penemu media sosial, manfaat menggunakan media sosial. Berbagai situs aplikasi guna untuk membantu para pelajar siswa maupun mahasiswa.

Para penelitian menggunakan etnografi atau lebih tepatnya *online* etnografi/netnigrafi menurut Kozinets (2015). Etnografi merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial, di mana titik fokus penelitiannya dapat meliputi studi intensif budaya dan bahasa, bidang atau domain tunggal, ataupun gabungan metode historis, observasi, dan wawancara.

Pada awalnya, etnografi berakar pada bidang antropologi dan sosiologi. Hal ini merupakan sebuah laporan deskripsi tentang kehidupan sosial lewat media sosial dan budaya dalam sistem sosial tertentu berdasarkan pengamatan secara rinci tentang apa saja yang sebenarnya dilakukan orang. Pada hal ini para meneliti menetapkan sebuah informasi, melakukan wawancara kepada seorang informasi, di dalam wawancara tersebut mengajukan sebuah pertanyaan deskriptif sekaligus melakukan analisis wawancara dan membuat analisis domain.

Hal ini sama halnya dengan etnografi yang terfokus pada budaya dan komunitas, *online* etnografi fokus pada komunitas daring. Data diambil melalui observasi partisipasi terhadap kelompok percakapan *WhatsApp* dari suatu kumpulan alumni salah satu universitas Yogyakarta. Kelompok tersebut dipilih karena memiliki beberapa alasan, yang pertama karena adanya keragaman, kedua sebab tidak diragukan lagi dan ketiga keragaman sosiologis dan budaya pada

akhirnya membelah mereka, dalam konteks pemilu 2019. Dalam dua kelompok yang beda dan secara tajam. Sebuah *group* data dikumpulkan berbagai bentuk yaitu teks, gambar, grafis yang dipertukarkan grup. Di dalamnya saling memberikan tanggapan dan komentar. Rentang ini dipilih karena percakapan pada waktu itu sangat tinggi.

Post-Truth di Ruang Percakapan: Kebenaran Vs Keyakinan

Mar (2017; Kapolkas, 2019:11) menyebut bahwa ciri-ciri era *post-truth* adalah ketidakjujuran baru secara kualitatif para politisi. Kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Terutama dalam hal mengarang fakta untuk mendukung apapun yang di narasikan. Dengan kata lain, fakta dihadirkan dan dibuat secara *ad hoc* sesuai dengan cerita tertentu atau karena sesuai dengan agenda yang lebih luas.

Fakta yang hadir dalam realitas media sosial, termasuk dalam ruang-ruang percakapan karenanya tidak pernah netral. Dalam hal ini pihak ketiga yang pandai mengarang sejenis berita hoaks yang seolah-olah sama dengan isinya dengan lebih mudah tersebar karena pengarangan berita yang sering dan bahkan banyak kemiripan itulah masyarakat begitu mudahnya percaya akan hal ini. Fakta yang di hadirkan itu mencerminkan suatu hasrat politik tertentu, terutama dalam usahanya memengaruhi persepsi orang-orang mengenai politik dalam konteks penelitian ini pemilihan umum.

Ketika di sebuah pemilu tidak lagi dimenangkan, usaha selanjutnya ialah dengan menggunakan cara delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Mengenai hal ini, tidak peduli apakah data tersebut masuk akal atau tidaknya valid atau tidaknya. Terpentingkan hanyalah tingkat dukungan fakta itu untuk membenarkan pandangan-pandangan. Atas kebenaran yang menjadi sederhana karena hanya soal orang-orang yang meyakininya dan begitu pula sebaliknya (Kapolkas, 2019: 11).

Pengamatan terlibat menemukan bagaimana fenomena *post-truth* berlangsung dalam ruang percakapan grup selama pemilihan umum 2019. Orang-orang yang berada dalam garis dukungan pasangan calon presiden tertentu sangat aktif dalam pengunggahan data-data dan fakta yang tampak akurat demi membangun suatu narasi yang diinginkan. Walaupun yang sebenarnya ialah kelompok anggota itu tidak banyak,

hanya keaktifan dalam penyampaian pesan politik narasi ini dibedakan dalam tiga isu. *Pertama,* sepasang presiden telah gagal saat pemilu, namun para anggota yang mendukung terus menerus menggugah data artikel hingga menyebabkan kegaduhan perdebatan hingga akhirnya menunggu keadaan kembali tenang. *Kedua,* sepasang presiden yang didukung hanyalah–dalam hal ini–narasi yang di buat seolah-olah cara penyampaiannya faktual. Kemudian diikuti dengan data-data faktual seperti kegiatan kampanye. Di sinilah terbangun narasi mengenai sebuah kemenangan yang mendapat dukungan.

Ketiga, kegiatan pemilu dilakukan secara tidak jujur. Dalam lembaga *quick count* dan media *mainstream*. *Quick count* atau hitung cepat adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara yang dijadikan sampel. Sedangkan *mainstream* arus utama, seperti kebiasaan dan perilaku umum. Hal ini sama seperti narasi pertama, yang kedua didukung oleh data-data faktual meskipun akurasi banyak ditanyakan oleh anggota lain. Mereka jarang sekali aktif guna membangun narasi tentang kemenangan pasangan yang didukungnya.

Definisi post-truth

Pada zaman politik di Indonesia, sekitar 2018 sampai 2019 pasca-pemilihan presiden yang dipenuhi oleh wacana-wacana pada zaman itu, kecurangan pemilu melalui hitungan cepat. Di era saat ini, banyak wacana yang tidak dilaksanakan dengan baik cuman sekedar mulut ke mulut hanya kepentingan politik bukan pada ide, gagasan dan kebijakan arah bangsa Indonesia. Budaya politik *post-truth* dapat ditandai dengan merendahkan klaim dari pendirian dan arus media sosial pada saat ini semua hanya dianggap opini yang hanya tersembunyi.

Demokrasi saat ini sedang berlangsung dirongrong oleh devaluasi kebenaran. Kondisi tersebut akan memunculkan *post-truth* radikal, seperti kebohongan, obskurantisme, dan ekstremisme. Situasi ini dimanfaatkan partai politik untuk mencabut ase lembaga-lembaga hitungan cepat agar bisa memenangkan partainya. Akibatnya, masyarakat cenderung tergantung kepada ideologi bukan bukti. Omong-kosong dari pihak-pihak yang tidak memberikan bukti-bukti yang akurat seperti uang kas negara tidak diberitahukan kepada masyarakatnya berapa uang kas sekarang dan berapa biaya yang dikeluarkan. Dimensi kebohongan kekeliruan, dan kebohongan strategi yang salah ditempuh secara berulang ulang untuk menipu. Mayoritas

publik dianggap lemah sehingga dimanfaatkan sebagai destinasi atau bahkan penghancur kebenaran.

Salah satu yang tidak berubah pada saat omong-kosong *post-truth* yaitu tidak adanya relasi, fakta-fakta yang aktual. Mayoritas publik dianggap lemah karena rentan terhadap omong kosong. kondisi demikian menjadi penghancur kebenaran menjelaskan bahwa *post-truth* bermain suasana yang meluas. *Post-truth* membutuhkan kepemimpinan dan ambisi untuk diproduksi dan dikelola dengan komunikasi yang baik sehingga dapat keberhasilan kelompok jadi masyarakat hanya melihat kebenarannya namun melihat kebenarannya, hanya melihat opini dan memperindah kebenaran dan tidak melihat fakta-faktanya (Muhammad Iqbal, Jatmiko, Prozonov, 2018; McComiskey, 2017:7-8; Fredal, 2011:245).

Pada saat ini, kebohongan sangat mengedepankan bagi masyarakat dari pada kebenaran apalagi saat ini banyak yang memakai media sosial masalah kebohongan atau kebenaran sangat mudah menyebar di seluruh dunia. Masyarakat saat ini tidak mencari kebenaran namun opini saja mencari pembenaran hanya lewat perasaan saja bukan logikanya. Hoaks digunakan untuk kepentingan politik bahkan bisnis.

Media sosial sebagai media baru pada era saat ini telah menjadi pemahaman baru bagi masyarakat bukan hanya masalah bekerja, bukan hanya virtual dunia nyata pun banyak juga yang membutuhkan media sosial. Media sosial memunculkan pemahaman baru bahwa kekuasaan menjadi hal utama pada seluruh aspek kehidupan. Cara beretika di media sosial harus menyampaikan ucapan yang baik dan sopan menyampaikan sesuatu yang benar dan sesuai dengan fakta bukan hanya lewat omongan orang tidak mencari dulu kebenaran yang ada. *Facebook* sebagai kontes sangat penting pada saat ini, termasuk *Twitter*, *Facebook* sebagai kontes popularitas sekolah menengah, sedangkan *Twitter* sebagai halaman sekolah yang dikelola oleh para pengangguran.

Media tradisional dan demokrasi ruang publik belum memberikan ruang publik yang cukup platform *online* untuk memainkan ceruk politik, ruang virtual menjadi ruang yang tepat untuk promosi dan penyebaran politik. media sosial dapat memfasilitasi pertemuan dengan konten politik yang penggunanya tidak terlibat secara politik media baru dapat mengubah dimensi ruang dan waktu arus komunikasi, interaksi manusia dan proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan langsung dalam aktivitas *online* dapat melepaskan emosi dan keterlibatan pada dirinya memfasilitasi mobilitas publik

yang terhubung secara digital, didorong dari masalah-masalah yang terjadi di media sosial yang belum tentu kebenarannya, didorong pendapat yang sepemikiran. Dengan demikian, budaya masyarakat tergeser karena adanya fenomena *online*.

Kebenaran *post-truth* yang semakin menjadi-jadi saat ini teknologi dapat menjuruskan masyarakat kepada hal-hal yang belum tentu kebenarannya seperti pemalsuan dan informasi masyarakat. Sebagaimana kita lihat di dalam *Facebook, Twitter* yang hanya meng-*upload* hal-hal yang tidak benar, hanya bisa meng-*upload* foto-foto atau tulisan yang belum tentu benar malah memunculkan masalah-masalah baru. Jadi, masyarakat harus melihat dulu masalah bukan hanya melihat opini yang ada di media sosial dalam platform media sosial yang hanya melihat konteks untuk dikritik dan dinilai.

Komunitas virtual *group* media sosial lambat laun dibentuk. Hal ini hanya untuk aktivitas politik maupun gerakan yang ada di dalam masyarakat komunitas itu disatukan oleh minat dan bakat konsep tentang dunia. Komunitas virtual lebih terstruktur secara algoritma sebab media sosial akan menyeleksi sendiri konten yang ditampilkan kepada pengguna memberikan konten sesuai pola perilaku.

Seleksi algoritma akan memastikan individu yang terdampak struktur informasi sesuai dengan pandangannya tentang personalisasi dari dunia virtual yang memungkinkan untuk hidup didunia khusus sehingga terus-menerus. Salah satu konsekuensi dari paparan media sosial tersebut lebih pada pembentukan yang akurat kelompok akan membentuk radikal yang mengakar pada suatu pandangan seseorang. Komunitas hanya melihat kepada hal-hal yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Hanya melihat dari media sosial dan tidak melihat dari faktanya.

Demikian komunitas anggota akan melakukan validasi cara tersebut akan memungkinkan untuk menguatkan perspektif dirinya sehingga mengarah kepada radikalisme. Tidak mengherankan media sosial sebagai dapat dianggap sebagai alat penting untuk membentuk perilaku sikap publik oleh elite kepentingan politik (Iqbal, Mohammad, dan Jatmiko Shapiro, 2019: 39).

Penyebab Percaya Berita Bohong (Hoaks)

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak

dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa pengguna media sosial sekarang sudah tak terhitung jumlahnya, di setiap kalangan seperti remaja, orang tua, dan bahkan anak-anak SD/TK sekalipun sudah dapat mengakses berbagai keinginan lewat sosial media.

Penggunaan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada 1971, yang berkembang melahirkan situs *GeoCities* tahun 1995, yang melayani *Web Hosting* yaitu layanan penyewaan penyimpanan data *website* agar halaman *website* bisa diakses dari mana saja. Kemudian lahir namanya situs jejaring sosial pada 1997, pada 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger, yang menawarkan penggunanya bisa membuat halaman situs sendiri yang dapat memuat hal tentang apapun termasuk hal pribadi, tanpa mengeluarkan uang banyak dan tenaga kerja. Pengguna sosial media bebas membuat pesan, mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar, dan video, grafis dan sebagainya. Semua dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, praktis bukan? Inilah yang menyebabkan media sosial berkembang begitu pesat.

Dalam hal ini dapat dikatakan teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama bagi seseorang dalam membuat media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memosting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta bersama teman-temannya. Semakin aktif seorang remaja di media sosial maka mereka semakin dianggap keren dan gaul. Namun, kalangan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno ketinggalan zaman, dan kurang bergaul. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapan pun dan di mana pun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang.

Ada dua aspek media sosial yang mempengaruhi manusia, yaitu antara yang positif dan yang negatif. Pertanyaannya, mana yang lebih

dominan mempengaruhi para pengguna media sosial? Apakah ke arah yang lebih dominan negatif atau ke arah yang lebih positif? belum ada penelitian dalam hal ini. Namun, dalam konteks ini (medsos), akan dikemukakan hal-hal yang negatif dan positif dari media sosial itu sendiri. Penyebab dari segi positif, yaitu:

1. Dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan;
2. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial;
3. Dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat, seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja ataupun mengenai beasiswa, dll.;
4. Menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama, ataupun motivator;
5. Mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat atau sosial *gathering*.

Penyebab dari segi negatif, antara lain:

1. Penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi *link* menuju laman. Mempermudah tertentu yang disisipi virus;
2. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun, karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam;
3. Kewajiban terhadap agama dilalaikan, demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan;
4. Pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif bukan kepada yang positif;
5. Terjadi stres dan cenderung tertekan, cenderung banyak curhat (curahan hati), emosional dan banyak mengumbar kata-kata kotor, tidak senonoh;
6. Waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia, mestinya aktivitas yang bermanfaat menjadi terabaikan;
7. Menjadikan seorang individualistis dan acuh kepada yang lain;
8. Terjadinya *cyber-bullying* dan *cybercrimes*;
9. Maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial;
10. Mengganggu hubungan antar-pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat media sosial;
11. Menimbulkan kecanduan/sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat salat lima waktu, jadi terabaikan;

12. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis;
13. Banyak menciptakan rekayasa hoaks atau berita bohong;
14. Pencurian dan penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain.

Dampak Terlalu Percaya terhadap Berita Hoaks

Berita palsu atau lebih populernya adalah berita hoaks sering tersebar dengan berbagai bentuk seperti tulisan, foto, dan video. Di era saat ini, hampir semua warga Indonesia menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari muda sampai tua. Hal ini pun menjadi salah satu alasan kenapa berita hoaks dengan mudah dan cepat tersebar di kalangan masyarakat.

Kita pastinya ingin menghindari dari berita hoaks tersebut apalagi tentang isu penting yang saat itu hangat diperbincangkan hampir semua masyarakat. Tentunya kita mencari berita yang *real* dan *actual* serta berkredibilitas agar bisa *up to date* di berita terkini. Salah satu dampak dari berita hoaks adalah terganggunya mental seseorang dalam sebuah studi, para psikolog sepakat bahwa berita hoaks bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, seperti *post-traumatic stress syndrome* (PTSD), menimbulkan kecemasan, sampai kekerasan. Tidak hanya itu, psikolog percaya, orang yang terpapar berita hoaks juga bisa membutuhkan terapi, karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita palsu.

Pada dasarnya, banyak faktor yang memengaruhi seseorang percaya terhadap berita hoaks yang tersebar, Menurut psikiater Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, dr. Gina Anindyajati, Sp.KJ, faktor pertama adalah kecenderungan untuk menyangkal apa yang sedang terjadi. Karena itu, individu yang bersangkutan akan mempercayai apa pun yang kontra/berlawanan dengan fakta yang ada. "Ketika terjadi hal yang membuat seseorang kehilangan (sesuatu yang berharga, termasuk kesempatan dan kebebasan) maka orang akan cenderung menyangkal. Apalagi kalau hal tersebut membuat seseorang harus berubah dan keluar dari zona nyamannya (*Antara*, Selasa (29/6).

Faktor kedua berkaitan dengan kecenderungan psikologis untuk percaya terhadap teori konspirasi. Faktor ketiga, keterikatan secara ideologis maupun politik terhadap penyebar hoaks (se-aliran)."Orang cenderung semangat menyebarkan suatu berita palsu karena mereka

yakin bahwa berita tersebut adalah benar, sekitar 30 persen yakin yang mereka teruskan itu benar. Selain itu, juga karena orang menganggap berita palsu tersebut memiliki bagian yang sama dengan dirinya (identitas politik atau kepercayaan lainnya) sehingga 'merasa perlu' untuk menyebarkan," jelas Dr. Gina.

Dr. Gina menambahkan, orang yang menyebar berita palsu juga memiliki dorongan emosional. Harapannya, orang lain merasakan efek emosional seperti yang ia alami saat membaca tajuk judul berita palsu. Berita hoaks juga dapat membunuh karakter seseorang hal ini dikaitkan oleh Komarudin, "Hoaks itu pembunuhan karakter yang berbeda dengan kritik. Kalau kritik silakan, tapi kalau hoaks saya anti, karena merupakan manipulasi, kecurangan, yang dapat menjatuhkan orang lain," ujar Komarudin dalam acara Deklarasi Masyarakat Anti Hoaks di Jakarta. Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, hoaks merupakan tindakan kriminal di wilayah *cyber*. Hoaks disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas, terutama hoaks yang muncul mengatasnamakan agama.

Berita hoaks pun juga masih memiliki dampak lainnya seperti berikut:

Menimbulkan Perpecahan

Berita bohong memicu perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan penggiringan opini terhadap seseorang, sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang tersebut. Nah, jika sudah membenci satu sama lain maka perpecahan tidak dapat dihindar

Menurunkan Reputasi Seseorang

Sering kata berita hoaks akan merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lainnya. Karena berita palsu bersifat mengadu domba, pihak korban akan merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik, dan menurunnya reputasi.

Tidak Lagi Percaya Fakta

Berkat terlalu banyak berita bohong yang beredar, masyarakat jadi sulit membedakan mana informasi palsu, dan fakta. Dengan menyebarluasnya hoaks, masyarakat justru tidak lagi percaya dengan fakta yang sebenarnya karena terlanjur keliru.

Menimbulkan Opini Negatif

Berita *hoaks* sering kali menyasar emosi masyarakat. Fitnah yang disebar dapat menyulut kebencian dan kemarahan sehingga masyarakat

memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Upaya ini bisa disebut dengan *black campaign* untuk menjatuhkan pesaing.

Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa berita hoaks memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi mental dan karakter serta masih ada beberapa dampak lainnya yang tentunya sangat merugikan banyak orang, Hoaks dapat menciptakan kecemasan dan *distrust* karena hoaks bertujuan untuk menakut-nakuti mayoritas masyarakat lewat penyebaran *fake news* TSM dengan menggunakan teknik "*clickbait*" atau sensasional menarik *netizen*. Hoaks menciptakan suasana "menakutkan", "mencekam", tidak percaya terhadap keadaan yang sedang terjadi sehingga negara butuh pemimpin yang keras, tegas, dan berani. Bukan pemimpin lemah lembut, rendah hati, dan merakyat.

Agar masyarakat tidak menjadi korban hoaks, mari uji hoaks atau fakta dengan ikuti media sosial resmi Kementerian Kominfo, contohnya program Lambe Hoaks di *Instagram* dan *Twitter* @ kemenkominfo. Ikuti juga media verifikasi hoaks, *fanpage* dan *Group* Indonesia Hoaks *Buster*. Gunakan aplikasi *Turn Back* Hoaks. Gunakan nalar dalam memahami pesan, selalu cek kebenaran jangan buru-buru percaya dengan pesan yang beredar di media sosial.

Macam-macam peran mahasiswa dalam era *post-truth* itu ada tiga media audio visual, internet, dan seni jalanan. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa latin "medius" yang secara harfiah berarti "tengah", perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Association for Education and Communication Technology (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *Education Association* (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional (Asnawir, 2002:11). Menurut Oemar Hamalik media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan

pengajaran di sekolah (Hamalik, 1989:12). Menurut Suprapto dkk., media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Shalahuddin, 1986:4).

Pengertian Media Pembelajaran Audio Visual

Menurut Sadiman dalam bukunya *Media Pendidikan* (1996:6), media adalah berbagai bentuk perangkat yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Arsyad (2014:4) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, *tape recorder*, kaset, video *camera*,*video recorder*, film, *slide* (gambar bingkai) foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Pendapat lain disampaikan oleh Sumiati, (2008:162) bahwa media pembelajaran mempunyai tiga bentuk atau format, yaitu suara (*audio*), bentuk (*visual*), dan gerak (*motion*).

Rusman, dkk. (2011:218) mengemukakan bahwa "video merupakan Serangkaian gambar gerak disertai suara yang membentuk satu kesatuan rangkaian menjadi sebuah alur, dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, yang disimpan dalam media pita dan disket". Video banyak digunakan dalam pembelajaran interaktif, dan dijelaskan oleh Arsyad, (2014:36) bahwa media pembelajaran interaktif merupakan sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada penonton (peserta didik) yang tidak hanya pasif mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga aktif memberikan respons, dan respons peserta didik tersebut akan menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian materi.

Suprijanto (2005:171) berpendapat bahwa jenis media audio visual mempunyai kemampuan yang lebih baik ketika digunakan dalam pembelajaran karena sekaligus mencakup media auditif (mendengar) dan visual (melihat). Media audio visual merupakan media perantara penyajian materi, yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu. Contoh media audio visual misalnya film, film bingkai (*slides*), dan audio visual dalam bentuk digital (Widaryanto dan Sulfemi, 2016: 1-10).

Dari uraian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid

dengan menggunakan metode demonstrasi dan berbagai media. Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan audio visual juga dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih berarti bagi peserta didik. Media yang digunakan dalam penelitian ini tentang peristiwa penting dalam keluarga.

Internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan juga teks. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer atau dibuat pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan internet. Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja. Jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, maupun instansi terkait seni jalanan atau lebih karib disebut *street art*.

Hari ini memang kian majemuk menampakkan parasnya. Ia sepertinya mewakili semangat zaman yang serba mungkin. Nilai estetika di dalam seni sendiri, semakin hari semakin terbuka menyambut berbagai gejala perubahan sosial serta berkembangnya posisi subkultur yang makin menguat di ranah urban. Sementara itu, konsep tentang subversi, sebagai satu-satunya mantra suci yang dipakai oleh penggiat atau seniman *street art* tempo dulu–biasanya memakai bentuk seni *grafiti* yang mengusung agenda-agenda politis di ruang publik, menyuarakan ekspresi liar dan pembelaan kepada kelompok yang "dimarginalkan" tidak lagi menjadi isu dominan lagi. Meskipun kelompok ideologis serta individu-individu seperti mereka masih saja diwariskan dari generasi ke generasi, terus saja hadir dan berekspresi di kota-kota besar dunia. Sering terjadi dalam perspektif tindakan vandalisme yang disematkan pada aktivitas perupa jalanan lebih pada kasus tuduhan pengotoran tembok kota dan ruang publik spesifik yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan lokal tentang tata kota.

Di lain pihak, di berbagai belahan dunia, sudah jamak diketahui pula lembaga-lembaga yang berafiliasi atau di bawah payung pemerintah, misalnya seperti NEA (*National Endowment for The Arts*) di Amerika Serikat berkolaborasi dengan LSM setempat sering kali mengundang dan mengakomodir kegiatan para seniman jalanan, merangkulnya untuk bersama-sama mengampanyekan agenda-agenda milik pemerintah; seperti demokratisasi, pluralisme dan hak asasi manusia dengan label *initiative art project* dll. Pada sudut pandang industri seni, paras *street art* kian semarak, atau boleh dibilang lebih sumringah menyambangi alaf anyar. Jika beberapa dekade lalu Basquiat sudah "mementaskan diri" dari jalanan di Bronx untuk kemudian karyanya hadir di rumah lelang Sotheby's dan di *display* di MOMA. Demikian pula Shepard Fairey dengan nama jalanan Obey yang sepuluh tahun lalu "bergerilya" di tembok-tembok kota di Washington DC. Akhirnya hari ini "duduk manis" dalam satu diskusi panel dengan *Bonham Art Auction*. Para seniman jalanan sohor lain di dunia barat, seperti Mr. Brainwash, Invader. Contoh dalam *confirmation bias* ini terlihat dalam kasus penyebaran *hoaks* pada November 2018, dengan mencatut institusi Polri mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hoaks ini disebarkan melalui *Facebook* dan sempat di-*share* 400 kali (*tempo.co*, 2018). Dalam pengakuan tersangka, ia meyakini hal tersebut karena melihat bahwa berita tersebut tersebar luas di media sosial (*jateng.tribunnews.com*, 2018).

Hoaks yang disebarkan tersebut dilengkapi dengan gambar sejumlah siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah pada kegiatan Pekan Santri 2017. Ada pun materi hoaks yang disebarkan: dapat dari grup suruh *nyebarin* biar merinding penjilat-penjilat yang main curang. Berikutnya akan diuraikan bagaimana kebohongan itu diproduksi dan disebarluaskan. Salah satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis adalah ***firehose of falsehood. Firehose of falsehood*** saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk memengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu.

Menurut Paul dan Matthews (2016), peneliti dari Rand Corporation, *Firehose of Falsehood* memiliki ciri-ciri yaitu *lacks commitment to consistency, lacks commitment to objective reality, rapid, continuous and repetitive, high volume and multichannel propaganda*.

Lacks commitment to objective reality merupakan penyebaran informasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta objektif. *Firehose of falsehood* adalah menyebarkan informasi yang disukai, sekalipun itu salah. Informasi yang salah itu dibangun dengan data dan bukti-bukti yang bisa jadi mengandung sedikit kebenaran atau sepenuhnya salah. *Lacks Commitment to Consistency* merupakan penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa dengan berbeda-beda atau bisa juga saling berbenturan kemudian informasi dapat berubah. Barangkali hal ini agak sulit diterima, bagaimana mungkin informasi yang tidak konsisten bisa dipercaya. Akan tetapi, dalam penelitian psikologi eksperimental justru menunjukkan hasil yang berbeda, kontradiksi justru membuka kesempatan untuk mempersuasi penerima informasi. Kemudian, perubahan informasi justru memberi kesan bahwa si pengirim informasi telah memperoleh data yang lebih baik dari berita sebelumnya (Paul & Matthews, 2016).

Pada saat ini, kebohongan sangat mengedepankan bagi masyarakat dari pada kebenaran apalagi saat ini banyak yang memakai media sosial masalah kebohongan atau kebenaran sangat mudah menyebar di seluruh dunia. Masyarakat saat ini tidak mencari kebenaran namun opini saja mencari pembenaran hanya lewat perasaan saja bukan logikanya. Hoaks digunakan untuk kepentingan politik bahkan bisnis.

Media sosial sebagai media baru pada era saat ini sebagai media baru telah menjadi pemahaman baru bagi masyarakat bukan hanya masalah bekerja bukan hanya virtual dunia nyata pun banyak juga yang membutuhkan media sosial. Media sosial memunculkan pemahaman baru bahwa kekuasaan menjadi hal utama pada seluruh aspek kehidupan.

Cara beretika di media sosial harus menyampaikan ucapan yang baik, sopan, menyampaikan sesuatu yang benar dan sesuai dengan fakta bukan hanya lewat omongan orang tidak mencari dulu kebenaran yang ada *Facebook* sebagai kontes sangat penting pada saat ini, termasuk *Twitter dan Facebook* sebagai kontes popularitas sekolah menengah, sedangkan *Twitter* sebagai halaman sekolah yang dikelola oleh para pengangguran.

Media tradisional dan demokrasi ruang publik belum memberikan ruang publik yang cukup platform *online* untuk memainkan ceruk politik. Ruang virtual menjadi ruang yang tepat untuk promosi dan penyebaran politik. media sosial dapat memfasilitasi pertemuan dengan konten politik yang penggunanya tidak terlibat secara politik media

baru dapat mengubah dimensi ruang dan waktu arus komunikasi, interaksi manusia dan proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan langsung dalam aktivitas *online* dapat melepaskan emosi dan keterlibatan pada dirinya memfasilitasi mobilitas publik yang terhubung secara digital didorong dari masalah-masalah yang terjadi di media sosial yang belum tentu kebenarannya didorong oleh pendapat yang sepemikiran. Dengan demikian, budaya masyarakat tergeser karena adanya fenomena *online*.

Kebenaran *post-truth* yang semakin menjadi-jadi saat ini teknologi dapat menjuruskan masyarakat pada hal-hal yang belum tentu kebenarannya, seperti pemalsuan informasi masyarakat seperti yang kita lihat di dalam *Facebook Twitter* yang hanya meng-*upload* hal-hal yang tidak benar, hanya bisa meng-*upload* foto-foto atau tulisan yang belum tentu benar malah memunculkan masalah-masalah baru.

Jadi, masyarakat harus melihat dulu masalah bukan hanya melihat opini yang ada di media sosial dalam platform media sosial yang hanya melihat konteks untuk dikritik dan dinilai. Komunitas virtual *group* media sosial lambat laun dibentuk. Hal ini hanya untuk *aktivitas* politik maupun gerakan yang ada di dalam masyarakat komunitas itu disatukan oleh minat dan bakat konsep tentang dunia. Komunitas virtual lebih terstruktur secara algoritma sebab media sosial akan menyeleksi sendiri konten yang ditampilkan kepada pengguna memberikan konten sesuai pola perilaku.

Seleksi algoritma akan memastikan individu yang terdampak struktur informasi sesuai dengan pandangannya tentang personalisasi dari dunia virtual yang memungkinkan untuk hidup di dunia khusus sehingga terus-menerus. Salah satu konsekuensi dari paparan media sosial tersebut lebih pada pembentukan yang akurat kelompok akan membentuk radikal yang mengakar pada suatu pandangan seseorang. Komunitas hanya melihat kepada hal-hal yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Hanya melihat dari media sosial dan tidak melihat dari faktanya.

Demikian komunitas anggota akan melakukan validasi cara tersebut akan memungkinkan untuk menguatkan perspektif dirinya sehingga mengarah kepada radikalisme. Tidak diherankan media sosial sebagai dapat dianggap sebagai alat penting untuk membentuk perilaku sikap publik oleh elite kepentingan politik.

Dari uraian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid

dengan menggunakan metode demonstrasi dan berbagai media. Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan audio visual juga dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih berarti bagi peserta didik. Media yang digunakan dalam penelitian ini tentang peristiwa penting dalam keluarga. Internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia.

Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan juga teks. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer atau dibuat pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan internet.

Street Art

Hari ini memang kian majemuk menampakkan parasnya. Ia, sepertinya mewakili semangat zaman yang serba mungkin. Nilai estetika di dalam seni sendiri, semakin hari semakin terbuka menyambut berbagai gejala perubahan sosial serta berkembangnya posisi subkultur yang makin menguat di ranah urban. Sementara itu, konsep tentang subversi, sebagai satu-satunya mantra suci yang dipakai oleh penggiat atau seniman *street art* tempo dulu–biasanya memakai bentuk seni *grafiti* yang mengusung agenda-agenda politis di ruang publik, menyuarakan ekspresi liar dan pembelaan kepada kelompok yang "dimarginalkan" tidak lagi menjadi isu dominan lagi.

Meskipun kelompok ideologis serta individu-individu seperti mereka, masih saja diwariskan dari generasi ke generasi, terus saja hadir dan berekspresi di kota-kota besar dunia. Sering terjadi, dalam perspektif tindakan vandalisme yang disematkan pada *aktivitas* perupa jalanan lebih pada kasus tuduhan pengotoran tembok kota dan ruang publik spesifik yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan lokal tentang tata kota. Di lain pihak, di berbagai belahan dunia, sudah jamak diketahui pula lembaga-lembaga yang berafiliasi atau di bawah payung pemerintah, misalnya seperti NEA (*National Endowment for The Arts*) di Amerika Serikat berkolaborasi dengan LSM setempat sering kali mengundang dan mengakomodir kegiatan para seniman

jalanan, merangkulnya untuk bersama-sama mengampanyekan agenda-agenda milik pemerintah; seperti demokratisasi, pluralisme dan hak asasi manusia dengan label *initiative art project* dll. Pada sudut pandang industri seni, paras *street art* kian semarak, atau boleh dibilang lebih sumringah menyambangi alat baru.

Apabila beberapa dekade lalu Basquiat sudah "mementaskan diri" dari jalanan di Bronx untuk kemudian karyanya hadir di rumah lelang Sotheby's dan di *display* di MOMA, demikian pula Shepard Fairey dengan nama jalanan Obey yang sepuluh tahun lalu "bergerilya" di tembok-tembok kota di Washington DC, akhirnya hari ini "duduk manis" dalam satu diskusi panel dengan *Bonham Art Auction*. Para seniman jalanan sohor lain di dunia barat, seperti Mr. Brainwash, Invader. Contoh dalam *confirmation* bias ini terlihat, dalam kasus penyebaran hoaks pada November 2018, dengan mencatut institusi Polri mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hoaks ini disebarkan melalui *Facebook* dan sempat di-*share* 400 kali (*nasional.tempo.co*, 2018). Dalam pengakuan tersangka, ia meyakini hal tersebut karena melihat bahwa berita tersebut tersebar luas di media sosial (*jateng.tribunnews.com, 2018*). Hoaks yang disebarkan tersebut dilengkapi dengan gambar sejumlah siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah pada kegiatan Pekan Santri 2017.

Berikutnya, akan diuraikan bagaimana kebohongan itu diproduksi dan disebarluaskan. Salah satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis adalah *firehose of falsehood*. *Firehose of falsehood* saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu.

Menurut Paul dan Matthews (2016), peneliti dari Rand Corporation, *Firehose of Falsehood* memiliki ciri-ciri yaitu *lacks commitment to consistency*, l*acks commitment to objective reality*, rapid, continuous and repetitive, *high volume and multichannel propaganda*. *Lacks commitment to objective reality* merupakan penyebaran informasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta- fakta objektif.

Dalam *firehose of falsehood*, menyebarkan informasi yang disukai, sekalipun itu salah. Informasi yang salah itu dibangun dengan data

dan bukti-bukti yang bisa jadi mengandung sedikit kebenaran atau sepenuhnya salah. *Lacks Commitment to Consistency* merupakan penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa dengan berbeda-beda atau bisa juga saling berbenturan kemudian informasi dapat berubah.

Barangkali hal ini agak sulit diterima, bagaimana mungkin informasi yang tidak konsisten bisa dipercaya. Akan tetapi, dalam penelitian psikologi eksperimental justru menunjukkan hasil yang berbeda, kontradiksi justru membuka kesempatan untuk mempersuasi penerima informasi. Kemudian, perubahan informasi justru memberi kesan bahwa si pengirim informasi telah memperoleh data yang lebih baik dari berita sebelumnya (Paul & Matthews, 2016)

Fenomena *post-truth* ini awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperebutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut *post-truth politics*. Istilah *post-truth* pertama kali diperkenalkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia.

Tesich melalui esainya pada harian The Nation (1992) menunjukkan kerisauannya yang mendalam terhadap fenomena *post-truth*, dengan maraknya upaya memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan bahkan mendegradasi fakta dan data informasi yang objektif. Secara sederhana, *post-truth* dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran. Dalam perkembangannya, istilah *post-truth* menjadi semakin populer akhir-akhir ini ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai *word of the year* tahun 2016. *Post-truth* menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Era *post-truth* dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara sederhana, *post-truth* dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran. Sudah selayaknya kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sebagian kecil saja contoh bagaimana fenomena *post-truth* memengaruhi kehidupan pada berbagai bangsa, dari kasus yang terjadi di Ukraina, Rusia, Inggris, Amerika Serikat.

Di Ukraina, tumbangnya presiden Ukraina diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di *Facebook,* yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev, di Rusia, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya, seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman. Bahkan, Senat Amerika pernah memanggil perwakilan Google, *Facebook,* dan *Twitter* dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Di Inggris, referendum Brexit secara efektif menggunakan medsos seperti *Facebook* untuk memasang iklan. Trump juga menggunakan medsos untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50.000-60.000 iklan yang berbeda di medsos, utamanya di *Facebook*.

Media sosial, *post-truth*, dan literasi digital oleh humas dipublikasikan pada 19 Oktober 2018, kategori: opini, dibaca: 119.786 kali oleh: Eddy Cahyono Sugiarto (*A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes truth:* Paul Joseph Goebbels). Perkembangan era digital dewasa ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Fenomena ini merupakan konsekuensi perubahan pola komunikasi, dari cara-cara dan media konvensional menuju digitalisasi komunikasi dengan menggunakan berbagai kanal media sosial kekinian.

Pemanfaatan media sosial menjadikan arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, pola-pola komunikasi linier, mulai digantikan dengan pola-pola komunikasi simetris, *real time* melintas batas ruang dan waktu, dengan mengedepankan kecepatan, sekaligus menandakan pola komunikasi dewasa ini sesungguhnya telah memasuki fase *interactive communication era*, sebagaimana kategorisasi Everett M Rogers. Fase lebih lanjut dari pengembangan era telekomunikasi dengan menjadikan penggunaan internet sebagai media baru (*new media*).

Perkembangan era digital dengan masifnya penggunaan internet sebagai media baru (*new media*), membawa konsekuensi pergeseran karakter khalayak menjadi audiens. Khalayak tidak lagi objek pasif, namun dapat berperan menjadi produsen informasi (*Prosumer*). Masyarakat sebagai khalayak tidak lagi pada posisi objek yang dideterminasi media massa arus utama, tetapi lebih jauh dapat berperan memproduksi berita dan membentuk opini publik via platform media sosial. Melalui media sosial memungkinkan pengguna

berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring (*networking society*) yang ditandai dengan munculnya jurnalisme warga (*citizen journalism*). Fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus berperan membentuk opini publik. Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru, tidak lagi hanya sekadar berperan sebagai kanal menyampaikan pesan dan menyerap informasi, tetapi lebih jauh berperan dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik, memengaruhi pengambilan keputusan institusi, kelompok masyarakat dan turut andil dalam pengembangan kesadaran kolektif opini publik.

Lebih ekstrim, Aylin Manduric dalam tulisannya "Social Media *as a Tool for Information Warfare"* menyatakan bahwa media sosial sebagai senjata pemusnah massal dan pemicu timbulnya konflik, berperan sebagai senjata kata-kata yang mempengaruhi hati dan pikiran *audiens* yang ditargetkan. Melalui media sosial, berbagai informasi membanjiri ruang publik media sosial, arus informasi yang deras tanpa batas tersebut, ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda. Media sosial satu sisi dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan secara benar untuk mengedukasi masyarakat dan mengoptimalkan manfaat praktis media sosial, bagi peningkatan pembangunan bangsa.

Pemanfaatan media sosial berperan dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi dan membangun sinergi antar segenap komponen bangsa, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, di tengah persaingan antara bangsa yang semakin tajam. Dampak positif media sosial, antara lain terlihat dari bergeraknya aktivitas ekonomi rakyat, di sektor pariwisata tidak lagi didominasi oleh korporasi besar, namun berkembang desa wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal, *homestay* dll. Dampak positif pemanfaatan media sosial juga ditandai dengan berkembangnya *marketplace* yang mempertemukan penjual dan pembeli, *e-commerce*, UMKM yang memanfaatkan toko *online*, gojek, rental mobil rumahan dan berkembangnya *economic sharing resources* sehingga semakin masifnya *start-up bisnis*, yang membuka peluang usaha baru, menciptakan pasar baru dan menggunakan sarana promosi baru yang efektif dan *efisien* berkat pemanfaatan positif media sosial.

Walaupun di sisi lain pemanfaatan media sosial juga dapat kontra produktif, apabila ruang publik disesaki oleh informasi yang berseliweran melalui media sosial dengan hoaks, informasi palsu (*fake news*) dan informasi keliru (*false news*) yang memiliki daya rusak yang

dahsyat karena penyebarannya yang sangat cepat tanpa batas dan mampu membangkitkan emosi yang sangat kuat. Dengan merebaknya fenomena *post-truth,* apabila tidak diantisipasi dengan mitigasi yang terencana dan terukur, juga akan berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat, ditandai dengan semakin viralnya pemberitaan yang tendensius mengusung sentimen agama, ras dan kelompok kepentingan yang dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam memacu keberlanjutan pembangunan nasional, merawat NKRI guna mengingatkan kesejahteraan rakyat.

Fenomena Frasa post-truth

Ini awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperebutkan kursi parlemen dan atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut *post-truth politics*. Istilah *post-truth* pertama kali diperkenalkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia.

Tesich melalui esainya pada harian *The Nation* (1992) menunjukkan kerisauannya yang mendalam terhadap fenomena *post-truth*, dengan maraknya upaya memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan bahkan mendegradasi fakta dan data informasi yang objektif. Secara sederhana, *post-truth* dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran. Dalam perkembangannya, istilah *post-truth* menjadi semakin populer akhir-akhir ini ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai *word of the year* tahun 2016. *Post-truth* menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Era *post-truth* dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini.

Fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi, dan nonfiksi. Secara sederhana, *post-truth* dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran. Sudah selayaknya kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sebagian kecil saja, contoh bagaimana fenomena *post-truth* mempengaruhi kehidupan pada berbagai bangsa, dari kasus yang terjadi di Ukraina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Di Ukraina, tumbangnya presiden Ukraina diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di *Facebook* yang

dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev, di Rusia. Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman. Bahkan, Senat Amerika pernah memanggil perwakilan Google, *Facebook* dan *Twitter* dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia. Di Inggris referendum Brexit secara efektif menggunakan medsos seperti *Facebook* untuk memasang iklan. Trump juga menggunakan medsos untuk kampanye memengaruhi pemilih dengan membuat 50.000-60.000 iklan yang berbeda di medsos, utamanya di *Facebook*.

Post-truth sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat sehingga bagi yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan.

Berita/informasi yang disampaikan, meskipun menjanjikan sesuatu yang indah dan menyenangkan, belum dapat dikatakan suatu kebenaran, sebaliknya, bukan pula sesuatu yang nyata akan terjadi, apabila diungkapkan berupa ancaman atau sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan serta menciptakan kondisi yang tidak produktif.

Salah satu faktor yang menjadi katalisator berkembangnya *post-truth* adalah kehadiran teknologi informasi yang berimplikasi pemanfaatan media sosial yang tidak tepat, teknologi digital-telah mampu menciptakan realitas sendiri, sesuai dengan agenda *setting* kelompok kepentingan atau menurut ilmu semiotika. Keadaan ini berdampak pada terpisahnya antara penanda (*signifier*) dengan petanda (*signified*).

Peran media sosial melalui algoritma secara tidak langsung juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat *post-truth*. Algoritma media sosial berperan dalam menciptakan kondisi yang disebut *echo-chamber*. *Echo-chamber* (ruang gema) adalah kondisi di mana seseorang menerima informasi, ide, dan gagasan yang homogen secara terus-menerus, sedangkan pandangan lain tidak masuk dalam ruang tersebut.

Algoritma seolah-olah menjadi filter *buble*. Algoritma filter *bubble* mengondisikan pengguna mendapat informasi sesuai dengan riwayat penggunaannya, secara perlahan tapi pasti informasi yang dipasok disesuaikan dengan preferensi yang dikehendaki, sedangkan yang

tidak sesuai akan tersortir secara otomatis. Eksternalitas dari algoritma tersebut tak dibayangkan adalah masyarakat akan hanya mendapat informasi yang bersifat banal dan parsial. Dampaknya, penguatan identitas dan polarisasi masyarakat yang semakin tajam dan berpotensi memantik konflik yang berkepanjangan.

Strategi Digital di Era Post-Truth

Kehadiran teknologi digital dan media sosial menjadi tantangan yang sangat berat bagi perusahaan khususnya divisi Humas. Alasan tugas humas untuk menjaga reputasi, dan citra perusahaan akan semakin kompleks karena sifat media sosial yang dua arah, dan juga semakin banyak kanal-kanal baru. Begitu pula strategi yang harus digunakan untuk menghadapi "manis" dan "pedas"-nya pernyataan dari para pengguna internet. Di sisi lain, sisi gelap media sosial adalah adanya hoaks dan berita palsu, yang menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Kabar bohong dan palsu dengan mudah beredar di media sosial. Gampang untuk membangun citra, demikian pula sebaliknya untuk meruntuhkan citra dalam waktu yang tidak lama.

Dalam era baru ini, praktisi humas, baik dari swasta maupun pemerintahan harus memiliki pemahaman yang mendalam dalam ekosistem baru ini sekaligus mempersenjatai diri dengan strategi-strategi yang komprehensif, antara lain:

1. Lokakarya Tujuan

a. Memahami Cakupan, tantangan dan peluang humas di era digital;
b. Mampu mengelola humas dan menjembatani pesan dengan benar dalam konvergensi media;
c. Mampu mengelola krisis di era digital;
d. Mampu mengelola reputasi lembaga/brand di era *post-truth*

2. Ekosistem Humas Digital

a. Data;
b. Hubungan ke berbagai media;
c. Media sosial;
d. Kreativitas dan konten digital;
e. *Influencer;*
f. Iklan;
g. Pemasaran Digital.

3. Perubahan Hubungan dengan Media

a. Media Gelembung;
b. "Jurnal" baru;
c. Menuju strategi media baru;
d. Kemitraan media.

4. Teknologi Baru, Kreativitas dan Konten Digital

a. Konten yang fleksibel;
b. Pentingnya wawasan dan strategi;
c. Konten Buatan Pengguna;
d. Pentingnya cerita.

5. Pengukuran Humas di Digital

a. Menentukan tujuan dan pengukuran;
b. Mengukur keluaran komunikasi digital.

6. Manajemen Risiko dan Mengelola Isu

a. Pemetaan kanal yang mungkin menyebabkan krisis;
b. *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mencegah krisis;
c. Menangani krisis di digital.

7. Manifesto Merek di Era *post-truth*

a. Otentik;
b. Transparan;
c. Menghargai privasi;
d. Lihatlah empati;
e. Dapat dipercaya.

Hoaks politik dalam ruang lingkup media percakapan yang terjadi di antara para profesional. Melihat fenomena hoaks dan *post-truth* di media sosial, yang tidak semata dilihat dari perspektif literasi digital, tetapi juga etika. Pemberdayaan para pengguna media sosial melalui literasi digital dan etika adalah keharusan untuk menciptakan suatu tatanan komunikasi di media sosial yang lebih positif. Studi etika komunikasi di media sosial harus berjalan seiring dengan studi-studi dan Gerakan literasi, karena baik literasi digital atau etika mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan literasi untuk meningkatkan kapasitas pengguna dalam menggunakan media sosial secara kritis,

sedangkan etika menuntun pengguna untuk selalu reflektif dalam berkomunikasi. Etika memandu para pelaku komunikasi untuk selalu mempertimbangkan komunikasi, apakah sesuai dengan norma dan memberi manfaat atau tidak.

Kebenaran *post-truth* yang semakin menjadi-jadi saat ini teknologi dapat menjuruskan masyarakat kepada hal-hal yang belum tentu kebenarannya, seperti pemalsuan, dan informasi masyarakat.seperti yang kita lihat di dalam *Facebook,Twitter* yang hanya meng-*upload* hal-hal yang tidak benar, hanya bisa meng-*upload* foto-foto atau tulisan yang belum tentu benar malah memunculkan masalah-masalah baru. Dalam konteks ini, era *post-truth* memberikan pesan bagi masyarakat universal untuk bersikap bijaksana dalam memainkan perannya di dunia teknologi. Karena dalam menggunakan teknologi yang sangat gampang dan mudah, sebenarnya mau menyeret dan menjebak kita dalam ruang gerak yang terbuka dan bebas tapi kebingungan dan bahkan hampir tidak bisa membedakan mana lawan dan kawan. *Post-truth* hadir dalam beragam kompleksitas arus globalisasi yang menakjubkan dan mematikan. Pada akhirnya, diperlukan kerja sama, konektivitas membantu aksesibilitas dan akselerasi. Simpul perekat tampak dalam dasar negara kita yakni Pancasila.

BAB VIII
EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI DASAR KEBENARAN ERA POST-TRUTH

Agama dan kepercayaan merupakan, boleh dikatakan, unsur paling inti dalam kehidupan masyarakat nusantara dan Indonesia sejak dahulu hingga kini selain masalah ekonomi dan tradisi sehari-hari. Seluruh kehidupan dan kekuasaan juga lalu lintas sosial ekonomi dipenuhi dengan aura agama dan kepercayaan. Karena itu, menulis dan merencanakan suatu perubahan kehidupan masyarakat nusantara dan Indonesia mustahil tidak menyertakan analisis peran dan dimensi agama.

Kemajuan ilmu agaknya tidak selalu diiringi dengan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Masyarakat di negara maju cenderung bersifat materialistis, individualisme, dan lebih longgar di dalam menerapkan nilai-nilai moral keagamaan. Untuk itu, integrasi keilmuan agaknya perlu dipikirkan dan diusahakan untuk menjadi kehidupan lebih baik (Arif, 2017 : 7).

Walaupun dalam rentang sejarah yang panjang agama mengalami dinamika dan transformasi dalam kehidupan masyarakat nusantara dan Indonesia, terkadang sangat radikal meskipun perlu proses yang panjang. Jadi, meskipun agama terus berada dalam dinamika masyarakat hampir di seluruh aspeknya tetapi agama itu sendiri mengalami perubahan dan transformasi sesuai tuntutan dan jawaban perubahan masyarakat. Maka penting untuk diajukan pertanyaan, bagaimana posisi agama dalam perubahan masyarakat di era disrupsi dan *post-truth* kini dan masa depan? Jawaban atas pertanyaan ini barangkali bisa sebagai titik pijak bagi suatu perencanaan perubahan di masa depan (Ahmad Suaedy, July 1, 2021:2).

Urgensi Pendidikan Islam bagi Kehidupan Era Post-Truth

Agama dalam Sejarah Nusantara

Julukan bagi Indonesia dengan kata "bukan negara sekuler dan bukan negara agama" sesungguhnya kurang tepat. Lebih tepat adalah "negara

sekuler berinti agama." Agama di sini bukan dilihat sebagai ideologi dan sistem politik, melainkan sebagai substansi yang menginspirasi dan mengisi bangunan sistem sekuler. Ada beberapa alasan untuk ini: pertama, bentuk mutakhir dari sistem negara-bangsa Indonesia adalah sangat unik jika dibandingkan dengan negara lain, tetangga, dan sesama negara mayoritas muslim sekalipun, apalagi dengan negara yang mayoritas bukan muslim, dan negara sekuler Barat. Kedua, bentuk mutakhir itu ("negara sekuler berinti agama") melalui proses yang sangat panjang dan perdebatan yang alot dan luas melampaui pemaksaan sekularisme oleh kolonial. Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bisa dikatakan model khas Indonesia dengan apa yang kini populer disebut bentuk negara dan masyarakat ***post* sekuler**. Jadi, hasil itu adalah temuan mutakhir dari pergulatan masyarakat nusantara yang sangat panjang dan berliku hingga "Menjadi Indonesia."

Ketiga, berbeda dengan di Barat bahwa proses sekularisme oleh kolonial telah "mengusir" agama dari ruang publik dan negara maka "negara sekuler Indonesia" justru mengembalikan peran agama dan kepercayaan ke ruang publik dan negara yang sekuler itu. Kalimat Bung Karno yang kemudian menjadi klasik di PPKI menjawab desakan sebagian perwakilan muslim mengatakan, kira-kira, sepakati dulu bentuk negara ini (waktu itu), nanti kalau Islam ingin berperan besar maka penuhi lembaga perwakilan untuk memutuskan itu. Keempat, tidak bisa dipungkiri bahwa sekularisasi nusantara adalah bagian dari strategi penjajahan (mengikuti alur apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte di Prancis waktu itu) melalui penindasan dan pemaksaan. Politik etis tidak mengeluarkan masyarakat nusantara darinya, tetapi bagian dari pemaksaan dan penindasan itu sendiri. Ketika politik etis diberlakukan, para agamawan masih disingkirkan di pinggiran yang merupakan dampak dari perlawanan di seluruh nusantara yang diilhami oleh spirit agama dan tarekat yang diawali dari perlawanan dan gerakan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah atau Ngayogyakarta Hadiningrat.

Meskipun gerakan Pangeran Diponegoro dan perlawanan di seluruh nusantara lainnya bukanlah tawaran ideologis agama atas sekularisme itu melainkan hendak mengembalikan tradisi nusantara di mana agama menjadi bagian dari kehidupan publik dan pemerintahan yang bersifat kultural dan tolak angsur. Karena itu, ketika para agamawan diusir dalam sistem kolonial mereka bukan membangun ideologi Islam

untuk perlawanan, melainkan membangun strategi kultural dengan mendirikan institusi-institusi pendidikan dan kebudayaan, seperti pesantren di pedesaan untuk "desa mengepung kota." Keputusan-keputusan PPKI adalah hasil pertarungan dan perdebatan di antara mereka itu dan sekaligus titik temu antara sekularis didikan politik etis dan aspirasi agamawan yang disingkirkan tersebut.

Realitasnya kini bahwa agama kian memenuhi ruang publik dan masuk ke dalam sistem negara dan pemerintahan yang makin dalam. Anggaran Belanja dalam APBN, misalnya, Kementerian Agama yang sebelumnya di era pasca kemerdekaan hanya mengurusi NTCR, kini anggarannya menduduki terbesar kedua setelah Kementerian Pertahanan. Bagaimana kita memahami fenomena ini dan bagaimana pula menempatkannya dalam strategi perencanaan menyongsong masa depan masyarakat dan negara Indonesia? Sebagian orang sebatas cemas melihat fenomena tersebut tetapi sebagian lain mencoba secara keras mencari cara untuk menempatkan fenomena ini sebagai tantangan dan sekaligus jawaban untuk masa depan (Ahmad Suaedy, July 1, 2021: 4).

Sintesis Nusantara: Spirit Agama

Menelusuri peran dan spirit agama dalam negara Indonesia pasca-kemerdekaan sekalipun harus dilakukan terlebih dahulu tinjauan jauh ke belakang. Bukan untuk mundur, melainkan justru untuk merencanakan dan menyongsong masa depan yang jauh ke depan dan dimulai dari saat ini. Kata majemuk Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub di dalam Kitab Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad XIV, abad kejayaan kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebentuk narasi sintesis agama Budha dan Hindu dalam proses peralihan di Nusantara dari mayoritas agama Budha ke mayoritas agama Hindu yang berproses kira-kira sejak abad IX. Proses itu dengan membentuk kesatuan tuhan keduanya, Siwa (Hindu) dan Budha (Budhisme). Sintesis itulah yang menyelamatkan dari ancaman kekerasan dan perang keduanya. Meskipun komunitas dan candi-candi Hindu dan Budha hingga kini berbeda lokus tetapi mereka merasa menyatu di dalam kesatuan bangsa nusantara Indonesia di bawah Bhinneka Tunggal Ika.

Ricklefs, seorang sejarawan ahli Jawa terkenal pernah menulis, hingga empat abad kemudian, di abad XVIII era di mana mayoritas sudah menjadi Muslim, ternyata tradisi Bhinneka Tunggal Ika itu masih berlangsung, antara Hindu-Budha dan Islam. Namun, sintesis itu tidak sampai pada tingkat penyatuan tuhan sebagaimana Hindu-

Budha karena perbedaan karakter melainkan pada tingkat profan. Meski demikian, sintesis itu terjadi baik dalam sistem hubungan pemerintahan ulama maupun tradisi bahkan ritual agama. Ulama, sebagaimana dalam tradisi Hindu-Budha sebelumnya tetap menjadi penasihat terdekat sultan dan bahkan sultan dan keluarga tidak sedikit yang menjadi murid tarekat para agamawan. Pada tingkat spiritual dan ritual keagamaan mereka saling menghormati dan bahkan mempraktikkan keduanya, baik dengan penciptaan tradisi Islam di dalam masyarakat maupun memodifikasi ritual Hindu-Budha dan kepercayaan lokal menjadi tradisi Islam. Yang terakhir ini misalnya, dalam kasus menunggui mayat yang meninggal dari sebelumnya, konon, bermain judi dan ritual panteisme lainnya menjadi membaca tahlil dan Al Qur'an. Kini membaca tahlil pun sudah masuk istana presiden, bukan?

Pola kehidupan ini memang sempat terinterupsi oleh kebijakan sekularisasi penjajahan oleh Pemerintahan Hindia Belanda (PHB), setidaknya sejak 1 Januari 1800. Sultan dipotong hubungannya dengan rakyat dan agamawan dan hidupnya digaji, sedangkan struktur kekuasaan diambil alih sepenuhnya oleh aparat kolonial hingga lapisan paling bawah: desa. Satu-satunya pihak yang bisa mengakses rakyat dan mendengar suara mereka ketika itu adalah para agamawan dan terutama imam tarekat karena mereka meskipun dengan sembunyi-sembunyi masih bisa berhubungan dengan rakyat dengan alasan mengajari agama. Itulah sebabnya mengapa perlawanan pada abad XIX dan awal XX, sebagian besar dipimpin oleh agamawan dan pemimpin tarekat. Secara diskursus, mereka juga melawan para intelektual pribumi didikan Barat kolonial dalam menempatkan agama dan agamawan dalam sistem negara dan pemerintahan Indonesia kemudian. Pancasila dan UUD 1945 adalah sintesis yang paling nyata dari pergulatan tersebut pada kemerdekaan Republik Indonesia.

Hingga mengaksesnya agama ke ranah publik dan negara kini sesungguhnya bukanlah islamisasi melainkan revitalisasi tradisi. Kita harus menempatkan gejala itu bukan sebagai ancaman melainkan tantangan, bagaimana inisiatif dan kreatif substansiasi agama tersebut ketika masuk ke ruang publik dan pemerintahan, bukannya agama yang tekstual dan ideologis. Gus Dur pernah menulis bahwa agama harus melakukan transformasi terlebih dahulu pada dirinya sebelum agama itu sendiri hendak mentransformasi masyarakat. Agama dalam bentuknya yang baku dan tekstual tidak bisa secara eksklusif memaksakan ke dalam sistem sosial sebelum agama itu sendiri melakukan transformasi

pada dirinya. Transformasi pemahaman agama dimaksud bukanlah sekularisasi, melainkan menyelaraskan substansi agama dengan tuntutan kehidupan sosial politik mutakhir, misalnya selaras dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia; pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; kemiskinan dan kesetaraan; serta hak-hak keadilan bagi rakyat pada umumnya. Seluruh filosofi Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan itu dan Islam juga agama yang lain menyediakan seluruh substansi dan metodologi untuk mencapai itu semua (Ahmad Suaedy, 2021:3).

Pendidikan Islam Membentuk Karakter Terpuji di Era Post-Truth

Antisipasi Era Disrupsi dan Post-truth

Dua diksi, disrupsi dan *post-truth*, tersebut kini paling menakutkan tetapi bukan untuk dihindari melainkan untuk dilampaui. Beberapa ciri penting dari dua diksi di atas adalah: pertama, tidak adanya atau tidak diakuinya lagi otoritas, baik otoritas agama maupun sosial kebudayaan dan bahkan negara atau bentuk negara-bangsa. Seorang penulis mengungkapkan bahwa kini negara-bangsa sesungguhnya sudah kolaps dan tidak lagi memiliki otoritas kecuali mungkin batas negara yang masih ditunggui angkatan bersenjata. Tetapi, terhadap transaksi keuangan, ideologi atau pandangan hidup, tenaga kerja dan perdagangan nyaris bisa dilampaui dengan teknologi maupun hukum masing-masing ranah, hukum teknologi komunikasi misalnya. Otoritas agama, bagi milenial, misalnya, bukan lagi di agamawan maupun MUI, melainkan ada di gawai. Belajar agama dari gawai tidak lagi memperdulikan apakah ada otoritas agama atau tidak. Inilah yang menjelaskan meluasnya "takfirisme" dan bahkan menindaklanjuti dengan penghalalan darah konsekuensi dari takfir tersebut.

Turunan dari itu adalah, kedua, hilangnya atau tidak diakuinya metodologi ilmu pengetahuan termasuk metodologi ilmu pengetahuan agama. Otoritas dalam semua ranah, secara ilmiah, mendasarkan pada validitas metodologi termasuk dalam otoritas agama dan negara. Jika metodologi tidak lagi diakui maka otoritas agama dan negara otomatis runtuh. Pertanyaannya, bagaimana agama menginspirasi dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan individu yang bisa menuntun ke arah positif dan kebaikan yang berbasis pada kemanusiaan dan hak asasi manusia jika tidak lagi ada otoritas. Ketiga, dalam waktu yang sama karena maraknya teknologi informasi, komputer dan robot, banyak

lapangan pekerjaan yang hilang karenanya sehingga menimbulkan pengangguran massal, terutama bagi milenial, sedangkan otoritas agama berpindah ke gawai. Jika *outlet* maraknya pengangguran adalah agama maka pilihan otoritas agama adalah pindah ke **otoritas gawai**. Situasi ini lebih dalam dari situasi perdebatan dan pertentangan di era pergulatan kemerdekaan yang memperhadapkan kubu sekuler dan buku kultural agama. kini keduanya berhadapan dengan tantangan di luar dirinya: teknologi! Dalam situasi seperti ini sebaiknya menempatkan agama sebagai bagian dari jalan keluar dan bukan beban bangsa dan negara.

Agama dan Dinamika Masyarakat Sipil: Substansiasi Nilai-nilai Keagamaan

Posisi negara dan pemerintah atas agama mungkin mengalami dilema kini. Di satu pihak, dengan melihat bergesernya otoritas agama dan juga pemerintahan ke gawai, yang sulit ditebak namun membahayakan, pemerintah hendak mengambil alih otoritas itu untuk mengendalikannya. Ada gejala ke arah itu, misalnya ketika menanggapi maraknya radikalisme agama atau kekerasan dan terorisme. Masalah keamanan rakyat tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terhindar dari terorisme dan kekerasan tetapi bagaimana menempatkan agama yang sering dipakai alasan dan basis bagi para teroris. Muncullah program deradikalisasi oleh institusi atau elemen dari pemerintah. Juga program Moderasi Beragama yang masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk merespons agenda-agenda keagamaan eksklusif masuk ke dalam kebijakan negara dan pemerintahan, bahkan birokrasi. Dengan itu, berarti dua program tersebut harus menjadi program pemerintah dan bersifat masif.

Tujuannya sendiri sangat baik sebagai cara pemerintah untuk mengarahkan peran dan fungsi agama dalam membangun kedamaian dan kerukunan. Namun, bahayanya, banyak kritik lahir dari analisis ini, adalah pemerintah bisa terperosok pada otoritarianisme dengan menggunakan basis agama hanya untuk kepentingan rejim. Di lain pihak, apakah campur tangan pemerintah dan juga negara atas agama bisa di satu pihak dengan mengambil jarak tertentu dengan tidak terperosok pada melakukan kontrol terhadap tafsir dan pemikiran agama, namun di lain pihak bisa mengarahkan ke arah substansiasi agama. Artinya, pemerintah tetap ikut campur tangan dalam agama tanpa menggunakannya sebagai legitimasi kekuasaan apalagi otoritarianisme. Di sinilah tempat Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) saya kira bisa ikut melakukan *review* terhadap apa yang telah terjadi dan mengarahkan proses ke depan.

Pada tingkat konstitusi dan aspek-aspek yang setara dengannya (misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi), juga dalam ideologi di balik sistem pemerintahan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945, hubungan agama dan negara dan masyarakat sipil sudahlah selesai. Bagi Islam sendiri, model *post* sekuler sebagaimana Indonesia sekarang juga tidak ada kontroversi yang substansial. Untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan dalam Islam tidak diperlukan suatu langkah drastis sekularisme sebagaimana terjadi di Barat. Hubungan para agamawan dari era Hindu-Budha maupun di era Islam pra-kolonial menempatkan agamawan sebagai semacam penasihat spiritual maupun sosial politik kepada para penguasa, Sultan, dan Kesultanan. Sebagaimana saya kemukakan di atas, kini terjadi revitalisasi peran agama dalam ranah publik dan pemerintahan setelah sekularisasi secara paksa di era kolonial. Dalam sistem demokrasi Indonesia kini, antara parpol dan ormas yang berasaskan tunggal Pancasila maupun Pancasila dan Islam tidak ada kontroversi, kecuali mereka yang secara individual dan kolektif namun terbatas, suka melakukan kekerasan dan main hakim sendiri serta memupuk kebencian. Masalahnya bukan pada asas organisasi, melainkan pada perilaku individu dan kolektif.

Lantas, apa yang tersisa dari agenda ke depan tentang agama. Menurut saya, agenda itu adalah bagaimana menjadikan agama sebagai spirit dan etika dalam keseluruhan hidup individu dan kolektif masyarakat juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika bukan dalam pengertian akhlak dan tata krama individual, melainkan spirit dan dorongan kolektif untuk memperbaiki nasib bangsa secara bersama atau jika boleh meminjam kata-kata presiden Jokowi: Revolusi Mental. Agama harus diangkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada urusan politik keseharian dan birokrasi melainkan perbaikan bagi perilaku budaya dan sosial, individu dan masyarakat. Dengan demikian, agama adalah pedoman dan landasan bagi proses demokratisasi dan penghargaan hak-hak asasi manusia; tata pemerintahan yang baik (*good governance*); kedisiplinan; anti korupsi; pelayanan publik; penegakan keadilan dan penghapusan kesenjangan; pelestarian lingkungan hidup; kebersihan; perlindungan tanah milik rakyat; rasa malu berbuat salah dan jahat bagi pejabat publik; dan sebagainya.

Dari keseluruhan TAP MPR di masa lalu, ada beberapa TAP yang mengesankan dan memberikan pedoman dan landasan, individu dan kolektif, bagi masalah-masalah bangsa. Beberapa TAP MPR yang masih

relevan dan selayaknya dipertajam, diperluas dan dioperasionalisasi dengan menjadikan agama sebagai pedoman dan landasan, yaitu, misalnya TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; TAP MPR No. XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; serta TAP MPR No. VIII 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Di samping itu, dalam hal agama, MPR bisa memberi arah bagi pemerintah dalam menempatkan agama sebagai spirit dan etika publik. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa pembangunan etika publik berbasis agama tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah secara langsung melainkan oleh peran serta masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dan mengerahkan segala daya upaya dengan biaya dan fasilitas lainnya untuk hal itu. Tujuan utama dari proses ini adalah merebut kembali otoritas agama oleh para agamawan dari gawai dan membangun metodologi yang relevan sesuai dengan tantangan mutakhir: karakter milenial dan digital (Ahmad Suaedy, 2021: 5).

Persoalan "otoritas" dan pengakuan "kebenaran" menghantui penghayatan hidup maupun pemikiran keagamaan, bukan hanya di tanah air. Dalam cuaca intelektual yang kerap disebut "pasca-modernisme", memang keduanya sedang dipersoalkan secara serius. Apalagi klaim-klaim metafisik tentang "Otoritas" (dengan "O" besar) maupun "Kebenaran" (dengan "K" besar) yang mengatasi ruang-waktu kini makin tidak dipercayai.

Mari saya ambil contoh dari ranah kesusastraan. Pernah, pada suatu ketika, Roland Barthes, seorang kritikus sastra mahsyur dari Prancis, menulis esai programatis yang kemudian sangat terkenal, tentang "matinya sang pengarang" (Barthes, 1977). Barthes mau melukiskan, posisi sang pengarang yang tadinya diasumsikan sebagai semacam "penjamin" makna suatu teks, kini justru tidak lagi perlu diperhitungkan. Alih-alih menanti atau mencari makna yang dimaui pengarang, menurut Barthes kini justru sang *pembaca*, lewat berbagai pembacaan kreatif, yang memproduksi makna dari teks.

Barthes memang berbicara tentang pengarang. Tetapi, sebenarnya, ia juga sedang memaklumkan kematian otoritas. Antara "pengarang" (*author*) dengan "otoritas" (*authority*) memang sangat dekat hubungannya. Akan tetapi, jika pengarang/otoritas tidak lagi perlu diperhitungkan, dan semuanya diserahkan pada tafsir pembaca yang beraneka ragam untuk menemukan makna teks. Bukankah hal itu akan menjebak orang ke dalam relativisme yang berbahaya.

Sebuah buku daras yang berpengaruh luas mengenai konsep-konsep kritis dalam ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan menegaskan bahwa "*there is no preexisting metaphysical or transcendental meaning that's somehow found under or above the text. Authors, readers, and subjects always 'happen' in a cultural context*" (Nealon dan Giroux, 2012:51). Tetapi, jika benar seperti itu maka jelas kita akan memasuki rimba tafsir yang anarkis. Malah lebih jauh lagi, ketika semua makna yang diberikan pembaca dianggap sama nilainya maka di situ sebenarnya *hanya* makna yang *saya* berikan itulah yang paling benar! *Saya*lah yang menentukan makna. *Saya*lah yang memegang otoritas!

Islam Nusantara Sebagai "Proyek"

Cuaca intelektual yang saya gambarkan secara karikatural di bagian sebelumnya merupakan konteks kiwari perbincangan tentang Islam Nusantara. Kalau mau dipadatkan, konteks itu mau menggambarkan bagaimana realitas pada era pascakebenaran merupakan pertarungan kuasa tafsir di mana "kebenaran" dan "otoritas" terus menerus dipertaruhkan. Juga gagasan tentang Islam Nusantara.

Sudah sejak kemunculannya, yakni ketika jargon Islam Nusantara resmi dipakai sebagai tema Muktamar NU ke-33 di Jombang (2015), gagasan tersebut masuk ke dalam pertarungan kuasa tafsir yang terus berlangsung sampai sekarang. Seperti diingatkan Saskia Schäfer (Schäfer, 2020), pada Juli 2018, pihak MUI Sumatera Barat langsung mengeluarkan fatwa bahwa jargon tersebut bisa membingungkan dan bahkan memecah belah umat. Pertarungan tafsir yang panas itu sampai membuat Ketua PBNU merasa perlu mengeluarkan penjelasan bahwa Islam Nusantara bukanlah mazhab baru, apalagi "agama baru" (*Republika*, 23 Desember 2019).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo malah menyambut hangat dalam pidatonya seraya menegaskan, "Alhamdulillah, Islam kita Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi" (Ahmad, 2021: 2). Sebuah penegasan yang menggembirakan, terutama bagi para pengusung gagasan Islam Nusantara, tetapi sekaligus makin merumitkannya. Karena kini gagasan itu menjadi — kalau istilah ini boleh dipakai — suatu "komoditas baru" dalam pertarungan politik agama yang kuat mewarnai perkembangan sekarang, khususnya pasca-Reformasi 1998.

Dalam kajiannya yang sangat bagus mengenai tema yang sama sekali berbeda, Samsul Maarif menjelaskan politik agama sebagai

"upaya politik oleh kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara lain. Upaya politik tersebut dilakukan melalui mobilisasi dan tekanan massa dengan klaim atas nama kepentingan dan identitas agama mayoritas, melalui kekuatan partai politik, hingga infiltrasi negara melalui kebijakan-kebijakan dan aturan perundang-undangan" (Maarif, 2017:1).

Apabila diletakkan dalam konteks politik agama tersebut maka gagasan Islam Nusantara bukan saja merupakan "kosakata konseptual" (*conceptual vocabulary*). Untuk memakai istilah *Schäfer* yang indah, yang dipakai oleh kalangan cendekiawan muda dan progresif dari NU, tetapi sekaligus juga merupakan perkakas kerja-kerja politik.

Hal ini sangat kentara jika, misalnya, membaca bagaimana Rumadi Ahmad menggambarkan gagasan Islam Nusantara, termasuk "sasaran tembak" proyek tersebut: pertama, kelompok yang masih mempersoalkan Pancasila dan NKRI; kedua, kelompok puritan yang hendak melakukan pemurnian Islam; dan ketiga, kelompok yang cenderung menghalalkan kekerasan untuk menyiarkan dan menyebarkan Islam (Ahmad, 2021: viii–ix; baca juga Hasyim, 2018). Begitu juga *Schäfer* menempatkan kajiannya di dalam konteks pergulatan politik Islam kiwari pasca *conservative turn*, sekalipun mengingatkan bahwa kosakata konseptual Islam Nusantara bukan hal baru tetapi punya jejak panjang. Sementara kajian Leonie Schmidt baru-baru ini menempatkannya sebagai bagian dari "budaya anti-teror" yang dikembangkan NU guna melawan terorisme yang mengatasnamakan Islam (Schmidt, 2021).

Tentu saja masih terlalu dini untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan kosakata konseptual Islam Nusantara di dalam menentukan arah, atau setidaknya ikut mewarnai, pertarungan politik agama di tanah air. Namun, setidaknya, saya ingin memberi dua catatan yang menurut saya perlu dipertimbangkan.

Pertama, eksperimentasi gagasan Islam Nusantara dengan segera mengingatkan saya pada eksperimentasi gagasan sebelumnya yang dikembangkan oleh alm. K.H Abdurrahman "Gus Dur" Wahid sejak 1980-an, yakni apa yang dikenal sebagai "pribumisasi Islam". Walau Gus Dur, sependek ingatan saya, tidak meninggalkan elaborasi utuh mengenai gagasannya, namun esai pendek yang pernah ia tulis cukup menggambarkan inti gagasannya itu:

"Pribumisasi Islam bukanlah 'jawanisasi' atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan

lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma (agama — TS) demi budaya, melainkan agar norma-norma (agama — TS) itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada *Ushl Fiqh* dan *Qaidah Fiqh*" (Wahid, 2001, h. 111)

Kita tahu Gus Dur mengembangkan gagasannya itu sebagai perlawanan terhadap benih-benih "Arabisasi" yang mulai menguat, seperti tampak dalam penggantian secara sengaja ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia ke kosakata Arab. Saya kira Gus Dur sadar bahwa proses "Arabisasi" itu bukanlah sekadar penggantian bahasa, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan penghayatan keislaman yang makin lama dapat membuat orang merasa tercerabut dari akar budaya sendiri–sebuah kegelisahan yang tampaknya makin terbukti dewasa ini. Bagi saya, gagasan tersebut lebih mencerminkan pribadi Gus Dur yang multi-paradoks, sebagai "darah biru" NU yang sangat berakar dalam kultur pesantren tetapi menyukai *An die Freude* Simfoni ke-9 Beethoven, maupun visi besarnya tentang Islam.

Menurut saya, Islam yang diperjuangkan Gus Dur adalah Islam yang ramah dan terbuka, yang memberi ruang dan mampu berdialog dengan budaya-budaya lokal, paham pemikiran modern, ekspresi budaya maupun keyakinan lainnya yang sangat beragam di Nusantara (lihat Sutanto, 2020). Itu sebabnya eksperimentasi Gus Dur mungkin bisa disebut sebagai "Islam Nusantara" *avant la lettre*.

Serta saya kira pergulatan tersebut merupakan pergulatan *genuine* agama-agama di Indonesia untuk menerjemahkan pesan-pesan universal dan abadi yang diwarisinya ke dalam bahasa kontekstual yang selalu berubah. Tanpa penerjemahan tersebut, maka agama-agama dapat terancam entah menjadi insignifikan secara internal (tak lagi memberi makna bagi pengikutnya), atau menjadi irelevan (tak gayut) dengan perkembangan zaman.

Hanya saja, sebagai catatan *kedua*, sebagaimana sudah dielaborasi di atas, dewasa ini dalam era *post-truth*, problem tersebut jadi jauh lebih rumit. Kita berhadapan bukan hanya dengan tidak adanya otoritas tunggal, melainkan juga benturan pendakuan otoritas yang anarkis sifatnya. Dan ini, sebagaimana sudah diingatkan McIntyre, menggerogoti keyakinan bukan hanya soal pemahaman akan realitas, bahkan juga realitas itu sendiri, termasuk di dalamnya proyek Islam

Nusantara. Misalnya, apakah kosakata konseptual ini sebaiknya harus dipahami menurut tafsir resmi PBNU, atau menurut MUI, atau malah menurut Presiden Jokowi?

Tentu saja pilihan-pilihan tersebut masih terbuka lebar, dan masing-masing dapat mendaku otoritasnya sendiri-sendiri. Menurut saya, sekalipun terasa rumit dan menjengkelkan, namun situasi anarkis itu justru membuka ranah yang sangat lebar untuk dijelajahi bagi siapapun yang tertarik dengannya. Sebab, pergulatan kosakata konseptual tersebut sebenarnya mencerminkan pergulatan setiap tradisi keagamaan yang *genuine* dengan tantangan ganda yang saya sebut di atas, sembari meminjam istilah alm. Eka Darmaputera: ancaman insignifikansi internal maupun irelevansi eksternal. Dalam tantangan ganda itulah "nasib" agama dipertaruhkan.

Mungkin persis di dalam pergulatan tersebut kita dapat sekilas memandang wajah kebenaran yang membebaskan dan menjadi saksinya. Sebab, untuk mengutip jawaban Yesus kepada Pilatus dalam Injil favorit saya, tugas kita hanyalah menjadi "saksi-saksi kebenaran" (Yoh 18:37), bukan mengklaimnya, apalagi ingin menguasainya.

Rimba Tafsir Anarkis

Kondisi inilah yang menggelisahkan banyak kalangan dengan perkembangan dunia media sosial (medsos) sekarang. Dalam jagat medsos, yang menghampiri dan dapat dimasuki lewat perangkat gawai di tangan setiap orang, kita menemukan baik anarki tafsir maupun lenyapnya otoritas. Dalam jagat medsos, setiap orang dapat sekaligus berfungsi sebagai produsen, pengarang, penyelaras, sampai penyebar isi atau pesan yang ingin disampaikan. Dan setiap tafsir itu seakan punya nilai yang sama: entah Anda merupakan orang yang sudah berpuluh tahun bergulat dengan kitab-kitab kuning di pesantren, atau Anda baru kemarin membaca buku-buku keagamaan yang banyak dipasarkan di pinggir jalan, nilai pandangan dan komentar Anda sama saja. Tak ada cara untuk membedakan atau memberi nilai lebih pada suatu komentar. Di *Facebook* bahkan komentar direduksi menjadi sekadar *meme*, entah jempol teracung atau jempol terbalik.

Tom Nichols, dalam kajiannya yang mahsyur, menyebut fenomena itu sebagai "matinya kepakaran" (Nichols, 2017), mirip-mirip dengan apa yang disebut Barthes dengan "kematian pengarang" di atas. Di situ tak ada lagi "sang pakar" (atau "sang pengarang"), dan karenanya tidak ada lagi "otoritas" yang memang layak didengar. Setiap orang

dapat bebas berbicara dan berpendapat, dan semua pendapat dianggap bernilai sama.

Dalam konteks keagamaan, itu berarti begini: Anda tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar di pesantren (atau sekolah teologi dan filsafat), bergulat dengan kitab-kitab tafsir klasik yang membuat penat kepala, dan belajar bahasa Arab (atau bahasa Ibrani dan Yunani). Cukup mendengar atau mengikuti ceramah Ustaz (atau penginjil) populer di beberapa *channel YouTube* yang memberi pedoman-pedoman praktis mana yang boleh dan mana yang haram, kelompok mana yang benar dan mana yang salah, bahkan Anda pun bisa membuat *channel YouTube* sendiri lalu mendapat pengakuan sebagai Ustaz (atau penginjil) yang dapat mengeruk banyak keuntungan!

Saya sadar, deskripsi saya terdengar sangat karikatural, tetapi itulah yang terjadi sekarang di dalam masyarakat kita. Apalagi jika kita memperhatikan ciri-ciri khas medsos, yakni tidak ada orang lain (Anda *sekaligus* menjadi penulis, penyunting, maupun pengedar tulisan), *mbludak* tanpa kendali, dan dengan kecepatan yang tak memungkinkan orang melakukan pengecekan fakta, maka situasinya memang sungguh menggelisahkan. Banyak kalangan merisaukan dampak sosial-politik dari kecenderungan tersebut–apalagi jika dikaitkan dengan pertarungan kekuasaan menjelang pemilihan umum. Kajian akbar Cherian George tentang "pelintiran kebencian" (George, 2016) sudah lama memberi *wanti-wanti* dampak tersebut.

Di sini saya ingin masuk lebih dalam. Tanpa mengingkari dampak sosial-politik tersebut, yang sudah kerap menjadi perbincangan internasional sejak fenomena Trump di AS dan *Brexit* di Inggris, perkembangan teknologi medsos membuat orang bukan hanya makin sulit membedakan antara *hoaks* dengan berita yang benar, tetapi bahkan makin meragukan adanya "kebenaran" atau malahan "realitas" itu sendiri. Itulah alaf baru yang kini dimasuki umat manusia: cuaca intelektual yang kerap dijuluki sebagai "pasca-kebenaran" (*post-truth*). Mari kita melihat soal "pasca-kebenaran" ini sejenak, sebab cuaca intelektual itulah yang melatari konteks persoalan kita sekarang.

Kata tersebut, seperti dicatat Lee McIntyre, baru dikenal sejak *Oxford Dictionary* secara resmi menobatkannya sebagai "*Word of the Year*" tahun 2016, mengalahkan pesaing ketatnya: "*alt-right*" maupun "*Brexiteer*". Dan kamus paling berwibawa di dunia itu mentakrifkan *post-truth* sebagai sesuatu yang menunjuk pada iklim di mana "fakta objektif kurang punya pengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang

seruan yang lebih menyangkut emosi dan keyakinan personal." Jadi, dengan kata lain, imbuhan *pasca* di situ bukanlah penunjuk waktu (seperti pasca-Perang Dunia II, misalnya), namun mau menegaskan, kata McIntyre, "bahwa kebenaran sudah tenggelam–artinya sudah tidak relevan lagi"(McIntyre, 2018:5).

Akan tetapi, seperti ditunjukkan McIntyre dengan bagus, sebenarnya apa yang terjadi bukanlah "kebenaran" itu sudah hilang sama sekali, melainkan makin dominannya salah satu tafsir kebenaran terhadap tafsir lainnya! Dan di situ, apa yang disebut "fakta empiris" selalu dapat dipilih, dibentuk, dan diajukan untuk mendukung tafsir kebenaran tersebut. Atau, kalau mau dikatakan dengan cara lain, cuaca intelektual pasca-kebenaran sebenarnya merupakan rimba pertarungan tafsir yang anarkis!

Saya menyebutnya "anarkis" karena semua itu berlangsung tanpa ada ruang, juri atau wasit, maupun kriteria yang dapat menentukan "kebenaran" dan menengahi pertarungan tersebut. Sudah tentu, bukan tempatnya di sini menyibak soal bagaimana "kebenaran" mau dimaknai yang sudah lama menjadi debat panjang dalam filsafat. Ada banyak pandangan dan teori kebenaran yang selama ini diperdebatkan, mulai dari teori korespondensi, koherensi, pragmatis, semantik, dstnya. Masing-masing menawarkan ranah kebenaran beserta model pembuktiannya. Dan tentunya, masing-masing ranah itu tidak dapat dipakai begitu saja saling dipertukarkan. Untuk mengambil contoh sederhana, "kebenaran aksiomatik" dalam matematika (dengan pembuktian formalistiknya), misalnya, sudah tentu tidak dapat dipakai sebagai kriteria dalam ilmu-ilmu sosial.

Tanpa perlu masuk ke dalam diskusi *njelimet* itu (jika tertarik, Anda bisa membaca kumpulan tulisan yang disunting Lynch, 2001, maupun karya akbar sejarawan Oxford, Fernández-Armesto, 1997), situasi pasca-kebenaran sungguh menggelisahkan. Bahkan, apa yang dikenal sebagai "realitas", seperti ditegaskan McIntyre, tidak dapat menjadi juri atau wasit bagi pertarungan tafsir. Sebab, katanya, "apa yang tampak baru dalam era pasca-kebenaran adalah tantangan bukan hanya pada gagasan tentang *memahami* realitas, tetapi pada eksistensi realitas itu sendiri" (McIntyre, 2018:10). Persoalan kiwari tentang Coronavirus, pandemi Covid-19 beserta seluruh proses vaksinasinya, misalnya, memperlihatkan soal itu dengan gamblang. Orang jadi bingung sendiri dan bertanya-tanya, apakah Coronavirus memang sungguh-sungguh ada sebagai realitas yang kita hadapi sehari-hari? Apakah pandemi

Covid-19 bukan sekadar rekayasa penguasa, dan vaksinasi merupakan bentuk lain dari pertarungan bisnis farmasi global.

Kita tahu, bahkan setelah dunia dipaksa berhenti sejenak gara-gara Coronavirus, dan korban banyak berjatuhan, masih banyak orang yang *keukeh* mempertahankan pandangan bahwa itu semua adalah hasil rekayasa. Jadi, apa sebenarnya realitas? Dalam jagat medsos, makin lama makin tidak ada cara untuk menguji mana yang realitas, mana yang hasil rekayasa. Mungkin ketika Covid-19 menghantam diri sendiri barulah orang sadar, ternyata Covid-19 memang riil.

Islam Nusantara di Era Kolonial Hingga Generasi Millenial

Selama ini, arus utama kajian tentang jalur rempah dan studi tentang awal mula Islamisasi, baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh para pengkaji akademik di universitas dan lembaga-lembaga riset, termasuk luar negeri, nyaris terkonsentrasi sejak kedatangan para pelancong dan pedagang Eropa abad XV-XVI, khususnya sejak kolonial. Itu disebabkan karena data-data tertulisnya yang relatif tersedia. Memang, sebenarnya cukup bisa dimaklumi mengapa hal itu terjadi, mengingat keterbatasan ketersediaan data dan referensi serta akses terhadap sumber-sumber berbahasa non-Inggris seperti bahasa Arab, China dan Persia serta India. Juga sansekerta dan aksara Jawa. Sejumlah peneliti Barat kini telah berusaha untuk mengakses terhadap sumber-sumber tersebut dan kemudian mereka menerbitkannya.

Walaupun hal itu masih sangat terbatas dan belum cukup untuk merekonstruksi pergulatan dan tolak angsur dalam proses Islam menjadi mayoritas di nusantara pra-kedatangan orang Eropa. Pergulatan peradaban Islam Nusantara itu sesungguhnya telah terjadi sejak sebelum berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di berbagai belahan nusantara. Dalam konteks ini, tradisi maritim dan pembentukan peradaban antar-Islam dan lokalitas di tengah laut dan di pantai serta sungai, misalnya, merupakan sumbangan kekayaan peradaban masyarakat nusantara kepada dunia yang masih sangat sedikit dieksplorasi oleh para peneliti dan pemerintah.

Era Islam sebelum kolonial sesungguhnya memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan spiritual pada peradaban dunia umumnya yang sangat signifikan. Fakultas Islam Nusantara UNUSIA hendak mengonsentrasikan eksplorasi dan pencarian melalui penelitian pada era transisi masyarakat nusantara dari mayoritas Hindu-Budha menjadi

mayoritas Muslim antara abad XIII-XVI. Pada era itulah terbentuknya komunitas-komunitas sipil Muslim di nusantara dengan menciptakan sintesis dan hibridisasi tradisi serta spiritualitas termasuk upacara-upacara keagamaan dan tradisi yang hidup di masyarakat (*living tradition*).

Islam Nusantara bukanlah ideologi apalagi *aqidah*. Islam Nusantara adalah semacam komunitas epistemik atau meminjam terima Ben Anderson adalah *imagined communities*. Ia merupakan *blended* dari berbagai unsur lokal dan Islam berupa kepercayaan, spiritual, upacara-upacara keagamaan serta tradisi yang hidup. Karena itu, Islam Nusantara tidak mengeksklusi yang lain atau non Islam melainkan justru mengingklusi. Ia merekognisi apapun yang ada di dalam negara dan bangsa Indonesia dengan seluruh dimensinya melalui proses negosiasi dan revitalisasi.

Sesungguhnya, semua agama, kepercayaan, dan tradisi yang ada di nusantara ini mengalami hal yang sama, yaitu adaptasi, sintesis dan blended karena pergulatan dan pergaulan tersebut. Kristen, Budha, Hindu, dan kepercayaan serta agama-agama dan sekte-sekte yang baru masuk Indonesia melakukan hal yang sama tersebut. Berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di seantero nusantara mengiringi dan merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya komunitas sipil muslim atau komunitas epistemik tersebut, bukan sebaliknya. Inilah yang menjelaskan mengapa Islam masuk ke nusantara dan menjadi mayoritas melalui jalan damai, dialog dan sintesis.

Berbagai temuan penelitian arkelologis terbaru dan naskah-naskah filologis menunjukkan itu. Dalam waktu yang sama terbangun jaringan tasawuf dan tarekat yang masih perlu didalami lebih jauh. Berbeda dengan Eropa yang datang dengan moncong senjata, merebut paksa dengan kekerasan untuk memonopoli komoditas perdagangan sembari memaksakan sekularisme dan tumpangan misionaris agama Kristen.

Hal ini bukan berarti hendak menengok ke belakang semata, melainkan justru dari sanalah peradaban nusantara dan Indonesia kini harus dikayuh menyongsong masa depan untuk bersaing dengan peradaban dunia lainya. Ini bisa diilustrasikan mula-mula terbangunnya peradaban Eropa (*renaissance*) di dalam masyarakat Barat. Bahwa *renaissance* di Barat sesungguhnya berangkat dari kesadaran akan kekayaan ilmu pengetahuan dan kearifan masa lampau yang mereka miliki. Lantas mereka lakukan pengkajian dan revitalisasi besar-besaran data-data kehidupan maupun yang bersifat filologis.

Dari pengkajian itulah mereka menemukan asal-usul dan akar mereka dari peradaban Yunani yang tidak bisa mereka akses kecuali merujuk pada pengkaji muslim yang telah terlebih dahulu melakukannya. Hal yang sama terjadi pada tradisi awal Islam termasuk Islam nusantara. Pelacakan jauh ke belakang merupakan bagian dari kebangkitan peradaban itu untuk mencari dan menghidupkan kembali basis-basis warisan ilmu pengetahuan dan kearifan. Islam dan Islam Nusantara harus belajar dan me*review* pula dari karya-karya Barat yang sudah lebih dahulu melakukannya. Dengan demikian, saling belajar antar peradaban dan sumber dunia adalah keharusan serta keniscayaan.

Konsisten pada Kebenaran Islam Di Era Post-Truth

Terdapat beberapa formula yang dilakukan dalam menyebarkan klaim kebenaran yang bersifat *post-truth*. *Pertama*, kebenaran alternatif disampaikan untuk tujuan tertentu sebagai antitesis dari informasi arus utama yang sudah begitu populer di masyarakat. *Kedua*, kebenaran alternatif itu disebarkan melalui agen-agen yang telah dipersiapkan. Agen penyebar informasi ini bisa berupa media atau orang-orang terlatih yang bertugas untuk meyakinkan para penerima informasi. *Ketiga*, kebenaran alternatif tersebut terus disampaikan berulang-ulang dan secara masif sehingga masuk ke alam bawah sadar penerimanya. Di sinilah emosi dan keyakinan pribadi seseorang dimanfaatkan. *Keempat*, kebenaran alternatif tersebut diperkuat dengan pendapat para ahli yang juga telah dipersiapkan sehingga kebenaran alternatif yang sebenarnya bersifat manipulatif tersebut menjadi seakan-akan kuat karena didukung oleh para ahli yang sebenarnya partisipan dan tidak netral (Zainul Adzfar & Badrul Munir Chair, 2021:277). Dukungan para ahli ini diperlukan untuk semakin meyakinkan masyarakat akan kebenaran alternatif yang telah dikonstruk. Sebagian masyarakat yang mungkin masih ragu akan kebenaran alternatif yang telah digembar-gemborkan mulai sedikit yakin karena pengaruh pendapat para ahli atau pakar. Melalui formulasi yang diuraikan di atas, *post-truth* dikonstruksikan sebagai manipulasi ekstrem atas kebenaran. Jika melihat formulasi yang digunakan, sebenarnya kebenaran-kebenaran alternatif semacam *post-truth* sudah muncul sejak lama dalam kehidupan umat manusia, termasuk juga dalam ranah teologi atas agama.

Implementasi ketahanan nasional dalam rangka pembangunan nasional diperlukan kriteria sebagai berikut: 1) comprehensive; 2) keuletan dan ketangguhan; 3) keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan; 4) dinamis; 5) kemandirian; dan

6) partisipatif . Adapun implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi era *post-truth* dapat dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam era globalisasi. Dalam era *post-truth* ini, setiap warga negara dan seluruh rakyat Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, dalam pemantapan wawasan Nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional sebagai hasil akhir pembangunan nasional (Zainul Adzfar & Badrul Munir Chair, 2021:277).

DAFTAR PUSTAKA

_____. 2021. *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. Kediri: I AIN Kediri Press.

Achmad, A. 1996. *Menguak tabir hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.

Admin, B. 2019. *Membangun Demokrasi di Era Post Truth Melalui Literasi dan Diskursus Publik*.

Adolf, H. 2002. *Aspek aspek negara dalam hukum internasional. Jakarta:* PT. Raja Grafindo Persada.

Ahada, Ramadhana. *Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini*. Diakses pada tanggal 18 November 2021. Dari (https://akurat.co/post-truth-peradaban-kita-hari-ini,)

Aisyah, Novia. 2022. *Karakteristik Umum-Khas Demokrasi Pancasila, Sekaligus Inti dan Pengertiannya*. Dari (https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6290080/karakteristik-umum-khas-demokrasi-pancasila-sekaligus-inti-dan-pengertiannya).

Al-Rodhan, Nayef, 2017, *Post-Truth Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News.*

Al-Rodhan, Nayef. 2017. P*ost-Truth Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News*.

Amalliah, A. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media online Pada Era Post Truth. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 3 No. 4 Edisi November 2018 (1-15)

Amalliah. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoaks di Media Online pada Era Post Truth.. *Jurnal Akrab Juara*, 3 November, 1–15.

Anggraini, C. N. (2016). *Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoak:(Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-Maret 2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Antari, Ozora. 2020. "*Intervensi adalah, pengertian, tujuan serta jenisnya*". Diakses pada 17 November 2021. Dari (https://www.jojonomic.com/blog/intervensi-adalah/)

Anugrah, b. 2021. *Membangun Karakter Bangsa di Era Post-Truth. Membangun Karakter Bangsa di Era Post-Truth*. Dari (https://

kumparan.com/boy-anugerah/membangun-karakter-bangsa-di-era-post-truth-1vBkNoUNnno)

Anwar, I. C. 2021. *mengenal bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI menurut UUD 1945*. pendidikan, p. 1.

Apeldoorn, Van, L. J. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Arafat, Muammar. 2019. *Pancasila sebagai Pembentuk Identitas Nasional Bangsa Indonesia*. Artikel Opini Harian Palopo Pos terbitan Senin 27 Mei.

Ardiansyah, Okky. 2021. *Post-Truth Adalah Gejala yang Hadir Bersama Hoaks, Pertempuran Opini Melawan Fakta*. Dari (https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012107223/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama- hoaks-pertempuran-opini-melawan-fakta).

Arendt, Hannah, 1972. *Le systeme Totalitaire*. trad. J.-L. Bourget, R. Davreu, P. Lévy.

Arif, Mohammad. 2017. Studi Islam Dalam Dinamika Global, Kediri: *STAIN Kediri Press*.

Arifiannto, S. 2015. Kontruksi teori-teori dalam perspektif "kajian budaya dan media". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–16.

Arifin Futuhal Nuhdi,dkk. 2020. Dampak Posth-Truth di Media Sosial. Volume 10, No. 3, Desember.

Arifin, N. F., & Fuad, A. J. 2020. Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10*(3), 376-378.

Arifin, N. F., & Fuad, A. J. 2020. Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10*(3), 376-378.

Arwendria, A. O. 2019. Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. Jurnal Dokumentasi dan Informasi , 196-206.

Ashari, Mahmud. 2021. *Ladang Ranjau Post Truth dalam Medsos*. diakses pada tanggal 19 November 2021. Dari (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13938/Ladang-Ranjau-Post-Truth-dalam- Medsos.html)

Asman. 2021. *Pendidikan Di Era Post Truth*. dari (https://retizen.republika. co.id/posts/14474/ pendidikan-di- era-post-truth).

Asmaroini, A. P. 2016. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.

Asmaroini, Ambiro Puji. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2: 440-450.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: *Konstitusi Press*.

Athique, Adrian. 2013. *Digital media and society: an introduction*. Cambridge: Polity Press.

Awaludin, Hamid. 2012. *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Baran, S. J., & Davis, D. K. 2010. Teori dasar, komunikasi pergolakan, dan masa depan massa. *Jakarta: Salemba Humanika*.

Basyir, Kumawi, dkk. 2013. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press.

Basyiruddin Usman, Asnawir. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Ciputat Pers, Juni.

Bo'a, F. Y. 2018. Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi, 15*(1), 21-49.

Bybee, C. 1999. Can democracy survive in the post-factual age?: A return to the Lippmann-Dewey debate about the politics of news. *Journalism & Communication Monographs, 1*(1), 28-66.

Cahyani, I. R. 2020. Librarians and Post Truth World: Peluang dan Strategi Perpustakaan di Tengah Crisis of Critical Thinking. *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* – Vol. 10 No. 1.18-26.

Chomsky N. 2015. *How the world works*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

Davis, E. 2017. *Post-truth: Why we have reached peak bullshit and what we can do about it. Little*. Brown Book Group.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. "Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi" Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, hlm.2

Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 119-160.

Fatmawati, E. (2019). Tantangan Literasi Informasi Bagi Generasi Muda pada Era Post Truth, Semarang : *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, *28*(2), 57-66.

Febriyandra, d. 2021. Intervensi. Intervensi Adalah: Pengertian, Macam, Dampak, Bentuk, Contoh. Dari (pintarnesia.com)

Festinger, Leon. 2008. *When Prophecy Falls*. Pinter & Martin: London.

Ghazy, Nurul. 2009. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia. Jakarta: Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin & Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ghufron F. 2017. *Menyikapi Era Defisit Kebenaran*. Jakarta: Kompas

Hadirman, F. Budi. 2017, "Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis," *Majalah Prisma* 36, No. 3, 4

Hamad, Ibnu. 2017. *Kritik Post Truth*. Diakses dari https:// mediaindonesia. com/opini /111766/kritik- post-truth.

Hamalik, Oemar. 1989. *Media Pendidikan*. Bandung : Citra Aditya, 12.

Haq, M. N. (2019). Penggunaan Retorika Post-Truth dalam Populisme Islam (Studi Kasus Caption Instagram Felix Siauw). *Islamic Insights Journal*, *1*(2), 103-122.

Hariani, Bhakti, dkk. 2019. *Saring Informasi di Era Post-Truth.* Diakses pada 28 April 2019. Dari (https://www.google.com/amp/s/ www.beritasatu.com/amp/nasional/551367/ saring- informasi-di-era-posttruth)

Hartono, Dudi. 2018. *Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking*. Jakarta: Universitas Mercu Buana

Haryatmoko, ddk. 2019. "*Era Post-Truth dan Prasangka Negatif*", dalam Post-Truth dan Anti Pluralisme, ed. Agus Suwignyo. Jakarta: Penerbitan buku Kompas

Haryatmoko. 2006. "*Dermagogi dan Komunikasi politik*" kompas,

Haryatmoko. 2018. ''Mencari Kebijakan di Era Post-Truth: Menghadapi Hoaks, Emosi Sosial dan Populisme Agama,'' Majalah Basis: Nomor 05-06, tahun ke-68, 2019, hlm. 30, juga dalam Diskusi Publik bertajuk, ''Etika Media Sosial di Era Post-Truth dan Disrupsi Informasi,'' Yogyakarta,

Haspramudilla, D. (2019). Indonesia, Selamat Datang di Era "Post-Truth.".

HendriNov, Z. 2019. "Ruang Media Sosial di Era Post-Truth Politik". Diakses pada tanggal 16 Mei 2019 melalui: https://www.kompasiana.com/ripiliang/5c7eda7d677ffb30 ec200a72/ruang- media-sosial-di-era-post-truthpolitik?page=all.

Herman, 2019. *Pancasila Dalam Kedudukuan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Himawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Kompas Media Nusantara, Jakarta

https://www.remotivi.or.id/kabar/345/selamat-datang-di-era-post-truth

Hunt A. & Wheeler B. 2017. *Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU.BBC News.* Dari (http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887).

Ihsan, Hafizul. *Kedaulatan*. Dari https://osf.io/2cqyw/download

Ika di Era Post Truth Melalui Media Sosial". *Jurnal Lontar*. Vol (6). No (2)

Imaduddin, Firman. 2020. *Kebohongan Post-Truth*. Diakses pada tanggal 19 November 2021. Dari (https://www.remotivi.or.id/headline/esai/569)

Irwan Gesmi dan Yun Hendri, Buku Ajar Pendidikan Pancasila..., hlm. 5-8.

Iyengar, S., & Massey, D. S. 2019. Scientific communication in a post-truth society. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *116*(16), 7656-7661.

Jatmiko, M. I. 2019. Post-truth, media sosial, dan misinformasi: pergolakan wacana politik pemilihan presiden indonesia tahun 2019. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *20*(1), 21-39.

Juditha, C. 2018. Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*,, 3(1), 31-44.

Jurnal Intelektual: , Desember 2020Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman.Volume 10, Nomor 3,

Juvano, Edo. 2020. "*Memikirkan Kembali Regulasi Media Sosial di Era Post-truth*," opini.id, 5

Kaderi, Alwi. 2015. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press.

Kartoli, K., & Risman, H. 2020. Pemahaman Tren Saat Ini Sebagai Langkah Awal Penguatan Nilai-Nilai Pancasila. *Mimbar Agama Budaya*, *37*(1), 1-7.

Keyes, R. 2004. *The Post-Truth Era*. New York: St. Martin's Press, 175 Fifth Avenue, New York, N.Y.

Keyes, Ralph. 2004. *The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press: New York.

Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kreitner, Richard. 2016. *Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About The Current Moment*. Dari (https://www.thenation.com /article /archive /post- truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/)

Kresnoadi. 2021. *Apa itu Post Truth, Dampak, dan yang Harus Kita Perbuat*. Dari (https://www.ruangguru.com/blog/post-truth)

Kresnoadi. 2021. *Apa Itu Post Truth, Dampak, Dan Yang Harus Kita Perbuat*. Diakses pada tanggal 18 November 2021. Dari (https://www.google.com/amp/s/www.ruangguru.com/blog/post-truth%3hfs_amp=true)

Kuen, M. M., & Kuen, F. A. 2020. Efektivitas Komunikasi Sebagai Katalisator Berkembangnya Post Truth Cerdaskan Milenial Bermedia Sosial Di Kota Makassar. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 361-381.

Kuncorowati, P. W., & UNy, H. F. 2009. Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*, *6*(1), 60-75.

Kurniawan, B. 2018. Politisasi Agama Di Tahun Politik : Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama* , 12(1), 133–154.

Latour B. 2004. *Why has critique run out of steam? from matters of fact to matters of concern.Critical Inquiry*, 30(2), 225-248.

Laughlin R. 2004. *Putting the record straight: a critique of 'methodology choices and the construction of facts: some implications from the sociology of knowledge'*. Critical Perspectives on Accounting, 15, 261–277.doi:10.1016/S1045-2354(03)00070-4.

Leatemia, Ardiyah. 2013. *Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*. Lex et Societatis. Vol. I.

Liliweri, A. (2020). Dasar-dasar komunikasi antar budaya. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Liliweri,Alo. 2015. Komunikasi Antar Personal. Jakarta : Kencana Prenada media Group Littlejohn, Stephen W dan Karen a Foss. 2009. Teori Komunikasi Theories of Human Communication. (Jakarta: salemba Humanika).

Lillahi, I. 2019. Membaca Pancasila di Era Post-Truth. SumbarMadani. com.

LLORENTE & CUENCA. 2017. *The Post Truth Era: Reality vs. Perception*. In UNO Developing Ideas.

Longino H.E. 2002. *The fate of knowledge*. United State of America: Princeton University Press

Lubis A.Y. 2015. *Filsafat ilmu klasik dan kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Lubis A.Y. 2016. *Postmodernisme: teori dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers

Mahmuzar, M. 2020. Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi. Hukum dan Pembangunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(2), 2.

Masyarakat Telematika Indonesia. 2017. "*Mastel: Penyebaran Hoaks Hambat Pembangunan*".

McComiskey, B. 2017. *Post-truth rhetoric and composition*. University Press of Colorado.

McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIt Press.

Putro, W. D., & Muammar Arafat Yusmad, M. 2020. Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth.

Mudjiyanto, dkk. Literasi Media di Era Post Truth. *Jurnal Promedia* (Public Relation Dan Media Komunikasi), Volume Ke-6 No. 2, 2020.

Nainggolan, P. P. 2020. *PEMILU PRESIDEN DAN INTERVENSI ASING*: . kajian, 1-13.

Nasution, A. T., Harahap, N. H., & Rambe, A. A. Makalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Nomor 1, Maret 2018, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi)

Nuhdi Futuhal Arifin, A. J. 2020. Dampak Post-Turth di Media Sosial. *Jurnal Intelektual:Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* , 376-388.

Nuraeni, N. 2019. Pancasila di Era Post Truth dalam Horizon yang Etis dan yang Politis. *Extension Course Filsafat (ECF)*, (2).

Nurdianto, Wahyu. 2020. *Era Post-Truth Media dan Tantangannya Dalam Menjawab Problematika Pandemi*. Diakses dari (https:// www. timesindonesia. co.id/read/ news/ 306390/era-post-truth- media-dan-tantangannya-dalam-menjawab-problematika-pandemi.)

Nurwardani, Paristiyanti et.al, 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi : Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Indonesia Prime. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Padilah, A. N., & Dewi, D. A. 2021. Pancasila di Era Globalisasi dalam Memperkuat Moral untuk Membangun dan Memajukan Bangsa. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(11).

Parani, R., Pramesuari, A., Maldiva, D. M., & Felicia, E. 2018. Mempertanyakan Kembali Bhinneka Tunggal Ika Di Era Post Truth Melalui Media Sosial. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 152-164.

Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Tabligh Volume 20 No. 1, Juni 2019. *Juvano, Edo, Memikirkan Kembali Regulasi Media Sosial di Era Post Truth*. Diakses pada tanggal 22 November 2021. Dari (https://opini.id/politik/read-14285/memikirkan-kembali- regulasi-media-sosial-di-era-post-truth)

PEMILU PRESIDEN DAN INTERVENSI ASING: MENYINGKAP TUDINGAN INTERVENSI RUSIA DALAM PILPRES DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA | Nainggolan | Kajian (dpr.go.id)

Pendit, Putu Laxman. 1992. "*Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah Perdebatan*," dalam Kepustakawanan Indonesia: *Potensi dan Tantangannya*, eds. Antonius Bangun dkk. Jakarta: Kesaint-Blanc.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

Poltak Partogi Nainggolan, PEMILU PRESIDEN DAN INTERVENSI ASING: MENYINGKAP TUDINGAN INTERVENSI RUSIA DALAM PILPRES DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA (Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD), 2018

Post truth,media social (Muhammad Iqbal jatmiko Prozonov ,2018) Jurnal tabligh volume 20 no 1,juni 2019, 21-22.

Amilin, A. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, *7*(3), 5-11.

Putri, A. S. 2020. *Hakikat NKRI*. Diakses pada tanggal November 05, 2021. Dari (https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/164500769/hakikat-nkri)

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing Yogyakarta

Ramadhan, B. 2020. data Internet di Indonesia dan perilakunya di tahun 2020. Diakses dari (http://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-di-tahun-2020).

Ramadhan, Bagus. 2020. *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*. Diakses pada tanggal 22 November 2021. Dari (https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-periakunya-880c7bc7cd19)

Golose, P. R. (2019). Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth (Kajian dalam rangka Menyukseskan Pemilu 2019). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *13*(1), 10.

Rianto, Puji. 2019. Literasi Digital dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8.2: 24-35

Ricoeur, Paul. 2020. Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristian, Volume 5, Nomor 1, Oktober.

Ritzer G., Goodman D.J. 2011. *Sosiological Theory. New York: McGraw Hill Tunggal N. 2016.* Produk Kebudayaan Inspirasi Pembangunan. Jakarta: Kompas [terbit tanggal 26 Desember 2016)

Riyanto, S. 2012. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, *1*(3).

Rizki, Dyah Winahyu. 2020. *Fenomena Post-Truth dalam Kampanye Politik di Media Sosial Twitter.* Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Roberto, U. M., & Kritis, T. H. 2008. Kajian Tentang Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern. *Bandung, Nusa Media*.

Romano, A. 2017. Asserting journalistic autonomy in the 'post-truth'era of 'alternative facts': Lessons from reporting on the orations of a populist leader. *Asia Pacific Media Educator*, *27*(1), 51-66.

Rozi, F., Kurniawan, R. R., & Sukmana, F. 2021. Pengembangan media pembelajaran pengenalan bangun ruang berbasis augmented reality pada mata pelajaran matematika. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, *6*(2), 436-447.

s://www.ruangguru.com/blog/post-truthhttps://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012107223/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama-hoaks-pertempuran-opini-melawan-fakta

Saleh, R., & Pancasila, P. 1979. UUD 1945 dalam Perundang-undangan. *Jakarta: Bina Aksara*, 12.

Salman, O. 2010. Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah. *Bandung: Refika Aditama*.

Saputra, A. W. 2019. Post Turth Sebagai Hyperrealisitas. Diakses pada tanggal 18 November 2021. Dari (https://www.terakota.id/post-truth-sebagai-hyperrealitas/)

Senia. (2018). Berita Hoax Sebagai Camilan. 1-11.

Seda, Frans. 1983. "*Mengenang Situasi Lahirnya Peraturan 3 Oktober 1966*" dalam Bustomi Hadjid Ronodirdjo dkk, ed., Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru. Bandung: Harapan Bandung.

Jandja, Sendjaja Sasa. 2005. *Media Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka

Septanto, H. *2017*. Jurnal Sosbud 3. Jurnal Sosbud 3, 157–162.

Septiyadi, C. A., Khafifah, Z., Khumairoh, A. S., & Hidayatullah, A. F. 2021. Truth Dan Post Truth Dalam Perspektif Al-Kindi Pada Era Milenial (Media Sosial). *Jurnal Penelitian Humaniora*, *22*(1), 40-50.

Setyawan, D. 2018. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 1-19.

Shalahuddin, Mahfud. 1986. *Media Pendidikan Agama*. Bandung : Bina Islam, 4.

Sidi. R, dkk. 2021. Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 494-500.

Simon, J. C. 2020. Pendidikan Kristiani Di Era Post-Truth: Sebuah Perenungan Hermeneutis Paul Ricoeur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, *5*(1), 93-110.

Situmorang, I. M. (n.d.). Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat Dalam UUD 1945 dan Pancasila. Diakses pada tanggal 5 November 2021. Dari (https://osf.io/2k4eu/download/?format=pdf)

Stevanus, Subagijo. 2019. *Pasca-Kebenaran Yang Membingungkan*. Diakses pada tanggal 19 November 2021. Dari (https: //investor.id/opinion/188678/pascakebenaran-yang-membingungkan)

Sugiarto, E. C. 2020. Media Sosial, Post Truth, dan Literasi Digital.

Suharyanto, C. E. 2019. Analisis berita hoaks di era post-truth: sebuah review.

Suherdi, D. 2021. *Peran literasi digital di masa pandemik*. Cattleya Darmaya Fortuna.

Sulistyo, E. 2017. *Medsos dan Fenomena "Post-Truth*. Diakses dari (https://nasional.sindonews.com/read/1261 141/18/medsos-dan-fenomena-post-truth1511797550)

Sumber : Komite.ID, Inspirasi Globalisasi 4.0 & Industri 4.0 untuk Indonesia, Diakses pada tanggal 18 November 2021 melalui: https://www. Komite .id /2017 /02/13/ mastel-penyebaran hoaks hambat pembangunan/.

Surahman, S. 2016. Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi media Terhadap Seni Budaya Indonesia. *Jurnal Rekam*, 12(1), 31–42.

Surahman, S. 2018. Publik Figur Sebagai Virtual Opinion Leaderdan Kepercayaan Informasi Masyarakat. *Jurnal Wacana*, 17 (1), 53-63.

Susanto, E. H. 2010. *Komunikasi manusia: esensi dan aplikasi dalam dinamika sosial, ekonomi, politik*. Mitra Wacana Media.

Suwignyo, A. (Ed.). 2019. *Post-truth dan (anti) pluralisme*. Penerbit Buku Kompas.

Syafaruddin, & Irwan N. 2005. *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: Quantum Teaching,

Marzuki, Ahmad. 2009. *Seri Management Pengantar dan Kegiatannya*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Syuhada, Dhimas Karisma. 2017. Etika Media di Era Post-Truth. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Volume 5, No. 1.

Syuhada, K. D. 2017. Etika Media di Era "Post Thruth". *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. 5, no. No. 1

Thabroni, Gamal. 2019.*Post Truth adalah Kebohongan yang Menjadi Kebenaran*. Diakses dari (https://serupa.id/post-truth/)

Prabowo, Thoriq Tri. 2021. *Post-Truth Pandemi*. Diakses dari (https:// uin - suka. ac.id/id/kolom/detail/100/post-truth-pandemi)

Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2019. *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Toharuddin. 2017. *Post-Truth, Efek Samping Zaman Informasi*. Diakses pada tangal 18 November 2021. Dari (https://gelorasriwijaya. co/blog/post-truth-efek-samping- zaman-informasi/)

Ulya. 2018. Post Trut, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Volume 6 No. 2.

Wahyono, E., Amalia, R., & Ranteallo, I. C. 2017. Menelaah Lebih Dekat "Post Factual/Post Truth Politics, Studi Kasus Brexit"(Analsis Resensi Media). *Nyimak: Journal of Communication, 1*(1), 23-31.

Wera, M. 2020. Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, dan Populisme Agama. Societas Dei: *Jurnal Agama dan Masyarakat*. Vol. 07, No. 1.

Wera, Marz. 2019. Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, dan Populisme Agama. *Jurnal Agama dan Masyarakat*. Vol. 07,No.1.

Setyo Wibowo, A. 2019. Meneropong Bohong à la Post-Truth. *Majalah Basis*, Nomor. 05-06, tahun ke-68, 2.

Winastya, Khulafa Pinta. 2021. *Intervensi adalah Istilah dalam Dunia Politik*. Dari (https://www.merdeka.com/trending/ intervensi-adalah-istilah-dalam-dunia-politik- simak-penjelasan-selengkapnya-kln.html)

Wright, Charles R. 1988. *Sosiologi Komunikasi Masa, Ed. Jalaluddin Rakhmat*, Bandung, Remadjaa Karya & Littlejohn, Stephen W, (1996), Theories of Human Communication. Washington: Wadsworth Publishing Company.

Zelizer, B. 2004. When facts, truth, and reality are God-terms: on journalism's uneasy place in cultural studies. *Communication and Critical/Cultural Studies, 1*(1), 100-119.

Wuryanta, A. E. W. 2018. Post-Truth, Cyber Identity dan Defisit Demokrasi. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Anugrahbayu, Y.D. *Pasca-Kebenaran*. Diakses pada tanggal 19 November 2021. Dari (https://news.detik.com/kolom/d-3993900/pasca-kebenaran)

Yuda, A. 2021. Pengertian, Jenis, Sifat, Bentuk, dan Kedaulatan Menurut UUD 1945. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023. Dari (https://www.bola.com/ragam/read/4524498/pengertian-jenis-sifat-bentuk-dan-kedaulatan-menurut-uud-1945)

Pradana, Y. (2018). Atribusi kewargaan digital dalam literasi digital. *Untirta Civic Education Journal*, *3*(2).

Yustisia Jurnal Hukum, 1, 7. Retrieved November 5, 2021, from https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10074/8990

Adzfar, Z. & Badrul Munir Chair. 2021. Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 9 No. 2.

Zaluchu, S. E. (2020). Dinamika Hoax, Post-Truth dan Response Reader Criticism di Dalam Rekonstruksi Kehidupan Beragama. *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, *10*(1), 98-117.

Zimmer, Ben. 2010. Truthiness. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017. Dari (https://www.nytimes.com/2010/10/17/magazine/17FOB-onlanguage-t.html)

Biodata Penulis

A. Data Diri

1.	Nama	: **Dr. MOHAMMAD ARIF, MA.**
2.	Tempat, Tanggal Lahir	: Nganjuk
3.	Alamat	: Dsn. Pandanasri Ds. Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. Nganjuk & Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk
4.	Pekerjaan	: DOSEN / PNS IAIN Kediri
5.	Bidang Pekerjaan	: Dosen IAIN Kediri.
6.	Pangkat/Golongan/Ruang	: Penata Tingkat I - III/d
7.	Jabatan Fungsional	: Lektor
8.	Alamat Kantor	: IAIN Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri
9.	HP/E-mail	: 0852 9899 9950 / moharif.am@gmail.com & mohammadarif99@iainkediri.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Lambangkuning 1 Kertosono Nganjuk, 1981
2. SMPN 1 Kertosono Nganjuk, 1984
3. MAN Nglawak Kertosono Nganjuk, 1987
4. S1 IAIN Sunan Ampel Kediri Fak. Ushuluddin Jur. Perbandingan Agama, 1992
5. S2 UIN Maliki Malang, Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, 2002
6. S3 UIN Sunan Ampel Surabaya, Islamic Studies/Dirasah Islamiyah, 2012
7. Short Course, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia 2015
8. Pondok Pesantren Salaf Darul Muta'alimin Pandanasri Lambangkuning

Kertosono Nganjuk, 1987

9. Pondok Pesantren Al Hikmah Jl. Perintis Kemerdekaan Ngronggo Kota Kediri, 1994
10. Pondok Pesantren Miftahul 'Ula Nglawak Kertosono Nganjuk, 1998
11. Pondok Pesantren Al 'Arfiyah Mojoduwur Ngetos Nganjuk, 2002 dan berlanjut
12. Kursus Bhs Inggris Di BEC Singgahan Pare Kediri, TC 38, 1992
13. Pelatihan Nasional Bhs Inggris Di Cimahi Bandung 1 bln, 1996
14. Pelatihan Nasional : Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan di UGM 6 bln, 2007.
15. Pelatihan Nasional : Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan di UGM 3 bln, 2008.
16. Workshop TOT Moderasi Beragama IAIN Kediri 2023

C. Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Umum Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Kediri 1 989 – 1991
- Ketua Pon. Pes. Al-Hikmah Ngronggo Kediri 1989 -- 1992
- Ketua Pon.Pes Miftahul 'Ula Nglawak Kertosono 1995 -- 1998
- Ketua I PMII Komisariat IAIN Kediri 1989 – 1991
- Pengurus PMII Cabang Kediri 1990 – 1992
- Pengurus IPNU Cabang Kota Kediri 1988 – 1992
- Wkl Ketua ISNU Cabang Nganjuk 2006 –2012 & 2012-2016 - sekarang
- Pengurus IKAPMI Kab. Nganjuk 2016 - Sekarang
- Sekretaris BPD Ds Lambangkuning Kertosono 2002 - 2006
- Ketua Karang Taruna Lambangkuning Kertosono 1996 -- 1998
- Sekretaris Panwas Kab. Nganjuk 1999 & 2008
- Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab. Nganjuk 2014
- Ketua LTN-NU PCNU Kab. Nganjuk 2016-2021
- Koordinator GUSDURian Nganjuk 2019 - Sekarang
- Ketua IKA UINSA Korda Nganjuk 2019 - Sekarang
- Pembina IMASKA KEDIRI 2016 - Sekarang
- Pengurus Corps Provost Banser (CPB) Satkorwil Jawa Timur 2019-2020.
- KADIV DIKDAK CORPS PROVOST BANSER (CPB) SATKORNAS 2020-2025
- Wakil Ketua Rumah Moderasi Beragama (RMB) IAIN Kediri 2022-2025
- Ketua Badan Koordinasi Muballigh Se Indonesia (BAKOMUBIN) PD Kab. Nganjuk 2023-2027
- Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orda Kab. Nganjuk 2023 - 2027

D. Riwayat Pekerjaan

1. CPNS Cados, III/b, STAIN Kediri tahun 2006
2. Penata Muda Tingkat I, III/b, Tenaga Edukatif STAIN Kediri tahun 2007
3. Penata Muda Tingkat I. III/b, Asisten Ahli Pendidikan Islam tahun 2009
4. Penata, III/c, Lektor Pendidikan Islam STAIN Kediri tahun 2011
5. Penata Tingkat I, III/d , Lektor Pendidikan Islam STAIN Kediri tahun 2013

E. Karya Ilmiah

- Penelitian
  1. Dampak Pemikiran Syeh Muhammad Abduh Terhadap Pembaharuan Islam Di Indonesia (Skripsi Fak. Ushuluddin Jur. Perbandingan Agama IAIN Kediri, tahun 1992)
  2. Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Kasus Di BEC Pare Kediri),(Tesis, Konsentrasi Manajamen Pendidikan Islam UIN Malang, tahun 2002)
  3. PONDOK PESANTREN SALAF DAN PERUBAHAN SOSIAL (Studi Dinamika Sosial Akademik di Pon. Pes. Mojosari dan Krempyang Kab. Nganjuk), (Disertasi Konsentrasi Islamic Studies, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012)
  4. Pesantren Sebagai Pusat Deseminasi Ajaran Jama'ah Tabligh, Studi Kasus di Pesantren Al Fattah Temboro

Magetan Jawa Timur (Penelitian Individu), tahun 2007.

5. Terapi Religi:Pengalaman Religius Di Pesantren Al 'Arfiyah Mojoduwur Ngetos Nganjuk (Penelitian Individu), tahun 2008.
6. COHERENCE OF MULTICULTURAL LIFE OF THE TANON PEOPLE, PAPAR DISTRICT, KEDIRI REGENCY, EMPIRISMA Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022.

- Jurnal

1. *Manajemen Pembelajaran Yang Efektif*. JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2002)
2. *Pengembangan Ilmu Agama Islam Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2003).
3. *Politik Yang Dimainkan Oleh Nabi Muhammad SAW*. JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2004).
4. *Fundamentalisme Dan Modernisme*. JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2006)
5. *Komponen Pelaksanan Dan Pendukung Madrasah*. JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2007).
6. *Islam Budaya* JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2008)
7. *Urgensi Terapi Religi Pesantren Dalam Era Globalisasi*. Jurnal **Lentera**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2009)
8. *Mengenang Hasil Un Dan Harapan Unas Ke Depan*. **MPA KANWIL DEPAG JATIM**. AGUSTUS 2009.
9. *Urgensi Ritual Di Pesantren Dalam Era Globalisasi.* JURNAL **UNIVERSUM**, STAIN KEDIRI. AGUSTUS 2010.
10. *Simbiosis Mutualistis Khittah Nu 1926 Dengan Implementasi Pluralisme Gus Dur.* JURNAL **LENTERA**. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono (2010)
11. *Peranan Dan Pengaruh Komputer Dalam Pendidikan*. **MPA KANWIL DEPAG JATIM**. JANUARI. 2011.
12. *RESPON PONDOK PESANTREN SALAF TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL,* JURNAL LENTERA. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono JUNI 2011.
13. *Pondok Pesantren Salaf Transformatif : Pondok Pesantren Salaf Transformatif : Sebuah Analisis Futurologis Kebutuhan Masyarakat Era Globalisasi*, Jurnal *Al-Hikmah* STAI Al-Hikmah Tuban, Volume 1 Nomor 2 (September, 2011).
14. *INTERNALISASI NILAI KEISLAMAN DI PONDOK PESANTREN SALAF,* JURNAL LENTERA. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono JUNI 2012.
15. *Korespondensi Antara Islam dan Local Wisdome di Era Global.* JURNAL **UNIVERSUM**, STAIN KEDIRI. JULI 2013.
16. *Paradigma Gus Dur Dalam Membangun Pilar Kebangsaan (Study Tentang Representasi Gus Dur Sebagai Ketua NU dalm Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal),* JURNAL LENTERA. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono JULI 2013.
17. .*Idealitas Madrasah Unggulan,* JURNAL LENTERA. STAI MIFTAHUL 'ULA Nglawak Kertosono JULI 2014.
18. *Social Behavior di Pesantren Salaf, JURNAL ASKETIK STAIN Kediri, ASKETIK Vol 1 No. 1 Juli 2017.*
19. *Dinamika Islamisasi Makkah dan Madinah , JURNAL ASKETIK STAIN Kediri, Vol 2 No. 1 Juli 2018.*
20. *Interaksi Agama Dan Budaya, EMPIRISMA IAIN Kediri Vol. 27 No. I Januari 2018 .*
21. *Implementasi Dakwah Rasulullah Dalam Era Millenial , JURNAL ASKETIK STAIN Kediri, Vol 4 Nomor. 1 Juli 2020.*
22. CHARACTER EDUCATION INNOVATION INFORMING MILLENNIAL GENERATION PERSONALITY, Didaktika Religia: Journal of Islamic Education Volume 10, Number 1, June 2022 p-ISSN: 2337-7305; e-ISSN: 2549-631X
23. COHERENCE OF MULTICULTURAL LIFE OF THE TANON PEOPLE, PAPAR DISTRICT, KEDIRI REGENCY, EMPIRISMA Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022

- Buku

1. Pesantren Sebagai Pusat Deseminasi Jama'ah Tabligh, Studi Kasus di Pesantren Al Fattah Temboro Magetan Jawa Timur, dalam Irwan Abdullah, et.al (Ed). *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama Pustaka Pelajar. 2008.
2. *TEKNOLOGI PENDIDIKAN*. KEDIRI:STAIN KEDIRI PRESS. 2010
3. *Ilmu Pendidikan Islam*. Kertosono: IReSS Press kerjasama dengan STAIM Press. 2011
4. *Muhammad Abduh* ; Pemikiran dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Islam di Indonesia. KEDIRI : STAIN KEDIRI PRESS. 2011
5. *Easy English Grammmar* Kertosono: IReSS Press kerjasama dengan STAIM Press.*2012*.
6. *Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris* : *Sebuah Aplikasi Efektif*. Kertosono: IReSS Press kerjasama

dengan STAIM Press. 2012.
7. *Pesantren Salaf Basic Pendidikan Karakter Dalam Kajian Historis Dan Prospektif.* KEDIRI:STAIN KEDIRI PRESS. 2012 (HAKI)
8. Terapi Religi:Pengalaman Religius Di Pesantren Al 'Arfiyah Mojoduwur Ngetos Nganjuk, dalam Muhammad Rais&Saidin Ernas (Ed.). Menjaga Tradisi & Menggapai Pahala: Potret Dialog Diskursif Islam Dan Tradisi Lokal. Yogyakarta : TICI Pubications. 2013.
9. *INDIVIDUALISME GLOBAL DI INDONESIA (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia DiEra Global).* KEDIRI:STAIN KEDIRI PRESS. 2015 (HAKI)
10. *PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM.* KEDIRI:STAIN KEDIRI PRESS. 2016 (HAKI)
11. *STUDI ISLAM DALAM DINAMIKA GLOBAL,* KEDIRI:STAIN KEDIRI PRESS. 2017 (HAKI).
12. *URGENSITAS PESANTREN DALAM INOVASI PENDIDIKAN, KEDIRI :IAIN KEDIRI PRESS, 2019.*
13. *GENEARI MILLENIAL DALAM INTERNALISASI KARAKTER NUSANTARA, KEDIRI :IAIN KEDIRI PRESS, 2021*

BIODATA PENULIS

Vika Faiza Rahma, S.Pd., tempat lahir Nganjuk, mengenyam pendidikan dimulai dari sekolah Tingkat kanak-kanak di TK Darma Wanita III Kapas, Sukomoro Nganjuk dan lulus pada tahun 2006. Kemudian sekolah dasar di SDN 1 Kapas lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di MTs Al-Islam Nganjuk sekaligus melanjutkan di jenjang Madrasah Aliyah Al-Islam dan lulus di tahun 2018. Kemudian melanjutkan studi di IAIN Kediri pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan lulus tahun 2022. Untuk saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Psikologi S2.

BIODATA PENULIS

Dr. Lia Istifhama, M.E.I., (lahir 12 Februari 1984), adalah Aktivis sosial yang juga seorang advokat, penulis, akademisi, dan musisi. Ia merupakan anak dari Tokoh Nahdliyyin KH. Masykur Hasyim dengan Hj. Aisyah, Kakak tertua Khofifah Indar Parawansa. Ia aktif sebagai narasumber berbagai forum seminar, baik forum nasional maupun internasional, diantaranya Webinar Internasional 'The Impact of Covid 19 For The Global Education' bersama para akademisi dari Singapura, Afganistan, Pakistan, Malaysia, Mesir, Kuwait, Brunei (STAI Taruna dan STAI Syaichona Cholil, 2020) serta webinar tentang Pendidikan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa, Filipina, dan Republik Rakyat Tiongkok yang diselenggarakan oleh Forsiladi pada tahun 2021.

Ia meraih gelar sarjana strata satu pada tahun 2007 dari tiga tempat, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Fakultas Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Fakultas Dakwah STID Taruna Surabaya. Ia meraih gelar magister Ekonomi Islam pada 2013 dan Doktoral Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 2020.

Pada tanggal 26 Oktober 2019, ia dilantik sebagai Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Pada tanggal 15 Januari 2022 ia merilis buku novel motivasi yang berjudul 'Berkisah Tentang Hati' dan meluncurkan beberapa lagu dengan lirik ciptaannya, yaitu Cinta Tani, Syair Tani, dan Petani Bejo.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Pendidikan Islam

dalam Guncangan *Post Truth*

Pendidikan Islam dalam Guncangan Post-Truth, sebagaimana judul buku ini mengulas bagaimana pendidikan Islam di era sekarang terhadap informasi yang berkembang dalam menghadapi berbagai informasi yang simpang siur di dunia maya, bahkan fakta dan kebenaran informasi mulai dipertanyakan karena cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi telah mengalami perubahan secara drastis. Fenomena ini dikenal juga dengan post-truth yang di mana kondisi saat masyarakat lebih "membenarkan" ajakan, seruan, hasutan, atau propaganda pihak tertentu atas dasar emosi dan kesamaan perasaan. Media sosial dituduh sebagai pihak yang turut mempercepat dan memperluas penyebaran disinformasi (ketidakbenaran informasi), seperti hoaks dan fitnah.

Buku ini hadir untuk menginformasikan para pembacanya baik bagi generasi milenial maupun semua generasi agar memahami seberapa bahayanya disinformasi serta bagaimana latar belakang dan orientasi munculnya post-truth agar ke depannya seluruh masyarakat mampu memfilter informasi-informasi sebelum menyebarkan informasi, dan tahu bagaimana bertindak, menyikapi, dan bagaimana memberikan informasi yang benar bahkan secara tepat di media sosial maupun mulut ke mulut. Buku ini menarik untuk dibaca karena kebutuhan dan penulis sistematik dengan temuan dalam bukunya yang membuat kebijakan pengguna media sosial, generasi milenial, dan mahasiswa untuk lebih memahami post-truth.

IAIN KEDIRI PRESS

ISBN: 978-623-7682-22-6